MENJERAT

GUS DUR

Virdika Rizky Utama

Prolog: Greg Barton | Epilog: Wahyu Muryadi

MENJERAT GUS DUR

MENJERAT GUS DUR

Mengungkap Rencana Penggulingan Gus Dur

Virdika Rizky Utama

JAKARTA
NUMEDIA DIGITAL INDONESIA.

Penyunting
Hendrik Yaputra
Lutfia Harizuandini

Perancang Sampul dan Tata Letak
Eka Arief Setyawan

Cetakan Pertama: Desember 2019
Cetakan Kedua: Januari 2020
Cetakan Ketiga: Januari 2020

Judul Buku: Menjerat Gus Dur
Penulis: Virdika Rizky Utama
Tebal Buku: xxi+376 hlm; 14 x 21 cm
ISBN: 978-602-52420-6-9

Diterbitkan oleh
PT. NUMEDIA Digital Indonesia.
Gedung PBNU, lantai 5
Jalan Kramat Raya No. 164
Jakarta Pusat, 10340
Email: ptnumediadi@gmail.com

DAFTAR ISI

Bab IV

Bab V

Bab VI

PROLOG

20 TAHUN BERLALU: AWAL TRANSISI DEMOKRASI INDONESIA DAN KONTEKS MASA KEPRESIDENAN GUS DUR YANG TRANSFORMATIF

GREG BARTON

Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur hanya menjabat sebagai presiden Indonesia selama 20 bulan. Meski demikian, masa jabatan Gus Dur yang penuh gejolak dan terhenti di tengah jalan tersebut menandai pergeseran penting dalam sejarah Indonesia.

Penulisan buku tentang pelengseran Gus Dur tentu saja bukan tanpa alasan. Para pengkritik dan musuh-musuh Gus Dur mungkin berharap kejadian itu akan dilupakan sejarah dan dianggap sebagai penyimpangan belaka yang tidak memiliki konsekuensi jangka panjang. Ironisnya, begitu pula nasib presiden Megawati Soekarnoputri, perempuan yang harapannya untuk menjadi presiden dipotong dengan kasar oleh Gus Dur, meski ia bisa membalas dengan cara menggantikan Gus Dur saat Gus Dur dilengserkan. Megawati memelihara *status-quo* dan bisa dibilang tidak banyak peduli untuk memajukan reformasi demokratis, sesuatu yang sangat dipedulikan oleh Gus Dur—sehingga Gus Dur terbentur dan terjungkal sebelum melewati dua tahun dari masa masa jabatannya. Namun demikian Gus Dur telah meletakkan dasar bagi berakhirnya peran dwi-fungsi ABRI, pengakuan atas hak-hak Tionghoa Indonesia, warga Papua, Kristen dan minoritas sebagai sesama warga negara

Indonesia, melindungi kebebasan pers, meningkatkan harapan akan demokrasi dan menghancurkan kultus presiden super kuat (*strong-man presidency*).

Dalam buku Menjerat Gus Dur ini, Virdika Rizky Utama telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam bentuk mendokumentasikan secara rinci tidak hanya kekuatan dan keadaan yang membuat presiden pertama Indonesia yang terpilih secara demokratis tersebut jatuh, tetapi juga konteks yang lebih luas dan substansi dari masa kepemimpinananya yang transformasional. Tak banyak yang perlu ditambahkan dalam buku Virdi ini. Maka yang saya tulis dalam kata pengantar ini adalah upaya sederhana untuk menggarisbawahi beberapa poin penting dari buku ini serta memberi konteks yang lebih luas.

Ketika Soeharto secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya pada Mei 1998—setelah lebih dari tiga dekade berkuasa dengan dukungan salah satu kekuatan militer terbesar di dunia, Indonesia diprediksi akan mengalami Balkanisasi dan terpecah dalam kelompok-kelompok etnis dan budaya yang kecil-kecil, atau jatuh dalam cengkeraman kekuasaan militer. Atau negara kepulauan ini akan mengalami derita yang panjang, atau kerapuhan, mengingat rendahnya perkembangan ekonomi di luar Pulau Jawa, ditambah dengan problem multi-etnis, multi-bahasa, dengan populasi mayoritas Muslim di bagian barat kepulauan dan populasi Kristen yang besar di bagian Timur. Dalam ketiadaan pemimpin yang kuat, di tengah banyaknya isu dan persoalan yang belum terselesaikan, berbagai tensi dan ketegangan diprediksi akan dengan cepat menggantikan stabilitas yang telah tegak selama beberapa dekade kekuasaan Soeharto.

Bahkan mereka yang punya pandangan cukup optimis terkait transisi tetap mengidap kekhawatiran mengingat relatif kecilnya kelas menengah Indonesia. Mereka khawatir kecilnya jumlah kelas menengah akan membawa pada lemahnya

masyarakat sipil yang diharapkan jadi penopang perjalanan konsolidasi demokrasi yang penuh rintangan.

Fakta bahwa Wakil Presiden BJ Habibie gagal memahami pengunduran diri Soeharto, di mana ia tidak memandangnya sebagai sinyal bahwa Soeharto pada dasarnya mengharapkan ia mundur bersamanya, terbukti sangat berpengaruh pada kurun waktu berikutnya. Habibie, yang menempuh pendidikan dan menghabiskan sebagian besar kehidupan profesionalnya di Jerman yang demokratis, menafsirkan penunjukan pribadi Soeharto kepadanya sebagai tanda bahwa ia harus mengambil alih jabatan sebagai presiden transisi, meski Soeharto sendiri tidak pernah lagi berbicara dengan Habibie setelah itu.

Habibie memandang Soeharto tak ubahnya sebagai figur ayah, dan menyaksikan kejatuhan Soeharto sangat melukainya. Akan tetapi peristiwa itu juga membebaskannya untuk menjadi seorang pemimpin yang berdiri di atas kakinya sendiri untuk kemudian mengikuti keyakinannya sendiri. Kalau bukan karena keputusannya menggelar referendum Timor Timur, sebuah keputusan yang menunjukkan kesalahannya dalam menilai sentimen di Timor Timur dan kesalahan dalam menilai kepatuhan militer terhadapnya, Habibie mungkin saja terpilih sebagai presiden berikutnya dan menjadi presiden pertama yang dipilih secara demokratis.

Dalam kacamata masa lalu, Indonesia pada dasarnya telah cukup siap dengan transisi demokrasi dibanding apa yang terjadi saat itu. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki *civil society* yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan, sebagaimana terlihat dalam gerakan reformasi 1998. Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, Indonesia adalah sebuah keunikan. Indonesia adalah rumah bagi dua organisasi besar, NU dan Muhammadiyah, yang mewakili puluhan juta orang dan merupakan mayoritas dari muslim taat di Indonesia. Kedua organisasi ini secara konsisten menunjukkan orientasi ke

arah keseimbangan antara konservatisme sosial dan kesediaan untuk terlibat dalam reformasi serta penyesuaian terhadap tuntutan modernitas. Dalam kedua organisasi tersebut juga terdapat elemen kecil yang condong ke puritanisme Salafi Saudi atau ide-ide politik proto-Islamis Ikhwanul Muslimin Mesir, tetapi mayoritas anggota dan pendukung dua organisasi tersebut merasa nyaman hidup dalam demokrasi non-sektarian yang menghormati Islam ketimbang bercita-cita untuk mewujudkan "negara Islam."

Itu semua tak lain adalah hasil proses budaya serta pengajaran serta praktik agama—yang diperkuat oleh prosedur organisasi, agar memilih para pemimpin melalui prosedur demokratis. Bukti lebih lanjut dari dukungan NU-Muhammadiyah terhadap prinsip-prinsip demokrasi sekuler juga ditemukan dalam kontribusi signifikan yang dibuat oleh para pemimpin kedua organisasi tersebut terhadap gerakan nasionalis, baik sebelum maupun sesudah deklarasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Kaum nasionalis terkemuka, termasuk para pemimpin kunci kaum muslim, pada bulan Juni 1945 berkumpul bersama sebagai anggota dari sembilan orang sub-komite yang ditugaskan untuk merancang UUD 1945. Pada 22 Juni mereka menyetujui teks pembukaan konstitusi yang kemudian dikenal sebagai "Piagam Jakarta" yang menetapkan lima prinsip (Pancasila) dari negara baru ini, yang bertuhan, berkemanusiaan, dan non-sekretarian, yang diambil dari pidato inspiratif pemimpin nasionalis yang kelak jadi presiden, yaitu Sukarno. Namun dalam proses berikut, tujuh kata yang memicu pertentangan dimasukkan, yaitu kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya."

Sehari setelah deklarasi kemerdekaan, di tengah pertemuan para pemimpin nasionalis utama, Sukarno dan wakilnya, Mohammad Hatta, mengundang para pemimpin nasionalis Muslim untuk meminta dukungan mereka demi menghapus "tujuh kata" demi persatuan nasional. Hal itu dilakukan bukan

terutama karena tujuh kata itu menimbulkan masalah di kalangan non-Muslim, tetapi karena para pendiri bangsa menyadari hal itu dapat berakibat pada perpecahan di antara sesama Muslim itu sendiri.

Di satu sisi pada prinsipnya sulit bagi muslim untuk menolak Hukum Islam, tetapi di sisi lain tidak ada definisi yang disepakati tentang apa yang dimaksud dengan "menerapkan Syariat" dalam praktik kehidupan sehari-hari dalam konteks sebuah negara bangsa modern.

Meski produk materialnya telah ditulis selama berabad-abad oleh para ulama, sebagian besar urusan syariah berhubungan dengan prinsip-prinsip umum moralitas atau aspek detil praktik ibadah. Berbeda dengan para pengagum tokoh Ikhwanul Muslimin Mesir seperti Hassan al-Banna dan Sayid Qutb atau murid-murid ulama Saudi yang memiliki gambaran tentang adaptasi prinsip syariah ke perangkat hukum modern, mayoritas ulama Indonesia menilai tidak ada kejelasan atau kesepakatan tentang apa artinya "menegakkan Syariat" dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Bagi segelintir orang khususnya di dalam Muhammadiyah dan di dalam Masyumi (terutama setelah NU keluar jelang pemilu 1955), penghapusan tujuh kata Piagam Jakarta dipandang sebagai hilangnya peluang besar umat Islam dan sekaligus pengkhianatan atas tuntutan kaum muslimin. Namun bagi mayoritas, UUD 1945 bersama dengan lima sila dalam Pancasila, yang secara efektif mengakui ketuhanan dan sekaligus menghindari bias sektarian serta menyatukan prinsip-prinsip dan nilai-nilai agama dengan komitmen humanistik universal yang lebih luas terhadap keadilan dan kesetaraan, dipandang mewakili jalan tengah yang sangat cocok untuk sebuah negara baru yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut.

Bak materi gelap tak terlihat yang jumlah massanya memicu perdebatan, puluhan juta pendukung NU dan Muhammadiyah,

yang di dalamnya termasuk sekian organisasi non-pemerintah dan perkumpulan yang bermunculan secara organik dari organisasi sayap pemuda dan perempuan, serta didukung oleh ratusan penulis dan intelektual—yang seperti Gus Dur dididik sebagai ulama, dua organisasi yang mewakili mayoritas santri ini membentuk sumbangsih penting dalam domain masyarakat sipil. Tentu saja tidak mungkin untuk menghitung secara persis kadar sumbangsih yang telah diberikan dua organisasi tersebut dalam proses transisi demokrasi di Indonesia, namun selalu ada alasan kuat dan baik untuk menaruh kepercayaan bahwa kekuatan masyarakat sipil memiliki pengaruh penting.

Hal ini dengan mudah dapat dilihat dari menjamurnya partai politik baru setelah pengunduran diri Soeharto, yang difasilitasi oleh pendekatan liberal BJ Habibie untuk membuka demokrasi, dan juga pembebasan para tahanan politik dan pembukaan kran media serta kebebasan membentuk partai politik baru. Fakta bahwa hanya segelintir partai pendukung platform Islam garis keras yang berhasil mencapai *treshold* dalam pemilihan Juli 1999 dan sebaliknya mayoritas partai politik yang mengambil pendekatan lebih luas untuk mewakili kepentingan Muslim berhasil lolos *treshold*, sebagian condong ke NU dan sebagian lagi Muhammadiyah, dapat diartikan sebagai cerminan dari orientasi demokratis sekuler kalangan Muslim taat di Indonesia. Tentu saja politik Indonesia menghormati agama dan Islam pada khususnya, akan tetapi pemaksaan interpretasi atas syariah yang bersifat *top-down* serta pengaturan moral yang sering mengikutinya ditolak oleh mayoritas muslim. Bisa dibilang kalangan 'muslim kultural' non-santri tidak menyukai jika para politisi memberi tahu mereka soal urusan agama dan cara hidup. Dan ternyata hasil pemilu juga menunjukkan bahwa sebagian besar Muslim santri juga segan mencampuradukkan kekuatan politik dengan otoritas agama.

Menyusul pengunduran diri Soeharto pada Mei 1998,

Indonesia secara efektif dipimpin oleh dua presiden transisi. Gus Dur menggantikan Habibie sebagai presiden yang terpilih secara demokratis, tetapi Gus Dur jelas melihat perannya sebagai presiden transisi yang berusaha mendorong kemajuan reformasi demokrasi sejauh dan selama mungkin. Gus Dur mengakui bahwa modal politiknya sangat terbatas dan pada akhirnya, kecuali dia bersedia berkompromi dengan rezim lama, kekuatan rezim lama akan mendorongnya keluar dari kekuasaan.

Habibie menjaga tahap pembukaan Indonesia setelah jatuhnya rezim Soeharto dan menerapkan mekanisme yang memungkinkan pemilihan umum Juli 1999 menjadi pemilihan pertama yang bebas dan adil di Indonesia dalam 45 tahun. Hal berbeda akan terjadi jika misalnya Habibie melakukan apa yang diharapkan oleh Soeharto, yaitu memahami bahwa pengumuman pengunduran diri Soeharto adalah sebuah instruksi buat Habibie untuk turun dan mendukung Soeharto keluar dari psnggung politik, meski tidak jelas siapa yang bakal menjadi penjabat presiden—tetapi calon yang paling mungkin adalah Pemimpin Angkatan Bersenjata Jenderal Wiranto.

Bisa dibayangkan situasi akan berbeda jika Wiranto menjadi presiden menggantikan Soeharto, meski tentu bukan tidak mungkin Wiranto juga akan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Habibie, yakni membuka jalan bagi demokrasi. Juga bukan tidak mungkin di bawah kepemimpinan transisionalnya, militer akan tetap berada di luar politik praktis sebagaimana yang sudah terjadi, dan bukan tidak mungkin juga Wiranto akan memerintah sebagai pemimpin sementara rakyat sipil. Dan bahkan mungkin, seperti Habibie, Wiranto akan menyingkir pada akhir tahun 1999 dan mengizinkan Golkar, partai lama Soeharto, mencalonkan kandidat lain untuk menjadi presiden. Kita tidak akan pernah tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hipotetis tersebut, tetapi berdasarkan

keseimbangan probabilitas, tampaknya tidak mungkin Indonesia akan menempuh jalan yang sama di bawah Wiranto—seperti yang sudah ditempuh oleh Habibie. Sangat mungkin Wiranto akan menduduki kekuasaan bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, dengan dukungan militer. Jika hal ini yang terjadi, transisi demokrasi Indonesia boleh dibilang akan mati sebelum dilahirkan.

Pada saat ditetapkan sebagai pengganti Soeharto, Habibie tampak seperti kandidat yang tidak mungkin membuka jalan bagi transisi demokrasi. Sepanjang karirnya Habibie dikaitkan erat dengan Soeharto. Perannya sebagai wakil presiden adalah murni simbolis dan dipandang sebagai dukungan lebih lanjut dari statusnya sebagai favorit presiden yang terpikat pada keinginan paternalistik dari patronnya. Meskipun ia seorang insinyur yang brilian, karakter pribadinya eksentrik dan canggung dianggap tidak menghasilkan rasa hormat dari jajaran militer atau elit sipil yang mapan. Posisinya dianggap tidak dapat dipertahankan dan tidak berkelanjutan, dan jika ada orang yang tidak memercayai itu tak lain adalah Habibie sendiri. Dengan membebaskan tahanan politik, membuka kran kebebasan pers serta membuka ruang bagi pembentukan partai politik baru sebelum pemilihan yang bebas dan adil dilangsungkan, Habibie telah mencapai lebih dari yang diharapkan mampu dilakukan sosok seperti dirinya. Dengan semua itu dia menunjukkan keberanian moral yang lebih, visi politik demokratis jelas, dan integritas melebihi yang diharapkan banyak orang. Dan untuk alasan-alasan yang sebagian terkait dengan karakternya dan sebagian lagi ditentukan keadaan, Habibie mampu berperan sebagai presiden transisi dan demokratis.

Kalau bukan karena salah perhitungan atas referendum Timor Timur, Habibie mungkin akan menjadi kandidat Golkar untuk presiden. Prestasi mengejutkan dari masa transisinya akan menempatkannya pada posisi yang kuat agar didukung oleh

Golkar dan dipilih oleh parlemen. namun ketika kemungkinan ini tidak bisa diwujudkan setelah kekerasan pasca-referendum oleh militer Indonesia di Timor Timur, harapan jatuh pada Megawati Soekarnoputri, yang partainya, PDIP, dalam pemilu 1999 mendapatkan 153 dari 462 kursi parlemen (dibandingkan dengan 120 kursi Golkar dan 51 kursi partai Gus Dur, PKB). Dengan perolehan partainya, Megawati memiliki kunci untuk mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Akan tetapi koalisi tak terduga dari Islamis radikal, Muslim konservatif serta kaum Muslim Demokrat melahirkan koalisi 'Poros Tengah', yang mana koalisi yang sebenarnya tidak cukup solid ini memilih untuk mendukung Gus Dur ketimbang Megawati Soekarnoputri. Pilihan itu lahir bukan karena mereka sepakat atas kemampuan Gus Dur untuk memimpin, tetapi justru sebaliknya.

Dalam masa keemasannya, Gus Dur adalah sosok yang eksentrik dan berpendirian teguh, alim, brilian, intelektual modern dan punya karakter pemimpin, tetapi tidak pernah benar-benar cocok untuk menjadi presiden. Seperti Habibie, Gus Dur tidak hanya dilihat sebagai seorang *maverick*, tetapi ia juga dilihat sebagai seseorang yang, pada dasarnya, bukan politikus. Dalam kepemimpinannya di NU sebagai Ketua Tanfidziyah selama hampir 15 tahun, ia memang telah memperlihatkan ketajaman dan keterampilan dalam bernegosiasi dan bermanuver. Selain itu, Gus Dur adalah sosok yang sungguh karismatik, seorang orator yang cakap yang dikaruniai ingatan yang hampir fotografis, termasuk ingatan tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits berikut tafsirnya serta teks-teks Islam, yang fasih berbahasa Arab, serta mampu dengan sangat baik menumbuhkan rasa hormat dan perhatian dari Muslim tradisionalis berbasis perkampungan yang berafiliasi dengan NU. Dan meski kakek dan ayahnya telah memainkan peran penting dalam gerakan nasionalis pra-

kemerdekaan serta ayahnya pernah menjadi menteri, Gus Dur sendiri bukan bagian elite politik pada umumnya. Baik oleh para pendukung maupun pengkritiknya ia sering dipandang terlalu nekad, dianggap terlalu idealis untuk berkompromi demi karir politik jangka panjang. Dan itu memang terbukti. Seandainya saat menjadi presiden Gus Dur lebih berkompromi dengan elit politik dan militer, mungkin Gus Dur menemukan jalan untuk tetap berkuasa. Namun pendekatan kepemimpinan Gus Dur yang bertujuan membawa reformasi dan demokrasi sejauh mungkin memiliki konsekuensi yang besar, di mana dia kehabisan jalan politik dan dipaksa keluar dari kekuasaan. Banyak kolega dekatnya menyesalkan sikap Gus Dur yang tidak mau berkompromi, karena mereka menganggap kompromi bisa membuat kekuasaan Gus Dur bertahan lebih lama dan dengan demikian dapat menjalankan proses reformasi yang lebih luas. Pada akhirnya, ketika Gus Dur dijatuhkan oleh parlemen dan dipaksa keluar dari istana negara tak sampai dua tahun masa jabatan, Gus Dur terkejut tetapi tidak benar-benar merasa kaget.

Sebagaimana bisa disaksikan, saat itu terjadi, pada saat Habibie tersingkir dari pencalonan Golkar dan Amien Rais melihat peluang untuk menutup langkah Megawati dalam pemilihan presiden dengan mempromosikannya, Gus Dur tidak lagi berada di puncak kondisinya. Serangkaian serangan stroke pada awal 1998 telah merampas sebagian besar sisa penglihatannya yang sebelumnya sudah sangat berkurang, dan membuat Gus Dur terbaring di tempat tidur selama hari-hari penting bulan Mei, bulan krusial yang berujung pada pengunduran diri Soeharto. Meskipun kesehatannya agak pulih hingga pada saat pemilihannya sebagai presiden pada Oktober 1999, Gus Dur tampak sangat lemah dan tidak stabil — seorang kiai eksentrik tuna netra yang atas segala kecemerlangannya tampaknya tidak mungkin dipilih jadi presiden.

Namun seperti Habibie, Gus Dur mampu mencapai sesuatu

yang jauh dari yang diperkirakan oleh banyak pendukung terdekatnya. Apakah pendekatannya tabrak kanan-kiri untuk mendorong reformasi politik dan sosial merupakan pendekatan yang tepat dan bijaksana mengingat modal politiknya yang terbatas tetap menjadi bahan perdebatan yang tak kelar-kelar. Namun dalam waktu kurang dari dua tahun sebagai presiden, Gus Dur telah meletakkan dasar reformasi struktural dan meningkatkan harapan sosial tentang demokrasi, yang telah dinikmati bangsa Indonesia selama 20 tahun terakhir ini. Gus Dur meningkatkan standar bagi para presiden setelahnya dan menanamkan di kepala publik tentang pentingnya harapan akan demokrasi dan bagaimana seharusnya demokrasi berjalan.

Greg Barton
Melbourne, 29 Agustus 2019

PENDAHULUAN

Kendati Indonesia memberlakukan sistem pemerintahan yang demokratis, hingga awal abad ke-21 justru tak pernah ada peralihan kekuasaan yang demokratis. Peralihan kekuasaan terjadi karena pemerintahan yang sedang berkuasa mengalami dekadensi legitimasi. Setidaknya ada tiga bidang yang membuat sebuah pemerintahan mengalami dekadensi legitimasi, yaitu politik, ekonomi, dan moral.

Legitimasi merupakan faktor penting bagi suatu rezim. Setidaknya, menurut Przeworski, ada dua alasan tentang pentingnya legitimasi. Pertama, setiap rezim membutuhkan legitimasi, dukungan, atau paling tidak "persetujuan tanpa protes" dari rakyat agar dapat bertahan; kedua, bila rezim kehilangan legitimasi, ia harus memproduksinya atau ia akan jatuh.[1] Sedangkan, moral menjadi sebuah nilai kepatutan yang mesti dimiliki oleh pemimpin untuk diterima atau dipercaya oleh rakyatnya.

Pemerintahan Soekarno, yang sejatinya baru memegang penuh kendali kekuasaan setelah Dekrit 5 Juli 1959, dijungkirbalikan oleh angkatan bersenjata yang berkolaborasi dengan Amerika Serikat melalui *Central Intelligence Agency* (CIA). Menjelang akhir kekuasaannya, Soekarno tak bisa

1 Syamsuddin Haris, *Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 2007), hlm. 26.

mengatasi dekadensi tiga bidang tadi.

Pertama, di bidang politik, Indonesia pada kepemimpinan Soekarno menjadikan politik sebagai panglima. Permasalahan politik menjadi agenda utama dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan politik Soekarno yang keras menentang kolonialisme dan imperialisme—yang diidentifikasinya dipelopori oleh negara-negara Blok Barat dalam Perang Dingin—menjadikan dirinya musuh Blok Barat.

Selain itu, di dalam negeri, Soekarno juga dianggap diktator karena membubarkan partai-partai politik yang tidak sejalan dengan semangat revolusionernya yang menentang kolonialisme dan imperialisme. Ia menyebut yang tak sejalan dengan idenya sebagai kelompok kontra revolusioner (kontrev). Tak hanya itu, ia juga memenjarakan beberapa tokoh, seperti Sutan Syahrir dan Muchtar Lubis, yang semakin membuatnya dicap sebagai diktator.

Dalam konstelasi politik Indonesia, Soekarno menjadikan dirinya sendiri sebagai patron bagi kelompok mana pun yang ingin terus menjaga eksistensinya. Pada saat itu ada dua kekuatan besar, yakni Partai Komunis Indonesia (PKI) yang diketuai Dipa Nusantara Aidit dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)—terutama matra Angkatan Darat (AD)—yang dipimpin oleh A.H. Nasution. Soekarno cenderung dekat dengan PKI, karena ia membutuhkan massa yang besar dan itu hanya dapat dipenuhi oleh PKI.

Kedua, di bidang ekonomi, akibat menjadikan politik sebagai panglima, Soekarno tak benar-benar menaruh perhatian khusus pada ekonomi. Bahkan, memasuki September 1965, inflasi besar menerpa Indonesia. Saat itu, tingkat inflasi mencapai 650% sehingga membuat rakyat sulit mendapatkan kebutuhan pangannya. Selain itu, kebijakan ekonomi Soekarno yang anti-Barat tidak disukai oleh Amerika Serikat, selaku

pemimpin Blok Barat dalam konteks Perang Dingin.

Greg Poulgrain menyatakan, Soekarno mengetahui maksud Amerika Serikat memberi bantuan ke Indonesia hanya sebagai dalih untuk dapat melakukan investasi dan eksplorasi emas di Papua.[2]

Ketiga, dalam hal moral, kehidupan pribadi Soekarno yang "gemar menikah" menjadi sorotan penting para demonstran yang diinisiasi oleh mahasiswa. Bahkan, rumah istri keempat Soekarno, Hartini, menjadi sasaran vandalisme demonstran dengan menuliskan kalimat "Hartini, lonte agung!".[3] Selain itu, terdapat pandangan bersama di antara para demonstran bahwa kehidupan Soekarno dan menteri-menterinya gemar bermewah-mewahan, serta banyak melakukan korupsi.

Singkatnya, akibat tak dapat mengendalikan tiga poin tersebut, Soekarno gagal mempertahankan kekuasaannya. Pemimpin Besar Revolusi ini harus meletakkan jabatannya sesaat setelah pidato pertanggungjawabannya, yang berjudul *Nawaksara* pada 1966, ditolak oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawarata Rakyat (MPR) saat itu. Jatuhnya Soekarno juga diiringi dengan ratusan ribu hingga jutaan orang mati dibunuh karena dianggap simpatisan PKI oleh tentara dan organisasi masyarakat yang dikerahkan oleh tentara. Sesaat setelahnya, MPR mengangkat Soeharto sebagai pejabat kepresidenan. Lambat tapi pasti, Soeharto resmi menjadi presiden pada 1968 dan menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) pertamanya pada 1971.

***

Belajar dari kegagalan mengelola politik, ekonomi, dan moral, Soeharto dengan sangat cepat mengubah orientasi ketiganya. Di bidang politik, terjadi perubahan besar. Jika Soekarno lebih dekat dengan Blok Timur dan menjadikan Blok

2 Greg Poulgrain, *Bayang-Bayang Intervensi* (Yogyakarta: Galang Press, 2018).

3 Soe Hok Gie, *Catatan Seorang Demonstran* (Jakarta: LP3ES, 1983).

Barat sebagai musuh, Soeharto justru bertindak sebaliknya.

Ia mengubah haluan selama kurang dari setahun ia menjabat di kepresidenan. Di dalam negeri, ia memenuhi tuntutan mahasiswa yang ingin membubarkan PKI. Dengan dikeluarkannya Ketetapan (Tap) MPRS No. XXV/1966, negara tak hanya membubarkan dan melarang PKI, tetapi juga mengharamkan berkembangnya ajaran Marxisme dan Lenninisme.

Demi melanggengkan kekuasannya, Soeharto juga membatasi masyarakat dari aktivitas politik. Ia menerapkan sebuah sistem massa mengambang. Maksudnya, persentuhan antara partai politik dan rakyat dibatasi hanya sampai tingkat walikota. Pemerintahan Soeharto tak lagi menjadikan politik sebagai panglima, tetapi menjadikan ekonomi sebagai panglima.

Di ranah ekonomi, konsekuensi logis menjadikannya sebagai panglima, Soeharto berupaya sekuat-kuatnya untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Salah satu caranya, Soeharto sangat terbuka terhadap investasi asing. Padahal pada masa kepemimpinan Soekarno, Indonesia tertutup dari investasi asing. Sebagai bentuk dukungannya terhadap investasi asing, ia bersama DPR menerbitkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) No. 1/1968. Dalam perjalanannya, ia mengonsepkan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Tujuannya agar pembangunan Indonesia tersusun dan terukur dengan rapi.

Di bidang moral atau sosial kemasyarakatan, Soeharto ingin mewujudkan pemerintahan yang kondusif. Ia ingin masyarakat mengikuti semua kehendak pemerintah. Salah satunya dengan tak membolehkan adanya tafsir lain terhadap Pancasila. Penafsiran Pancasila bersifat tunggal dan otoritatif. Masyarakat dipaksa untuk taat. Sama seperti Soekarno, Soeharto menjadikan dirinya *role model* sosok manusia Pancasila sesungguhnya.

Seiring berjalannya waktu, pemerintahan Soeharto justru tak begitu berbeda jauh—jika tak ingin dikatakan lebih buruk—dari pemerintahan Soekarno. Soeharto mempertahankan kekuasannya dengan cara-cara tak demokratis dan represif.

Di bidang politik, ia meredam semua kekuatan yang menyainginya. Hal itu dimulai sejak pemilu pertama di masa kekuasaannya pada 1971. Soeharto dibantu oleh asisten pribadinya Ali Murtopo dan Yoga Sugama untuk mengerahkan tiga kekuatan besar demi menopang kekuasannya. Ketiga kekuatan itu adalah ABRI, Birokrasi, dan Golongan Karya (Golkar)—atau biasa dikenal dengan aliansi ABG. Dalam konteks pemilu dari 1971 hingga 1997, ABRI dan Birokrasi wajib memilih Golkar. Sebab, Golkar sudah pasti akan mencalonkan Soeharto sebagai presiden. Soeharto menjadi faktor determinan, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Akibat tak adanya pembagian kekuasaan yang demokratis, kekuasaan hanya dibagikan ke segelintir orang melalui sistem kedekatan dan kekerabatan. Tentu tak banyak orang yang bisa memiliki akses tersebut. Sistem ini menjadikan negara dijalankan oleh hanya sekelompok orang. Dengan kata lain, pemerintahan Soeharto lebih tepat jika disebut sebagai oligarki daripada demokrasi.

Para oligarki—beberapa elite ABG—ini yang mengatur jalannya pemerintahan, baik di bidang politik maupun ekonomi. Mereka tentu diuntungkan dengan adanya sistem ini. Di bidang politik, hampir pasti tak ada yang menggantikan mereka di parlemen atau di institusi pemerintahan, kecuali pensiun dan/atau meninggal.

Di bidang ekonomi, Richard Robison menggambarkan bagaimana tentara menjadi kawan setia para investor yang ingin melakukan investasi, eksplorasi, atau bahkan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) atau keperluan bisnis lainnya.[4]

---

4 Richard Robison, *Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia* (Depok: Komunitas Bambu, 2012).

Tentara bertugas mengamankan modal dan juga sebagai alat untuk menghadapi kekuatan pengusik, seperti rakyat yang melakukan demonstrasi penolakan atau kegiatan aktivisme yang diinisiasi oleh mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Para oligarki ini juga harus berbagi jatah dengan anak-anak Soeharto menjelang 1990. Hampir seluruh kegiatan bisnis dan politik harus mendapat restu atau izin, baik dari anak-anak Soeharto maupun Soeharto. Praktik kerja kelompok oligarki ini lazim disebut dengan istilah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Isu KKN ini menjadi salah satu pokok utama perjuangan perlawanan aktivis pada pemerintahan Soeharto—terutama periode 1990-an. Hal tersebut layaknya mengulang apa yang terjadi pada pemerintahan Soekarno pada 1965. Tiga puluh tiga tahun setelah demonstrasi besar terhadap Soekarno, Soeharto mengalami hal demikian pula.

Pada 1998, arus gelombang perlawanan terhadap Soeharto mencapai titik kulminasi. Dimotori oleh demonstrasi yang digalang oleh mahasiswa, beberapa kelompok intelektual, seniman, dan rakyat mendesak Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden.

Sama seperti pendahulunya, Soeharto tak bisa mengatasi permasalahan politik, ekonomi, dan moral. Di bidang politik, demokrasi tak terjadi di masa kepemimpinan Soeharto. Sebagai contoh, kapan pun pemilu digelar, pemenangnya adalah Soeharto. Fungsi DPR yang semestinya mengawasi eksekutif malah hanya menjadi kepanjangan tangan eksekutif.

Di bidang ekonomi, pembangunan tak pernah dirasakan langsung oleh rakyat. Konglomerasi yang diharapkan meneteskan kesejahteraannya ke rakyat justru tak pernah terjadi. Belum lagi pada 1998, terjadi krisis ekonomi yang melanda negara-negara asia. Mata uang rupiah terdepresiasi

dari Rp2.000,-/USD menjadi Rp16.000,-/USD. Harga-harga sandang dan pangan melambung tinggi, dan sembako mengalami kelangkaan.

Di ranah moral, KKN yang dilakukan oleh keluarga dan kroni-kroni Soeharto tak bisa dikendalikan. Selain itu, aparatus negara semakin represif terhadap rakyat dan juga pada aktivis. Hal-hal tersebut juga mendorong protes yang mengakibatkan Soeharto memutuskan mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Reformasi pun dimulai.

***

Soeharto kemudian digantikan oleh wakilnya, Bacharuddin Jusuf (B.J.) Habibie. Saat itu, kelompok aktivis mahasiswa, intelektual, dan kekuatan masyarakat lainnya memiliki dua pilihan, yakni reformasi atau revolusi. Reformasi ingin melakukan perubahan secara bertahap atau revolusi yang ingin melakukan perubahan secara cepat dan mendasar.

Kekuatan lama, seperti Golkar, ingin terjadinya peralihan kekuasaan secara bertahap, yakni reformasi. Tujuannya agar Golkar sebagai representasi dari rezim sebelumnya tidak disapu bersih oleh kekuataan baru dan bisa berkonsolidasi untuk ikut melakukan kontestasi atau pemilu. Singkatnya, yang terjadi pada 1998 adalah reformasi. Dengan demikian, kelompok rezim lama ini masih bisa berpartisipasi. Artinya, proses demokratisasi masih belum terjadi meski Soeharto sudah tumbang. Akan tetapi, beberapa kelompok, seperti Forum Kota (Forkot), menyatakan bahwa reformasi harus dijalankan dengan beberapa catatan. Salah satunya yakni bagian dari rezim lama tak boleh berpartisipasi dalam proses demokrasi, seperti pemilu satu hingga dua pemilu berikutnya.

Oleh sebab itu, Golkar menjadi sasaran amuk massa di beberapa tempat selama proses pemilu 1999 berlangsung. Tak hanya itu, kelompok ini juga menuntut pembubaran Golkar

hingga akhir masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 2001. Celakanya bagi mereka, kekuataan rezim lama masih begitu besar. Golkar bahkan menempati peringkat kedua setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di pemilu 1999.

Begitu masih dominannya Golkar di bidang politik, ia juga menjadi salah satu faktor penentu terpilihnya Gus Dur menjadi presiden di pemilu 1999. Pada saat-saat akhir menjelang pemilihan presiden, Golkar enggan mencalonkan diri sendiri sebagai presiden. Golkar memilih merapat ke koalisi Poros Tengah yang mencalonkan Gus Dur, ketimbang mendukung Megawati.

Setelah Gus Dur terpilih menjadi presiden, ia menghadapi tugas untuk menjalankan tuntutan reformasi dan pembangunan demokratisasi. Tugas ini tentu mengharuskan Gus Dur berhadapan dengan anasir-anasir ABG yang masih kuat sepeninggal Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Salah satu tugas Gus Dur adalah membersihkan KKN.

Saat Gus Dur memecat Jusuf Kalla dari jabatannya sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) dari Golkar dan Laksamana Sukardi dari PDIP, hal itu mengakibatkan perlawanan dari kedua partai tersebut. Golkar dan PDIP yang secara historis selalu "berhadapan", kini mencapai titik temu. PDIP, partai yang memenangkan pemilu, masih sakit hati karena Megawati tak menjadi presiden. Sementara itu, Golkar yang sedang memperbaiki citra bersih dari KKN terusik dengan tuduhan Gus Dur.

Mereka berkolaborasi dan berelaborasi di parlemen sebagai dua partai pemenang untuk melakukan perlawanan terhadap Gus Dur. Mulai dari menginisiasi hak angket, interpelasi, hingga membentuk panitia khusus (pansus) *Buloggate* dan *Bruneigate* yang menganggap Gus Dur terlibat dalam penyalahgunaan dana

Bulog dan bantuan dari Sultan Brunei. Meski sampai saat ini tak pernah ada bukti bahwa Gus Dur terlibat dua kasus tersebut, nyatanya dua kasus tersebut cukup ampuh untuk "mengadili" Gus Dur. Bahkan hingga mampu menyeretnya ke tahap memorandum satu, memorandum dua, hingga *impeachment*.

Tak hanya menghadapi politisi sipil, Gus Dur juga mesti berhadapan dengan militer yang merupakan salah satu kekuatan terbesar pada masa pemerintahan Soeharto. Ia berulang kali dianggap melakukan intervensi dengan merotasi jabatan beberapa petinggi militer dan juga memecat Wiranto atas dasar pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Timor Timur. Tak hanya Tentara Nasional Indonesia (TNI), Gus Dur juga mendapat perlawanan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Bimantoro yang tak terima dipecat dan digantikan oleh Chaeruddin Ismail.

Di kalangan massa jalanan, Gus Dur juga menghadapi kelompok Islam konservatif dan mahasiswa yang dimotori oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Mereka menganggap pemerintahan Gus Dur tak berpihak kepada umat Islam dan juga Gus Dur dianggap sering membuat kegaduhan karena ucapannya yang kontroversial.

Melalui moral, dengan adanya kasus *Buloggate* dan *Bruneigate*, ada upaya agar Gus Dur dijatuhkan dari jabatan. Gus Dur dituduh melakukan aksi korupsi oleh DPR. KKN merupakan isu yang sangat seksi setelah reformasi. Di kala ingin melakukan pembersihan aksi KKN yang akut sejak rezim Soeharto, isu yang dibangun di publik adalah: *bagaimana bisa seorang presiden ingin membersihkan KKN, namun terindikasi atau terlibat dugaan korupsi*.

Sementara itu, kelompok pendukung Gus Dur hanya kelompok-kelompok prodemokrasi. Misalnya, Forum Demokrasi (Fordem)—yakni merupakan sebuah kelompok

intelektual yang dipimpinnya pada 1991—1998 untuk melawan Soeharto—dan beberapa organisasi aktivis mahasiswa, seperti Forkot serta LSM. Meski Gus Dur memiliki massa Nahdlatul Ulama (NU) oleh karena ia mantan Ketua Umum Pengurus Besar NU (PBNU), Gus Dur enggan menggunakan NU hanya untuk mengamankan jabatannya.

Periode pemerintahan Gus Dur ini sangat krusial. Bukan hanya Gus Dur sebagai presiden pertama yang terpilih setelah reformasi, melainkan juga cita-citanya yang ingin mewujudkan demokrasi di Indonesia masih mendapat perlawanan dari anasir-anasir kekuatan oligarki Soeharto. Hasilnya, kita masih bisa saksikan hingga saat ini. Pemilu hanya sekadar praktik bagi-bagi kekuasaan, baik sipil maupun militer, yang pernah menjadi bagian (atau paling tidak) diuntungkan dari rezim Soeharto.

BAB 1

AWAL ORDE BARU

Awal kehidupan Orde Baru mengubah paradigma "politik sebagai panglima" menjadi "ekonomi sebagai panglima". Oleh sebab itu, perhatian utama terhadap bidang ekonomi dengan cara-cara ekstrem merupakan pilihan yang heroik. Kemudian dimunculkan jargon "pertumbuhan akan menetes ke bawah" dan "tidak ada pemerataan tanpa pertumbuhan, karena yang dibagi cuma kemiskinan". Pertumbuhan memang tercapai, namun pemerataan tak tercapai.[5]

Orde Baru menyerahkan sistem perekonomian pada mekanisme pasar. Akan tetapi, mekanisme pasar yang terjadi selama Orde Baru banyak mengandung favoritisme, blokade pasar dengan kekuasaan, perburuan renten, *captive market*, serta faktor-faktor yang mengganggu lainnya. Selain itu, mekanisme pasar yang berlangsung sangat distorsif dan sengaja dipakai oleh pengusaha besar bersama-sama penguasa untuk memetik keuntungan abnormal yang sebesar-besarnya. Bahkan, yang sering terjadi justru etatisme, peranan negara sangat dominan sehingga mengganggu mekanisme pasar yang sehat.[6]

Hasilnya, negara banyak mengganggu terciptanya mekanisme pasar yang sehat, di mana pelaku-pelaku ekonomi tertentu mendapat akses yang berlebihan terhadap sumber-sumber ekonomi yang tersedia. Dengan demikian, konglomerasi seperti yang terjadi saat ini merupakan sebuah konsekuensi logis dari pola ekonomi-politik dan kebijakan publik yang diterapkan Orde Baru.

5 Didik J. Rachbini, *Ekonomi di Era Transisi Demokrasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 21.
6 *Ibid.*, hlm. 13.

Selain itu, keberhasilan rezim Orde Baru mempertahankan kekuasaan ditopang oleh struktur politik—yang mempunyai banyak persamaan dengan strukur politik di negara-negara kapitalis *peripheral* di Asia dan Amerika Latin—yang mengikuti model otoriter birokratik. Ciri umumnya terletak pada hubungan antara negara dan masyarakat. Rezim ini akan memberikan prioritas kepada pembentukan negara kuat dalam struktur politik mereka dan berusaha keras untuk melemahkan sektor-sektor popular di masyarakat.[7]

Struktur tersebut sukses dalam menopang bekerjanya sebuah format politik yang dibuat untuk menjaga stabilitas dan keamanan. Namun, di lain pihak juga mengakibatkan terjadinya proses-proses dislokasi, marginalisasi, dan alienasi politik yang semakin meluas di dalam masyarakat, khususnya di lapisan bawah.[8]

Tak hanya itu, pembentukan situasi politik Orde Baru terhadap masyarakat sangat ditopang oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Selama Orde Baru, peran utama Angkatan Darat biasanya disebut dwifungsi, yang menunjukkan peran sosial-politik di samping peran pertahanan dan keamanan. Bagi pengamat dan politik sipil, dwifungsi ini muncul dari situasi yang tidak biasa, sementara dan dapat dinegosiasikan, serta bukan final sehingga bisa dievaluasi—mengenai konsep demokrasi di mata internasional. Bagi Angkatan Darat, dwifungsi bukan kecelakaan sejarah, melainkan kebutuhan sejarah.

Apabila sipil cenderung mengabaikan poin ini, Angkatan Darat menyadari bahwa validitas konstitusional legal final dwifungsi adalah status ABRI sebagai golongan karya, yang memungkinkan partisipasi dalam semua lembaga dan kegiatan negara. Setiap perwira ABRI yang menduduki jabatan sipil mengetahui bahwa dia telah "dikaryakan"—diberi posisi

7 Muhammad A.S. Hikam, *Politik Kewarganegaraan* (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 58.
8 *Ibid.*, hlm. 57.

golongan karya.[9]

Pertama, dengan melakukan depolitisasi massa secara sistematis. Depolitisasi dilakukan melalui sejumlah langkah kebijaksanaan. Misalnya, prinsip monoloyalitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai perusahaan negara. Dengan demikian, pegawai pemerintah tidak terkotak-kotak ke dalam aliran ideologi partai politik saat itu.

Monoloyalitas hadir karena desakan Amir Machmud pada 1970. Tujuannya agar seluruh pegawai Departemen Dalam Negeri (Mendagri) mengalihkan loyalitas dari partai kepada Korps Karyawan Departemen Dalam Negeri (Kokarmendagri). Hal ini didukung oleh ancaman pembubaran. Korps Karyawan (Kokar) ini, seperti buatan Angkatan Darat, dibentuk pada 1966 dan pada 1969 menjadi anggota Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Dalam satu langkah, hal ini memberikan tulang punggung organisasi yang sangat luas bagi Sekber Golkar sambil menghancurkan tulang punggung Partai Nasional Indonesia (PNI), di mana cukup banyak anggota dewan pimpinan cabangnya merupakan PNS. Langkah ini dibarengi kritik Angkatan Darat terhadap dampak perusakan akibat persaingan partai dan klaim bahwa Golkar-lah yang membela kepentingan PNS sejak 1958.

Sejarah langkah ini memang berasal dari 1958, yaitu tindakan Nasution terhadap politisasi birokrasi dan usulan Angkatan Darat kepada Dewan Nasional pada Agustus 1958, yang termasuk usulan untuk menjamin kedisiplinan pegawai negeri melalui pelarangan keikutsertaan mereka dalam aktivitas-aktivitas politik dan keanggotaan partai.[10]

Pada saat yang hampir bersamaan, setelah Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959, militer berusaha menjadi penyeimbang kekuatan politik.

---

9 David Reeve, *Golkar Sejarah yang Hilang Arah Pemikiran dan Dinamika* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013), hlm. 285—286.
10 *Ibid.*, hlm. 305.

Ide militer terlibat dalam kehidupan politik Indonesia digagas oleh Mayor Jenderal A. H. Nasution, selaku Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Ia memfokuskan tindakannya untuk mengurangi dan untuk menghilangkan kerapuhan politis yang merupakan kelemahan paling fundamental yang ada pada Tentara Nasional Indonesia (TNI). Nasution memperjuangkan usahanya agar militer memperoleh legitimasi untuk melakukan peranan-peranan nonmiliter, terutama di bidang politik.

Saat Soekarno mengumumkan Kabinet Kerja pada 10 Juli 1959, sepertiga menteri berasal dari militer. Keterlibatan militer beserta wakil-wakilnya dalam politik dan lembaga politik meluas dengan cepat. Hal ini disebabkan sejak Juli 1958 militer diakui sebagai kekuatan politik golongan fungsional. Selain itu, wakil-wakil militer juga berhasil didudukkan dalam lembaga negara Dewan Nasional, yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan berlakunya maklumat keadaan darurat bahaya perang.

Soekarno membentuk Dewan Nasional pada 6 Mei 1957 berdasarkan Undang- Undang Darurat No. 7/1957 setelah peranan partai-partai politik dilumpuhkan (dengan pengecualian Partai Komunis Indonesia (PKI)) dan Undang-Undang Darurat diberlakukan (*Staat Van Oorlog en Beleg: SOB*)—yaitu peraturan negara dalam keadaan darurat perang. Tujuan dibentuknya Dewan Nasional ialah sebagai upaya Angkatan Darat untuk mengambil alih dan mengembangkan ide perwakilan fungsional, serta menganjurkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 diberlakukan kembali. Hal ini mendorong pemberlakuan dwifungsi ABRI.

Untuk memperjelas kedudukannya dalam Dewan Nasional, Nasution melakukan pidato dengan membawa konsep *The Army's Middle Way* pada Hari Ulang Tahun (HUT) Akademi Militer Nasional di Magelang pada 12 November 1958. Tujuan Nasution melakukan pidato tersebut agar kedudukan tentara

yang berstatus sebagai golongan fungsional dibolehkan ikut serta dalam pemerintahan dengan atau tanpa Undang-Undang Darurat Bahaya Perang.[11] Karena militer masuk dalam kategori golongan fungsional, maka militer juga terlibat dalam Sekber Golkar.

Dekrit 5 Juli 1959 tak hanya membubarkan parlemen dan memberikan ABRI peran dalam politik, tetapi juga mengubah sistem pemerintahan dari parlementer menjadi presidensial. Sebelum dekrit, sistem pemerintahan Indonesia merupakan penggabungan elemen-elemen sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Dalam sistem tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memegang otoritas tertinggi. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih dan bertanggung jawab kepada MPR.

Kedua, dengan menerapkan *floating mass* atau massa mengambang. Individu-individu tidak memiliki ikatan tertentu dengan partai politik, kecuali pada saat pemihan umum (pemilu). Hal itu dilakukan dengan mengizinkan partai politik hadir hanya pada tingkat kabupaten. Alasannya, jangan sampai masyarakat—termasuk masyarakat pedesaan—terkotak-kotak dalam ideologi dan terombang-ambing oleh permainan partai politik yang ada.[12]

Padahal fungsi birokrasi pada hakikatnya adalah sebagai agen implementasi dari kebijakan publik dengan memberi pelayanan. Namun, di Indonesia, sejak Orde Baru, tidak jarang kebijaksanaan tersebut berasal dan mencerminkan kepentingan dari birokrasi itu sendiri. Sehingga, dengan kebijaksanaan publik itu, birokrasi akan memperkuat posisi politiknya sendiri.

Tingkat kehadiran birokrasi di Indonesia sangat tinggi. Mulai dari Jakarta sampai ke daerah-daerah yang terpencil. Bahkan, semakin jauh dari Jakarta, maka semakin tinggi pula kehadiran birokrasi. Hal ini yang membuat strategis politik dari

---

11 Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1982), hlm. 110.

12 Affan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 131—132.

birokrasi sebagai alat kekuasaan yang ikut membentuk sistem kekuasaan yang ada.

Bukti konkretnya saat penyelenggaraan pemilu. Mulai dari lembaga pemilu dan panitia pemilu adalah birokrasi. Keduanya dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri yang juga menjadi Ketua Jalur Birokrasi di dalam Golkar.[13] Affan Gaffar mencatat, karakteristik utama dari pemerintah Indonesia Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto adalah:

1. Lembaga Kepresidenan yang terlampau dominan.
2. Rendahnya kesetaraan di antara Lembaga Tinggi Negara.
3. Rekruitmen politik yang tertutup.
4. Birokrasi sebagai instrumen kekuasaan.
5. Kebijaksanaan publik yang tidak transparan.
6. Sentralisasi.
7. Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih rendah.
8. Sistem peradilan yang tidak independen.[14]

Kekuatan lain Orde Baru di bidang politik adalah Golkar. Golkar dibentuk pada masa Demokrasi Terpimpin. Saat itu, Sekber Golkar masih berupa federasi longgar dari beragam organisasi kemasyarakatan—profesi yang berhaluan antikomunis. Soekarno ingin membangun golongan fungsional pada 1957 untuk mengimbangi kecenderungan partai politik yang dianggap tidak sejiwa dengan nilai Indonesia.

Namun, oleh karena Front Nasional yang merupakan wadah fungsional juga dipengaruhi oleh PKI, maka militer kemudian mensponsori suatu wadah baru bagi golongan fungsional anti-PKI. Lahir Meidian Sekber Golkar sebagai federasi longgar sekitar 129 organisasi pada 20 Oktober 1964. Lahirnya kelompok ini menambah kekuatan anti-PKI yang

13 *Ibid.*, hlm. 157.
14 *Ibid.*, hlm. 149.

dimotori oleh Angkatan Darat, dalam percaturan politik masa demokrasi terpimpin.[15]

Pada Oktober 1969, Presiden Soeharto menyatakan bahwa pemilu harus menuju penyederhanaan struktur politik. Dengan disahkannya Undang-Undang Pemilu, Soeharto menghidupkan kembali usulan pengelompokan. Pada Februari 1970, dia menyarankan penyederhanaan pemilu.

Partai-partai akan dikelompokkan menjadi pembangunan material (nasionalis) dan pembangunan spiritual (agama). Secara umum, pembagian partai ini sama seperti rancangan undang-undang 1966—dengan Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) sekarang berada dalam pembangunan material, namun terdapat perbedaan. Perbedaannya adalah rasionalisasi pengelompokan semacam itu bukanlah kesamaan ideologi, melainkan asumsi kesamaan perspektif mereka terhadap pembangunan. Ini adalah bagian serangan pemerintah terhadap merusaknya ideologi.[16]

Undang-Undang Pemilu 1966 dirancang agar dapat menyediakan sarana untuk menyerang partai-partai dan memungkinkan munculnya kekuatan-kekuatan politik Orde Baru. Oleh karena itu, ketika Undang-Undang Pemilu disahkan pada akhir 1969, ada pendapat umum bahwa pemilu tidak akan mengubah tatanan politik yang sudah ada. Pemilu akan mempertahankan *status quo* parlemen di mana mayoritas kursi di duduki oleh partai-partai, yang tanpa ada satu partai pun yang bisa mendominasi.

Bahkan, selama 1970, ketika pemerintah menunjukan tanda bahwa mereka ingin menggunakan Sekber Golkar sebagai kendaraan pemilu untuk mendapatkan penegasan legitimasi dan program-program pembangunannya, masih ada kepercayaan luas dalam lingkaran sipil Jakarta bahwa Sekber Golkar merencanakan aliansi pemilu dengan PNI atau

15 Kholid Novianto, M Afan Alfian, dan Riyono Asnan, *Akbar Tandjung dan Partai Golkar Era Reformasi* (Bekasi: Sejati Press, 2004), hlm. 19.

16 David Reeve, *Op.cit.*, hlm. 307.

mungkin Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Sekber Golkar sendiri merendah dengan klaim target maksimal mereka hanya 30—35% suara.

Ada pula kepercayaan umum bahwa pemerintah tidak memiliki niat dan kemampuan berjalan sendiri bersama Sekber Golkar. Terlebih lagi dengan adanya pelecehan umum terhadap kemampuan organisasional para pemimpin Sekber Golkar. Jadi, sebagian besar pendapat partai-partai di 1971 sangat terkejut ketika tanda-tanda dukungan pemerintah terhadap Sekber Golkar pada 1970 diubah menjadi kampanye buldoser besar-besaran untuk deparpolisasi dan golkarisasi.[17]

Periode 1964—1965 merupakan tahun-tahun nasakomisasi dan degolkarisasi. Sedangkan, 1970—1971 giliran menjadi tahun-tahun deparpolisasi dan golkarisasi. Upaya tersebut sangat tidak terlihat, meskipun kampanye sudah berjalan cukup jauh. Soeharto, sebagai pimpinan Orde Baru, dan para penasehat dekatnya tidak secara langsung dikaitkan dengan perkembangan peran politik Angkatan Darat, pengajuan Badan Kerja Sama (BKS), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia (SOKSI), serta Sekber Golkar—sejak 1957 hingga 1965.

Mereka terbiasa dengan antipartai dan doktrin pro-golongan karya yang berkembang pada periode ini. Kendati begitu, mereka juga tertarik pada berbagai skema alternatif yang diusulkan para intelektual sipil dan orang-orang radikal Orde Baru. Akhirnya, mereka mengikuti opsi yang telah lama dikembangkan Angkatan Darat. Ketika Undang-Undang Pemilu disahkan pada 1969, sedikit sekali komentar yang tanggap. Ketua I Nahdlatul Ulama (NU) Subchan telah mengingatkan bahwa Golkar akan menjadi alat politik ABRI. Nasution melihat undang-undang tersebut mempertahankan *status quo*, kecuali jika ada perkembangan istimewa di bidang kekaryaan.[18]

17 *Ibid.*, hlm. 280.
18 *Ibid.*, hlm. 281.

Pada pemilu 3 Juli 1971, Sekber Golkar memperoleh 62,8% suara sehingga mendapatkan 236 dari 360 kursi anggota dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jumlah kursi ini masih ditambah dengan 100 kursi yang akan diisi anggota yang diangkat pemerintah. Jumlah suara terbesar partai yakni 18,7% diperoleh NU, sedangkan PNI hanya mendapatkan 6,9% dan Parmusi, penerus Masyumi hanya 5,45%. Hampir 15 tahun setelah pidato mengubur partai-partai Soekarno pada 1956, rezim Orde Baru yang didominasi Angkatan Darat hampir berhasil mencapai apa yang didukung Soekarno.

Cara pemerintah Orde Baru melakukan kampanye pemilu adalah ciri khas sebuah rezim baru: penggunaan sumber daya Mendagri serta Departemen Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) untuk memastikan penegasan bagi pemerintah, serangan terhadap dampak-dampak yang diklaim merusak persaingan ideologi partai; melemahkan perlawanan sipil terorganisasi; memasukan semua PNS, termasuk pegawai perusahaan-perusahaan negara, ke dalam Korps Karyawan yang sangat besar; dan pembentukan pemerintah hierarkis, berjenjang dan terpusat.[19]

Kemenangan Sekber Golkar pada pemilu Juli 1971 lebih merupakan hasil penggunaan sumber daya Menhankam, Mendagri, dan Operasi Khusus (Opsus) Ali Murtopo yang dikombinasikan dengan tindakan-tindakan pemerintah yang telah disebutkan di atas daripada memanfaatkan kemampuan dan sumber daya Sekber Golkar sendiri. Para cendekiawan telah menjelaskan ordebaruisasi sejumlah partai, di mana intervensi pemerintah menghasilkan para pemimpin partai yang diterima oleh pemerintah Soeharto.

Sekber Golkar sendiri mengalami tiga intervensi semacam itu, yaitu pada 1966 untuk menyelesaikan perpecahan antara para Soekarnois dan orang-orang yang berkomitmen terhadap

19 *Ibid.*, hlm. 279.

pemimpin Angkatan Darat. Lalu, pada 1970 ketika tim intelektual sipil Ali Murtopo dimasukkan dalam Sekber Golkar. Kemudian pada 1971, setelah kemenangan pemilu ketika Sekber Golkar, sekali lagi, direstrukturisasi sesuai gambaran pemimpin Orde Baru.[20]

Setelah kemenangan besar Sekber Golkar, usulan ini kembali dibangkitkan dan kali ini berhasil. Pada paruh kedua 1971, pemerintah menyatakan bahwa DPR memiliki empat fraksi, yaitu: ABRI, Golkar, Demokrasi Pembangunan, dan Persatuan Pembangunan. Pada praktiknya, kedua fraksi yang pertama terdiri dari kelompok golongan karya, sedangkan fraksi lain adalah partai-partai yang dikelompokkan menurut skema 1970.

Presiden Soeharto dan Ali Murtopo menyatakan dengan jelas bahwa ini menjadi dasar penyederhanaan di luar DPR. Selanjutnya, pada Januari 1973 kedua pengelompokan partai ini disatukan menjadi dua partai formal, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Seperti yang diusulkan oleh Angkatan Bersenjata pada 1967, hanya tiga kelompok yang tetap ada untuk bersaing dalam pemilu 1977, kedua partai ini dan Golkar.[21]

Islam Politik di Awal Orde Baru

Kehidupan Islam politik di era Orde Baru mengalami pasang surut. Setelah kekuatan Islam politik berhasil membantu tentara menumpas anggota dan simpatisan PKI pada 1966, kekuatan Islam politik kembali diperhitungkan. Setidaknya, sampai pemilu pertama Orde Baru pada 1971, pemerintah masih memberikan tempat untuk politik aliran yang terepresentasi dalam partai peserta pemilu untuk mengikuti kontestasi.

Namun, setelah pemilu 1971, pemerintah Soeharto mulai membatasi politik aliran dengan menyederhanakan partai-

20 *Ibid.*, hlm. 309.
21 *Ibid.*, hlm. 308.

partai atau fusi. Partai-partai nasionalis disatukan menjadi PDI dan partai-partai Islam difusikan menjadi PPP.[22]

Selain untuk mengukur kekuatan lawan-lawan politik pemerintah, fusi ini juga bertujuan untuk menciptakan konflik di masing-masing partai sehingga mereka tak dapat mengonsolidasikan kekuatan untuk menandingi Golkar.

Karena dianggap bukan bagian dari pemerintah, kehidupan Islam politik pun acap kali mendapat tekanan dari pemerintah. Bahkan, dalam proyek pembangunan Indonesia, kelompok Islam politik dapat dikatakan tak mendapat tempat. Mereka yang tak setuju dengan rencana pemerintah atau melakukan protes akan mendapatkan label ekstrimis kanan—bagian dari Darul Islam (DI)/ Tentara Islam Indonesia (TII).

Perlakuan yang dianggap tak adil ini menimbulkan konflik antara kelompok Islam politik dan pemerintah. Misalnya, konflik Tanjung Priok yang melibatkan umat Islam dengan tentara pada September 1984. Kerusuhan ini bermula dari sebuah insiden kecil di Musholla As-Sa'adah, Koja Selatan. Kejadian tersebut berlanjut dengan adanya bentrokan kecil antara warga dan petugas keamanan, sampai terjadinya pembakaran motor dinas petugas keamanan. Akibat kejadian itu, empat warga Koja ditangkap.

Selanjutnya, pada 12 September 1984, sejumlah besar umat Islam melakukan demonstrasi menuntut pembebasan warga yang ditahan. Demonstrasi direspon oleh aparat keamanan dengan kekerasan persenjataan dan mengakibatkan bentrokan berdarah antara umat Islam Tanjung Priok dan aparat militer.[23]

Dengan dalih untuk menjaga stabilitas dan mengikis ideologi ekstrem, baik kanan maupun kiri, pemerintah menerapkan asas tunggal Pancasila pada 1985 bagi seluruh organisasi kemasyarakatan dan partai politik. Tujuan utama asas tunggal ini adalah untuk mengooptasi atau penguasaan

22 F. S. Swantoro dan Jusuf Suroso, *PDI dalam Pusaran Politik Orde Baru* (Jakarta: PARA Syndicate, 2019), hlm. 17—18.
23 Eep Saefulloh Fatah, *Konflik, Manipulasi, dan Kebangkrutan Orde Baru* (Jakarta: Burung Merak Press, 2010), hlm. 241.

kendali Islam politik.

Saat itu, hanya NU melalui Abdurrahman Wahid—atau Gus Dur—yang menerima gagasan pemerintah tersebut. Gus Dur berpendapat bahwa Islam tak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bukan tanpa sebab Gus Dur menerima. Setahun sebelumnya, pada 1984, Gus Dur yang terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar NU (PBNU) mengembalikan NU kepada khittah 1926 menjadi organisasi kemasyarakatan yang aktif untuk memberdayakan masyarakat. Sebab, sebelumnya NU pun terlibat aktif dalam politik praktis melalui PPP.

Bisnis Soeharto dan Keluarga

Soeharto membuat fondasi untuk kekayaan keluarganya dengan menciptakan sistem patron yang berskala nasional yang mempertahankannya dalam kekuasaan selama 32 tahun. Pada masa awal kekuasaannya, Soeharto membentuk sebuah sistem patron-klien dengan pengusaha melalui militer dan/atau teman-teman terdekatnya.

Hal tersebut diungkapkan secara menyeluruh oleh Richard Robison dalam bukunya *Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme*. Setiap pengusaha yang ingin melakukan investasi atau meminta izin bisnis di Indonesia, mesti mendapatkan izin dari militer dan Soeharto. Militer dibutuhkan untuk mengamankan modal yang masuk dan juga untuk melakukan represi kepada masyarakat yang menolak daerah tempat tinggalnya dialihfungsikan menjadi tempat bisnis baru.

Izin terhadap Soeharto juga diperlukan untuk menjamin kelangsungan bisnis seorang pengusaha. Soeharto memang tak terlibat langsung pemberian izin. Biasanya orang terdekatnya yang akan menghubungkan dengan Soeharto. Lantas, lazimnya, Soeharto tak hanya meminta *fee*, tetapi juga akan meminta saham kepada perusahaan yang akan diberikan izinnya. Kejadian ini terus berlangsung hingga awal 1980-an.

Memasuki dekade 1980, Soeharto mulai menyerahkan bisnisnya kepada anak-anaknya. Mereka memanfaatkan kedekatan dengan presiden ke dalam peranan calo (perantara) untuk pembelian dan penjualan dari produk-produk minyak, plastik, senjata, bagian-bagian pesawat terbang, dan petrokimia yang dimiliki pemerintah. Mereka memegang monopoli pada distribusi dan import komoditi-komoditi utama.[24]

Sebagai contoh, pada 1981, anak pertama Soeharto Siti Hardijanti Indra Rukmana—yang dipanggil Tutut—memiliki perusahaan karet dan kertas di Sulawesi senilai 1,2 milyar USD dan perusahaan petrokimia senilai 1,6 milyar USD. Bambang Trihatmodjo, anak ketiga Soeharto bersama kakaknya, Sigit Haryoyudanto, memiliki perusahaan Bimantara yang bergerak di bidang telekomunikasi dan properti pada 1993 dengan aset 1,4 milyar USD. Sedangkan anak bungsu Soeharto, Tommy Soeharto, memiliki Humpuss Grup, perusahaan yang bergerak di ranah transportasi memiliki aset sebesar 500 juta USD pada 1992.[25]

Hanya Benny Moerdani, Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) yang berani menyampaikan keluhan kepada Soeharto terkait bisnis anak-anaknya. Sebab, anak pertamanya, Tutut, mempunyai bisnis persenjataan dan meminta *fee* cukup besar.[26] Keluhan Benny Moerdani berbuah kemarahan Soeharto. Ia dipecat oleh Soeharto dan perannya dilemahkan. Benny tak lagi memiliki pasukan, ia ditempatkan menjadi Menteri Pertahanan.

Pada 1999, Majalah *Time* menelusuri harta kekayaan Soeharto. Hasilnya, penyelidikan yang dilakukan selama empat bulan yang mencakup 11 negara, Time telah mengetahui bahwa sebanyak 9 miliar USD uang Soeharto dipindahkan dari Swiss ke rekening bank yang ditunjuk di Austria. Angka tersebut tidak buruk untuk seorang pria yang gaji jabatan presidennya 1.764 USD dalam sebulan ketika dia meninggalkan kursi RI 1.

---

24 Adam Schwarz, *A Nation in Awaiting* (Australia: Allen & Unwin Pty Ltd, 1994), hlm. 141.
25 *Ibid.*, hlm. 140—143.
26 Virdika Rizky Utama, *Demokrasi dan Toleransi dalam Represi Orde Baru* (Yogyakarta: Kanisius, 2018), hlm. 21.

(Soeharto kemudian menyangkal bahwa ia memiliki deposito bank di luar negeri. Ia bersikeras bahwa kekayaannya berjumlah hanya 19 hektar lahan di Indonesia, ditambah 2,4 juta USD dalam tabungan.).

Menurut data dari Badan Pertanahan Nasional dan Majalah Properti Indonesia, keluarga Soeharto sendiri, atau melalui entitas perusahaan, mengontrol sekitar 3,6 juta hektar *real estate* di Indonesia—sebuah area yang lebih besar dari total wilayah Belgia. Luas area itu termasuk 100 ribu meter persegi ruang kantor utama di Jakarta dan hampir 40% dari seluruh provinsi di Timor Leste.

Di Indonesia, enam keturunan Soeharto memiliki persentase saham yang signifikan di setidaknya 564 perusahaan. Lalu, kepentingan luar negeri mereka, termasuk ratusan perusahaan lain, tersebar dari Amerika Serikat hingga Uzbekistan, Belanda, Nigeria, dan Vanuatu. Anak-anak Soeharto juga memiliki banyak sumber kekayaan.

Selain peternakan senilai 4 juta USD di Selandia Baru dan setengah jumlahnya dalam yacht senilai 4 juta USD yang ditambatkan di luar Darwin, Australia, putra bungsu Suharto Hutomo Mandala Putra (dijuluki Tommy) memiliki 75% saham di lapangan golf 18 lubang dengan 22 apartemen mewah di Ascot, Inggris.

Bambang Trihatmodjo, putra kedua Soeharto, memiliki sebuah *penthouse* senilai 8 juta USD di Singapura dan sebuah rumah besar seharga 12 juta USD di lingkungan eksklusif Los Angeles—yang hanya berjarak dua rumah dari hunian bintang *rock* Rod Stewart dan tak jauh dari rumah saudaranya, Sigit Harjoyudanto, yang seharga 9 juta USD.[27]

27 "*Soeharto Inc*", Time, 24 Mei 1999.

Soeharto Menggaet Islam Politik

Menjelang 1990, saat Soeharto mulai menganggap ABRI tak lagi solid mendukungnya,—karena Benny Moerdani diisukan akan melakukan kudeta—ia membutuhkan kekuatan baru untuk mendukung kekuasannya. Pilihan tersebut jatuh kepada Islam politik.

Wadah untuk menyatukan kekuatan Islam politik tersebut terjewantahkan dengan didirikannya Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada Desember 1990, di Malang.[28] Bukti konkret Soeharto mengooptasi Islam politik ini dengan menempatkan Habibie sebagai Presidium ICMI. Sebab, Habibie merupakan orang kepercayaan Soeharto yang menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Aktivis ICMI pun berkompromi dengan menerima Habibie sebagai ketuanya, kendati banyak yang meragukan keislaman Habibie.[29]

Di saat mayoritas umat Islam melakukan euforia karena berhasil mendapatkan dukungan dari pemerintah, Gus Dur justru menganggap sebaliknya. Ia menganggap Soeharto sedang bermain api dengan kelompok Islam radikal yang sangat sektarian dan mengancam persatuan Indonesia.[30] Dalam wawancara bersama Adam Schwarz, Gus Dur ditanyakan kenapa Soeharto tak menggubris sarannya. Gus Dur menjawab, "Ada dua alasan. Kebodohan dan Soeharto tak ingin melihat siapapun yang tidak ia kontrol mejadi tumbuh besar dan kuat.[31]

Gus Dur kemudian bersama 40 intelektual lintas agama dan latar belakang mendirikan Forum Demokrasi (Fordem) untuk melakukan perlawanan gagasan kepada Soeharto. Pada awalnya, Fordem mengkritik keras ICMI karena sektarian. Di sisi lain, Fordem pun menganggap ICMI atau sektarianisme hanya sebagai alat untuk mengkritisi hal yang paling besar, yakni Soeharto.[32]

---

28 Robert W. Hefner, *Civil Islam* (Jakarta: Institus Studi Arus Informasi, 2001), hlm. 227.
29 *Ibid.*, hlm. 230—232.
30 Adam Schwarz, *Op.cit.*, hlm. 187.
31 *Ibid.*, hlm. 188.
32 Virdika Rizky Utama, *Op.cit.*, hlm. 109.

ICMI yang melakukan penetrasi ke dalam pemerintahan berhasil mendapatkan infrastuktur yang dimiliki pemerintah. Jumlah anggota pun pesat bahkan anggota ICMI bukan hanya intelektual Islam dan aktivis, melainkan juga birokrasi. Dawam Rahardjo dan Amien Rais merupakan tokoh ICMI yang cukup vokal.

Besarnya pengaruh ICMI dalam pemerintahan terbukti dengan banyaknya anggota ICMI yang menjadi menteri dalam Kabinet Pembangunan VI pada 1992. Publik dan pengamat politik bahkan menjuluki kabinet tersebut sebagai Kabinet Ijo Royo-Royo—hijau dianggap sebagai simbol warna yang merepresentasikan umat Islam. Tak hanya itu, persentase jumlah anggota ICMI di MPR lebih besar dibandingkan jumlah ICMI di kabinet. Sekitar 300 orang MPR dari 1000 orang adalah anggota ICMI.[33]

Pada Agustus 1992, ICMI terdata memiliki 11.000 anggota dan bertambah menjadi 40.000 dalam tujuh bulan ke depan. ICMI juga mulai menerbitkan korannya sendiri, yakni Republika. Tak hanya itu, ICMI juga mendirikan organisasi *think tank* bernama *Centre for Information and Development Studies* (CIDES).[34]

Melihat potensi ICMI yang cukup besar, beberapa petinggi militer pun terlibat dalam ICMI. Prabowo Subianto, Feisal Tandjung, Hartono, dan Syarwan Hamid merupakan contoh dari petinggi militer yang terlibat dalam ICMI dan melakukan jejaring dengan kelompok Islam politik.[35] Bahkan, pada periode tersebut terdapat dua kubu dalam militer, yakni ABRI Merah-Putih dan ABRI Hijau. ABRI Merah-Putih menganggap dirinya sebagai tentara profesional yang setia pada negara dan presiden. Sedangkan, ABRI Hijau dianggap ABRI yang terlibat politik praktis baik secara langsung maupun tidak langsung melalui jejaring ICMI.

33 Robert W. Hefner, *Op.cit.*, hlm. 244.
34 M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: Serambi, 2007), hlm. 633.
35 Robert W. Hefner, *Op.cit.*, hlm. 258.

Dipilihnya Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto dapat dianggap sebagai kemenangan representasi Islam politik. Bahkan, ICMI sudah menyiapkan dan berharap Habibie akan memimpin proses demokratisasi dan reformasi. Selain berhasil di ranah eksekutif, jumlah anggota ICMI yang menjadi anggota parlemen pun terus bertambah sejak 1992 meskipun penambahan tersebut tak signifikan.

Golkar juga mendapat efek dari berdirinya ICMI. Anggota ICMI yang diisi oleh banyak birokrat dan aktivis Islam ini, kemudian juga masuk menjadi anggota Golkar. Golkar sebagai institusi kemudian dikenal memiliki tiga jalur. Pertama, jalur ABRI yang dipimpin oleh Pangab. Kedua, jalur Birokrat dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri. Ketiga, jalur Golkar dipimpin oleh Ketua Umum Golkar—ketiga jalur ini disebut ABG (ABRI-Birokrasi-Golkar). Setelah berdirinya ICMI, dinamika di Golkar melalui tiga peran dari tiga jalur tadi, memang kemudian efektif. Bahkan, Golkar pada pemilu 1997 mendapat 84.187.907 suara atau 325 kursi. Sedangkan, pada pemilu 1992 hanya mendapat 66.599.331 suara atau 282 kursi.

Intervensi Soeharto di Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Pada periode 1990-an, bermunculan gerakan perlawanan yang masif terhadap Soeharto—dari kalangan mahasiswa dan intelektual. Hal ini tak dibarengi dengan radikalisasi dalam ranah partai politik. PDI, sebagai partai yang sering ditekan oleh rezim, bahkan mengalami konflik internal pada 1996. Persoalan itu rupanya melibatkan Soeharto dengan tujuan untuk melakukan intervensi. Hal itu justru semakin melemahkan posisi PDI.

Seperti yang dijelaskan dalam buku sejarah *PDI dalam Pusaran Politik Orde Baru*, terdapat dualisme dalam tubuh PDI: antara Megawati dan Soerjadi. Megawati merupakan

Ketua Umum PDI berdasarkan hasil Kongres Surabaya pada 1993 untuk kepengurusan 1993—1998. Sedangkan Soerjadi terpilih berdasarkan hasil Kongres Medan pada 22 Juni 1996 untuk periode 1996—1998, sebulan sebelum Peristiwa 27 Juli terjadi. Dualisme itu bermula ketika 16 fungsionaris DPP PDI menyatakan akan melaksanakan kongres PDI dengan tujuan memisahkan diri dari kepengurusan pimpinan Megawati. Mereka kemudian menyatakan akan melaksanakan kongres di Medan, yang rencana pelaksanaannya dipimpin Fatimah Achmad. Pada 19 Juni 1996, DPP PDI pun "membebastugaskan" atau memecat 16 fungsionaris yang dinilai secara sepihak mengadakan kongres yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI.[36]

Pemecatan dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua Umum DPP PDI bernomor 01-KU/KPTS/VI/1996 yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri. "Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh fungsionaris DPP PDI tersebut, pada kenyataannya telah menimbulkan intrik, pengadudombaan dan fitnah, serta manipulasi dan penyalahgunaan wewenang yang bisa membahayakan partai," demikian pernyataan Megawati, dikutip dari Harian Kompas terbitan 20 Juni 1996. Namun, kongres di Medan itu tetap berjalan. Indikasi mengenai "restu" Presiden Soeharto terhadap pelaksanaan kongres ini juga terlihat. Sebab, kongres yang berlangsung pada 20 Juni—22 Juni 1996 itu dibuka dan ditutup oleh Menteri Dalam Negeri Yogie S. Memed.

Saat itu, kongres terasa sepi dan terlihat tidak dinamis. Meski begitu, kongres itu menghasilkan keputusan yang menunjuk Wakil Ketua MPR/DPR Soerjadi sebagai ketua umum dan Buttu Reinhart Hutapea sebagai sekretaris jenderal (sekjen). Rebutan kantor DPP dukungan pemerintahan Soeharto terhadap Soerjadi semakin terlihat dengan pengakuan

36 F. S. Swantoro dan Jusuf Suroso, *Op.cit.*, hlm. 268.

dan legalitas terhadap kepengurusan Soerjadi.

Dukungan bahkan disampaikan oleh Kepala Staf Sosial Politik ABRI saat itu, Letnan Jenderal (Letjen) Syarwan Hamid. Menurut Syarwan, pemerintah mengakui DPP PDI hasil Kongres Medan.[37]

Berdasarkan asas legalitas, pemerintah juga tidak akan mengakui adanya tandingan atau DPP PDI pimpinan Megawati. Meski begitu, Syarwan menyatakan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur terhadap penyelesaian masalah internal partai.[38] Namun, dukungan terhadap Megawati tetap mengalir. Tidak hanya dari kader PDI, dukungan juga diberikan oleh mahasiswa dan aktivis demokrasi yang menentang rezim Soeharto.

Berbagai bentuk dukungan diperlihatkan, dari pernyataan sikap hingga menggelar mimbar bebas. Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro menjadi salah satu lokasi utama dalam pemberian dukungan perlawanan kubu Megawati terhadap intervensi rezim Orde Baru.[39] Berbagai mimbar bebas dan aksi demonstrasi pun digelar di kantor DPP PDI. Hal ini tentu janggal terjadi di rezim Orde Baru yang memberlakukan hukuman subversif secara ketat. Meski begitu, Pangab Jenderal Feisal Tanjung menegaskan bahwa ABRI tidak akan ikut campur untuk menduduki kantor DPP PDI. "Biar mereka (Soerjadi dan kawan-kawan) yang mengusahakannya sendiri. Itu masalah mereka *kok*," kata Feisal.[40]

Meski kubu Megawati menyatakan tidak akan membantu kubu Soerjadi untuk menguasai kantor DPP PDI, aparat keamanan menilai aksi mimbar bebas di DPP PDI mengganggu ketertiban umum. Hingga kemudian Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya Mayjen (Pol) Hamami Nata menginstruksikan agar kegiatan mimbar bebas dihentikan.

---

37 *Ibid.*, hlm. 270.
38 *Ibid.*, hlm. 271.
39 *Ibid.*, hlm. 273.
40 *Ibid.*, hlm. 275.

Kepolisian Sektor (Polsek) Menteng pun mengirim surat bernomor B/434/VII/1996/SektorMt pada 23 Juli 1996, yang meminta mimbar bebas dihentikan. Surat ditujukan kepada Megawati sebagai penanggung jawab kegiatan di Kantor DPP PDI.

DPP PDI pimpinan Megawati kemudian memberikan surat jawaban kepada Kapolsek Menteng yang isinya menganggap tidak ada alasan yang kuat dan mendasar untuk menghentikan kegiatan mimbar bebas itu. Surat tanggapan itu dibuat 24 Juli dan ditandatangani oleh Ketua DPP PDI Suparlan S.H. dan Sekjen Alex Litaay. Selain mimbar bebas, perlawanan juga dilakukan dengan menempuh jalur hukum. Tim Pembela Demokrasi Indonesia, yang mewakili PDI kubu Megawati, kemudian mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan Kongres Medan. Gugatan disampaikan kepada Fatimah Achmad dan kelompok 16 fungsionaris, juga untuk Menteri Dalam Negeri, Pangab, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Gugatan kepada Menteri Dalam Negeri dan Pangab didasarkan atas keterlibatannya secara langsung atau tidak langsung dalam mempersiapkan, merekayasa, serta membiayai kongres. Sedangkan terhadap Kapolri didasarkan putusan Kapolri yang dinilai telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku mengenai aturan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Bermacam upaya penyelesaian sengketa dualisme itu tidak menemui hasil. Hingga kemudian, terjadilah peristiwa Sabtu pagi pada 27 Juli 1996 tersebut. Massa yang mengaku pendukung Soerjadi menyerang dan berusaha menguasai kantor DPP PDI. Kerusuhan yang berujung timbulnya korban jiwa dan pembakaran sejumlah bangunan.

Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan hasil investigasi yang dipimpin oleh Munawir Sadzali dan Baharuddin Lopa, pascakerusuhan 27 Juli

mengakibatkan lima orang tewas, 149 orang luka, dan 23 orang hilang. Adapun kerugian materiil diperkirakan mencapai 100 miliar rupiah. Komnas HAM juga menilai terjadi enam wujud pelanggaran HAM oleh berbagai pihak. Pertama, pelanggaran asas kebebasan berkumpul dan berserikat, pelanggaran asas kebebasan dari rasa takut, pelanggaran asas kebebasan dari perlakuan keji dan tidak manusiawi, dan pelanggaran perlindungan terhadap jiwa manusia, juga pelanggaran asas perlindungan atas harta benda.[41]

Pada 8 hingga 10 Oktober 1998, PDI Megawati menyelenggarakan Kongres V PDI di Denpasar, Bali. Dalam kongres ini, Megawati terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP PDI periode 1998—2003 secara aklamasi. Meskipun pemerintahan sudah berganti, yang diakui pemerintah masih tetap PDI di bawah kepemimpinan Soerjadi dan Buttu Hutapea.

Agar dapat mengikuti pemilu 1999, Megawati kemudian mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan (PDIP) pada tanggal 1 Februari 1999, yang kemudian disahkan oleh Notaris Rakhmat Syamsul Rizal. Nama ini kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta.[42]

Berikut ini kronologi konflik internal PDI pada 1996.

Kronologi Konflik Internal PDI 1996

- *Akhir Mei 1996*

Belum ada tanda-tanda DPP PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri akan terpecah, walaupun Ketua DPP Fatimah Achmad didesas-desuskan akan *mbalelo* bersama sejumlah fungsionaris DPP lainnya.

41 *Ibid.*, hlm. 284.
42 *Ibid.*, hlm. 343.

- ***Senin, 2 Juni 1996***

Dalam rapat pleno DPP di Jalan Diponegoro, Jakarta, Fatimah Achmad menuntut supaya Megawati segera mengadakan kongres.

Sebagian besar fungsionaris (16 dari 27 pengurus DPP) mendukung gagasan itu. Megawati menolak. Massa pendukung Megawati marah. Mereka memukul Yahya Theo, Ketua DPP yang berdiri di kubu Fatimah.

Sejak itu, Kelompok 16—fungsionaris pendukung ide penyelenggaraan kongres—meninggalkan Megawati dan tak pernah lagi menginjakkan kaki ke Jalan Diponegoro. Hari itu juga, 50 utusan dari 21 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI menemui Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri (Dirjen Sospol Mendagri). Mereka menyerahkan pernyataan 215 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI yang mendukung kongres.

- ***Senin sore, 2 Juni 1996***

Fatimah dan kawan-kawan mengadakan rapat di Hotel Wisata, Jakarta, untuk membentuk panitia kongres.

- ***Selasa, 4 Juni 1996***

Panitia kongres diumumkan. Fatimah menjadi Ketua Panitia Penyelenggara Kongres PDI. Nama Soerjadi sudah tercium ikut merekayasa kongres.

- ***Rabu, 5 Juni 1996***

Panitia kongres diterima Dirjen Sospol Mendagri, Soetoyo N.K. Juga oleh Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) ABRI, Letjen Syarwan Hamid. Kubu Megawati tetap menolak kongres.

- ***Kamis, 13 Juni 1996***

Tempat penyelenggaraan kongres ditentukan di Medan, Sumatera Utara. Massa PDI pendukung Megawati mulai bergerak di mana-mana. Mereka menolak kongres. Sementara itu, nama Soerjadi muncul sebagai calon kuat Ketua Umum PDI.

- ***Kamis, 20 Juni 1996***

Kongres berlangsung, dibuka Menteri Dalam Negeri Yogie S. Memet dan dihadiri Pangab Jenderal Feisal Tanjung. Di Jakarta, massa PDI unjuk rasa di sekitar Gambir dan bentrok dengan petugas keamanan. Sebanyak 86 demonstran terluka, 50 lainnya menginap semalam di Polda Metro Jaya, dan 55 anggota ABRI terluka.

- ***Sabtu, 22 Juni 1996***

Kongres ditutup. Soerjadi terpilih sebagai Ketua Umum PDI. Hari-hari selanjutnya, kubu Megawati melancarkan aksi mimbar bebas dan unjuk rasa. Mereka tetap menguasai kantor DPP. Aksi mereka sempat menyinggung PPP, yang dalam sebuah mimbar bebas disebut "partai perempuan".

- ***Minggu, 21 Juli 1996***

Megawati bertemu dengan Jesse Jackson, aktivis HAM dari Amerika Serikat. Dalam pertemuan di Hotel Hilton, Jakarta, Megawati menjelaskan berbagai hal mengenai keadaan Indonesia saat ini.

- ***Senin, 22 Juli 1996***

Pangab Jenderal Feisal Tanjung melarang aksi-mimbar bebas yang dilakukan pendukung Megawati, karena dinilai mengganggu ketertiban, dan mengarah pada makar untuk menggulingkan pemerintah. Pendukung Megawati terus melakukan aksi.

- ***Kamis, 25 Juli 1996***

DPP hasil kongres pimpinan Soerjadi diterima Presiden Soeharto di Bina Graha. Peristiwa ini mematahkan spekulasi bahwa Presiden Soeharto tak akan menerima Soerjadi sebelum menyelesaikan konsolidasi partai. Megawati memerintahkan agar mimbar bebas dihentikan. Tetapi, satu jam kemudian dilanjutkan.

- ***Sabtu pagi, 27 Juli 1996***

Massa PDI pendukung Soerjadi menyerbu dan merebut kantor PDI di Jalan Diponegoro. Bentrok antarmassa PDI tak bisa dihindarkan. Belakangan ribuan massa bergabung—tak jelas apakah mereka warga PDI atau bukan. Kerusuhan pecah hingga malam hari. Puluhan orang luka. Gedung milik Departemen Pertanian dibakar, mobil disulut api. Sejumlah bangunan lain tak luput dari amukan massa.

Kala Soeharto Kembali Menjabat

Pada 10 Maret 1998, Sidang Umum (SU) MPR menetapkan kembali Soeharto menjadi presiden dan B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Jumlah MPR hasil pemilu 1997 adalah 1000 orang. 500 DPR (325 Golkar, 89 PPP, 11 PDI, dan 75 Militer), 100 orang unsur golongan, 213 dari utusan organisasi, 38 orang Golkar-militer, serta 149 utusan daerah yang ditentukan pemerintah. Dengan kata lain, 850 orang diangkat—atau paling tidak penentuannya—melalui campur tangan Soeharto. 150 dari PPP dan PDIP, 100 di antaranya sudah melalui penelitian khusus (litsus) pemerintah.[43]

Menjelang sidang MPR 1997, beberapa petinggi Golkar mengajukan Harmoko, Ketua Umum Golkar menjadi wakil presiden. Namun, Soeharto mulai melihat peran ICMI dalam menjaga kekuasaan cukup besar dan ini tak bisa dilepaskan dari peran Habibie sebagai Presidium ICMI. Alhasil, Soeharto lebih memilih Habibie sebagai wakil presiden. Hal ini menimbulkan kekecewaan bagi sebagian anggota Golkar yang mendukung Harmoko.[44] Meski kecewa, mereka tak bisa berbuat apa-apa dan tetap menerima keputusan Soeharto.

Di awal 1998, Asia diterpa krisis moneter. Indonesia mendapatkan bantuan ekonomi dari *International Monetary Fund* (IMF) yang dinamakan *Letter of Intent* (LOI). LOI berisi 50 poin yang diejawantahkan dalam empat kebijakan sebagai bukti kepatuhan dan *good will* kepada IMF, yaitu kebijakan moneter (10 poin), kebijakan anggaran 13 poin, restrukturisasi finansial 17 poin, dan reformasi struktural 21 poin.[45]

Paket bantuan ekonomi IMF jelas harus diragukan. Pertama, selama tidak ada mekanisme politik yang sungguh-sungguh, hal tersebut bisa memisahkan garis batas antara kepentingan elite penguasa dan kepentingan publik. Kedua, pemerintah yang

43 Akbar Tandjung, *The Golkar Way* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 62.
44 Wawancara dengan Y di Jakarta, 16 Mei 2019.
45 Ishak Rafick, *Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia* (Jakarta: Ufuk, 2007), hlm. 116—117.

melaksanakan paket reformasi struktural itu, pada hakikatnya, adalah pemerintah lama dengan mandat baru melalui SU MPR 1998 yang masih terjangkiti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sehingga tak bisa menjanjikan tegaknya pemerintahan yang bersih dan wibawa.[46]

Sebelum krisis ekonomi Asia, tepatnya pada awal 1997, agenda reformasi sudah mengemuka dalam kehidupan dan wacana. Pertama kali krisis ekonomi terjadi di Thailand pada Juli 1997, kemudian merambat ke negara-negara Asia lainya. Di Indonesia, dampak ekonomi dan sosial krisis tersebut belum terasa, bahkan hingga Oktober dan November 1997. Pada Oktober 1997, Indonesia tak punya upaya untuk menghadapi krisis. Hingga akhirnya, Indonesia meminta bantuan IMF melalui LOI. Baru pada akhir pengujung 1997, mahasiswa mulai melakukan aksi demonstrasi di dua kota besar, yakni Jakarta dan Yogyakarta.[47]

Tak sampai enam bulan, aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa terjadi begitu masif di Jakarta. Bersamaan dengan aksi itu, Indonesia mulai merasakan dampak dari krisis ekonomi. Harga-harga sembako semakin melambung. Naiknya harga juga disertai dengan kelangkaan yang terjadi di pasar.

Terdapat empat penyebab krisis di Indonesia pada 1998. Pertama, peningkatan jumlah pemasukan modal asing dengan struktur yang semakin rawan dan digunakan untuk membelanjai kegiatan investasi yang kualitasnya semakin menurun. Kedua, lemahnya sistem keuangan nasional. Meningkatnya persaingan pasar yang sudah dimulai sejak 1980-an oleh Soeharto telah mendorong industri keuangan yang mengandung risiko usaha yang lebih besar. Ketiga, menguatnya nilai riil rupiah. Keempat, lemahnya Bank Sentral.[48]

Jatuhnya perekonomian Indonesia menjadi salah satu

46 Syamsuddin Haris, *Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 2007) hlm. 44.
47 Max Lane, *Unfinisihed Nation* (Yogyakarta: Djaman Baroe, 2014), hlm. 266.
48 Ambia B. Boestam, dkk (ed), *Kahmi, Reformasi, dan Civil Society* (Jakarta: Majelis Nasional KAHMI, 2000), hlm. 30—38.

faktor deligitimasi pemerintahan Orde Baru. Padahal Orde Baru selalu menggaungkan bahwa ekonomi sebagai panglima. Bahkan, saat masa transisi Orde Lama ke Orde Baru tingkat inflasi mencapai 635%. Hanya dalam waktu empat tahun, Orde Baru berhasil menekan inflasi hingga 3,6%. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi meningkat dari 2,6% (1966) menjadi 12,9% (1969).[49]

Aksi mahasiswa semakin membuncah saat Maret 1998, terutama saat Sidang Istimewa (SI) menetapkan kembali Soeharto menjadi presiden. Bukan hanya Soeharto yang menjadi musuh utamanya, melainkan juga kroni dan anaknya yang juga masuk dalam kabinet.

Budiman Sudjatmiko menuliskan, di Solo, Jawa Tengah, terjadi bentrok antara mahasiswa dan tentara karena mahasiswa berupaya melakukan aksi ke luar kampus. Pada April, hal yang serupa juga terjadi di Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta. Bahkan Angkatan Darat dan Brigade Mobil (Brimob) menduduki UGM kurang lebih selama delapan jam. Sedangkan, di Universitas Sumatra Utara (USU), mahasiswa menggunakan bom molotov untuk melawan tentara. Dampaknya, kampus USU harus ditutup selama beberapa hari.[50]

Di Jakarta, tepatnya pada 12 hingga 14 Mei terjadi aksi demontrasi besar yang dilakukan di Universitas Trisakti. Bahkan aksi tersebut menewaskan empat orang mahasiswa Trisakti. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie.

Eskalasi aksi pascapenembakan mahasiswa Trisakti justru makin membesar. Mahasiswa semakin menuntut diadakannya reformasi. Ada enam poin tuntutan reformasi, antara lain: (1) supremasi hukum; (2) pemberantasan KKN; (3) mengadili Soeharto dan kroni-kroninya; (4) amandemen konstitusi yang

49 Syamsuddin Haris, *Op.cit.*, hlm. 43.
50 "*Gerakan Mahasiswa Kini Bersama Rakyat Tuntaskan Reformasi Total*", Kompas, 20 Desember 2000.

membatasi waktu jabatan presiden; (5) pencabutan dwifungsi ABRI; dan (6) pemberian otonomi daerah seluas-luasnya.

Tak hanya pembunuhan terhadap mahasiswa. Aksi tersebut juga diiringi dengan adanya huru-hara yang diduga dilakukan oleh tentara untuk membuat kerusuhan di Jakarta. Kerusuhan tak hanya penjarahan dan pembakaran toko-toko, tetapi juga pemerkosaan dan pembunuhan terhadap orang-orang keturunan Tionghoa. Pemerintah membuat dan mencari 'kambing hitam' dari kegagalannya menghadapi krisis. Dan keturunan Tionghoa dianggap pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya krisis. Sebab, banyak konglomerat atau yang menguasai perekonomian Indonesia merupakan keturunan Tionghoa. Kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya, sedikitnya menewaskan 1.217 orang.

Jumlah Korban di Jakarta dan Sekitarnya
12 Mei—2 Juni 1998

Tanggal	Meninggal		Luka/Sakit	Hilang
	Senjata/lain	Bakar		
12 Mei 1998	5	-	16	-
13 Mei 1998	-	-	10	43
14 Mei 1998	12	-	43	-
15 Mei 1998	3	564	6	27
16 Mei 1998	-	84	1	1
17 Mei 1998	4	476	-	1
18 Mei 1998	-	-	-	1
19 Mei 1998	-	55	-	-
20 Mei 1998	-	-	-	1
24 Mei 1998	-	4	-	-
27 Mei 1998	-	5	-	-

28 Mei 1998	1	1	15	-
30 Mei 1998	-	1	-	-
2 Juni 1998	2	-	-	-
Total	**27**	**1.190**	**91**	**31**

Sumber : Dokumentasi "Tim Relawan untuk Kemanusiaan", 12 Mei—2 Juni 1998. Data ini diperoleh dari berbagai sumber. Karena keterbatasan sumber daya bagi pengumpulan, data di atas lebih menunjuk pada jumlah dan kategori korban sejauh bisa dikumpulkan oleh Tim Relawan.

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan Mei 1998 mengungkapkan setidaknya ada empat pola kerusuhan dan perusakan. Pertama, langkah pengondisian massa untuk berkumpul di lokasi yang akan menjadi sasaran perusakan, penjarahan, dan pembakaran. Ada dua cara yang dipakai dalam langkah ini: (1) penyebaran isu tentang adanya aksi perusakan, penjarahan, dan pembakaran di suatu lokasi. Isu itu disebarluaskan lewat telepon, sopir-sopir angkutan, dan orang per orang; (2) ada sekelompok orang yang membakar kayu, ban-ban bekas, atau benda-benda lain—disertai semacam tuduhan dan ajakan.

Kedua, datangnya sekelompok orang berperan sebagai pengajak dan/atau sekaligus pemimpin/pengarah massa agar melakukan perusakan, penjarahan, dan pembakaran. Massa pada umumnya berasal dari daerah sekitar lokasi kejadian. Sedangkan kelompok pengajak perusakan dan pembakaran bukan dari daerah setempat, atau dari tempat yang tidak diketahui oleh warga setempat.

Ketiga, langkah mengawali tindakan perusakan, penjarahan, dan pembakaran bisa dibedakan menjadi dua: (1) pengajak perusakan dan pembakaran berbaur dengan massa, dan

meneriakkan yel-yel 'anti-Cina'; (2) pengajak perusakan dan pembakaran berada di depan, memimpin dan mengarahkan massa untuk menyerang sasaran dengan teriakan 'mahasiswa pengecut' dan 'anti-Cina'. Di berbagai lokasi kejadian, hanya terdapat sekelompok pengajak kategori pertama atau kedua. Sedangkan di lokasi lain, hadir kelompok pengajak pemimpin dari kedua kategori di atas.

Keempat, selama dan setelah kerusuhan, dilancarkan pula aksi teror akan terjadi perusakan dan pembakaran. Teror ini disertai dengan pemerasan pada pemilik ruko, pertokoan, perusahaan, dan warga perumahan. Mereka yang terkena teror dipaksa membayar sejumlah uang, dari Rp2 juta hingga Rp80 juta agar selamat dari tindak perusakan, penjarahan, dan pembakaran. Ada yang membayar pada aparat dan ada juga yang membayar pada 'sang komandan' yang berada di lokasi kejadian.[51]

Dalam pola umum tentang 'awal tindakan' perusakan, penjarahan, dan pembakaran di atas, setidaknya terdapat empat ciri orang-orang/kelompok pengajak dan pemimpin sebagaimana, dikenali oleh para korban dan saksi mata:

1. Kelompok pemuda yang menggunakan pakaian pelajar SLTA atau pakaian mahasiswa.
2. Kelompok remaja berpakaian lusuh dan berwajah dingin/sangar.
3. Kelompok pemuda yang berbadan kekar, berambut cepak, dan bersepatu bot militer.
4. Kelompok pemuda berbadan kekar, berwajah dingin/sangar, dan bertato.

Dalam beberapa peristiwa kerusuhan, ditemukan adanya peran 'komandan', yang naik motor atau mobil. Sang komandan

51 Tim Gabungan Pencari Fakta, *Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998* (Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan, 1999), hlm. 39—40.

ini ditemukan dalam peristiwa perusakan, penjarahan, dan pembakaran berantai di wilayah yang berdekatan, seperti yang terjadi di Depok, Tanah Abang, dan Tangerang.

Para pelaku kerusuhan dapat dibagi atas tiga kelompok. Pertama, kelompok provokator. Kelompok ini yang menggerakkan massa dengan memancing keributan, memberikan tanda-tanda tertentu pada sasaran, melakukan perusakan awal, pembakaran, dan mendorong penjarahan. Kelompok ini datang dari luar, tidak berasal dari penduduk setempat, dalam kelompok kecil (lebih kurang belasan orang), terlatih (yang mempunyai kemampuan terbiasa menggunakan alat kekerasan), bergerak dengan mobilitas tinggi, menggunakan sarana transportasi (sepeda motor mobil/*jeep*), dan sarana komunikasi (HT/HP). Kelompok ini juga menyiapkan alat-alat perusak, seperti batu, bom molotov, cairan pembakar, linggis, dan lain-lain. Pada umumnya kelompok ini sulit dikenal, walaupun di beberapa kasus, kelompok dari organisasi pemuda terlibat (contoh di Medan ditemukan keterlibatan langsung Pemuda Pancasila). Ditemukan fakta keterlibatan anggota aparat keamanan, seperti di Jakarta, Medan, dan Solo.

Kedua, massa aktif. Mereka ini massa dalam jumlah puluhan hingga ratusan—yang mulanya adalah massa pasif pendatang—yang sudah terprovokasi sehingga menjadi agresif melakukan perusakan lebih luas, termasuk pembakaran. Massa ini juga melakukan penjarahan pada toko-toko dan rumah. Mereka bergerak secara terorganisir.

Ketiga, massa pasif. Pada awalnya massa pasif lokal berkumpul untuk menonton dan ingin tahu apa yang akan terjadi. Sebagian dari mereka terlibat ikut-ikutan merusak dan menjarah setelah kerusuhan dimulai. Namun, tidak sedikit pula yang hanya menonton sampai akhir kerusuhan. Sebagian dari mereka menjadi korban kebakaran.[52]

52 *Ibid.*, hlm. 14—15.

Sedangkan, kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998 terjadi di dalam rumah, di jalan, dan di depan tempat usaha. Mayoritas kekerasan seksual terjadi di dalam rumah atau bangunan. TGPF juga menemukan bahwa sebagian besar kasus perkosaan adalah *gang rape*, di mana korban diperkosa oleh sejumlah orang secara bergantian pada waktu yang sama. Kebanyakan kasus perkosaan juga dilakukan di hadapan orang lain.

Meskipun korban kekerasan tidak semuanya berasal dari etnis Cina, namun sebagian besar kasus kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998 lalu diderita oleh perempuan etnis Cina. Korban kekerasan seksual ini pun bersifat lintas kelas sosial. Sedikitnya, tercatat 85 korban kekerasan seksual selama kerusuhan Mei 1998.[53]

Perbandingan Modus Operandi Kerusuhan dan Perkosaan Massal

No.	Kerusuhan	Perkosaan Massal
1.	Usaha pengondisian massa untuk berkumpul di lokasi yang akan menjadi sasaran perusakan, penjarahan, dan pembakaran melalui penye-baran isu-isu tentang adanya aksi perusakan, penjarahan, dan pembakaran di lokasi yang akan menjadi sasaran.	Usaha 'indoktrinasi" dan pengondisian massa untuk menjadikan perempuan-perempuan Tionghoa sebagai target 'perusakan' dan 'pem-bantaian' melalui penyebaran isu tentang adanya aksi kerusuhan, pembantaian, dan perkosaan terhadap warga Tionghoa.
2.	lsu disebarkan lewat telepon, sopir-sopir angkutan, dan orang per orang.	lsu disebarkan lewat telepon, sopir-sopir (taksi, bajaj, ang-kot), pedagang-pedagang kecil dan orang per orang.

53 *Ibid.*, hlm. 17—18.

3.	Ada orang atau sekelornpok orang yang berperan sebagai pengajak dan/atau sekaligus pemimpin-pengarah massa agar melakukan perusakan, penjarahan, dan pembakaran.	Ada orang atau sekelompok orang yang memberi komando atau mengarahkan langkah dan tindakan perkosaan.
4.	Pelaku tidak dikenali oleh warga setempat dan didatangkan dari tempat yang tidak diketahui warga.	Pelaku tidak dikenali oleh warga setempat dan didatangkan dari tempat yang tidak diketahui warga.
5.	Pengajak atau pemimpin-pengarah massa meneriakkan yel-yel 'anti-Cina'.	Komandan dan/atau pemimpin-pengarah massa meneriakkan yel-yel 'anti-Cina'.
6.	Selama dan setelah kerusuhan, dilancarkan aksi teror dengan disertai pemerasan. Teror dilancarkan dalam bentuk penyebaran isu-isu tentang akan terjadinya kerusuhan atau serangan massa. Isu ini masih beredar hingga dokumen ini dituliskan.	Selama dan setelah kerusuhan, dilancarkan aksi teror dengan disertai pemerasan. Teror dilancarkan dalam bentuk penyebaran isu-isu tentang akan terjadinya kerusuhan, penyebaran foto-foto yang berisi kejadian dan korban perkosaan massal, aksi penculikan dan perkosaan perempuan-perempuan Tionghoa. Dan aksi ini masih terus berlangsung hingga dokumen ini dituliskan.
7.	Sasaran teror setelah kerusuhan: pemilik toko, ruko, pabrik, usaha-usaha bisnis lainnya, dan para warga perumahan/ permukiman.	Sasaran teror setelah perkosaan massal adalah warga Tionghoa.

Sumber: Dokumentasi "Tim Relawan untuk Kemanusiaan", dari kesaksian para korban, keluarga, dan teman korban, serta saksi mata, Mei—Juli 1998.

Peristiwa kerusuhan ini semakin meluas oleh karena kurang memadainya tindakan-tindakan pengamanan guna mencegah, membatasi, dan menanggulangi pecahnya rangkaian perbuatan kekerasan, yang seharusnya dapat diantisipasi dan yang kemudian berproses secara eskalatif. Dapat disimpulkan bahwa adanya kerawanan dan kelemahan operasi keamanan, di Jakarta khususnya, bertalian erat dengan keseluruhan pengembanan tanggung jawab Panglima Komando Operasional (Pangkoops) Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana yang seharusnya. Gejala kerawanan dan kelemahan keamanan dalam gradasi yang berbeda-beda di berbagai kota lain, di mana terjadi kerusuhan, juga bertalian dengan masalah pergumulan elit politik pada tingkat nasional.

Munculnya kerusuhan berbau rasial (anti-Cina), gejala awalnya, sudah terlihat di beberapa kota di Jawa dan Ujung Pandang. Jika kecenderungan itu benar-benar membesar dan meluas, maka semakin besar peluang militer untuk tampil sebagai faktor 'pemersatu' dan 'penyelamat bangsa' di atas golongan yang lain. Dampaknya tentu akan menyempitnya peluang sipil, termasuk Islam, untuk tampil sebagai faktor determinan, baik dalam memanfaatkan momentum politik selama maupun pascakrisis.[54]

Soeharto Lengser

Di medio Oktober—November 1997 ada pertemuan tokoh-tokoh sipil, yakni Megawati, Gus Dur, Adnan Buyung Nasution, dan Amien Rais. Tujuannya agar koalisi sipil ini kompak untuk menghadapi Soeharto dan tentaranya yang sudah berkuasa selama tiga dekade. Pada awalnya, mereka sepakat untuk bergerak bersama gerakan massa.

Namun, sayangnya hingga Januari 1998, kesepakatan yang sudah disepakati tak kunjung terealisasi. Hal itu merupakan

54 Syamsuddin Haris, *Op.cit.*, hlm. 14—15.

akibat dari tidak adanya titik temu dan ego masing-masing. Terutama Megawati yang merasa akan memenangi pemilu bila pemilu akan diadakan secepatnya pascareformasi. Ini menjadi sulit, sebab gerakan sipil tak kompak. Padahal yang mereka hadapi adalah militer yang sudah terogranisasi rapi gerakannya.[55]

Di jalan, gelombang tuntutan untuk reformasi kian membesar. Amien Rais menjadi salah satu tokoh publik yang mengecam keras Orde Baru. Padahal ia pernah menjadi bagian dari Orde Baru dengan menjadi bagian dari ICMI. Sementara itu, Gus Dur lebih memilih untuk meredakan keadaan dengan mengunjungi Soeharto, dengan harapan agar tak semakin banyak pertumpahan darah.

Di titik ini, banyak orang beranggapan bahwa Gus Dur tidaklah konsisten. Al-Zastrouw tak sepakat dengan pernyataan tersebut. Di balik inkonsistensi dan kontroversi Gus Dur, itu justru terletak konsistensinya. Kalau kita memandang Gus Dur dari segi luarnya saja, maksudnya hanya memandang pernyataan, sikap, dan tingkah laku, hal tersebut benar adanya. Namun, kalau kita melihat di balik yang tampak, yakni menyelami jauh ke dalam paradigma, kerangka pikir dan gagasan-gagasan yang ada di balik tindakan dan pernyataan tersebut, kita akan menemukan sikap yang konsisten pada diri Gus Dur. Konsistensi Gus Dur bukan pada sikap dan pernyataan, tetapi pada gagasan, pemikiran, dan paradigma yang dibawanya. Dengan kata lain, konsistensi Gus Dur justru terletak pada sikap inkonsistensinya.[56]

Pada saat-saat genting dan mencekam di Jakarta, Soeharto bertolak ke Mesir untuk menghadiri sebuah konferensi pada 7 hingga 15 Mei 1998. Dengan kondisi Jakarta yang tak terkendali, fraksi ABRI di MPR mewacanakan diadakannya SI MPR.

---

55 Wawancara dengan X di Jakarta, 20 Februari 2019.
56 Al Zastrouw Ng, *Op.cit.*, hlm. 251—252.

Tak perlu waktu lama, Golkar yang selama Orde Baru menjadi kendaraan politik bagi Soeharto menyetujui untuk mempercepat jalannya SI MPR untuk meminta pertanggungjawaban presiden.

Soeharto bersama wakil presiden, kabinet, dan pimpinan DPR akan membahas desakan agenda reformasi. Dari pertemuan itu, Soeharto berjanji akan melakukan reformasi pada 2003. Namun, hal itu tidak dipercaya oleh publik. Fuad Bawazier menyatakan pernah berbicara dengan Soeharto bahwa Soeharto ingin mundur, tetapi selalu ditahan oleh orang-orang terdekatnya. Selain itu, ada krisis ekonomi. Sebagai seorang Jenderal, ia merasa tertantang untuk menyelesaikan krisis.[57]

Pertama, janji reformasi itu merupakan reaksi terhadap meningkatnya aksi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menuntut agar Soeharto mundur dari kekuasaannya. Kedua, pada 2003 Soeharto telah mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden. Sehingga ketika janji itu ditagih, dia bisa saja melarikan diri dari tanggung jawab atas janji reformasi.[58]

Saat mahasiswa mulai menduduki gedung DPR dan menuntut agar Soeharto mundur jadi presiden. Situasi dan kondisi fraksi-fraksi pun memanas dan juga kebingungan. Fraksi Keadilan Pembangunan (Golkar) sudah mengeluarkan draf atau petisi untuk ditandatangi oleh anggota DPR. Inti isi draf tersebut adalah meminta Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. [59]

Pada saat itu, Ketua Fraksi Golkar Eki Syachrudin terkejut dengan adanya draf tersebut. Awalnya, Eki menolak untuk ikut menandatangi draf tersebut. Baru setelah beberapa anggota DPR Golkar, seperti Ferry Mursidan Baldan menandatangani, Eki akhirnya ikut menandatangani draf tersebut. Draf tersebut kemudian dikomunikasikan kepada fraksi-fraksi lainnya di DPR.[60]

57 Wawancara dengan Fuad Bawazier di Jakarta, 25 Januari 2015.
58 Syamsuddin Haris, *Op.cit*, hlm. 45.
59 Wawancara dengan Y di Jakarta, 16 Mei 2019.
60 Wawancara dengan Y di Jakarta, 16 Mei 2019.

Kemudian, draf tersebut didiskusikan, dibicarakan, dan dirapatkan oleh para pimpinan DPR/MPR—termasuk Harmoko. Mungkin karena dilatarbelakangi kekecewaannya karena tak dipilih menjadi wakil presiden, Harmoko pun menyetujui draf tersebut. Kemudian, pada 18 Mei, ia membacakan isi draf tersebut kepada media.

> *"Pimpinan Dewan, baik Ketua maupun Wakil-wakil Ketua mengharapkan demi persatuan dan kesatuan negara bangsa, agar presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri."*
>
> ***- Harmoko.***

Pernyataan ini dikeluarkan oleh Harmoko, selaku Ketua DPR/MPR, pada saat melakukan jumpa pers pada 18 Mei 1998 pukul 16.00 WIB. Dengan pernyataan ini, sebuah titik luncur kejatuhan Soeharto tak terbendung lagi.[61]

Setelah itu, sekitar Pukul 18.00 WIB, Harmoko ke DPP Golkar. Situasi di DPP Golkar waktu itu sangat menegangkan. Harmoko dimarahi, dimaki-maki, dan diserang oleh anak-anak Soeharto dan 'orang-orang' Wiranto. Harmoko mendapat telepon dari istrinya dan menangis karena rumah Harmoko sudah diusik oleh Angkatan Darat. Ia kemudian menelepon marinir atau Angkatan Laut untuk membantunya dan mengawalnya untuk pulang.[62]

Di perjalanan, Harmoko mengubah arah, tak jadi pulang. Ia kemudian memutuskan untuk tinggal di DPR. Sebab, informasi yang beredar di internal Golkar, Harmoko akan 'digilas' oleh Tommy dan Prabowo. "Ini situasinya. Di mana saja kita dipantau. Situasinya tidak aman. Paling aman, ya, kita mesti

61 Kholid Novianto, M Afan Alfian, dan Riyono Asnan, *Akbar Tandjung dan Partai Golkar Era Reformasi* (Bekasi: Sejati Press, 2004), hlm. 11.
62 Wawancara dengan Y di Jakarta, 16 Mei 2019.

kembali ke DPR. Kalau harus mati, mati di DPR dan supaya didukung oleh DPR bersama mahasiswa. Tetapi kalau di luar, atau di hotel, aduh, mati konyol," ujar Y.[63]

Personalisasi kekuasan yang dibangun di atas 'koalisi oportunisme' ABG yang menjadi basis, rupanya sekaligus menjadi pangkal keruntuhan Orde Baru. Jelas, kejatuhan Soeharto bukan karena ia mendengar suara mahasiswa atau rakyat, melainkan koalisi yang dibangunnya menarik dukungan mereka pada 20 Mei 1998.[64]

Selain adanya faktor krisis ekonomi, ketidakpercayaan pada pemerintah, dan demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa, Akbar Tandjung meyakini bahwa faktor utama Soeharto mengundurkan diri adalah desakan mundur dari Golkar di DPR dan mundurnya sejumlah menteri.[65]

Pada 19 Mei 1998, Soeharto bertemu ulama dan tokoh masyarakat, yakni Gus Dur, Emha Ainun Najib, Nurcholis Madjid, Ali Yafie, Malik Fajar, Yusril Ihza Mahendra, Cholil Badawi, Sumarsono, Ahmad Bagja, dan Ma'ruf Amin. Di pertemuan yang digelar selama 2,5 jam itu, para tokoh menjelaskan situasi terkini: elemen masyarakat dan mahasiswa tetap menginginkan Soeharto mundur. Soeharto lalu mengajukan Komite Reformasi.

Dalam keterangan persnya, Soeharto menyatakan akan segera melakukan *reshuffle* Kabinet Pembangunan VII dan sekaligus mengganti namanya menjadi Kabinet Reformasi. Soeharto juga akan membentuk Komite Reformasi. Sedangkan, Nurcholis mengungkapkan, ide *reshuffle* kabinet dan membentuk Komite Reformasi itu murni usulan Soeharto, bukan usulan para tokoh yang diundang Soeharto.[66]

Keesokan harinya, 14 menteri bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN) melangsungkan pertemuan di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

63 Wawancara dengan Y di Jakarta, 16 Mei 2019.
64 Syamsuddin Haris, *Op.cit.*, hlm. 67.
65 Wawancara dengan Akbar Tandjung, 24 Januari 2019.
66 Mahrus Ali dan M.F. Nurhuda Y., *Pergulatan Membela yang Benar: Biografi Matori Abdul Djalil* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 152—153.

Keempat belas menteri tersebut adalah Ginandjar Kartasasmita, Akbar Tandjung, AM Hendropriyono, Giri Suseno, Haryanto Dhanutirto, Justika Baharsjah, Kuntoro Mangkusubroto, Rachmadi Bambang Sumahidjo, Rahardi Ramelan, Subiakto Tjakrawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L. Sambuaga, dan Tanri Abeng. Dua menteri yang tak hadir adalah Mohammad (Bob) Hasan dan Fuad Bawazier. Mereka bermufakat untuk tak lagi menjabat sebagai menteri atau Kabinet Reformasi.

Selain itu, Wiranto yang menjabat sebagai Pangab ragu mengambil alih kepemimpinan. Padahal Soeharto sudah memberikan surat rekomendasi layaknya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) untuk Wiranto agar mengambil alih kepemimpinan. Seorang sumber dari Fraksi ABRI menceritakan bahwa Wiranto sempat meminta untuk diyakinkan olehnya untuk mengambil alih surat tersebut. Ada dua pertanyan yang diajukan Wiranto kepadanya. Pertama, "bagaimana sikap Amerika?" Kedua, "bagaimana dengan gerakan mahasiswa dan gerakan prodemokrasi lainnya?"[67]

Bukan tanpa alasan Wiranto mempertanyakan hal tersebut. Pasalnya, hubungan Amerika dan Indonesia sudah terjalin baik sejak Soeharto berkuasa pada 1966. Untuk gerakan mahasiswa, Wiranto tampaknya berpikir bahwa akan ada pembersihan rezim berkuasa setelah reformasi.

Ia menjawab pertanyaan Wiranto. "Mengenai Amerika, Mas Wiranto hanya perlu menjawab bahwa Indonesia tak akan mengubah kebijakan luar negerinya. Sedangkan, untuk gerakan mahasiswa, gerakan mahasiswa tidak mempedulikan siapa pengganti Soeharto. Bagi mereka hal terpenting adalah Soeharto jatuh," ucapnya.[68]

Bukan tanpa sebab, ia menyarankan agar Indonesia

67 Wawancara dengan X di Jakarta, 20 Februari 2019.
68 Wawancara dengan X di Jakarta, 20 Februari 2019.

tak mengubah kebijakan luar negerinya. Sebab, Amerika akan selalu mendukung penuh siapa pun yang berkuasa di suatu negara tanpa mempedulikan latar belakangnya sipil atau militer, asalkan garis kebijakan negara tersebut berkiblat pada Amerika.

Sumber tersebut melanjutkan, setelah Wiranto mendapatkan saran darinya, Wiranto bergegas menuju Markas Besar (Mabes) TNI di Cilangkap. Di sana, ia bertemu beberapa jenderal dan meminta saran lagi untuk mengambil kepemimpinan. Wiranto bertemu dengan Kepala Sosial dan Politik (Kasospol) ABRI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY justru menyarankan agar Wiranto jangan mengambil kepemimpinan nasional.

SBY menyatakan bahwa jika Wiranto ambil alih kepemimpinan, maka situasi akan lebih parah, karena publik sangat antimiliter dan kepentingan strategis ABRI bisa terganggu. Wiranto lebih percaya dengan argumen SBY. Esok harinya, Wiranto mendatangi Soeharto dan meminta maaf karena tak sanggup mengambil alih kepemimpinan. Soeharto kecewa dan bingung dengan sikap Wiranto. Musababnya, Wiranto adalah orang sudah dipersiapkan lama oleh Soeharto untuk menggantikannya sebagai presiden.

Soeharto lantas memberikan surat tersebut kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Subagyo Hadi Siswoyo. Akan tetapi, Subagyo pun harus mendatangi Mabes TNI untuk mendapatkan izin. Izin yang diharapkan Subagyo pun tak diterima. SBY mengatakan kepada Subagyo, “Pangab saja tak berani mengambil alih kepemimpinan. *Masak* kamu berani?”[69] Dengan demikian, pupus harapan milter untuk mengambil alih kepemimpinan nasional.

Di sisi lain istana, kelompok sipil yang merepresentasikan Islam politik yang dimotori Habibie meminta diberikan kewenangan menjadi presiden yang baru. Habibie pun dilantik menjadi presiden, sesaat setelah Soeharto mengundurkan diri

69 Wawancara dengan X di Jakarta, 20 Februari 2019.

pada 21 Mei 1998 pukul 09.00 WIB. Mahasiswa kembali menduduki Gedung DPR/MPR untuk melakukan selebrasi.

Tahap awal dan mendasar untuk melakukan reformasi telah tercapai, yakni melengserkan Soeharto. Akan tetapi, untuk mewujudkan tuntutan reformasi tentu masih membutuhkan waktu yang panjang. Salah satunya, masih bercokolnya unsur-unsur Orde Baru di lembaga pemerintahan—termasuk Habibie.

BAB 2

PEMERINTAHAN HABIBIE

Menurut Huntington, dalam masa transisi kekuasaan, setidaknya ada dua kubu elite, yaitu rezim otoriter dan oposisi. Kelompok rezim otoriter terdiri atas kelompok garis keras-konservatif atau *status quo* dan kelompok pembaru di dalam rezim lama. Sedangkan kelompok oposisi terdiri atas oposisi moderat dan kelompok revolusioner.[70] Dalam konteks sisa kekuasaan Orde Baru, ada persaingan tiga kelompok di Kabinet Habibie, yakni kelompok garis keras Wiranto, kelompok pembaru Akbar Tandjung, dan kelompok Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Adi Sasono.[71]

Akan tetapi, kekuatan politik di Indonesia terbagi atas dua kelompok. Pertama, sisa-sisa kelompok lama. Kedua, kelompok proreformasi atau prodemokrasi. Dalam kasus Indonesia, karena memilih jalan reformasi, transisi kekuasaan berjalan bertahap. Hal ini memungkinkan kekuatan-kekuatan lama masih ikut terlibat dalam proses transisi. Oleh karenanya membuat publik—terutama mahasiswa, menyatakan bahwa reformasi tak kan membawa banyak perubahan.

Selama memangku jabatan sebagai presiden, Habibie

70 Samuel Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga* (Jakarta: Grafiti, 1997), hlm. 155—156.
71 Syamsuddin Haris, *Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 2007), hlm. 48.

membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Dari 36 menteri yang dilantik, 20 di antaranya merupakan wajah lama dalam kabinet Pembangunan VII. Sedangkan 16 menteri baru adalah Syarwan Hamid, Yunus Yisfiah, Bambang Subianto, Soleh Solahuddin, Muslimin Nasution, Marzuki Usman, Adi Sasono, Ide Bagus Oka, Hamzah Haz, Hasan Basri Durin, dan Panangian Siregar.

Adapun susunan kabinetnya sebagai berikut.

- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam): **Jenderal TNI (Purn.) Feisal Tanjung.**
- Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin merangkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): **Marsekal Madya TNI (Purn.) Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (sampai 27 September 1999), lalu digantikan oleh Ir. Hartarto Sastrosoenarto (ad interim sejak 1 Oktober 1999).**
- Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara (Menkowasbangpan): **Ir. Hartarto Sastrosoenarto.**
- Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (Menko Kesra dan Taskin): **Dr. H. Haryono Suyono, M.A.**
- Menteri Dalam Negeri (Mendagri): **Lentnan Jenderal TNI (Purn.) Syarwan Hamid (sampai 27 September 1999), lalu digantikan oleh Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung (ad interim sejak 1 Oktober 1999).**
- Menteri Luar Negeri (Menlu): **Dr. (H.C.) Ali Alatas, S.H.**
- Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankan)/Pangab: **Jenderal TNI Wiranto, S.H.**
- Menteri Kehakiman (Menkeh): **Prof. Dr. H. Muladi, S.H.**

- Menteri Penerangan (Menpeh):

Letnan Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Yunus Yosfiah.

- Menteri Keuangan (Menkeu):

Dr. Ir. H. Bambang Subianto, M.B.A.

- Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag):

Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc.

- Menteri Pertanian (Mentan):

Prof. Dr. Ir. H. Soleh Solahuddin, M.Sc.

- Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben):

Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, M.S.I.E., M.S.C.E.

- Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Menhutbun):

Dr. Ir. H. Muslimin Nasution, A.P.U.

- Menteri Pekerjaan Umum (PU):

Ir. Rachmadi Bambang Sumadhijo.

- Menteri Perhubungan (Menhub):

Ir. Giri Suseno Hadihardjono, M.S.M.E.

- Menteri Pariwisata, Seni, dan Kebudayaan (Menparsenbud):

Dr. Ir. H. Marzuki Usman, M.A. (sampai 27 September 1999), lalu digantikan oleh Ir. Giri Suseno Hadihardjono, M.S.M.E. (ad interim sejak 1 Oktober 1999).

- Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Menkop UKM): **Ir. Adi Sasono.**

- Menteri Tenaga Kerja (Menaker):

Drs. Fahmi Idris (sampai 27 September 1999), lalu digantikan oleh Jenderal TNI (Purn.) Ir. Drs. H. Abdullah Makhmud Hendropriyono, S.H., S.E., M.B.A. (ad interim sejak 1 Oktober 1999).

- Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (Mentrans PPH): **Jenderal TNI (Purn.) Ir. Drs. H. Abdullah Makhmud Hendropriyono, S.H., S.E., M.B.A.**

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud):

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

- Menteri Kesehatan (Menkes):

Prof. Dr. dr. H. Faried Anfasa Moeloek, Sp.O.G.

- Menteri Sosial (Mensos):

Prof. Dr. Ir. Hj. Justika Sjarifuddin Baharsjah, M.Sc.

- Menteri Agama (Menag): **Prof. Drs. Abdul Malik Fadjar, M.Sc.**
- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg):

Ir. H. Akbar Tandjung (sampai 10 Mei 1999), lalu digantikan oleh Prof. Dr. H. Muladi, S.H. (sejak 1 Oktober 1999).

- Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Menristek/Kepala BPPT):

Prof. Dr. Ir. Muhammad Zuhal, M.Sc.

- Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Meninves/Kepala BKPM):

Dr. H. Hamzah Haz, M.A. (ad interim sejak 1 Oktober 1999).

- Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman (Menperakin): **Drs. Theo L. Sambuga (Sampai 27 September 1999), lalu digantikan oleh Ir. Rachmadi Bambang Sumadhijo (ad interim sejak 1 Oktober 1999).**
- Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH)/Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal):

dr. Panangian Siregar.

- Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (Menneg Pendayagunaan BUMN): **Tanri Abeng, M.B.A.**
- Menteri Negara Peranan Wanita (Menperwan):

Dra. Hj. T. Alawiyah.

- Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora):

Drs. H. R. Agung Lasksono (sampai 27 September 1999), lalu digantikan oleh Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A. (ad interim sejak 1 Oktober 1999).

- Menteri Negara Pangan dan Hortikultura (Menneg PH): **Dr. Ir. H. Ahmad Muflih Saefuddin (sampai 27 September 1999), lalu digantikan oleh Prof. Ir. H. Soleh Solahuddin, M.Sc. (ad interim sejak 1 Oktober 1999).**
- Menteri Negara Kependudukan dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN): **Prof. Dr. Ida Bagus Oka.**

Ada juga Jaksa Agung, pejabat setingkat menteri, yang diangkat oleh Presiden B.J. Habibie. Jaksa Agung masa pemerintah B.J. Habibie sempat mengalami pergantian. Awalnya, Jaksa Agung dijabat oleh Sudjono Chanadiah Atmonegoro, S.H. sampai 15 Juni 1998. Ia adalah Jaksa Agung berlatarbelakang sipil yang kedua setelah Singgih, S.H. (1990—1998). Kemudian pada 17 Juni 1998, Sudjono digantikan oleh Letnan Jenderal TNI (Purn.) Andi Muhammad Ghalib, S.H., M.H.[72]

Setahun berlalu, *Indonesian Corruption Watch* menerbitkan dokumen yang menunjukkan bahwa Ghalib dan istrinya menerima sejumlah uang dari cukong kakap di rezim Soeharto, yakni Prajogo Pengestu dan The Nin King. Hal itu menandakan adanya keengganan pemerintah untuk mengadili Soeharto.[73]

Upaya Habibie Mereformasi

Pada akhir Juli 1998, anggota-anggota *Consultative Group on Indonesia* (CGI) setuju menyumbangkan 7,9 miliar USD pada pemerintahan Habibie, yang sebagiannya untuk program jaringan pengamanan sosial. Sebelumnya, *International Monetary Fund* (IMF) mengeluarkan 1 miliar USD yang ditujukan pada program yang sama.

Masalahnya sekarang adalah seberapa jauh langkah tersebut memberikan sumbangan bagi pemulihan stabilitas politik dan

72 Bondan Gunawan, *Hari-Hari Terakhir Bersama Gus Dur* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2018), hlm. 157—160.
73 M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: Serambi, 2007), hlm. 657—658.

ekonomi. Pengamat politik dan ekonomi pun berkeyakinan bahwa Habibie tak mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat. Elite-elite politik pun menyadari bahwa manuver politik pemerintah tak lain hanya untuk strategi jangka pendek Habibie agar tetap berkuasa. Dengan dukungan yang lemah, Habibie mengulur waktu dan memberikan beberapa kelonggaran politik sambil mengonsolidasikan kekuatan.[74]

Tuntutan reformasi seperti penghapusan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), pencabutan UU paket politik, usut Soeharto tak tampak dalam Sidang Istimewa (SI) MPR yang dilangsungkan pada 10 hingga 13 November 1998. Pada sidang itu hanya diputuskan agar melakukan percepatan pelaksanaan pemilu paling lambat Juni 1999.[75]

Pada ranah reorganisasi militer, khususnya dwifungsi ABRI, pada HUT ABRI, 5 Oktober 1998, internal militer mulai berbenah. Mereka menerima tuntutan dan kritik publik agar militer tak lagi menjalankan dwifungsi, tetapi fokus ke pembentukan militer profesional.

Pada kesempatan itu, sudah mulai didengungkan sejumlah metode tentang paradigma baru militer Indonesia. Mengubah posisi dan metode tidak selalu harus di depan … mengubah dari konsep menduduki menjadi mempengaruhi … mengubah dari cara-cara memengaruhi secara langsung menjadi tidak langsung,… senantiasa melakukan *role sharing* (kebersamaan dalam pengambilan keputusan penting kenegaraan dan pemerintahan) dengan komponen bangsa lainnya.[76]

Pada kesempatan yang sama, pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga telah memutuskan dua arah penting yang akan menentukan masa depan militer pasca-Soeharto.

74 Muhammad A.S. Hikam, *Politik Kewarganegaraan* (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 90—91.
75 Syamsuddin Haris, *Op.cit.*, hlm. 55.
76 *TNI Abad XXI, Redefinisi, Reposisi, Reaktualisasi Peran TNI dalam Kehidupan Bangsa* (Jakarta: Markas Besar TNI, 1999), hlm. 22—28.

Pertama adalah keluarnya kebijakan untuk memisahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari ABRI. Ini termasuk salah satu tuntutan yang banyak dilontarkan publik dan juga purnawirawan TNI sendiri. Menurut mantan Kapolri Jenderal Awaluddin Djamin, "integrasi polisi di tubuh ABRI itu sebenarnya merugikan... Sebab polisi *'kan* bukan angkatan perang."

Kedua, Panglima TNI Jenderal Wiranto, sesuai dengan rencana, telah membacakan konsep reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran sosial politik TNI. Dalam upacara peringatan HUT tersebut, Jenderal Wiranto menjanjikan bahwa "Langkah awal, ABRI akan mengurangi secara kuantitatif implementasi penugas karyaan di departemen non-pertahanan dan keamanan secara sistematis, bertahap, dan lebih mengedepankan aspek kualitas dan kepakarannya."[77]

Kebijakan ini tentu menimbulkan pro dan kontra. Mayoritas anggota ABRI saat itu menyatakan dukungannya sebagai bentuk reformasi dan pengorbanan besar ABRI untuk menegakkan supremasi sipil. Sedangkan, sebagian kecil anggota ABRI merasa dua poin tersebut belum maksimal. Kelompok ini dipimpin oleh Agus Wirahadikusumah dan disebut sebagai kelompok pembaru dalam ABRI.

Menurut Agus, dua poin tersebut masih bersifat simbolik dan kurang substantif. Menurut Agus, hal itu dirasa percuma, apabila kelompok pragmatis masih mempertahankan doktrin Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) sebagai dasar keterlibatan tentara dalam menjaga keutuhan wilayah.

Agus pun berpendapat, "doktrin perang tidak lagi relevan sebagai corak pembentukan kepribadian prajurit, tetapi tindakan atau aksi yang dapat mengondisikan suatu halangan

77 Dewi Fortuna, dkk, *Gus Dur Versus Militer* (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 45.

bagi perluasan perang". Oleh karena itu, "maka reformasi internal yang diprakarsai TNI haruslah merupakan titik balik dari doktrin perang rakyat semesta dan karena itu memerlukan perubahan bukan hanya pada redefinisi, reaktualisasi dan reposisi melainkan pada keseluruhan cara pandang atau konsepsi mengenai perang.[78]

Dengan kata lain, Agus menganggap bahwa diperlukan lebih dari sekadar dokumen. Misalnya, cara pandang baru berupa "gagasan baru dan agar dalam mempersepsikan suatu perubahan perspektif dari orientasi atau fokus budaya dari negara (*state*) kepada masyarakat (*society*). Pandangan reformasi internal, apabila dilihat dari pola hubungan sipil-militer tidak akan cukup mampu memberikan perspektif baru dan keluar dari paradigma lama."[79]

Dapat dikatakan, kelompok Agus ini lebih menghendaki perubahan secara progresif dan revolusioner dalam reformasi internal TNI. Perubahan radikal itu dimulai dengan adanya keinginan untuk mengkaji ulang persepsi ancaman (*perception of threat*) yang dihadapi bangsa Indonesia. Bagi Agus Wirahadikusumah, yang dianggap sebagai ancaman sekarang adalah ketidakadilan, kemiskinan, dan kebodohan. Jadi berbeda dengan yang diyakini selama ini oleh sebagian besar anggota TNI. Ancaman itu bukan fisik sifatnya, melainkan abstrak. Konsekuensinya, TNI Angkatan Darat harus lebih memusatkan perhatian pada upaya "pemerdayaan rakyat." Jangan seperti di masa lalu, tentara digunakan sebagai alat untuk membebaskan tanah, digunakan untuk masalah buruh, untuk politik, untuk mengawasi ulama yang ceramah di masjid, melihat orang-orang yang dinilai ekstrem. Sebagai akibatnya, pengembangan dan pembinaan lembaga teritorial menjadi salah satu kunci utamanya.[80]

---

78 *Ibid.*, hlm. 45.
79 *Ibid.*, hlm. 46.
80 *Ibid.*, hlm. 47.

Di sisi lain, mahasiswa masih melakukan demonstrasi untuk menolak Habibie sebagai presiden dalam SI MPR yang akan digelar pada November 1998. Akan tetapi, SI MPR yang memberikan legitimasi kepada Habibie ditentang oleh banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan kelompok prodemokrasi lainnya. Titik kulminasi demonstrasi tersebut terjadi pada 13 November 1998 yang menewaskan 18 orang mahasiswa atau dikenal Tragedi Semanggi I. Saat itu, mahasiswa membawa setidaknya empat tuntutan. Pertama, SI MPR mempertanggungjawabkan mandat disertai dengan pencabutan mandat yang diberikan oleh Soeharto kepada Habibie. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden baru atau membentuk presidium. Ketiga, menetapkankan landasan konstitusional bagi proses reformasi. Keempat, melaksanakan pemilu secepatnya.[81]

Tuntutan mahasiswa tak terealisasi, bahkan SI MPR tidak mencabut mandat yang diberikan untuk Soeharto sebagai presiden dan Habibie menjadi wakil presiden pada 1997. Hal ini bukan tanpa sebab, pasalnya DPR masih dikuasai oleh kroni-kroni Orde Baru, seperti Golkar dan ICMI. Oleh sebab itu, muncul gerakan untuk membersihkan DPR dengan membubarkan Golkar.

Demi reformasi bersih dari kekuatan lama, gerakan mahasiswa juga menuntut pencabutan kelima paket undang-undang (UU) politik antidemokrasi hasil karya rezim Soeharto bersama wakil-wakil rakyat yang telah dikebiri pada 1985. Kelima UU itu adalah UU No. 1/1985 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (UU No. 2/1985), Partai Politik dan Golongan Karya (Golkar) (UU No. 3/1985),

80 *Ibid.*, hlm.47
81 A. Malik dan M. F. Nurhuda Y., *Mengawal Transisi, Refleksi atas Pemilu 1999* (Jakarta: PB PMII dan UNDP, 2000), hlm. 10.

Referendum (UU No. 5/1985), dan Organisasi Kemasyarakatan (UU No. 8/1985).[82]

Tak hanya itu, beberapa kelompok mahasiswa di Jakarta menginisiasi sebuah dialog yang diadakan di kediaman Gus Dur, di Ciganjur pada 10 November 1998. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Gus Dur, Megawati, Amien Rais, dan Sri Sultan Hamengkubowono X. Pertemuan para elite politik tersebut menghasilkan Deklarasi Ciganjur yang berisi delapan kesepakatan. Salah satunya adalah dilaksanakannya pemilu yang jujur dan adil oleh lembaga yang independen.

Pemilu yang direncanakan pada 2003 kemudian dipercepat menjadi 1999, sehingga sejumlah undang-undang disiapkan. Antara lain UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, dan UU No. 4 tahun 1999 tentang DPR dan MPR. Seiring dengan itu, dalam waktu singkat, jumlah partai politik yang mendaftar mencapai 141 partai. Setelah diverifikasi oleh tim 11 Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi 98 partai. Akan tetapi, yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu hanya 48 partai.

Kendati Habibie ditolak oleh mayoritas aktivis gerakan mahasiswa dan prodemokrasi karena dianggap bagian dari rezim Orde Baru, ia melakukan perubahan yang cukup penting dalam proses demokratisasi, yakni pembebasan tahanan politik dan kebebasan pers.

Golkar Pasca-Soeharto

Bergulirnya reformasi tak berarti tugas atau proyek demokratisasi selesai. Sebab, reformasi masih harus membersihkan atau setidaknya mengevaluasi struktur ekonomi dan politik Orde Baru. Segala bentuk sikap dan tindakan antidemokrasi sisa-sisa Orde Baru masih bertahan dan harus segera diselesaikan. Di bidang keamanan, Tentara Nasional

82 Ishak Rafick, *Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia* (Jakarta: Ufuk, 2007), hlm. 104.

Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus dipisah. TNI juga mesti kembali ke barak. Selain itu, proses pembersihan di parlemen ditandai dengan pembubaran Golongan Karya (Golkar).

Pascareformasi, di kalangan aktivis dan intelektual setidaknya ada dua prediksi perubahan Indonesia pascakrisis. Pertama, perubahan seperti yang diharapkan oleh elite politik secara evolusioner dalam tahap-tahap dan jenjang yang teratur. Argumennya, rezim Soeharto masih cukup kokoh, sehingga tak ada suatu kekuatan pun yang mampu mengubahnya. Jika ada tekanan dan guncangan, mungkin rezim akan berubah secara inkremental dan gradual, atau bertahap.

Kedua, perubahan secara cepat dan menyeluruh yang berujung pada revolusi. Perubahan ini yang diharapkan oleh aktivis kritis. Krisis telah mendorong rakyat melawan tirani kekuasaan dalam sebuah bentuk revolusi.[83]

Sedangkan A.S. Hikam menyatakan hal serupa dengan Hermawan Sulistiyo. Hanya saja menurut Hikam, ada tiga pilihan strategis bagi bangsa Indonesia dalam konjungtor perpolitikan pasca-Soeharto. Pertama, bertahan dan pemberdayaan kembali sistem politik otoriter. Kedua, pengupayaan demokrasi secara radikal. Ketiga, pengupayaan demokrasi secara gradual.[84]

Amien Rais menyatakan bahwa reformasi atau perubahan mestinya secara bertahap, dan cenderung lebih cocok untuk konteks masyarakat Indonesia. Menurutnya, watak bangsa Indonesia yang menyukai harmoni—dan mungkin kultur bangsa Indonesia yang cenderung moderat dan tidak ingin banyak memakan korban—yang menjadikan reformasi lebih cocok daripada revolusi.[85]

Argumen Hermawan Sulistiyo dan Hikam diakui oleh Akbar Tandjung yang merupakan pimpinan Golkar. Menurutnya,

83 Hermawan Sulistiyo, *Darah, Nasi, dan Kursi* (Jakarta: Pensil 324, 2011), hlm. 3.
84 Muhammad A.S. Hikam, *Op.cit.*, hlm. 244.
85 Wawancara dengan Amien Rais, 9 Januari 2019.

naiknya Habibie—yang juga tokoh Golkar—menjadi Presiden dianggap *blessing in disguise* bagi Golkar. Pergantian rezim tidak disertai pergantian partai yang memerintah. Transisi politik lebih dapat dikelola oleh Golkar yang merupakan kekuatan politik terbesar dalam lembaga eksekutif dan legislatif. Bahkan Golkar dan orang-orang Golkar masih mendominasi posisi-posisi kunci di pemerintahan maupun legislatif.

Perubahan ini menguntungkan bagi Golkar, sebab transisi demokrasi tidak mengganti struktur secara keseluruhan.[86] Dr. Syahrir menyatakan, Habibie penuh dengan ambivalensi dan kompromi. Habibie merupakan produk Orde Baru dan menjadi presiden berkat reformasi. Kabinetnya pun ambivalen, empat menteri koordinator (menko) berasal dari Kabinet Pembangunan VII.[87]

Golkar terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu yang berhubungan langsung dengan Soeharto dan yang tidak berhubungan langsung. Di kubu yang terlibat langsung ada mantan Wakil Presiden dan Ketua Umum Golkar Sudharmono. Di kubu seberangnya ada Harmoko-Gafur yang didukung Habibie. Mereka yang mencalonkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Akbar Tandjung menjadi Ketua Umum Golkar.[88]

Akbar Tandjung terpilih sebagai Ketua Umum Golkar setelah gesekan dalam Golkar kian tak terbendung lagi. Karena dinilai paling bertanggung jawab atas lengsernya Soeharto, Ketua Umum Golkar saat itu, Harmoko, dituntut turun. Dalam sebuah rapat pimpinan tercapai kesepakatan untuk mengadakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) pada Juli 1998. Dinamakan luar biasa karena mestinya periode kepengurusan Harmoko berakhir dalam munas yang rencananya digelar Oktober 1998.[89]

---

86 Akbar Tandjung, *The Golkar Way* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 72.

87 *Ibid*., hlm. 196.

88 Ishak Rafick, *Op.cit*., hlm. 297.

89 Muhammad Husnil, "*Golkar Sepeninggal Daripada Soeharto*", Historia.id, diakses dari https://historia.id/politik/articles/golkar-sepeninggal-daripada-soeharto-DbNWQ, pada 3 Juni 2019, Pukul 11.35 WIB.

Abdul Gafur, salah seorang Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar, menyatakan bahwa munaslub merupakan hasil desakan dari pengurus Dewan Pimpinan Daerah. Urgensinya munaslub itu untuk reformasi. Selain mengganti ketua umum, hal yang terpenting adalah untuk mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) supaya Golkar mempersiapkan diri menjadi partai politik.[90]

Dalam munaslub ini, Akbar Tanjung terpilih menjadi ketua umum, mengalahkan pensiunan Jenderal Edi Sudrajat. Munaslub juga memutuskan Golkar menjadi Partai Golkar, yang resmi dideklarasikan pada 7 Maret 1999. Terpilihnya Akbar sebagai Ketua Umum Partai Golkar karena banyak pengurus Golkar di daerah yang merupakan eks kader Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI).[91] Jadi, dapat dikatakan kemenangan Akbar di Golkar juga merupakan kemenangan HMI.

Jejaring koalisi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)-Birokrasi-Golkar—atau ABG—akan dipertahankan oleh Habibie sebagai basis kekuasaannya. Ini terbukti dengan Akbar Tandjung menjadi pimpinan Golkar yang baru didukung sepenuhnya oleh ABRI. Ini juga merupakan upaya untuk mempertahankan kursi ABRI di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memenangkan Golkar di pemilihan umum (pemilu) 1999.[92] Konsep dwifungsi ABRI sebenarnya memarjinalkan konsep tentara profesional dan juga mengabaikan pentingnya perbedaan dan spesialisasi struktur yang menurut Weber merupakan keniscayaan pada masa modernitas.

Golkar sadar akan desakan penghapusan dwifungsi ABRI terus menjadi topik utama di masyarakat. Hal tersebut juga yang menjadikan tekanan bagi Golkar, terutama dari kalangan prodemokrasi yang ingin meniadakan wakil militer di parlemen. Namun, peran perwira militer masih sangat kuat,

---

90 "*Golkar Jadi Partai*", Majalah Gatra, 15 Juni 1998.
91 Wawancara dengan Y di Jakarta, 16 Mei 2019.
92 Syamsuddin Haris, *Reformasi Setengah Hati* (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 73.

hingga Habibie berada dalam posisi dilematis. Alhasil, Golkar meminta jumlah militer di parlemen dikurangi secara gradual.[93]

Namun, Akbar bersikukuh bahwa Golkar sudah memutus hubungan dengan jalur pendukung Golkar. Pada masa Orde Baru, Golkar didukung oleh tiga jalur politik, masing-masing jalur ABRI, Birokrasi, dan Golkar. Jalur ABRI sangat erat dengan Golkar, terutama Angkatan Darat sejak awal pendirian Golkar. Posisi militer di Golkar juga sangat istimewa.[94]

Akbar mengatakan, tak ada hak kelompok-kelompok lain yang meminta pembubaran Golkar. Sebab, Golkar tidak pernah melakukan suatu tindakan-tindakan yang menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Kalau ada yang menghendaki Golkar untuk dibubarkan, maka itu hanya bisa dilakukan melalui mekanisme pemilu.[95]

Jalur birokrasi, melalui sistem monoloyalitas, tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 12 tahun 1969 tentang larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk ikut aktif dalam partai politik. Aspirasi PNS harus disalurkan kepada Golkar.

Akbar berpendapat, meski Soeharto berhasil menyerahkan jabatan presiden kepada B.J. Habibie, Habibie gagal mewarisi struktur politik Orde Baru secara utuh. Struktur politik Orde Baru memosisikan Golkar pada posisi dominan, kemudian runtuh bersama jatuhnya kekuasaan Soeharto. Golkar seakan kehilangan arah dan tujuan politiknya setelah Soeharto mengundurkan diri.

Golkar pada masa transisi kekuasaan tanpa harapan, pun banyak yang meyakini tak akan lagi eksis. Amien Rais dan A.S. Hikam menyatakan hal serupa di media massa. Amien menyatakan Golkar telah kehilangan panggung dan pamornya, serta tak bisa mengharapkan pada pengurusnya, seperti

---

93 Akbar Tandjung, *Op.cit.*, hlm. 137—138.
94 *Ibid.*, hlm. 102.
95 *Wawancara dengan Akbar Tandjung di Jakarta, 24 Januari 2019.*

Harmoko, Hartono, dan Tutut.

Sementara A.S. Hikam menyatakan apabila pemilu dilaksanakan dengan demokratis dan *fair*, Golkar pasti akan kalah dan bubar tak lama berselang. Golkar akan pecah dan hancur dengan sendirinya. Kalau tidak, akan digulung rakyat dan zamannya.[96] Selain itu, tuntutan sama juga berasal dari gerakan mahasiswa garis keras di Jakarta, antara lain dimotori oleh: Forum Kota (Forkot), Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred), Partai Rakyat Demokratik (PRD), dan Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ).[97] Mereka menginginkan adanya sebuah Komite Rakyat Indonesia yang bebas dari unsur-unsur rezim Soeharto.[98]

Tak hanya itu, banyak yang beranggapan dukungan Golkar terhadap reformasi hanya kepura-puraan, karena Golkar merupakan bagian dari rezim sebelumnya. Oleh sebab itu, banyak yang mendesak agar Golkar dilarang ikut pemilu 1999. Bahkan Akbar mengakui, Partai Golkar yang telah berubah dari Golkar pun tetap dianggap produk Orde Baru. Partai Golkar dianggap sebagai musuh reformasi yang harus dibekukan atau dibubarkan.[99]

Akan tetapi, Golkar meyakini telah membuat paradigma baru dengan mengemban nilai-nilai baru selaras dengan tuntutan reformasi, dan menjadikan dirinya sebagai partai politik yang terbuka, mandiri, demokratis, moderat, solid, mengakar, dan responsif terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara dengan melaksanakan fungsi-fungsi partai politik secara konsisten.[100]

Akbar berpendapat reformasi semestinya menjadi sebuah momentum untuk rekonsiliasi antara kekuatan lama dan baru.

---

96 Akbar Tandjung, *Op.cit.*, hlm. 9—10.
97 *Ibid.*, hlm. 86—8.
98 Kholid Novianto, M Afan Alfian, dan Riyono Asnan, *Akbar Tandjung dan Partai Golkar Era Reformasi* (Bekasi: Sejati Press, 2004), hlm. 68—69.
99 Akbar Tandjung, *Op.cit.*, hlm. 11.
100 *Ibid.*, hlm. 98.

Menurutnya, rekonsiliasi nasional tak boleh terlalu berorientasi ke masa lalu. Rekonsiliasi nasional harus juga mencakup usaha-usaha untuk menyiapkan masa depan yang memungkinkan bangsa Indonesia dapat menghindari terulangnya kekeliruan-kekeliruan di masa lalu. Mengatasi kekeliruan itu perlu diadakan proses–sosial, hukum, politik, dan budaya—yang memungkinkan korban kesalahan masa lalu menyuarakan perasaannya, tetapi kesemuanya dalam rangka rekonsiliasi.[101]

Penataan kehidupan mesti dilakukan secara menyeluruh untuk rekonsiliasi. Di bidang politik, menjamin tegaknya demokrasi dan persamaan hak warga negara. Hubungan pusat dan daerah juga perlu dikaji untuk mengatasi ketimpangan yang menimbulkan gejolak sosial politik.

Di bidang ekonomi, perlu ditata ekonomi yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi daerah dan ekonomi rakyat agar dapat terwujud pemerataan dan keadilan. Di bidang hukum, sistem hukum nasional harus benar-benar menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan persamaan derajat setiap warga negara di depan hukum. Di bidang pertahanan dan keamanan, membantu TNI dan Polri agar lebih profesional sehingga dapat menjaga integritas dan integrasi nasional.[102]

Pada masa pemerintahan Habibie, polarisasi konflik terpecah ke dalam tiga arus baru. Pertama, kelompok sisa-sisa kekuatan Orde Baru yang terdiri dari militer, Golkar, dan para kroni Soeharto. Habibie masuk dalam kelompok ini. Kedua, kelompok oposisi moderat yang berpusat pada Gus Dur, Amien Rais, dan Megawati.

Ketiga, oposisi radikal yang cenderung menghendaki suatu reformasi total dengan pergantian rezim Habibie oleh suatu presidium dan pembubaran DPR/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan suatu "Komite Rakyat". Aktor kelompok ini adalah para aktivis mahasiswa yang memobilisasi aksi

---

101 Akbar Tandjung, *Moratorium Politik Menuju Rekonsiliasi Nasional* (Jakarta: Golkar Press, 2003), hlm. 35—36.
102 *Ibid.*, hlm. 37—38.

demonstrasi menentang pemerintahan Habibie. Mereka menolak paket perubahan atas tiga undang-undang bidang politik, dan tidak mengakui Sidang Istimewa (SI) MPR 1998.[103]

Menghadapi pemilu 1999, Partai Golkar yakin masih memiliki modal besar warisan Orde Baru yakni Sumber Daya Manusia (SDM) Golkar yang tersebar di berbagai bidang. Golkar telah berpengalaman menyertai perjalanan bangsa, dan juga merupakan kekuatan politik terbuka, serta paling mencerminkan keindonesiaaan.

Infrastruktur dan jaringan itu masih terpelihara, meskipun terjadi reformasi. Selain itu, kader-kader Golkar juga tersebar di berbagai tempat, terutama di birokrasi. Jaringan birokrasi ini sangat membantu saat partai Golkar mendapat tekanan pada awal reformasi. Hubungan formal dan personal mampu dibangun dengan baik oleh elite Partai Golkar dengan jajaran strategis birokrasi.[104]

Justru, kata Akbar, tantangan yang sangat krusial bagi Golkar saat itu adalah adanya tokoh-tokoh Golkar yang mendirikan partai-partai baru. Salah satunya Edi Sudrajat yang mendirikan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). Menurut Edi, Golkar yang dimpinpin Akbar kurang aspiratif dan kurang reformis. Golkar dinilai tak konsisten dalam mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 karena bersedia mencabut Ketetapan (Tap) No. IV/MPR/ 1983 tentang referendum yang berfungsi mengamankan dasar negara tersebut.[105]

Sebenarnya, dinamika atau perpecahan Golkar sudah terjadi sebelum Soeharto lengser. Akbar mencatat, ada rapat di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar pada 18 Mei 1998 yang menghadirkan perdebatan tajam. Harmoko sebagai Ketua DPR dan Pimpinan Golkar meminta Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Hal ini dikonfrontasi oleh loyalis Soeharto, kecuali Siti Hardijanti Indra Rukmana—dijuluki Tutut

103 *Ibid.*, hlm. 37—38.
104 Syamsuddin Haris, *Op.cit.*, 2007, hlm. 4—5.
105 *Ibid.*, hlm. 108.

(Ketua DPP Golkar) dan Bambang Trihatmodjo (Bendahara DPP Golkar).

Sebagian menganggap Harmoko sebagai pahlawan, sebagian lainnya menganggap langkah Harmoko sebagai pengkhianat. Menurut Harmoko, pemintaan mundur kepada Soeharto berdasarkan aspirasi masyarakat yang berkembang yang menuntut agar segera dilakukan reformasi. Konflik internal di tubuh Golkar yang selama Soeharto berkuasa tak pernah nampak, kini meletup ke permukaan.[106]

Harmoko membantah memiliki konflik dengan Tutut dan Bambang. Menurutnya, tak ada permasalahan di antara mereka. Kendati demikian, sebagian besar orang mengakui bahwa anak-anak Soeharto telah mulai memainkan peran politik di dalam Golkar. Itu fakta yang tak bisa dipungkiri. Tutut disebut diproyeksikan untuk menggantikan Harmoko sebagai Ketua Umum Golkar dan akan dicalonkan menjadi presiden.

Cara-cara nepotisme Soeharto di dalam Golkar banyak menimbulkan kekecewaan di sebagian internal Golkar. Anak-anak Soeharto yang telah berhasil menguasai ekonomi, mulai masuk ke ranah politik dan menghadirkan pergunjingan. "Banyak orang yang susah payah dari bawah, jungkir balik untuk mencapai struktur kepengurusan. Ternyata ada yang dalam pusat kekuasaan tiba-tiba saja menjadi bendahara dan ketua," ucap Slamet Effendi Yusuf, pengurus DPP Golkar.[107]

Namun, pergolakan internal Golkar dapat ditafsirkan sebagai bangkitnya kembali Orde Baru. Pertama, pergolakan yang terjadi di internal Golkar merupakan konsekuensi logis tuntutan reformasi. Sebab, Golkar bergantung pada penguasa, bukan rakyat sebagai basis atau konstituennya. Kedua, kejatuhan Soeharto mestinya menandai berakhirnya era Golkar.

Akan tetapi, mundurnya Soeharto juga disebabkan oleh Harmoko, Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar saat itu, yang

106 *Ibid.*, hlm. 77.
107 *Ibid.*, hlm. 80.

menarik dukungan kepada Soeharto. Ketiga, banyak tokoh Golkar saat ini sangat fasih membicarakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini menandakan adanya upaya "saling membersihkan" antara pendukung setia Soeharto dan kaum reformis Golkar.

Masalahnya, apabila kekuatan Soeharto muncul kembali dan mendominasi politik dengan "baju reformasi", maka agenda reformasi sesungguhnya akan kembali ke titik nol. Ini tentu kontraproduktif bagi upaya pemulihan ekonomi dan politik.[108]

Gejala ini pun disadari oleh Gus Dur. Terlepas dari fungsinya sebagai wahana pemutihan politik, reformasi juga mengarah pada timbulnya ajang balas dendam sosial. Kekuatan-kekuatan yang pada era Soeharto merasa mendapatkan tekanan dan perlakuan yang tak adil. Mereka seolah mendapat penyaluran untuk melakukan balas dendam ketika arus reformasi terjadi. Gejala ini, menurut Gus Dur, tidak sehat bagi reformasi. Jika ini diteruskan, maka bangsa Indonesia tidak akan pernah mengalami kemajuan demokrasi, sebab yang terjadi justru saling membalas setiap ada kesempatan.[109]

Sepanjang bulan Juni, setelah Soeharto turun, Gus Dur masih saja tak yakin mengenai arah jalan yang harus dijalaninya. Gus Dur sangat khawatir bahwa dalam kekosongan situasi setelah jatuhnya rezim Soeharto, Golkar memiliki posisi baik untuk melakukan konsolidasi dan melaksanakan pemilu secara profesional. Golkar merupakan bagian dari Soeharto dan pemerintahan Orde Baru yang memiliki aset dan jaringan yang sangat luas. Golkar memang tak diharapkan menang, tetapi kalau mereka bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan partai Islam lainnya, maka akan dapat membentuk sebuah pemerintahan.

Golkar melaksanakan kongres di bulan Juli dan terjadi pertarungan dua kubu antara Habibie dan Try Soetrisno. Kubu

---

108 Syamsuddin Haris, *Op.cit.*, hlm. 146—147.

109 Al Zastrouw Ng., *Gus Dur, Siapa sih Sampeyan?* (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 211.

Habibie akhirnya menang, dan calon mereka, Akbar Tandjung, menjadi ketua umum. Ini kesan bahwa Golkar suatu kekuatan politik yang harus diperhitungkan. Naiknya Akbar mempertegas bahwa Golkar sudah melakukan reformasi di dalamnya.[110]

Gus Dur menilai Soeharto yang sudah tua dan mengidap penyakit, mungkin untuk segera bertobat dan dengan serta merta menyerahkan sebagian besar kekayaannya. "Jika kita bisa membujuk Soeharto untuk secara sukarela menyerahkan kekayaannya, atau paling tidak sebagian besar dari kekayaannya itu, kita sedikitnya bisa memperoleh kembali. Bagaimanapun, Soeharto masih terlalu berbahaya untuk dilawan dengan atau tanpa memperhatikan akibat serius yang akan ditimbulkannya.[111]

Gus Dur sangat kritis terhadap Soeharto secara pribadi, terutama mengenai caranya yang menggunakan agama dan kelompok untuk memperkuat rezim. Menurut Gus Dur, banyak masalah yang dihadapi oleh Indonesia merupakan warisan Soeharto dari usahanya yang mengadu domba elemen-elemen masyarakat untuk melanggengkan kekuasaannya.

Akan tetapi, Gus Dur enggan menjadikan penuntutan terhadap Soeharto sebagai prioritas utama. "Soeharto masih terlalu kuat," katanya. Setidaknya, banyak orang yang bertindak atas nama Soeharto atau mengira mereka mengabdi kepada Soeharto tak akan segan bertindak keras jika mereka anggap tuntutan terhadap Soeharto berlangsung terlalu cepat.

Gus Dur khawatir tuntutan keras mahasiswa untuk segera mengadili Soeharto akan menjadi alasan bagi elemen-elemen reaksioner di kalangan militer untuk bergerak. "Kalangan militer telah mengalami demoralisasi dan tidak akan bertindak macam-macam," katanya, "tetapi pada waktunya mereka bisa menjadi makin berbahaya. Oleh karena itu, tidak perlu menekan mereka terlalu keras dan terlalu cepat."[112]

---

110 Greg Barton, Biografi Gus Dur: *The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid* (Yogyakarta: LkiS, 2002), hlm. 329.

111 Ibid., hlm. 338.

112 Ibid., hlm. 326—327.

Bintoro Tjokroamidjojo berpendapat bahwa adanya *majority party* (Golkar) tetap baik untuk menjamin stabilitas dan kesinambungan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Namun, jika sampai ada aspirasi politik yang sampai jebol representasinya, rasanya tidak baik bagi demokrasi itu sendiri.[113]

Dengan demikian, kondisi masyarakat Indonesia hingga awal 1998 tidak memiliki syarat-syarat terjadinya revolusi. Memang krisis ekonomi langsung diikuti krisis politik yang mampu menjadi prasyarat revolusi. Akan tetapi, prasyarat objektif itu tidak cukup. Sebab, tidak ada pemimpin yang kharismatik dan berpengaruh dalam memimpi gerakan.

Kedua, Indonesia hingga awal 1998 tidak mengenal adanya partai atau kelompok yang secara signifikan melakukan penentangan terhadap pemerintah. Tidak ada ideologi yang menggerakan rakyat. Orde Baru saat itu hanya mengenalkan ideologi tunggal yang ditafsirkan oleh mereka sendiri. Akibatnya, tidak ada ruang diskursus ideologi-ideologi tandingan.[114]

Sebenarnya, dalam politik, terutama dalam masa transisi, merupakan hal biasa atau wajar jika rezim yang disingkirkan berusaha kembali untuk berkuasa. Begitu juga dengan kelompok Orde Baru, mereka merasa penyelamat negara pada 1965 dan disingkirkan pada 1998, jelas ada rasa ingin kembali.[115]

113 Ambia B. Boestam, dkk (ed), *Kahmi, Reformasi, dan Civil Society* (Jakarta: Majelis Nasional KAHMI, 2000), hlm. 94.
114 Hermawan Sulistiyo, *Op.cit.*, hlm. 5—7.
115 Wawancara dengan Fuad Bawazier di Jakarta, 25 Januari 2019.

BAB 3

PEMILIHAN UMUM 1999

Ada dua persoalan krusial bila kita berharap pada pemilihan umum (pemilu) 1999 sebagai agenda reformasi untuk keluar dari krisis. *Pertama*, kebutuhan lahirnya undang-undang (UU) bidang politik yang memberikan jaminan bagi berlangsungnya pemilu yang demokratis dan partisipasi luas bagi semua pihak. *Kedua*, pelaksanaan pemilu maksimal Juni 1999 seperti yang dijadwalkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).[116]

Masalah menjelang pemilu 1999 di antaranya, yang *pertama*, rawannya kohesi sosial di antara komponen bangsa yang majemuk, bahkan paling majemuk di dunia. *Kedua*, belum kuatnya budaya demokrasi pada sebagian masyarakat. *Ketiga*, rawan provokasi oleh siapapun dan pihak manapun yang tak menginginkan berlangsungnya pemilu akibat krisis ekonomi. Keempat, masih belum tercapainya kesepakatan bagaimana bentuk kampanye pemilu 1999.[117]

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mencatat beberapa poin kritis dalam penyelenggaraan pemilu 1999. Pemilu di masa transisi memiliki beberapa keunggulan. *Pertama*, memberikan kepastian terhadap alih kepemimpinan dan kekuasaan (*transfer of leader and power*) secara konstitusional

116 Syamsuddin Haris, Reformasi Setengah Hati (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 162.
117 Akbar Tandjung, *Moratorium Politik Menuju Rekonsiliasi Nasional* (Jakarta: Golkar Press, 2003), hlm. 180—181.

untuk melahirkan kepemimpinan yang legitimatif.

Dengan demikian, sah atau tidaknya kepemimpinan Habibie dapat dijawab dan diselesaikan melalui pemilu 1999. *Kedua*, pemilu adalah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat (*sovereignty*) secara mendasar di negara demokrasi. Dengan demikian, keterlibatan rakyat dalam pemilu adalah wujud dari partisipasi rakyat.

Ketiga, pemilu dimaksudkan sebagai wahana formal untuk membentuk tatanan negara dan masyarakat (*state and sosial formation*) menuju tatanan yang lebih baik. *Keempat*, pemilu dapat menjadi filter kepercayaan rakyat terhadap partai politik yang menjadi pilihan rakyat. Dengan kata lain, pemilu yang menjadi wahana perekrutan terakhir untuk menyeleksi secara alamiah dalam proses keterwakilan di pemerintahan.[118]

Kendati begitu, KIPP juga mengakui masih kuatnya unsur Orde Baru dalam pemerintahan Habibie juga ditandai dengan makin menguatnya tuntutan agar reformasi sesegera mungkin secara signifikan dan memadai bagi demokrasi. Caranya adalah dengan menegasi segala aspek kehidupan yang dikembangkan oleh rezim otoriter Orde Baru.

Ada dua pandangan atau sikap politik berkenaan hal tersebut. *Pertama*, harus ada pemerintahan sementara (transisi) sipil demokratis. Ini juga ditujukan untuk meletakkan landasan bagi terbentuknya permanen sipil demokratis serta sistem yang demokratis untuk menjamin terselenggaranya keadilan sosial.

Kedua, memilih cara pencapaiannya melalui pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Mereka memercayai bahwa pergantian rezim dan untuk menyelesaikan krisis. Pemilu adalah cara yang demokratis dan konstitusional.[119]

Sedangkan, bagi kalangan mahasiswa, penyelenggaraan pemilu 1999 sejak awal memang ditanggapi dengan skeptis.

---

118 Juri Ardiantoro F (ed), *Transisi Demokrasi: Evaluasi Krisis Penyelenggaran Pemilu 1999* (Jakarta: Komite Independen Pemantau Pemilu, 1999), hlm. 33—35.
119 Ibid., hlm. 55.

Alasannya tak lain karena pemilu diagendakan, dipersiapkan, dan diselenggarakan oleh kekuasaan rezim Orde Baru. Logikanya adalah tidak mungkin sebuah kekuasaan mau menyiapkan sebuah sistem yang akan menghancurkan dirinya sendiri.[120]

Kendati demikian, harus diakui bahwa liberalisasi politik atau pemulihan beberapa hak individu dan hak sosial yang dilakukan Habibie mempunyai makna yang cukup penting. Sebab, liberalisasi adalah jalan menuju proses redemokratisasi yang berikutnya.

Sayangnya, liberalisasi tak selalu berjalan linier ke arah demokratisasi. Sebab, liberalisasi dapat dengan mudah dibatalkan oleh penguasa jika ternyata langkah tersebut membahayakan posisinya. Atau, liberalisasi diterapkan dengan disertai berbagai pembatasan-pembatasan model lama yang pada akhirnya melahirkan kondisi otoriterisme yang diliberalkan. Ini merupakan sebuah konsekuensi logis jika perubahan dilakukan oleh kekuasaan yang masih banyak didominasi oleh rezim lama.

Gellermo O'Donnel dan Philippe Schmitter dalam Transition from Authoritarian Rule menyatakan, langkah liberalisasi sering diambil oleh penguasa rezim transisi bukan dimaksudkan untuk merintis jalan redemokratisasi, melainkan lebih dimaksudkan untuk mengurangi berbagai tekanan dan memperoleh berbagai informasi dan dukungan yang diinginkan, dengan tanpa mengubah struktur pemerintahan dan tanpa harus mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa lalu.[121]

120 *Ibid.*, hlm. 98.
121 *Ibid.*, hlm. 100—101.

Upaya Pembentukan Koalisi

Secara pengalaman politik, Amien Rais sangat dekat dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bahkan, ia sudah menandatangani surat formal untuk menjadi Ketua Umum PPP. Namun, Amien menyadari bahwa ia memiliki potensi dan peran lebih besar sebagai seorang reformis yang mewakili seluruh elemen masyarakat.

Amien dibujuk Syafi'i Anwar untuk bergabung dengan partai baru, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN). PAN dibentuk oleh sebagian besar tokoh-tokoh Muhammadiyah dan reformis dengan visi membangun sebuah partai inklusif nonsektarianisme. PAN juga mengutamakan pembangunan negara sekular modern—yang menjadi tempat bagi semua orang, kelompok suku, bangsa, dan agama. Masalahnya, PAN tak punya akar sejarah yang kuat.[122]

PAN tak hanya inklusif dari beberapa latar belakang agama. Mereka juga menerima mantan pejabat birokrasi Orde Baru sebagai anggotanya. Salah satu mantan birokrat yang bergabung dengan partai politik setelah reformasi adalah Fuad Bawazier. Ia memilih PAN karena memiliki latar belakang yang sama dengan Amien Rais, yakni mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) dan juga berasal dari Yogyakarta.[123] Menurut sebuah sumber yang tak ingin disebut namanya, menyatakan bahwa Fuad merupakan penyumbang dana terbesar bagi PAN selama pemilu 1999. Bahkan, pada perjalanannya, Fuad dapat memengaruhi sikap dan tindakan Amien Rais terhadap Gus Dur.[124]

Di sisi lain, sepanjang paruh kedua 1998, Gus Dur menolak untuk menyetujui diformalkannya koalisi dengan Amien dan Megawati. Akan tetapi, hubungan Gus Dur dan Amien terus membaik karena adanya bantuan dari Syafi'i Anwar yang menjadi jembatan bagi keduanya.

---

122 Greg Barton, Biografi Gus Dur: *The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid* (Yogyakarta: LkiS, 2002), hlm. 331.
123 Wawancara dengan Fuad Bawazier, 25 Januari 2019.
124 Wawancara dengan X, 20 Februari 2019.

Menjelang Agustus, keduanya semakin mengindikasikan bahwa koalisi akan terbentuk. Musababnya, Amien sebagai Ketua Umum PAN telah mulai berbicara mengenai dukungannya pada nasionalisme sekular, demokrasi, dan reformasi. Amien juga menyatakan telah membuang jauh pernyataan-pernyataan anti-Cina dan anti-Kristen, seperti yang pernah ia ucapkan. Bahkan, Amien juga menyatakan bahwa dirinya memang bersalah karena telah mendorong maju pemahaman Islam yang sempit seperti itu.[125]

Meski Gus Dur tak bermaksud memperlemah kedudukan Megawati, tapi tak dapat disangkal bahwa komentarnya di depan umum mengenai Megawati sering menyinggung harga diri Megawati. Misalnya, Gus Dur menggunakan ungkapan yang kurang lebih berarti bahwa Megawati itu "jujur tapi bodoh". Padahal secara pribadi, Gus Dur sering berbicara mengenai Megawati dengan kasih sayang dan rasa hormat. Jadi, sulit menjelaskan sikap Gus Dur yang terkesan sombong dan gegabah mengenai Megawati di depan umum.[126]

Hubungan Gus Dur dan Amien terlihat sangat baik dan keduanya berbicara dengan semangat mengenai kemungkinan untuk mengadakan front bersama, tentu bersama dengan Megawati dan partainya, untuk menghadapi Golongan Karya (Golkar). Namun, 17 Mei 1999 merupakan titik balik kampanye. Hubungan Gus Dur dan Amien memang semakin membaik, namun hubungan Gus Dur dan Megawati semakin buruk. Selain itu, Megawati juga percaya dengan Amien Rais.[127]

Komitmen Amien Rais terhadap demokrasi mendapatkan penegasan di era pasca-Soeharto, ketika ia memutuskan untuk mendirikan partai politik non-Islam, PAN pada 1998. *Platform* partai ini terbuka secara keagamaan, meskipun diyakini bahwa anggota Muhammadiyah menjadi konstituen utama partai ini.

---

125 Greg Barton, *Op.cit.*, hlm. 332—333.
126 *Ibid.*, hlm. 344.
127 *Ibid.*, hlm. 353.

Sebagai Ketua MPR, lembaga politik tertinggi menurut konstitusi Indonesia sebelum diamandemen, Amien Rais berhasil memimpin proses amandemen Undang-Undang Dasar (UUD). UUD yang sudah diamandemen merupakan dokumen modern bagi politik Indonesia.[128]

PDIP Menangkan Pemilu

Selanjutnya, Juni 1999 pemilu dilaksanakan dengan sedikit penyimpangan. Ada 462 kursi yang diperebutkan. Selain itu, ada jatah 38 kursi untuk militer, sehingga total menjadi 500 kursi DPR. Lima ratus kursi di DPR akan digabungkan dengan 65 utusan golongan (akan dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)) dan 135 utusan daerah (dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)), sehingga total anggota MPR sebanyak 700 orang.[129]

Partai	Suara Masuk	Persentase Suara	Jumlah Kursi di DPR	Persentase kursi di DPR
PDIP	66.066.145	33,7	153	33,0
Golkar	43.913.402	22,4	120	26,0
PKB	24.701.288	12,6	51	12,6
PPP	20.976.491	10,7	58	11,0
PAN	13.918.980	7,1	34	7,4
Lainnya	26.269.624	13,4	46	10,0
Total	195.845.930	99,9	462	100,0

128 Syamsuddin Haris, *Op.cit.*, hlm. 71.
129 M.C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: Serambi, 2007), hlm. 668.

Meski menempati urutan kedua pada pemilu 1999, Golkar sebenarnya mengalami kekalahan besar. Pada pemilu 1997, Golkar meraih 76% kursi di DPR menjadi sekitar 26% kursi di pemilu 1999. Hasil terbaik Golkar adalah di luar Jawa-Bali dan di kawasan pedesaan tempat jaringan patronase era Orde Baru masih tetap kukuh bertahan.[130]

Bagi Golkar, dengan konstelasi hasil pemilu yang sangat tipis, maka koalisi menjadi sebuah keniscayaan. Setiap calon presiden diuji tingkat akseptabilitasnya masing-masing di depan partai-partai yang lain, ditambah utusan daerah dan utusan golongan yang berhasil menempatkan wakilnya di MPR. Semakin tinggi akseptabilitasnya, semakin kecil resistensinya.[131]

Di sisi lain, PDIP muncul sebagai pemenang. Tak bisa dielakkan bahwa PDIP memang agak jemawa dengan hasil tersebut. Megawati sangat gembira dengan hasil yang diperoleh partainya dan menganggap sebagai suatu hal yang pasti bahwa kemenangannya ini akan mengantar dirinya ke kursi presiden.

Kendati demikian, beberapa anggota PDIP menyarankan agar Megawati segera berkomunikasi dengan partai atau pihak lain, terutama Gus Dur. Alasan dibutuhkannya komunikasi dengan Gus Dur karena PDIP tidak menang lebih dari 50% dan untuk melancarkan jalannya transisi demokrasi, mau tak mau tetap membutuhkan Gus Dur karena rekam jejaknya memperjuangkan demokrasi.[132] Selain itu, komunikasi dengan Gus Dur dianggap perlu untuk menjaga kondisi kondusif di parlemen karena PKB berada di peringkat ketiga pemilu 1999 dengan 51 kursi.

Namun, Megawati tak pernah mengeluarkan pernyataan akibat perseteruan tak langsungnya dengan Gus Dur dan Amien Rais. Bahkan, Amien Rais menyatakan, "Jika Megawati terus diam, maka masyarakat tidak akan pernah tahu jalan

---

130 Chris Manning dan Peter van Diermen (ed), *Indonesia di Tengah Transisi* (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 24.

131 Ambia B. Boestam, dkk (ed), *Kahmi, Reformasi, dan Civil Society* (Jakarta: Majelis Nasional KAHMI, 2000), hlm. 175.

132 Wawancara dengan Noviantika Nasution di Jakarta, 1 Maret 2019.

pikiran serta visinya. Kita menunggu Mbak Mega bicara. Kita tak bisa menunggu orang yang diam terus. Kita harus bergerak karena proses politik itu dinamis dan selalu berubah. Kita berusaha agar perubahan itu mengarah kepada keinginan menangnya reformasi.[133] Pernyataan Amien ditanggapi oleh Laksamana Sukardi. Laksamana Sukardi mengatakan, "Selama hasil penghitungan suara belum disahkan, maka ia belum mau bicara."[134]

Meski demikian, Megawati dan Gus Dur sempat membicarakan koalisi. Pada saat itu, Gus Dur dengan cepat menyatakan berapa jumlah menteri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang masuk jika melakukan koalisi dengan PDIP. Saat itu, Megawati dan PDIP cukup terkejut. Sebab, kata Megawati, menentukan menteri merupakan hak prerogratif presiden.[135]

Megawati berkomentar bahwa PKB paling-paling bisa berharap mendapatkan "satu posisi menteri—tak lebih dari itu" dalam pemerintahannya. Banyak anggota PKB kecewa dengan pernyataan itu. Sebelumnya, mereka berharap bisa memperoleh setidaknya dua atau tiga menteri.

Noviantika ingat bahwa ayahnya Yahya Nasution Anggota Majelis Partai (MPP) PDIP menceritakan kepadanya pertemuan antara Megawati dan Gus Dur. Yahya Nasution menyebutkan bahwa Gus Dur meminta kepada Megawati sedikitnya PKB mendapat dua menteri, yakni Menteri Agama dan Menteri Luar Negeri atau Menteri Pendidikan.[136]

Poros Tengah

Pada waktu yang sama dengan hasil komunikasi dengan PKB dan Partai Bulan Bintang (PBB), Amien membentuk Poros Tengah. Atas nama Poros Tengah juga, Amien melontarkan ide untuk menjadikan Gus Dur sebagai calon presiden.

---

133 "*Gus Dur Bertemu Habibie: Saling Mencalonkan Merupakan Hal Sehat*", Kompas, 22 Juli 1999.
134 "*PDIP Bahas Caleg yang akan ke Senayan*", Kompas, 20 Juli 1999.
135 Wawancara dengan Noviantika Nasution di Jakarta, 1 Maret 2019.
136 Wawancara dengan Noviantika Nasution di Jakarta, 1 Maret 2019.

Pencalonan ini dikatakan merupakan cara untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara kelompok Megawati dan kelompok Habibie. Ada yang berpendapat bahwa ini merupakan pengkhianatan terhadap Megawati.[137]

Masalahnya, Gus Dur dan PKB sudah setuju untuk ikut mencalonkan Megawati menjadi Presiden RI. Dukungan dari PKB sangat penting untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena dianggap tak memiliki keinginan utuk membuka jalur komunikasi dengan partai lain. Bagi Megawati, PKB adalah satu-satunya partai yang bisa dipercaya. Kala itu, PDIP merupakan pilihan yang paling rasional untuk PKB, sebab PDIP membutuhkan koalisi untuk membendung kekuatan lama seperti Golkar.

Bahkan Matori menyatakan sudah ada lobi-lobi antara PKB dan PDIP untuk mencalonkan dirinya sebagai Ketua MPR. Skenario yang dirancang oleh PDIP dan PKB adalah Ketua MPR dijabat oleh Matori atau Gus Dur, Megawati menjadi presiden, dan Akbar Tandjung menjadi wakil presiden.[138]

Skenario ini kurang meyakinkan. Pasalnya, Akbar sebagai Ketua Umum Golkar dianggap sebagai bagian dari rezim lama dan partai-partai reformis pada awalnya tak mau bekerja sama dengan Golkar. Terlebih ada kesan bahwa PDI saat Orde Baru merupakan partai yang paling ditindas oleh rezim dan Golkar.

Saat hubungan Megawati-Gus Dur tak menunjukan tanda-tanda membaik, Amien makin bersuara lantang dalam mendukung pencalonan Gus Dur sebagai alternatif. "Harus ada tokoh alternatif, bukan hanya kelompok Megawati atau kubu Habibie. Anak-anak bangsa hendaknya jangan dibuat percaya seolah-olah tak ada calon presiden lain di negeri ini," kata Amien.

Gus Dur pun menanggapi, "Hal ini penting bagi saya

137 Greg Barton, *Op.cit.*, hlm. 360—361.

138 Mahrus Ali dan M.F. Nurhuda Y., *Pergulatan Membela yang Benar: Biografi Matori Abdul Djalil* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 212.

karena untuk pertama kalinya partai-partai yang berbasis Islam sepakat memilih orang semacam saya. Artinya penting sekali. Tapi, saya telah membuat pilihan saya. Saya mendukung Megawati walaupun belum lagi final. Sebagai seorang warga negara yang baik dan seorang muslim yang baik, saya selalu menaati keputusan MPR, tak peduli siapa saja yang akan dipilih.[139]

Hal yang membuat Poros Tengah menjadi kuat adalah sifatnya yang terbuka dapat bekerja sama dengan kekuatan lain. Sebaliknya, silaturahmi dan kerja sama itu tidak berlaku bagi PDIP karena, partai yang selalu menyatakan sebagai pemenang pemilu ini, ternyata cukup tinggi hati untuk membuka diri. Golkar cukup rendah hati membuka diri dan medatangi Poros Tengah untuk membagun kekuatan dalam meraih posisi strategis, sebelum pertarungan dimulai.[140]

Priyo Budi Santo yang saat itu menjadi anggota DPR dari Partai Golkar menyaksikan betapa arogannya anggota DPR fraksi PDIP. Sebagai partai pemenang pemilu, mereka merasa di atas angin akan menjadi presiden. Bahkan, saat sidang pertanggungjawaban Habibie, fraksi PDIP tak menghormati kedatangan Habibie.[141]

Selain itu, meski berjumlah sedikit, tapi Poros Tengah memiliki pengalaman dan informasi untuk melakukan lobi. Hal itu diakui oleh Fuad Bawazier, dia mengklaim bahwa dirinya merupakan penghubung Poros Tengah dengan mantan birokrat. Bahkan, pertemuan-pertemuan Poros Tengah dilakukan di rumah Fuad.[142]

Yusril memiliki pandangan berbeda tentang Poros Tengah dengan Amien Rais. Jika Amien Rais menganggap Poros Tengah sebagai kekuatan alternatif yang segar sehingga rakyat tidak terpecah menjadi kubu yang esktrim, maka Yusril mengangap

139 Greg Barton, *Op.cit.*, hlm. 363
140 Yudi Pramuko, *Yuzril Ihza Mahendra: Sang Bintang Cemerlang* (Jakarta: Putera Berdikari Bangsa, 2000), hlm. 73.
141 Wawancara dengan Priyo Budi Santoso di Jakarta, 30 Januari 2019.
142 Wawancara dengan Fuad Bawazier di Jakarta, 25 Januari 2019.

Poros Tengah bukan sebagai kekuatan ketiga. Oleh karena, itu tidak perlu mencalonkan seorang presiden.

"Kalau menurut saya, sebaiknya Poros Tengah itu tidak mengajukan calon. Dengan demikian dia masih Poros Tengah. Kalau sudah punya calon—dia 'kan kelompok ketiga, artinya nanti bukan Poros Tengah lagi," ucap Yusril.

Menyikapi manuver Amien Rais yang "menjual" nama Gus Dur dengan mengatasnamakan Poros Tengah, Yusril menyatakan, "Itu yang mencalonkan Gus Dur 'kan Pak Amien, hahaha. Kita mengiyakan tidak, tapi menindak juga tidak. Kita diam saja, kita lihat saja perkembangannya, karena prosesnya masih berlangsung."[143]

Konteks kerja sama antarpartai bagi proses pencalonan presiden, yang lebih dibutuhkan adalah diskusi mengenai visi-misi program, bukan hanya sebatas pembagian kekuasaan. Hal yang utama bagi Poros Tengah, atau secara spesifik PBB, adalah bagaimana kebijakan terhadap umat Islam nanti akan berjalan.

Embrio kelahiran PBB sesungguhnya dapat dilacak pada masa kekuasaan Orde Baru tengah berjaya sekitar 1989. Pada tahun tersebut, terbit keinginan kuat keluarga besar Bulan Bintang mendirikan partai politik Islam. Namun, mengingat situasi politik tidak mendukung, terutama adanya kebijakan penguasa Orde Baru yang cenderung anti-Islam, keinginan pendirian partai dipendam, sambil menunggu cuaca politik berubah secara drastis.[144]

Hal itu yang terasa berat terwujud di PDIP, belum lagi jumlah anggota DPR yang non Islam sangat banyak. "Misalnya ketika berbicara dengan PDIP kami akan tanya bagaimana kebijakan Islam Anda. Itu bagi kami penting sebagai partai Islam. Kalau pada tahap awal pembicaraan sudah tidak ada titik temunya, 'kan tidak mungkin bicara struktur atau sharing kekuasaan," Yusril mencontohkan.[145]

143 Yudi Pramuko, Yuzril Ihza Mahendra, *Op.cit.*, hlm. 80—81.
144 Yudi Pramuko, Yuzril Ihza Mahendra, *Op.cit.*, hlm. 67.
145 *Ibid.*, hlm 78.

Sementara itu, Megawati baru mau berbicara pascapemilu, 29 Juli 1999. "Pemilu jelas-jelas mengamanatkan kepada kita semua, para pemimpin partai yang berada di barisan proreformasi dan anti-*status quo*, untuk segera mungkin melaksanakan tuntutan dan kehendak rakyat, yang tak lain adalah terjadinya pergantian rezim. Dari pemerintahan sekarang yang bermasalah dan tak mampu keluar dari krisis kepercayaan, untuk digantikan dengan suatu pemerintahan yang bersih, terpercaya, dan dikehendaki rakyat," kata Megawati. Megawati juga menanggapi isu calon legislatif muslim-nonmuslim yang santer diembuskan. Megawati menyatakan wakil rakyat dari PDIP wajib menghormati kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam.[146]

Sebelumnya, pada saat menyusun draf calon anggota parlemen, Megawati mengizinkan rekan-rekan dekatnya di partai untuk menampilkan representasi Kristen yang berlebihan sehingga muncul protes berapi-api dari berbagai partai dan organisasi Islam. Meski UU Pemilu memberikan wewenang kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk menyeleksi ulang calon namanya yang sudah didaftarkan, PDIP tidak memanfaatkan ketentuan ini sama sekali. Ketika para anggota fraksi diambil sumpahnya pada 1 Oktober 1999, 58 dari 153 wakil bukanlah muslim.[147]

Habibie Turun Jabatan

Pada 19 Oktober 1999, Habibie membacakan pidato pertanggungjawabannya sebagai presiden. Namun, pidato itu ditolak oleh mayoritas suara di DPR. Sebenarnya, jumlah suara Golkar dapat membuat Habibie berhasil. Namun, pada penghitungan suara jelas Golkar tak mendukung Habibie. Hal itu yang membuat Habibie mundur dari jabatannya dan juga mundur sebagai calon presiden 1999.

---

146 Mohammad Sobary, dkk (ed), *Gus Dur di Istana Rakyat* (Jakarta: LKBN Antara, 2000), hlm. 17.
147 Chris Manning dan Peter van Diermen (ed), *Op.cit.*, hlm. 57.

Salah satu penyebab laporan pertanggungjawaban menjalankan pemerintahan Habibie ditolak ialah karena Habibie tak sepenuhnya mengikuti kehendak Soeharto. Pada saat itu, Soeharto ingin Habibie tidak mengubah sistem politik dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tetap kuat. Selain itu, tetap membatasi kebebasan pers.[148]

Namun, Habibie lebih mendengarkan aspirasi rakyat, terutama tokoh-tokoh pergerakan. Habibie mengambil langkah-langkah demokratis dengan mencabut izin pers, membebaskan tahanan politik, dan menghapuskan sedikit demi sedikit peranan ABRI di DPR. Untuk menerima atau menolak pertanggungjawaban Habibie, dilakukan votting tertutup. Dengan cara ini, kata Akbar, ia tidak bisa mengorganisasikan dukungan Golkar kepada Habibie. Sebab, ada unsur-unsur yang tidak suka kepada Habibie di Golkar.

Hasilnya, laporan pertanggungjawaban Habibie ditolak dengan selisih jumlah yang sangat tipis 355 menolak dan 322 menerima.

Menjelang Sidang Istimewa (SI) MPR November 1998, ketika B.J. Habibie berusaha mencari mandat untuk melegitimasi kepresidenannya, sejumlah politisi, jenderal dan usahawan menciptakan kelompok paramiliter baru untuk menangkal aksi-aksi demonstrasi mahasiswa yang menentang pencalonan kembali Habibie.

Kelompok Pasukan Pengamanan Masyarakat (PAM) Swakarsa ini antara lain terdiri dari preman-preman Ambon Muslim yang direkrut oleh Ongen Sangaji, anggota Pemuda Pancasila. Dukungan keuangan untuk kelompok ini berasal dari keluarga Soeharto dan seorang pengusaha keturunan Arab, Fadel Muhammad, yang dekat dengan keluarga Soeharto.[149] Sementara dukungan politis untuk kelompok itu berasal dari

148 Wawancara dengan X di Jakarta, 20 Februari 2019.

149 George Junus Aditjondro, *Orang-Orang Jakarta Jakarta di Balik Tragedi* (Maluku: 2001).

Jenderal Wiranto (Menteri Pertahanan), Mayor Jenderal Kivlan Zein (Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD)), Abdul Gafur (Wakil Ketua MPR), dan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya Mayjen Djadja Suparman.

Untuk meningkatkan militansi para milisi yang miskin dan berpendidikan rendah itu, mereka diindoktrinasi bahwa para aktivis mahasiswa adalah "orang-orang komunis" yang didukung oleh jenderal dan pengusaha Kristen. Dengan demikian banyak anggota PAM Swakarsa beranggapan bahwa mereka berjihad melawan "orang kafir". Kenyataan bahwa bentrokan yang paling sengit antara para mahasiswa dan tentara terjadi di kampus Universitas Katolik Atmajaya. Hanya karena kedekatan kampus itu dengan gedung parlemen, memberikan kesan kredibilitas dari propaganda sektarian dan antikomunis.

Sementara itu, massa PDIP dari daerah-daerah pun mulai berdatangan. Di sisi lain, mahasiswa dan kelompok prodemokrasi yang menuntut agar pertanggungjawaban Habibie ditolak pun tumpah ruah di jalan. Bentrokan pun tak terelakkan. Hingga akhirnya, perwakilan dari DPR mengizinkan perwakilan mahasiswa untuk masuk ke dalam ruang SI MPR.[150]

Saat menjelang Sidang Istimewa untuk melaporkan pertanggungjawaban kepemimpinan Habibie, mahasiswa melakukan aksi massa menolak penetapan Rancangan Undang-Undang Penangan Keadaan Bahaya (RUU PKB). Mahasiswa menolak RUU itu sebab substansi RUU itu masih sangat beraroma represif, tidak menghiraukan HAM, simbol keangkuhan rezim penguasa waktu itu atau rezim otoritarian, mengabaikan rasa keadilan rakyat, serta dapat menjadi celah masuk bagi militer untuk kembali berkuasa.

RUU ini berawal dari gejolak politik di masa pemerintahan Soekarno. Pada 14 Maret 1957, Soekarno memberlakukan

---

150 Mahrus Ali dan M. F. Nurhuda Y., *Op.cit.*, hlm. 217.

keadaan darurat perang. Keputusan ini didasarkan pada UU SOB (*De Regeling op de staat van Oorlog en Beled*) Belanda. Kemudian pada 1957, Soekarno bersama Jenderal A. H.Nasution (penguasa militer saat itu), merumuskan UU Keadaan Bahaya.

Pada 1959, UU itu diubah menjadi Perpu No. 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya. Tahun 1961, peraturan pemerintah itu kembali ditetapkan menjadi UU. Hingga Mei 1963, UU ini banyak memberikan kekuasaan kepada pihak militer dan penguasa. Buktinya selama enam tahun pemberlakuan SOB, pada Desember 1959 Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) mengambil alih semua perusahaan milik Belanda yang beroperasi di Indonesia. Setahun kemudian, pengambilalihan tersebut disahkan lewat UU Nasionalisasi. Bahkan, pada masa itu Soekarno berani membubarkan lembaga legislatif dan menggantikannya dengan Front Nasional, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR).

Kondisi SOB berakhir 1 Mei 1963. Akan tetapi, pemerintah menciptakan aturan baru yaitu UU No. 11/ Pnps/1963 tentang Pemberantasan Tindakan Subversi. UU ini bukannya mengurangi UU Keadaan Bahaya, tapi justru semakin menguatkan daya represi penguasa. Lalu UU tentang Pemberantasan Tindakan Subversi ini yang digandrungi Soeharto untuk memberantas siapa saja yang berseberangan dengannya. Kelaliman penguasa terulang kembali.

Soeharto, yang berkuasa selama 32 tahun, menggunakan UU tentang Pemberantasan Tindakan Subversi ini untuk mereka yang berseberangan dengannya. Sebut saja Malari, kasus tanah untuk rakyat, Golput, Santa Cruz, atau 27 Juli yang menjadikan Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai tersangka. Pasal-pasal dalam UU ini sering kali melar untuk dapat menjerat dan melilit siapa saja yang mencoba melawan Soeharto.

Di masa pemerintahan B.J. Habibie, UU Pemberantasan Tindakan Subversi dicabut. Dan dimulailah era pencabutan UU No. 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya yang akan diganti dengan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya. Namun, pada 7 September 1999 pukul 00.00 waktu Dili, karena situasi yang memanas pasca jajak pendapat di Timor Timur, pemerintah memutuskan penggunaan kembali UU No. 23/Prp/1959. Kemudian dengan Keppres No. 112/1999, Habibie mencabut keadaan darurat militer di Timor Timur.[151]

Pada 23 September 1999, demonstrasi RUU PKB tersebut dilakukan selama dua hari dan berjalan normal. Akan tetapi, pada 24 September pukul 20.30 demonstrasi yang berjalan damai berubah menjadi mencekam. Sebab, terdengar suara tembakan diiringi dengan konvoi mobil tentara. Ketika mobil tentara semakin mendekat, tembakan pun semakin intensif. Alhasil, mahasiswa yang berdemo di sekitar Semanggi berlindung masuk ke kampus Atmajaya dan Rumah Sakit Jakarta (RSJ). Saat kekacauan terjadi, salah satu demonstran bernama Yun Hap, mahasiswa Fakultas Teknik UI tewas dan jenazahnya sudah ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Yun Hap tertembak bagian punggung kiri atas.

Akan tetapi, Panglima Komando Daerah Militer Jaya (Pangdam) Djaja Suparman menyatakan bahwa Yun Hap tidak tertembak, tetapi tertabrak konvoi kendaraan tentara yang akan menuju Markas Polda Metro Jaya karena demonstran sempat mengadang. Tak hanya itu, Djaja mengklaim kalau pun ada suara tembakan, tembakan tersebut hanya berisi peluru hampa.[152]

Namun, Tim Pencari Fakta Independen (TPFI) menginvestigasi bahwa Yun Hap tewas tertembak oleh tentara sebelum dapat melarikan diri ke rumah sakit. Keyakinan TPFI

---

151 https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol943/font-size1-colorff0000bperjalanan-ruu-pkbbfontbrfenomena-ruu-paling-berdarah-dalam-sejarah-indonesia diakses pada 15 Juni 2019. Pukul 21.15 WIB.

152 Djaja Suparman, *Jejak Kudeta 1997—2005* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013), hlm. 333.

disebabkan tak ada kendaraan lain yang melintas di Jalan Sudirman, selain kendaraan tentara. Kejadian ini dikenal dengan kasus Semanggi II. Akibat dari Semanggi II ini, demonstrasi semakin gencar untuk mengadili pemimpin militer dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas saat itu.

Selain dengan menggunakan alat-alat kekerasan seperti senjata api, senjata tajam dan pentungan, penyerangan juga dilakukan dengan pernyataan-pernyataan verbal yang mendorong atau membenarkan penyerangan yang dilakukan. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) sekaligus Panglima ABRI saat itu, Jenderal TNI Wiranto. Ia yang mengatakan: "Saya sudah perintahkan jajaran ABRI untuk mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan yang nyata-nyata sudah mengarah kepada hal-hal yang sudah bersifat anarkis". Dari fakta-fakta yang ada, pernyataan-pernyataan serupa juga dikemukan oleh pejabat-pejabat militer dan kepolisian yang bertanggungjawab dalam menangani aksi-aksi mahasiswa ketika itu.[153]

Garis Waktu Demontrasi Penolakan RUU PKB 1999

19 Juli Jenderal Wiranto, Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) pemerintahan Habibie mengajukan RUU PKB dengan nama Rancangan Undang-undang Keamanan dan Keselamatan Negara (RUU KKN).

153 http://lama.elsam.or.id/downloads/813335_Ringkasan_Eksekutif_TSS_Semanggi_Komnasham.pdf diakses pada 15 Juni 2019, pukul 21.40 WIB.

6 September RUU Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diubah judulnya oleh DPR hasil pemilu 1997 menjadi RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB).

17 September Demontrasi mahasiswa anti-RUU PKB di dekat gedung DPR/MPR.

20 September Rakyat miskin kota unjuk rasa tolak RUU PKB.

21 September Demontrasi menolak RUU PKB makin marak. Hari itu ada unjuk rasa anti-RUU PKB di tiga kota, Ujung Pandang, Surabaya, dan Bandung.

22 September Terjadi demonstrasi besar-besaran dan paling marak, dari mahasiswa, masyarakat miskin kota, dan buruh.

23 September RUU PKB disetujui oleh DPR hasil pemilu 1997, setelah sebelumnya diubah namanya dari RUU KKN menjadi RUU PKB (RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya).

24 September Mahasiswa turun ke jalan untuk menentang RUU PKB, sedikitnya tiga mahasiswa dan seorang pekerja meninggal tertembak di Semanggi. Yap Yun Hap, mahasiswa Universitas Indonesia (UI), dan Denny Julian mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, serta seorang karyawan Kusnoadi (27) yang tewas tertembak dalam aksi tersebut.

Pada saat yang sama RUU PKB dibekukan sementara oleh pemerintah. Pernyataan penundaan RUU PKB diutarakan oleh Kepala Pusat Penerangan, Pertahanan, dan Keamanan RI, Mayjend (TNI) Sudrajat.

27 September DPR hasil Pemilu 1997 menyerahkan RUU PKB kepada DPR baru hasil Pemilu 1999.

28 September Mahasiswa Lampung melakukan aksi di Universitas Lampung menentang RUU PKB, tercatat M. Yusuf Rizal (23) tewas tertembak dan Zaitul Fitria (21) juga tertembak dan sempat dirawat selama lima hari akibat aksi ini.

5 Oktober Aksi mahasiswa merambat ke Palembang, M Ardiansyah (19), seorang mahasiswa Universitas IBA Palembang, tewas tertusuk dalam aksi tersebut, di depan Kodam II Sriwijaya.

1-21 Oktober Sidang Umum MPR Perubahan pasal amandemen konstitusi ditolak dalam pembahasan perubahan pertama UUD 1945 pada Sidang Umum MPR tahun 1999. Perubahan ini berkaitan dengan pasal 20 UUD 1945 (lihat pada perubahan Sidang Tahunan MPR 2000).

Calon Pengganti Habibie

Setelah pertanggungjawaban Habibie ditolak, Habibie berunding dengan Akbar Tandjung dan Amien Rais untuk memikirkan calon presiden alternatif. Amien Rais dicalonkan menjadi presiden alternatif, tapi ia menolak karena sudah memiliki kesepakatan untuk mencalonkan Gus Dur.

Mosi tidak percaya yang diberikan kepada Habibie, sebenarnya dapat membuat Akbar mencalonkan diri sebagai calon presiden. Akbar sempat menerima tawaran ini, tapi mengundurkan diri dari pencalonan pada 20 Oktober. Setelah laporan pertanggungjawaban Habibie ditolak, Akbar Tandjung diminta untuk menjadi calon presiden dari Partai Golkar. Namun, Akbar menolak dengan alasan tidak ingin ada perpecahan dalam Partai Golkar.[154]

Secara khusus, Akbar memuji tindakan pengunduran diri Habibie. Pengunduran diri atau tepatnya penarikan diri Habibie dari pencalonan presiden telah dinilai oleh banyak pihak, termasuk kawan dan lawannya, sebagai mencerminkan jiwa ksatria dan demokrat sejati. "Secara jujur harus kita katakan bahwa kesediaan beliau untuk dinilai dan dievaluasi oleh Majelis Terbuka dalam SU MPR 1999 itu saja adalah merupakan preseden demokrasi yang tak ternilai harganya dalam pengembangan demokrasi di masa depan. Pengunduran diri beliau secara ksatria telah meretas tradisi baru demokrasi dan oleh karenanya—diakui atau tidak— beliau layak, bahkan sangat layak dipandang sebagai Bapak Demokrasi. Habibie dan Partai Golkar yang mencalonkannya memang kalah, tetapi insya Allah, menang di panggung sejarah."[155]

Amien menceritakan, ada momen yang sangat krusial yang tidak banyak dibahas pada malam pertanggungjawaban Habibie ditolak. Saat itu, ada rapat di rumah Habibie di Kuningan,

---

154 Akbar Tandjung, *The Golkar Way* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 122.
155 Akbar Tandjung, *Op.cit.*, 2003, hlm. 95.

Jakarta Selatan. Rapat dihadiri petinggi Golkar, ABRI, PPP, PAN, Partai Keadilan (PK), dan fraksi utusan golongan. Amien datang terlambat pada saat itu. Habibie meminta Amien Rais untuk maju sebagai calon presiden. Bahkan, Habibie sudah meminta persetujuan ke Wiranto, Akbar Tandjung, dan Ginanjar Kartasasmita. Wiranto menyatakan kepada Amien bahwa ABRI akan mendukung penuh Amien Rais.[156] Hal itu diamini oleh Fuad Bawazier, bahkan pada rapat itu muncul ide bahwa jika Amien Rais menjadi presiden, maka Gus Dur akan menjadi Ketua MPR dan Akbar Tandjung menjadi Ketua DPR.[157] Kejadian ini menujukkan pula kedekatan Amien Rais dengan tentara dan bagian dari rezim Orde Baru.

Akan tetapi, pada saat itu, ia sudah terpilih menjadi Ketua MPR. Tak mungkin, baginya, mengkhianati konsensus yang sudah disepakati dengan Poros Tengah. Selain itu, Amien menyatakan, yang paling penting mengamankan ketua MPR.[158] Sebab, pada saat itu, tugas dan fungsi ketua MPR itu sangat fungsional dan instrumental untuk memilih presiden.

Pada saat pemilihan Ketua MPR, Amien Rais mengalahkan Matori. Bahkan, Amien justru mendapatkan restu dari Gus Dur untuk menjadi Ketua MPR. Amien Rais yang dicalonkan oleh Fraksi Reformasi, PAN, dan Partai Keadilan memperoleh 305 suara. Sedangkan, Matori hanya meraih 279 suara.[159]

Sebenarnya, Amien sempat berpikir cukup lama sebelum menolak tawaran menjadi presiden. Salah satu alasan yang diyakinkan ke Amien agar menjadi presiden adalah kesehatan Gus Dur.[160] Namun, Amien menyatakan bahwa Gus Dur akan segera sembuh karena akan berobat ke Amerika.[161] Pilihan ke Amien cukup beralasan karena Wiranto tak akan diterima di publik karena ada semangat antimiliterisme.

---

156 Wawancara dengan Amien Rais di Jakarta, 9 Januari 2019.
157 Hasil Wawancara dengan Fuad Bawazier di Jakarta, 25 Januari 2019.
158 Wawancara dengan Amien Rais di Jakarta, 9 Januari 2019.
159 Mahrus Ali dan M. F. Nurhuda Y., *Op.cit.*, hlm. 213.
160 Wawancara dengan Priyo Budi Santoso di Jakarta, 30 Januari 2019.
161 Wawancara dengan Amien Rais di Jakarta, 9 Januari 2019.

Selain itu, meski menjelang reformasi ia sangat keras mengkritik Soeharto, tapi pada awal 1990-an Amien merupakan salah satu Anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Sedangkan, kesan Akbar Tandjung di publik adalah bagian dari Orde Baru.

Dukungan Amien Rais terhadap Gus Dur juga dapat dilihat sebagai bentuk kekuatan Islam politik. Sosok Gus Dur dapat dianggap sebagai representasi kekuatan kalangan Islam yang dapat menggantikan Habibie, terlebih Gus Dur merupakan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Dengan analisis ini juga dapat dinilai, jika pertanggungjawaban Habibie ditolak sebagian besar oleh kekuatan nasionalis dan/atau Golkar ideologis. Sebab, Habibie dinilai banyak melakukan perubahan di masa transisi setelah Soeharto mundur, terutama mewadahi kekuatan Islam, karena Habibie merupakan Presidium ICMI.

Sebagian besar kelompok Golkar merasa bahwa Habibie bukan kader ideologis Golkar. Ia masuk Golkar dan menjadi wakil presiden karena faktor kedekatannya dengan Soeharto. Menjelang reformasi, hubungan Habibie dan Soeharto juga memburuk. Ini alasan yang membuat loyalis Soeharto di Golkar dan parlemen menolak pertanggungjawaban Habibie.

Dinamika pascapemilu begitu cepat, Amien Rais berinisiatif membentuk Poros Tengah yang terdiri dari partai-partai Islam. Ide Poros Tengah bermula dari Hamzah Haz, yang berdasarkan masukan peta politik kajian majelis pakar PPP, melihat adanya peluang untuk menyatukan partai-partai yang memiliki aspirasi yang sama. Ia kemudian menemui Amien Rais dan menyatakan perlunya membentuk kekuatan alternatif. "Kita harus bergabung pada kekuatan yang tengah, kelompok tengah," kata Hamzah Haz.

Pertemuan dengan Amien Rais tersebut dilanjutkan pertemuan dengan Gus Dur di Pusat Dakwah Muhammadiyah, dan pertemuan Hamzah Haz dengan Gus Dur di PBNU. Tindak lanjut pembuatan kekuatan alternatif ini dengan menggagas fraksi reformasi yang didukung PKB, PAN, PPP, PK, PBB dan partai Islam lainnya yang memiiki 169 suara di DPR.[162]

Dibandingkan Amien Rais yang sangat garang dan haus perubahan radikal, Gus Dur dianggap oleh kekuatan-kekuatan lama lebih bisa diajak berkompromi. Hal ini pun diamini oleh Amien Rais. Menurutnya, Amien mencalonkan Gus Dur karena ia sudah memiliki perhitungan akan kalah kalau mencalonkan diri sebagai presiden. Gus Dur lebih dapat diterima dari kacamata pluralis itu mungkin lebih bagus. Kalau Megawati yang terpilih, akan ada yang mengendalikan. Terutama kekuatan-kekuatan yang berseberangan dengan ideologi Bung Karno.[163]

Dari sisi politik, Gus Dur pun boleh dibilang tak terlalu benci dengan Golkar. Pada pemilu 1997, Gus Dur bersama Tutut tanpa ragu menggembosi PPP dengan turun ke pesantren-pesantren untuk memenangkan Golkar. Hasilnya pun nyata, Golkar memborong hampir 300 lebih kursi dari 425 kursi yang diperebutkan.[164] Di dunia luar, Amerika Serikat (AS) dipastikan lebih menyukai Gus Dur dibandingkan Amien Rais. Meskipun, Amien memperoleh gelar doktor di Chicago. Amien dinilai dapat membahayakan kepentingan AS di Indonesia. Terutama keinginannya untuk meninjau kembali kontrak-kontrak pertambangan asing.

Potensi Amien Rais menjadi presiden sangat besar. Dalam sebuah *polling*, ia bahkan mengalahkan Megawati. Oleh sebab itu, PBB dan PPP tertarik memboyongnya. Namun, Amien menolak dengan alasan diplomatis: baju partai Islam baginya terlalu sempit.

---

162 Mohammad Sobary, dkk (ed), *Op.cit.*, hlm. 25.

163 Wawancara dengan Amien Rais di Jakarta, 9 Januari 2019.

164 Ishak Rafick, *Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia* (Jakarta: Ufuk, 2007), hlm. 198.

Setidaknya ada lima keistimewaan yang tak dimiliki pesaingnya saat itu. Pertama, Amien telah ikut melengserkan Soeharto. Kedua, dia tak pernah terlibat Orde Baru. Ketiga, dia bebas korupsi. Keempat, dia dikenal jujur baik oleh yang menyukainya maupun yang membencinya. Kelima, tak pernah main perempuan.[165]

Yusril memiliki perhitungan yang rasional: Habibie dan Amien Rais tidak mungkin menjadi calon presiden. Hanya tersisa ia, Gus Dur, dan Megawati. Jika, Gus Dur mundur karena alasan kesehatan, maka pertarungannya antara ia dan Megawati. Akan tetapi, perhitungannya meleset, Gus Dur tak mengundurkan diri. Ia lantas memilih mundur untuk menjaga *ukhuwah* dengan Gus Dur.

Meski sempat terserang stroke dan keterbatasan fisik, bagi mayoritas DPR, Gus Dur masih jauh lebih baik dari Megawati. Gus Dur saat itu dapat dikatakan obat bagi kelompok reformis yang kalah dalam pemilu, obat bagi Golkar dan anteknya yang tak ingin berhadapan langsung dengan kelompok reformis, obat bagi mayoritas muslim yang tak ingin dipimpin perempuan, dan obat bagi dunia luar, terutama AS—yang tak ingin dinakhodai Amien Rais yang bisa membahayakan kepentingan mereka.[166]

Sebenarnya, ada sejumlah faktor yang mendukung terciptanya Megawati-Akbar Tandjung untuk menghadapi Poros Tengah Amien Rais. Petama, makin mengerasnya penolakan sebagian elite Partai Golkar terhadap pencalonan Habibie sebagai Presiden. Selain itu, mencuatnya kasus korupsi Bank Bali yang melibatkan pendukung Habibie menjadi peluang untuk menggembosi Habibie.

Kedua, meski Akbar menyatakan mendukung Habibie, Akbar lebih mengetahui peta aspirasi anggota DPR dari Golkar yang duduk di DPR/MPR. Ketiga, Akbar memperhitungkan

165 *Ibid.*, hlm. 271.
166 *Ibid.*, hlm. 331.

karier politiknya. Sebab, kemungkinan kecil ia akan diajak menjadi menteri kalau Habibie menjadi presiden. Oleh sebab itu, ia membutuhkan Megawati, dan sebaliknya, PDIP memerlukan dukungan dan legitimasi Akbar Tandjung sebagai ketua umum dari partai terbesar kedua dalam pemilu 1999.[167]

Namun, hal itu tak terjadi. Solahuddin, adik Gus Dur yang sebelumnya menjadi tim sukses Habibie di Golkar, mendatangi Gus Dur pada 20 Oktober pagi hari. Ini menjadi pertanda bahwa Golkar akan menjadi pendukung Gus Dur. Akbar pun menelpon Alwi Shihab, tim kampanye Gus Dur, bahwa Golkar akan mendukung Gus Dur. Lima menit kemudian, Akbar hadir di kamar Gus Dur untuk menyatakan langsung dukungannya.[168]

Golkar pada waktu itu setuju mendukung Gus Dur. Sehingga Golkar seolah-seolah mendukung Poros Tengah. Alasan Golkar mendukung Gus Dur sebagai presiden, karena Gus Dur merupakan tokoh yang membawa pikiran-pikiran pembaruan. Dan sejalan pula dengan pembaruan-pembaruan yang sedang dilakukan Golkar.[169]

Padahal sejak menjelang pemilu 1999, publik telah mengingatkan partai-partai reformis agar tidak melakukan koalisi dengan Golkar yang telah menjadi bagian rezim sebelumnya. Apalagi beberapa saat menjelang pemilu, Gus Dur, Amien Rais, dan Megawati, melalui Deklarasi Paso, telah menyepakati untuk menghadang kekuatan *status quo* dalam pemilu 1999.[170]

Hingga menjelang pemilu presiden Oktober 1999, komunikasi PDIP dan partai-partai lain tetap tidak terjalin. Pada titik ini, harus diakui bahwa Megawati dan PDIP masih kurang pengalaman dalam komunikasi dan konstelasi elite politik. PDIP merasa kaget dengan sistem pemilu terbuka 1999 yang baru kali pertama terjadi setelah 32 tahun.

---

167 Syamsuddin Haris, *Op.cit.*, hlm. 187—188.
168 Greg Barton, *Op.cit.*, hlm. 370—371.
169 Wawancara dengan Akbar Tandjung *Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia* (Jakarta: Ufuk, 2007), hlm. 24 Januari 2019.
170 Syamsuddin Haris, *Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 2007), hlm. 64.

Kompromi politik yang semestinya dilakukan dalam politik tidak terjadi karena kurangnya pengalaman PDIP. Selain itu, di dalam internal PDIP—terutama anggota DPR terpilih—tak kenal satu sama lain karena PDIP menerima anggota baru nonkader.[171]

Penerimaan anggota baru PDIP diakui atau tidak karena PDIP tak siap secara organisasi maupun kaderisasi. Pada 1999, PDIP kekurangan kader untuk mengisi pos DPR yang tersedia.

Kendati begitu, PDIP sudah diprediksi akan memenangi pemilu 1999, sebab PDIP dianggap simbol perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Hal itu disebabkan karena konflik internal yang terjadi dalam tubuh PDI pada 1996, hingga menyebabkan kerusuhan 27 Juli 1996—atau biasa dikenal Kudatuli.

Akhirnya, PDIP menerima anggota baru yang kebanyakan berlatar belakang pengusaha. Kelompok ini disebut anak kos atau *indekos*, karena dianggap tak berjuang bersama PDIP sejak lama. Kelompok kos ini berdampingan dengan kader-kader lama atau kelompok 87.

Proses perekrutan anggota baru itu tidak terlalu selektif, yang penting punya komitmen untuk masuk di PDIP. Salah satu tokoh kos yang terkenal adalah Arifin Panigoro dan Tjahjo Kumolo. Arifin adalah pengusaha sukses dan sempat aktif di Golkar. Sedangkan, Tjahjo merupakan sahabat baik Taufiq Kiemas. Bahkan, Tjahjo sering berperan sebagai *ghost writer* bagi Taufiq. Jumlah anak kos di PDIP pada pemilu 1999 hampir 50% dari jumlah total kursi yang didapat oleh PDIP di parlemen.

Pada perjalanannya nanti, anak-anak kos ini memiliki peran yang sangat vital dan vokal di parlemen. Sehingga, menimbulkan kecemburuan bagi kelompok 87. Bahkan, karena perannya yang vital, anak kos lebih dianggap sebagai representasi PDIP. Selain itu, karena banyak anak kos berlatar belakang pengusaha,

171 Wawancara dengan Noviantika Nasution *Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia* (Jakarta: Ufuk, 2007), hlm. 1 Maret 2019.

mereka juga dapat berpengaruh karena kekuatan modalnya. Terlebih pada awal pemilu, PDIP tak banyak memiliki logistik.

Noviantika melanjutkan, selain kurangnya pengalaman, gagalnya PDIP merajut komunikasi, kompromi, dan koalisi karena kurangnya biaya logistik yang dimiliki partai. Novi sebagai Bendahara Umum PDIP, sempat berkali-kali dimintai dana untuk pertemuan forum sekjen-sekjen partai guna membahas koalisi yang diinisiasi oleh Amien Rais. PDIP sebagai partai pemenang selalu diminta untuk membayar semua keperluan pertemuan. Novi merasa kebingungan karena kas partai tak banyak, belum lagi setelah kerusuhan 27 Juli 1996. Aset PDIP banyak rusak dan harus membangun dari awal.[172]

Dalam satu sampai tiga pertemuan awal, PDIP masih ikut terlibat dalam forum sekjen partai tersebut. Setelahnya, karena pertemuan awal lebih banyak basa-basi, Sekjen PDIP Alexander Lithaay tak lagi aktif terlibat. Bahkan, orang-orang yang terlibat dalam forum sekjen marah dan menganggap penghinaan, karena PDIP tak lagi mengirimkan sekjennya ke dalam forum sekjen.[173]

Menjelang pemilu presiden, PDIP sudah merasa was-was akan kalah. Sebab, manuver Amien Rais di dalam Poros Tengah juga cukup gencar. Hal itu ditambah dengan Akbar Tandjung juga—yang sudah memiliki gelagat sejak pelantikan anggota DPR terpilih pada 1 Oktober 1999—mendukung Amien Rais dan Poros Tengah. Dalam perumusan tata tertib dan perumusan semacam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) anggota DPR, usulan PDIP selalu kalah oleh Amien Rais dan Akbar Tandjung.[174] Menjelang SI MPR, dibentuk tim tujuh yang terdiri dari masing-masing perwakilan partai untuk menyiapkan materi SI MPR seperti Tata Tertib, Jadwal SI MPR, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Non-GBHN,

172 Wawancara dengan Noviantika Nasution di Jakarta, 1 Maret 2019.
173 Wawancara dengan Noviantika Nasution di Jakarta, 1 Maret 2019.
174 Wawancara dengan Noviantika Nasution di Jakarta, 1 Maret 2019.

Amandemen UUD 1945, tata cara pemilihan presiden dan draf TAP MPR mengenai Timor Timur. Hanya PDIP yang tak menempatkan wakilnya karena Megawati tidak percaya dengan partai-partai Poros Tengah.

Menjelang pemilihan presiden, Yusril menyatakan diri untuk menjadi calon presiden. Keinginan Yusril ini sebagai antisipasi bila tiba-tiba Gus Dur mundur dari pencalonan. Kondisi tersebut memberikan harapan bagi Megawati. Musababnya, jika terdapat tiga calon presiden dan dua di antaranya dari Poros Tengah, maka suara Poros Tengah akan terpecah. Dengan demikian, suara Megawati akan utuh dan peluang menjadi presiden menjadi sangat besar.

Saat Amien Rais membuka sidang pemilihan presiden, Hartono Mardjono mengajukan interupsi kepada Amien Rais. Ia menyatakan ada satu hal yang ingin disampaikan oleh Yusril. Yusril berbicara bahwa ia mengundurkan diri dari pencalonan presiden demi menjaga *ukhuwah Islamiyah* dengan Gus Dur.[175]

Gus Dur Menangi Pilpres

Saat pemilihan presiden, Gus Dur berhasil mengalahkan Megawati. Gus Dur meraih 373 suara, Megawati 313 suara, 5 abstain. Hasil pemilihan terebut langsung termaktub dalam Ketetapan MPR RI No. VII/ MPR 1999.[176] Setelah Gus Dur menang, semua fraksi PDIP kebingungan mau bertindak seperti apa. Menurut Sutjipto, Ketua Fraksi PDIP, keputusan kongres PDIP adalah menjadikan Megawati sebagai presiden, bukan wakil presiden. Seluruh anggota PDIP dikumpulkan di suatu tempat, hanya bisa menunggu keputusan Megawati. Saat itu, tak ada yang berani menanyakan Megawati sedang ada di mana atau menanyakan apa yang hendak dilakukan PDIP.

175 Agus Hermawan, dkk., *Akrobat Politik: Investigasi Jurnalistik Membongkar Skenario dan Intrik Politik* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 260.
176 L. Misbah Hidayat, Reformasi Administrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan di Tiga Presiden (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 55.

Bahkan, menghubungi Taufiq Kiemas pun tak bisa dan baru beberapa jam Taufiq datang menemui anggota PDIP tanpa menyampaikan apapun.[177]

Setelah itu, Novi bersama Roy B. B. Janis dan Taufiq bertolak ke rumah Megawati di Kebagusan. Roy B. B. Janis memberanikan diri untuk menanyakan kepada Megawati, apa yang harus dilakukan oleh PDIP karena PDIP sudah memenangi pemilu dan jangan sampai Ketua Umum Megawati dipermalukan, jadi harus dapat sesuatu. Namun, Megawati hanya diam saja.[178]

Lalu, Roy langsung menelpon Syaifullah Yusuf, keponakan Gus Dur yang juga anggota PDIP, untuk datang ke Kebagusan. Begitu sampai di Kebagusan, Syaifullah Yusuf dituduh pengkhianat karena tak memberikan suaranya untuk Megawati. Lantas, Syaifullah menanyakan kesediaan Megawati untuk menjadi wakil presiden. Megawati hanya menjawab, "Pokoknya aku *gak* mau dipermalukan."

Namun, karena keputusan kongres PDIP hanya memerintahkan mencalonkan Megawati sebagai presiden, pencalonan Megawati sebagai wakil presiden diusung oleh PKB. Syaifullah langsung menelpon Gus Dur untuk meminta garansi dari Gus Dur. Tiga puluh menit kemudian, Gus Dur bersama rombongan datang ke Kebagusan untuk meyakinkan Megawati. Khofifah Indar Parawansa mendapatkan tugas untuk melengkapi semua persyaratan yang diperlukan untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden.[179]

Gus Dur sempat diisukan menginginkan Wiranto menjadi wakil presiden.[180] Sebab, Gus Dur tahu bahwa militer masih kuat. Bukan tanpa alasan Gus Dur ingin menjadikan Wiranto sebagai wakil presiden, reformasi ABRI menjadi TNI tentu masih memerlukan kekuatan dari bagian lama dan memiliki pengaruh.

177 Wawancara dengan Noviantika Nasution di Jakarta, 1 Maret 2019.
178 Wawancara dengan Noviantika Nasution di Jakarta, 1 Maret 2019.
179 Wawancara dengan Noviantika Nasution di Jakarta, 1 Maret 2019.
180 Wawancara dengan X di Jakarta, 20 Februari 2019.

Namun, situasi keamanan tak memungkinkan Gus Dur untuk menjadikan Wiranto sebagai wakil presiden. Sebab, kekalahan Megawati tak hanya menimbulkan perusakan gedung, kantor, dan pintu masuk, baik di Jakarta maupun di daerah oleh massa Megawati, tetapi juga ikut merusak semangat juang anggota Fraksi PDIP.[181] Mereka tak terima PDIP sebagai partai pemenang pemilu tak membuat Megawati menjadi presiden. Untuk meredam gejolak tersebut, Gus Dur mengusulkan Megawati untuk menjadi wakil presiden.[182]

Sebenarnya, ditawari Gus Dur untuk menjadi wakil presiden tak lantas membuat Megawati setuju. Justru Taufiq Kiemas merupakan orang pertama di PDIP yang setuju bila Megawati menjadi Wakil Presiden. Tujuan utama Taufiq adalah untuk membendung ABRI yang ingin kembali berkuasa setelah reformasi.[183]

Taufiq lantas meminta penjelasan Gus Dur mengenai cara yang akan ia tempuh untuk menggagalkan Wiranto menjadi presiden. Gus Dur mengatakan, "Biarpun Wiranto Pangab, tapi posisi saya sekarang 'kan lebih tinggi daripada dia. Saya sudah jadi presiden. Walaupun dia jenderal, dia harus tunduk kepada presiden. Detik ini juga saya bisa berhentikan dia sebagai Pangab dan dia harus patuh kalau saya perintahkan tidak maju sebagai wakil presiden."[184]

Sebenarnya, setelah Gus Dur terpilih, Partai Golkar mencalonkan Akbar Tandjung sebagai calon wakil presiden dengan cara aklamasi. Akan tetapi, pencalonan Akbar mendapat reaksi dari pendukung Wiranto, yang sebelumnya diisukan akan menjadi calon wakil presiden jika laporan pertanggungjawaban Habibie diterima dalam Sidang Umum (SU) MPR.

Habibie tak setuju dengan pencalonan Akbar Tandjung. Ia berpendapat meski ia telah mengundurkan diri, calon wakil

181 Derek Manangka, *Jurus dan Manuver Politik Taufiq Kiemas*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 83.
182 Wawancara dengan X di Jakarta, 20 Februari 2019.
183 Derek Manangka, *Op.cit.*, hlm. 87.
184 *Ibid.*, hlm. 88.

presiden semestinya tetap diberikan kepada Wiranto. Habibie mengingatkan Akbar Tandjung bahwa Wiranto adalah seorang militer dan Akbar nantinya dapat berhadapan dengan institusi TNI.[185]

Namun, pada kenyataannya, Wiranto bukan dicalonkan Fraksi Golkar dan TNI, melainkan dari Fraksi Daulah Ummah dan 74 anggota MPR. Melihat dinamika ini, saat SU MPR dibuka, Akbar Tandjung mengatakan bahwa dirinya mengundurkan diri. Alasan Akbar Tandjung mundur, karena ia merasa akan dijebak. Ia sudah menduga bahwa dukungan telah Golkar diplot kepada kandidat lain. Bila Akbar tetap maju, anak buahnya yang kecewa karena B.J. Habibie gagal bakal membelot untuk mempermalukan Akbar.[186]

Tak lama berselang, Wiranto pun menyatakan mundur dari bursa calon wakil presiden. Pengunduran diri Wiranto sangat mengagetkan. Sebab, usaha Wiranto untuk menjadi wakil presiden cukup keras. Bahkan, Wiranto sudah menyiapkan 1.000 eksemplar buku "Wiranto Menerjang Badai" untuk dibagikan untuk meyakinkan anggota MPR agar memilihnya.[187]

Dukungan Golkar akhirnya jatuh kepada Hamzah Haz yang dicalonkan oleh PKB untuk menantang Megawati. Saat pemilihan dilakukan, Megawati berhasil mengalahkan Hamzah Haz. Ia meraih 396 suara, sedangkan Hamzah Haz hanya 284 suara. Satu hal yang mesti disadari oleh Gus Dur, ia menjadi presiden bukan karena dipilih oleh rakyat, melainkan oleh mesin politik yang dinamakan Poros Tengah. Gus Dur memang memiliki legitimasi, namun bukan berarti legitimasi menjadi kredibilitas di tengah jalan. Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Saiful Munjani, pada 1999—sebelum pemilu—ada sosok yang disukai untuk menjadi presiden di antaranya:

---

185 Akbar Tandjung, *Op.cit.*, 2007, hlm. 264.
186 "*Skenario dari Patra*", Majalah Gatra, 25 Oktober 1999.
187 "*Pergulatan dan Perkubuan di MPR Saat Gus Dur Terpilih*", Majalah Gatra, 11 November 2000.

Megawati (48%), Habibie (19%), Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (12%), dan Amien Rais (11%).[188]

Pemilu 1999 belum menjamin perubahan besar, karena kuatnya intervensi pemerintah di KPU, yang mengindikasikan kuatnya kubu pro *status quo*. Walaupun demikian, bukan berarti tak ada peluang untuk meraih kemenangan dengan mempertimbangkan keadaan yang ada. Pertama, *mood* yang ada di negeri ini sangat mendukung terjadinya pemilu tak akan mengembalikan legitimasi penguasa baru. Pengalaman politik Golkar yang membuat trauma di beberapa daerah akan memperkuat penolakan terhadap legitimasi pemerintah baru di bawah Golkar. Ketiga, opini publik internasional yang menginginkan terjadinya reformasi politik di Indonesia.[189] Akan tetapi, tingkat partisipasi pemilu 1999 meningkat drastis, partisipasi pemilih mencapai 93%.[190]

---

188 Saiful Munjani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi, *Kaum Demokrat Kritis* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), hlm. 262.

189 Muhammad A.S. Hikam, *Politik Kewarganegaraan*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 254—255.

190 Saiful Munjani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi, *Op.cit.*, hlm. 31.

BAB 4

GUS DUR MENJADI PRESIDEN

Setelah mengucapkan sumpah presiden, Gus Dur menyatakan, "Kita harus mempertahankan keutuhan negara kita di hadapan negara lain yang terkadang menganggap ringan perasaan dan harga diri kita. Ini bukan tugas ringan, ini tugas berat. Apalagi karena kita sedang didera oleh perbedaan paham yang besar oleh longgarnya ikatan-ikatan bangsa."

Pernyataan Gus Dur ditutup dengan sedikit humor. "Saya tidak akan berpanjang-panjang apa yang saya kemukakan kali ini, karena semakin panjang yang saya kemukakan, akan semakin banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan."[191]

Reaksi massa bawah PDIP dan Golkar terhadap terpilihnya Gus Dur sangat luar biasa. Selain di Jakarta, setidaknya di tiga kota besar pecah kerusuhan berskala menengah dan besar. Ketiga kota itu adalah Solo, Denpasar, dan Makassar. Di Solo, reaksi massa PDIP mengakibatkan pembakaran, penjarahan toko dan sejumlah pemukiman termasuk rumah orang tua Amien Rais, orang yang dianggap paling bertanggungjawab atas kegagalan Megawati dalam pencalonan presiden.

Gus Dur sempat mengatakan kepada Wiranto bahwa hanya Wiranto yang cenderung dipilihnya sebagai pendamping.

---

191 Mohammad Sobary, dkk (ed),), *Gus Dur di Istana Rakyat* (Jakarta: LKBN Antara, 2000), hlm. 35.

Namun, berbagai pertimbangan politis memaksanya menawarkan jabatan itu kepada Akbar Tandjung. Kepada Wiranto, Gus Dur menjanjikan suatu kedudukan dalam kabinet dan yang paling penting "perlindungan".[192]

Gengsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) terpuruk hingga titik paling rendah karena TNI dianggap telah melakukan gerakan intimidasi terencana untuk mempegaruhi hasil pemungutan suara. Setelah pemungutan suara, milisi yang diorganisir TNI melakukan politik bumi hangus untuk melampiaskan dendam, memaksakan evakuasi dendam massa, dan berupaya mendiskreditkan suara yang dilaksanakan PBB.[193]

Pada 21 April 1999, Wiranto memprakarsai suatu perjuangan perdamaian, Dewan Perlawanan Timor Leste untuk Kemerdekaan (CNRT) dan kelompok-kelompok milisi. Sehingga, terkesan bahwa TNI adalah penengah, bukan pihak yang ikut berkonflik. Persetujuan itu menghasilkan serangkaian adegan sandiwara yaitu satuan-satuan milisi yang berbaris menyerahkan persenjataaan, yang lalu dikembalikan kepada mereka tak lama kemudian. Intimidasi tidak berkurang secara berarti meskipun ada tekanan publik dari seluruh dunia.[194]

Mengenai kerusuhan di Timor Timur, Wiranto membela diri dengan menyatakan perselisihan yang terjadi bukan atas provokasi yang dilakukan TNI. "Itu antara masyarakat dan masyarakat yaitu antara yang prointegrasi dan antiintegrasi. Memang, di dalam kasus pelanggaran HAM itu tak dipungkiri keterlibatan oknum aparat, baik militer maupun kepolisian. Karena apa? Sebagian besar dari satuan-satuan militer dan kepolisian di Timor Timur itu terdiri dari putra daerah. Mereka inilah yang sekarang ini sebagian dari mereka ikut bersama-sama dengan rakyat yang sangat emosional melakukan perusakan dan pelanggaran HAM. Itu sebenarnya ingin diungkap oleh

---

192 Chris Manning dan Peter van Diermen (ed), *Indonesia di Tengah Transisi* (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 61.
193 *Ibid.*, hlm. 115.
194 *Ibid.*, hlm. 119.

kita semua dan juga seharusnya oleh Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM."[195]

Di lain phak, Ketua Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa Mary Robinson pernah mengirim surat kepada Gus Dur yang berisi desakan agar Jenderal TNI (Purn.) Wiranto segera diadili, karena diduga melakukan pelanggaran HAM di Timor-Timur. Bondan Gunawan, yang menerima surat pertama kali, langsung mengabari Gus Dur. Gus Dur mengatakan, setelah pulang dari kunjungan kenegaraan di Eropa, ia akan mencopot Wiranto dari jabatan Menko Polkam.[196]

Setelah jabatan Wiranto dicopot, Gus Dur meminta bantuan dan saran Bondan, selaku Menteri Sekretaris Negara, terkait mutasi dan promosi di militer karena Bondan kenal banyak jenderal. Namun, karena dianggap ikut campur di militer, Bondan diancam dibunuh. Pesan itu disampaikan Donny yang diperintahkan oleh Syahrir dan Djaya Suparman.[197]

Di Denpasar, massa PDIP membuat lumpuh kota dengan menebangi pohon-pohon dan meletakkannya di jalan raya. Di Makassar, massa Golkar yang kecewa atas gagalnya Habibie menjadi presiden telah menyebabkan kerusuhan, yang umumnya dilakukan oleh mahasiswa. Faksionalisme di dalam tubuh Golkar—antara Habibie dan Akbar Tandjung—yang membuat kekecewaan massa Habibie di Sulawesi Selatan.

Pemerintahan Presiden Gus Dur dimulai dengan mewarisi berbagai konflik sebelumnya. Sebulan pertama pemerintahannya ditandai dengan eskalasi masalah Aceh yang semakin meningkat. Belum lagi tuntutan otonomi khusus yang diminta oleh berbagai provinsi. Di Riau, sebagian Sulawesi, dan Irian Jaya tuntutannya bukan lagi otonomi, melainkan kemerdekaan yang terlepas dari pemerintahan pusat di Jakarta.[198]

---

195 F. X. Bambang Irawan, *Supremasi Sipil? Agenda Politik Militer Gus Dur* (Yogyakarta: Elstreba, 2000), hlm. 148.

196 Bondan Gunawan, *Hari-Hari Terakhir Bersama Gus Dur* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2018), hlm. 224.

197 *Ibid.*, hlm. 231.

198 Hermawan Sulistiyo, *Darah, Nasi, dan Kursi* (Jakarta: Pensil 324, 2011), hlm. 48—49.

Kompetisi atau persaingan, kerja sama, dan konflik antarkelompok politik ini mewarnai masa pemerintahan Gus Dur. Sayangnya tak ada kerangka institusional yang disepakati sebagai landasan kerja sama dan konflik,. Akibatnya, fase demokrasi yang mestinya berlangsung menuju suatu konsolidasi demokrasi pascapemilu 1999 justru tetap diwarnai ketidakpastian politik, karena baik DPR maupun presiden, mengklaim pilihan langkah dan kebijakan politik mereka sebagai representasi aspirasi publik.[199]

Kendati demikian, harapan baik untuk duet Gus Dur-Megawati juga tak sedikit. Salah satunya datang dari Nurcholis Masjid. Ia berharap bahwa pemerintahan Gus Dur-Megawati dapat mewujudkan fondasi reformasi total sebagaimana telah menjadi wacana umum yang sangat mantap di kalangan warga negara ialah pemberantasan KKN.[200]

Pemberantasan KKN akan menjadi senjata utama Gus Dur untuk meraih simpati dan kepercayaan publik. Oleh sebab itu, pada pembahasan berikutnya akan dijelaskan bagaimana upaya Gus Dur memberantas KKN yang melibatkan unsur kekuatan rezim Orde Baru.

Langkah awal untuk mewujudkan pemberantasan KKN adalah penempatan orang-orang yang memiliki kredibilitas dalam hal keahlian dan keabsahan, serta kebugaran moral. Sebab, tanpa kebugaran dan keabsahan moral para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan, semua cita-cita reformasi yang mutlak diperlukan demi utuhnya bangsa dan negara lahir dan batin itu tidak akan terwujud.

Selain itu, pemerintahan Gus Dur-Megawati juga akan lebih terjamin mampu dengan sukses melaksanakan reformasinya melalui kerja sama erat dengan lembaga-lembaga mandiri masyarakat madani, khususnya LSM-LSM.

---

199 Syamsuddin Haris, *Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 2007), hlm. 30—31.

199 "*Harapan Kepada Gus Dur dan Mbak Mega*", Panji Masyarakat, 3—4 November 1999.

Lembaga-lembaga itu berperan penting sekali dalam usaha mewujudkan sistem dan proses pengawasan dan pengimbangan sebagai bagian mutlak dari demokrasi yang sejati.[201]

Gus Dur dan Fordem

Saat pemilu terutama pemilihan presiden, Fordem terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, yang mendukung Megawati seperti Marsilam Simanjuntak. Kedua, ada yang mendukung Gus Dur seperti yang dilakukan Bondan Gunawan dan kelompok NU yang ada di Fordem. Mereka yang yak mendukung Gus Dur mempertimbangkan kesehatan Gus Dur dan ia didukung oleh Amien Rais. Amien Rais dinilai masih mewakili ICMI yang pada pendiriannya dikritik keras oleh Fordem karena membawa semangat sektarianisme.

Saat terpilih menjadi presiden, Fordem termasuk kelompok pertama yang diundang ke Istana untuk diskusi ringan. Saat itu, Gus Dur juga merencanakan agar tetap mendapat masukan, kritik, saran, dan dukungan dari Fordem.[202] Meski demikian, bukan berarti dalam perjalanannya, Fordem sama sekali tak mengkritik. Fordem sebagai organisasi tetap berupaya juga memberikan kritik kepada Gus Dur.[203]

Fordem generasi pertama masuk menjadi birokrat menemani Gus Dur dan diharapkan dapat menjadi penghubung ide-ide Fordem untuk Gus Dur. Sedangkan, generasi muda Fordem, mempraksiskan ide dan gagasan Fordem secara murni melalui jejaring aktivis prodemokrasi—baik mahasiswa maupun LSM.[204] Asumsi dari tindakan ini, merupakan upaya pendidikan demokrasi bagi masyarakat untuk mencegah masyarakat bersentuhan dengan kelompok lama yang anti-demokrasi.

201 Syamsuddin Haris, *Loc.cit.*
202 Wawancara Todung Mulya Lubis di Jakarta, 17 Mei 2019.
203 Wawancara Rahman Tolleng di Jakarta, 17 November 2015.
204 Wawancara Fadjroel Rahman di Jakarta, 27 Maret 2019.

Meskipun, aktivitas Fordem setelah Gus Dur berkuasa tidak terkoordinasi dengan baik. Komunikasi Fordem dengan Gus Dur dianggap sudah terwakili dengan masuknya Marsilam Simanjuntak dan Bondan Gunawan menjadi menteri. Reaksi Marsilam saat diajak Gus Dur menjadi menteri agak ragu. Sebab, Marsilam mendapatkan kabar untuk masuk dalam kabinet bukan melalui Gus Dur, melainkan dari Bondan Gunawan.[205]

Bondan sendiri pun bahkan beberapa kali didesak Gus Dur untuk masuk kabinet. Suatu hari sepulang dari Papua di Desember 1999, Gus Dur kembali "Masuk ke kabinet saja dong, Mas," ujarnya. Ia menunjuk Bondan sebagai Sekretariat Presiden Pengendalian Pemerintahan dan Politik (Sesdalprinpol).

Suatu hari, Marsilam menanyakan menteri atau jabatan apa yang akan ia jabat. Akan tetapi, semuanya menjawab tidak tahu. "Gak bisa begitu, harus jelas. Menteri apa saja tidak masalah, asal bukan menteri agama," kata Marsilam. Marsilam melanjutkan, dirinya lantas ditawari menteri sosial. Tawaran itu ditolak Marsilam, sebab menurutnya tak perlu membina kehidupan sosial masyarakat.[206] Belakangan, Gus Dur juga membubarkan Depsos.

Baru pada Maret 2000, Gus Dur bertemu dengan Marsilam dan berbicara sekitar tiga jam. Saat itu, Gus Dur merasa tak punya teman di pemerintahan. Gus Dur menawarkan Marsilam menjadi sekretaris kabinet.[207]

Sedangkan, Rahman Tolleng tetap di luar pemerintahan untuk menjaga kritisisme.[208] Saat itu, konsolidasi antaranggota Fordem cukup solid, karena semangatnya adalah menjaga transisi demokrasi dari rezim otoriter dan kemungkinan bagian rezim lama akan balas dendam politik.[209]

Selain Bondan Gunawan dan Marsilam Simanjuntak,

---

205 Wawancara Marsilam Simanjuntak di Jakarta, 15 Januari 2016.
206 Wawancara Marsilam Simanjuntak di Jakarta, 15 Januari 2016.
207 Wawancara Marsilam Simanjuntak di Jakarta, 15 Januari 2016.
208 Wawancara Todung Mulya Lubis di Jakarta, 17 Mei 2019.
209 Wawancara Budi Murdono di Jakarta, 24 Maret 2019.

Gus Dur ingin mengajak Rahman Tolleng menjadi Kepala Badan Inteljen Negara (BIN). Akan tetapi, niat Gus Dur mendapat penolakan dari partai-partai koalisinya.[210] Sedangkan, Rahman Tolleng menyatakan sempat mempertimbangkan tawaran Gus Dur.

Hanya saja, ketika ia menanyakan kepada Gus Dur siapa yang akan menjadi Wakil Ketua Badan Intelijen Negara (BIN). Gus Dur menyebut satu nama petinggi Polri. Ketika, Rahman Tolleng mencari tahu rekam jejaknya cukup panjang dan punya nama besar, Rahman mengaku mengurungkan niatnya karena takut hanya akan dimanfaatkan oleh wakilnya nanti.[211]

Tak hanya sempat dirumorkan menjadi Kepala BIN, Rahman Tolleng juga diisukan akan menjadi Sekretaris Negara menggantikan Ali Rachman. Dengan masuknya Bondan Gunawan dan Marsilam lebih dulu dalam pemerintahan Gus Dur dan diisukannya Rahman Tolleng membuat *framing* bahwa ada Fordem *connection*.

Tak hanya Fordem *connection*, tetapi juga adanya isu kudeta administratif yang dilakukan oleh kader-kader Partai Sosialis Indonesia (PSI)—Rahman Tolleng dianggap salah satunya. Namun, hal itu dibantah oleh Rahman Tolleng. "Saya memang Angkatan 66, tapi saya bukan PSI. Saya sosialis. Kalau pun ada tawaran, saya harus mempelajari dulu tawaran itu serta tidak ada aturan dan pola karena sudah ada teman-teman (dalam pemerintahan-pen), saya harus ikut ke sana," tegas Rahman Tolleng.[212]

Namun, harus diakui konsolidasi Fordem hanya sebatas rapat-rapat dan kadang memberikan masukan untuk Gus Dur. Hal ini diakui tak mempunyai efek besar untuk menghalau kelompok antidemokrasi yang memiliki banyak jaringan dan dapat memengaruhi media *mainstream*. [213]

---

210 Wawancara dengan Budi Murdono, Fadjroel Rahman, dan Todung Mulya Lubis.

211 Wawancara Rahman Tolleng di Jakarta, 17 November 2015.

212 Rahman Tolleng, "*Saya Harus Mempelajari Dulu Tawaran Itu*", Forum Keadilan, 13 Februari 2000.

213 Wawancara Budi Murdono di Jakarta, 24 Maret 2019.

Pemerintahan Gus Dur

Niat Gus Dur "membersihkan" sisa-sisa kekuatan Orde baru diawali dengan mengganti ketua LKBN Antara yakni Parni Hadi oleh Mohammad Sobary. Parni diangkat oleh Habibie menjadi Ketua LKBN Antara pada Juli 1998. Saat itu spekulasi berkembang, Parni sengaja ditempatkan di pos tersebut agar bisa mengamankan kebijakan pemerintahan Habibie. Tuduhan ini dikaitkan dengan kedekatan Parni dengan Habibie. Ketika Habibie memimpin Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Parni Hadi dipercaya sebagai Ketua Departemen Pengembangan Media, Komunikasi dan Hubungan Luar Negeri. Parni pula yang dipercaya Habibie membidani Republika, koran yang diprakarsai orang-orang ICMI, pada 1993.

Parni tak membantah soal kedekatan tersebut. "Tapi, mengapa saya diganti, saya tak tahu," kata Parni. Ia mengaku tak kaget dengan pergantian ini. Sejak Habibie lengser, ia sudah menduga bakal dihabisi dari jabatannya sebagai Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Antara.[214]

Pergantian Parni pun memunculkan spekulasi yang sama yakni Gus Dur mau mengamankan lembaga pemberitaan negara tersebut. Misi ini tak bisa dilaksanakan kalau Parni tetap bercokol di situ. Seorang pejabat di kantor kepresidenan menyebutkan, orang-orang sekeliling Gus Dur cemas karena Parni dianggap terlampau dekat dengan Habibie.

Meski awalnya rela dipecat, Parni Hadi menuntut Gus Dur senilai 1 Triliyun. Ia telah memasukkan gugatan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selain menuntut keputusan presiden (keppres) itu dibatalkan, Parni juga minta Gus Dur merehabilitasi nama baiknya. Pencopotannya yang tiba-tiba, kata Parni, bisa menimbulkan kesan bahwa ia melakukan kesalahan. Keppres penggusurannya dari tampuk pimpinan Antara, menurut Parni, melanggar UU Nomor 40/1999

214 Majalah Gatra, *Nakhoda Pilihan Gus Dur*, 13 Desember 1999.

tentang Penyiaran.

"Antara itu bukan lembaga pemerintah. Yang berhak mengganti pimpinan Antara itu rapat umum pemegang saham, bukan keppres," kata pengacara Parni Hadi -Zul Amali Pasaribu. Berdasarkan UU tersebut, usaha pers, termasuk kantor berita, harus berbentuk badan hukum.[215]

Tak hanya, Parni Hadi, Gus Dur juga memecat Gubernur Bank Indonesia Syaril Sabirin akibat terindikasi terlibat dalam kasus korupsi Bank Bali pada 1998. Skandal ini menyangkut sejumlah nama besar, mulai Gubernur Bank Indonesia, sejumlah pejabat negara, tokoh partai Golkar seperti Setya Novanto, bahkan menyerempet nama Presiden RI ketiga, BJ Habibie.

Menurut Menko Ekuin Kwik Kian Gie bahwa Mantan Presiden Abdurrahman Wahid mengusulkan kepada ketua Dewan Perwakilan Rakyat agar Gubernur Bank Indonesia pada masa itu, yaitu Syahril Sabirin diganti. Bahkan, disebutkan bahwa Presiden telah mempersiapkan bakal calon pengganti yang memenuhi syarat. Hal ini dilakukan karena Gubernur Bank Indonesia dinilai sudah tidak dapat bekerja sama dengan Pemerintah, walaupun pada kenyataannya kerjasama antara Pemerintah dan Bank Indonesia sudah terwujud dengan baik dan berjalan sesuai dengan UU No.23/1999.[216]

Bahkan, Syahril Sabirin disarankan untuk mengundurkan diri agar bisa berkonsentrasi dengan baik dan penuh selama menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Agung RI (Kejagung) dalam kaitannya dengan kasus Bank Bali yang saat itu sedang diproses di Kejaksaan Agung RI.[217]

Langkah Jaksa Agung ini menuai kritik dari Akbar Tandjung dan petinggi Partai Golkar lainnya. Mereka menilai Marzuki Darusman bermanuver untuk kepentingannya. Musababnya, Syahril Sabirin dikenal cukup dengan Golkar.

---

215 Majalah Gatra, *Gus Dur Menggitik Istana*, 27 Maret 2010.

216 M. Dawam Rahardjo, et al., *Independensi BI dalam Kemelut Politik* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000), hlm. 106

217 Majalah Gatra, *Putusan Kiki Membelah Beringin*, 16 November 2000.

Tarik ulur dan kompromi kasus ini pun berlanjut. Meski sempat diberhentikan, Syahril Sabirin, Rabu 6 Desember, mulai *ngantor* lagi. Keputusan itu diambil, menyusul turunnya surat penangguhan penahanan atas tersangka skandal Bank Bali, Syahril Sabirin.

Surat penangguhan penahanan itu dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi, dan disampaikan pada Syahril pada Selasa (5/12) sore, di rumahnya. Syahril selama ini menjalani tahanan rumah. "Mudah-mudahan saya bisa membantu membenahi BI," ujar Syahril. Ia merasa tak bersalah, dan apa yang dikerjakan selama ini selalu dalam koridor hukum.[218]

Aktifnya kembali Syahril diharapkan dapat mengatasi kemelut di BI, menyusul mundurya sejumlah Direktur dua pekan lalu. Saat ini, DPR juga tengah menggodog amandemen UU Bank Indonesia. Penahanan Syahril menimbulkan pro dan kontra, yang berkembang ke masalah politik. Disebut-sebut, Gus Dur pernah mendesak agar Syahril mundur. Karena *ngotot* tak mau mundur, akhirnya Syahril dijebloskan dalam tahanan. Ada pula yang bilang, selain tudingan terlibat skandal Bank Bali, Syahril disebut-sebut ikut bertanggungjawab masalah kucuran BLBI.

Ketika Syahril ditahan, banyak politisi mengunjunginya di tahanan. Diantarannya, Ketua Golkar Akbar Tanjung; Ketua MPR Amien Rais, dan lain-lain. Para politisi itu menunjukkan sikap tidak setujunya pada pemerintah yang menahan Syahril. Ditangguhkannya penahanan Syahril, disebut-sebut juga tak lepas dari keputusan politik. Bisa jadi, ini buah kompromi antara Ketua Golkar Akbar Tanjung dan presiden.

---

218 Majalah Gatra, *Syahril Sabirin Aktif Lagi*, 6 Desember 2000.

Kronologis Kasus Cassie Bank Bali[219]

- **26 Januari 1998**

Terbit Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang jaminan atas kewajiban pembayaran bank umum. Keputusan ini untuk mengatasi krisis kepercayaan terhadap perbankan akibat likuidasi bank pada 1997.

- **8 Maret 1998**

Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama BPPN dan BI, Nomor 1/BPPN/1998 dan Nomor 30 /270/ KEP/DIR berisi petunjuk pelaksanaan penjaminan.

- **18 Maret 1998**

Bank Bali mengirim surat ke BDNI untuk minta konfirmasi soal utang-utangnya yang jatuh tempo pada 2 Maret 1998 sampai 16 Maret 1998 (6 transaksi).

- **9 Juli 1998**

Tim manajemen BDNI melalui suratnya menyatakan, klaim atas kewajiban BDNI ke Bank Bali sudah diajukan ke BPPN.

- **21 Oktober 1998**

Bank Bali kirim surat ke BPPN perihal tidak terbayarnya tagihan piutang di BDNI dan BUN yang timbul dari transaksi *money market*, SWAP, dan pembelian promissory notes. Tagihan pada BDNI (belum dihitung bunga) Rp 428,25 miliar dan US$ 45 juta. Sedangkan tagihan ke BUN senilai Rp 200 miliar.

219 https://lipsus.kontan.co.id/v2/perbankan/read/325/skandal-bank-bali-kongkalikong-berbau-politik diakses pada 11 Juli 2019 pkl. 16.10 WIB

- **27 Oktober 1998**

BI menyampaikan secara tertulis ke tim pemberesan BDNI tentang penolakan untuk memproses lebih lanjut klaim Bank Bali dengan alasan klaim belum didaftar dan terlambat mengajukan klaim, satu klaim tidak terdaftar, dan satu klaim ditolak karena tidak termasuk dalam jenis kewajiban yang dijamin (*transaksi forward-sell*) senilai Rp 1,131 miliar.

- **23 Desember 1998**

Bank Bali kembali mengirim surat ke BPPN perihal tagihan piutang ke BDNI dan BUN tidak kunjung berhasil. Bank Bali juga meminta BPPN membantu memecahkan masalah ini.

- **11 Januari 1999**

Bank Bali dan PT Era Giat Prima (EGP) meneken perjanjian pengalihan (*cessie*) tagihan piutang ke BDNI dan BUN. Jumlah seluruh tagihan piutang Bank Bali Rp 798,09 miliar. Disepakati paling lambat tiga bulan kemudian tagihan itu sudah diserahkan ke Bank Bali. Kemudian, Bank Bali juga menandatangani perjanjian cessie dengan Direktur Utama PT Era Giat Prima Setya Novanto. Bank Bali menjual seluruh tagihan pinjaman antarbanknya di BDNI, BUN, dan Bank Bira ke PT EGP. Total tagihan itu mencapai Rp 3 triliun.

- **12 Januari 1999**

Wakil Ketua BPPN Pande Lubis mengirim surat ke Bank Bali. Isinya, BPPN sedang mengumpulkan dan mempelajari data mengenai transaksi Bank Bali untuk mencari pemecahan masalah.

- **15 Februari 1999**

BPPN meminta bantuan BI untuk melakukan verifikasi atas tagihan Bank Bali ke BDNI dan BUN dari segi kewajaran dan kebenarannya.

- **16 Februari 1999**

BI tolak usulan Pande Lubis untuk meneliti kembali klaim Bank Bali karena sebelumnya BI sudah menyatakan secara administrasi tidak berhak.

- **18 Februari 1999**

Pande Lubis mengeluarkan memo kepada Erman Munzir yang berisi usulan untuk memeriksa ulang klaim Bank Bali. Erman kemudian mengaku telah minta Direktur UPMB I memprioritaskan klaim Bank Bali.

- **22 Maret 1999**

BI melakukan verifikasi terhadap tagihan-tagihan Bank Bali ke BDNI dan BUN. Hasilnya, antara lain, tidak ditemukan indikasi ketidakbenaran dan ketidakwajaran transaksi SWAP, forward dan L/C antara Bank Bali dengan BDNI, transaksi pembelian promes yang di-*endorse* BUN belum sesuai dengan prinsip praktik perbankan yang berhati-hati.

- **29 Maret 1999**

PT EGP memberikan surat kuasa ke Bank Bali untuk dan atas nama PT EGP menagih ke BUN piutang beserta bunganya sebesar Rp 342,919 miliar dan mengkreditkannya ke rekening perusahaan itu.
Hal serupa dilakukan terhadap penagihan piutang beserta bunganya ke BDNI yang besarnya Rp 1, 277 triliun dan mengkreditkannya ke rekening PT EGP.

- **1 April 1999**

Bank Bali mengirim surat ke BPPN. Isinya ralat tentang jumlah tagihan ke BDNI dan BUN.

- **9 April 1999**

BPPN menolak klaim tagihan Bank Bali terhadap BUN. Pengecualian terhadap BDNI. Meski begitu, harus ada persetujuan dari Bank Indonesia atau Menteri Keuangan.

- **14 Mei 1999**

Revisi Surat Keputusan Bersama Program Penjaminan Pemerintah:

- Keterlambatan administratif bisa diterima selama tagihan valid,
- Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh salah satu pihak, baik debitor atau kreditor,
- Ketidakberlakuan penjaminan diperluas sehingga mencakup kewajiban yang berasal dari pihak terkait
- Dana publik yang berasal dari perusahaan Asuransi dan Dana pensiun dikeluarkan dari kelompok pihak terkait, BPPN menolak klaim tagihan Bank Bali terhadap BUN. Pengecualian terhadap BDNI. Meski begitu, harus ada persetujuan dari Bank Indonesia atau Menteri Keuangan.

- **1 Juni 1999**

BPPN meminta BI melakukan pembayaran dana antarbank BB sebesar Rp 904 miliar. Dana Rp 904 miliar dari BI mengucur ke rekening BB di BI (piutang berikut bunganya).

- **3 Juni 1999**

BPPN instruksikan transfer dana dari rekening Bank Bali di Bank Indonesia ke sejumlah rekening berjumlah Rp 798 miliar secara bersamaan (Rp 404 miliar ke rekening-

PT EGP di Bank Bali Tower, Rp 274 miliar ke rekening Djoko S. Tjandra di BNI Kuningan, 120 miliar ke rekening PT EGP di BNI Kuningan)

- **9 Juni 1999**

Setelah uang keluar dari BI, janji PT EGP menyerahkan surat-surat berharga pemerintah yang harusnya jatuh tempo pada 12 Juni 1999 malah diubah dalam perjanjian penyelesaian. Isinya, Bank Bali agar memindahbukukan dana sebesar Rp 141 miliar ke PT EGP. Alasannya, tagihan Bank Bali dari BI hanya Rp 798 miliar, sehingga dikurangkan saja dengan uang yang mengalir dari BI sebesar Rp 904 miliar.

- **20 Juli 1999**

Standard Chartered Bank melaporkan hasil *due diligence* dan menemukan:

a. Terjadi tambahan kerugian akibat pembayaran keluar dari bank sebesar Rp 546 miliar sehubungan dengan klaim antarbank sebesar Rp 905 miliar

b. Adanya usaha penjualan aset-aset bank oleh manajemen, BPPN menolak untuk menerima kerugian tambahan tersebut sebagai bagian dari rekapitalisasi.

- **23 Juli 1999**

Penyerahan Bank Bali dari Bank Indonesia ke BPPN berdasarkan SK Gubernur BI no 1/14/Kep Dpg/1999 menyusul terlampauinya batas waktu pencapaian kesepakatan antara *Standard Chartered Bank* dan pemegang saham Bank Bali.

- **30 Juli 1999**

Ahli hukum perbankan Pradjoto membeberkan jaringan money politics, dalam transaksi penagihan piutang Bank-

Bali terhadap BDNI, BUN dan Bank Bira senilai Rp 3 triliun, yang melibatkan Setya Novanto (Dirut PT EGP), dengan dugaan adanya dukungan sejumlah pejabat tinggi negara.

- **5 Agustus 1999**

BPPN membentuk tim investigasi di bawah pengawasan *International Review Committee* untuk menginvestigasi kebenaran transaksi *cessie*, meneliti dasar hukumnya, menelaah proses pengambilan keputusan atas transaksi, melakukan pemeriksaan, penelitian, pengumpulan data, dan penyelidikan terhadap pengalihan dana yang dilakukan Bank Bali ke PT EGP.

- **27 September 1999**

Pejabat sementara Jaksa Agung Ismudjoko SH mengungkapkan, tim penyidik Kejaksaan Agung yang dipimpin ketua tim Pengkaji Pidana Khusus Ridwan Mukiat siap menyidik skandal Bank Bali dengan mencoba memanggil orang-orang yang diduga terkait dalam kasus Bank Bali.

- **7 Oktober 1999**

Presiden BJ Habibie telah menyetujui pemeriksaan tiga pejabat tinggi di kabinet waktu itu, salah satunya Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin, sebagai saksi dalam kasus skandal Bank Bali.

- **29 November 1999**

Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat izin pemeriksaan Syahril Sabirin. Pemeriksaan Syahril menjadi menarik setelah Wakil Dirut Bank Bali Firman Soetjahja saat diperiksa tim penyidik mengakui adanya pertemuan di Hotel Mulia pada 11 Februari 1999 yang membahas soal cessie.

- **5 Juni 2000**
Gubernur BI Syahril Sabirin resmi jadi tersangka kasus Bank Bali. Dia dipersalahkan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang merupakan prinsip perbankan.

- **21 Juni 2000**
Syahril Sabirin ditahan di Kejaksaan Agung.

- **28 Agustus 2000**
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Soedarto membebaskan Joko dari tuntutan hukum. Majelis berpendapat, kasus Djoko bukan termasuk pidana, melainkan perdata. Sebelumnya, jaksa Antasari Azhar menuntutnya 18 bulan penjara.

- **28 Juni 2001**
Mahkamah Agung kembali memenangkan Djoko S. Tjandra. Majelis Hakim Agung memperkuat argumentasi majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, satu anggota majelis kasasi, Artidjo Alkostar, mengajukan *dissenting opinion* dengan menyatakan Joko bersalah melakukan korupsi.

- **13 Maret 2002**
Syahril Sabirin divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihukum tiga tahun penjara.

***

Sebagai presiden, Gus Dur memang berhak melakukan berbagai perubahan yang diinginkannya agar Indonesia baru seperti konsepnya dapat terwujud. Hanya saja, Gus Dur tak pernah menjelaskan konsepnya sendiri. Maka setiap ia melansir

hal baru, timbul juga goncangan baru. Apalagi menteri-menteri yang membantunya pun tak pernah diajak duduk membicarakan langkah-langkah yang akan diambil. Akibatnya, menteri-menteri seperti berjalan sendiri-sendiri dengan komando antara presiden dan ketua partai masing-masing. Dari situ konflik antara presiden dengan partai pendukungnya, yang menaruh wakil-wakilnya di kabinet dan wakil rakyat di DPR, mulai tumbuh.[220]

Terpilihnya Gus Dur menjadi presiden di masa transisi sebenarnya mendapat kekhawatiran dari kerabatnya. Pertama, Presiden Indonesia yang keempat harus mengelola masa peralihan yang penuh gejolak dan kesulitan karena unsur-unsur rezim yang lampau akan berusaha keras untuk menghalangi, dan kalau bisa, menjatuhkannya. Pada saat yang sama, keadaaan ekonomi memburuk. Masyarakat mulai menunjukkan disintegrasi dan harapan rakyat mengenai demokrasi terlalu besar. Oleh karena itu, presiden yang baru akan mendapatkan kritikan dan pekerjaannya hampir-hampir tak dihargai.

Kedua, Gus Dur adalah pemimpin eksentrik yang suka membawa caranya sendiri. Meski ia memiliki visi jauh ke depan dan karena itu dapat memberikan inspirasi dan menunjukkan kepemimpinan yang jarang dapat dijalankan orang lain, pendekatannya yang *out of the box*, mungkin tidak akan berarti apa-apa untuk mendorong pencalonannya sebagai presiden. Di suatu fase krisis, orang bisa menaruh harapan dengan pendekatannya itu.[221]

Pada hari-hari pertama menjadi presiden, Gus Dur secara eksplisit menyatakan sistem garansi digunakan dalam penyusunan kabinet, sehingga ada menteri yang digaransi Megawati, Akbar Tandjung, Wiranto, Amien Rais, dan dirinya sendiri. "Mudah-mudahan, kabinet yang terdiri dari wajah

---

220 Ishak Rafick, *Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia* (Jakarta: Ufuk, 2007), hlm. 334—335.

221 Greg Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid* (Yogyajarta: LKiS, 2002), hlm. 37.

lama dan wajah baru ini, dapat bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Tugas presiden dan wakil presiden akan makin berat karena tuntutan masyarakat. Jadi kami mohon dimudahkanlah kami berdua," katanya.[222]

Pernyataan ini yang kemudian dianggap bahwa tak akan ada banyak perubahan besar dalam penyusunan kabinet. Kabinet diyakini akan bersifat kompromi. Termasuk memasukkan kekuatan lama, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Golongan Karya (Golkar) dalam kabinet.

Kompromi yang dilakukan oleh Gus Dur ditujukan untuk menjaga persatuan dengan membagi jatah, sehingga semua wakil terwakili. Dasar pembagian yang dipakai memang terlampau banyak untuk bisa dikombinasikan dengan baik. Usaha yang hampir mustahil ini cukup memusingkan Gus Dur, karena persyaratan kecakapan dan integritas para calon menteri juga harus dipenuhi sebelumnya.

Seminggu setelah Gus Dur terpilih, Fuad Bawazier membujuk Amien Rais untuk menyampaikan kepada Gus Dur bahwa Fuad harus menjadi Menteri Gus Dur. Bujukan Fuad kepada Amien berhasil. Bahkan, Amien mengancam Gus Dur, "Kalau Menteri Keuangan bukan dari PAN, maka kami, dan mungkin Poros Tengah, akan cabut dukungan kepada Anda!"[223]

Gus Dur yang tak mau diatur, tentu menolak. Meski, akhirnya Gus Dur memilih jalan tengah. Gus Dur mengatakan, Menteri Keuangan tetap dari Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, Gus Dur yang menunjuk siapa orangnya.[224] Akhirnya, Gus Dur menunjuk Bambang Sudibyo menjadi Menteri Keuangan, yang juga kader dari PAN.

Pada awalnya, semua partai politik harus mendapat bagian yang sepadan, termasuk militer. Lalu harus diperhatikan pemerataan atas dasar wilayah, daerah, suku bangsa, dan

---

222 Mohammad Sobary, dkk (ed), *Op.cit.*, hlm. 36—37.
223 Wawancara dengan X di Jakarta, 20 Februari 2019.
224 Wawancara dengan X di Jakarta, 20 Februari 2019.

warga keturunan. Karena sedang bergolak, wilayah Indonesia Timur—khususnya Sulawesi Selatan—mendapat alokasi besar, sampai empat kursi. Kemudian imbangan antaragama juga jadi patokan serius, sehingga perwakilan Hindu, Buddha, Kristen, dan Katolik juga mendapat kursi masing-masing.

Dapat dibayangkan sulitnya mendapatkan kendala yang berlapis ini seraya harus menampungnya dalam susunan yang terbatas. Akhirnya, niat untuk membuat kabinet yang pada asalnya berjumlah kecil terpaksa ditinggalkan. Jumlah menteri, yang dulunya direncanakan maksimum 25 orang kemudian membengkak menjadi 34 orang.

Mantan menteri kabinet Habibie juga dimasukkan. Asas lain yang dikompromikan ialah mengenai struktur kabinet, yang semula sebenarnya tidak mengenal adanya menteri koordinator (menko). Prinsip efisiensi telah dikompromikan demi menampung dukungan lebih banyak (dan menghindari oposisi?). Dasar kompromi ini lalu jadi semacam paradoks: niat baik Gus Dur untuk mengikat persatuan itu sekaligus menjadi bibit perpecahan di bidang yang lebih luas.

Asas lain yang telah dikompromikan secara berlebihan ialah tentang penempatan empat perwira tinggi aktif dalam kabinet, yang merupakan langkah mundur dari tuntutan reformasi untuk menghapus dwifungsi militer.

Terlebih lagi—begitulah menurut prasangka yang beredar—pos Departemen Perhubungan serta Departemen Pertambangan dan Energi yang dipercayakan pada dua jenderal bintang tiga itu sangat erat hubunganya dengan Orde Baru, khususnya keluarga cendana, seperti perusahaan telekomunikasi, proyek pelabuhan, jalan tol, pengangkutan dan pengilangan minyak, atau perusahaan pembangkit tenaga listrik. Kalau dugaan mengenai alasan ini benar, kompromi juga dilakukan demi kepentingan *status quo*.[225]

225 "Kabinet Superkompromi", TEMPO, 7 November 1999.

Susunan Kabinet Persatuan Nasional

• Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam): **Jenderal TNI (Purn.) Wiranto, S.H.** (26 Oktober 1999—15 Februari 2000), lalu diganti oleh **Jenderal TNI (Purn.) Soerjadi Soedirdja** (15 Februari—23 Agustus 2000). Terjadi perombakan (reshuffle) pertama Kabinet Persatuan Nasional pada 23 Agustus 2000, secara nomenklatur diganti menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) dengan pejabat baru, **Jenderal TNI (Purn.) Susilo Bambang Yudhoyono, M.A.** (23 Agustus 2000—1 Juni 2001).

Kata "sosial" muncul dalam nomenklatur karena Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (Kemenko Kesra dan Taskin) dihapuskan dan fungsinya digabungkan menjadi satu dengan Menko Poloskam. Lalu, terjadi lagi perombakan kabinet yang kedua kali pada 1 Juni 2001 dan diangkatlah **Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar** (1 Juni—9 Agustus 2001).

• Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin): **Kwik Kian Gie** (26 Oktober 1999—23 Agustus 2000). Dalam perombkan pertama kabinet, **Kwik Kian Gie** diganti oleh **Dr. Rizal Ramli** (23 Agustus—12 Juni 2001), lalu diganti lagi oleh **Ir. Burhanuddin Abdullah, M.A.** (12 Juni—9 Agustus 2001).

• Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (Menko Kesra dan Taskin):
Dr. H. Hamzah Haz, M.A. (26 Oktober 1999-26 November 1999), lalu diganti oleh **Dr. Prof. Basri Hasanuddin, M.A.** (26 November 1999—23 Agustus 2000).

Dalam perombakan pertama kabinet pada 23 Agustus 2000, Kemenko Kesra dan Taskin dihapus dan digabungkan dengan Kemenkopolsoskam.

• Menteri Dalam Negeri (Mendagri): **Jenderal TNI (Purn.) Soerjadi Soedirdja.** Dalam perombakan kabinet pertama pada 23 Agustus 2000, nomenklatrunya berubah merubah menjadi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Mendagri dan Otda). Pada periode 15 Februari—23 Agustus 2000, Mendagri sempat merangkap jabatan sebagai Menko Polkam.

• Menteri Luar Negeri (Menlu): **Dr. Alwi Abdurrahman Shihab.**

• Menteri Pertahanan (Menhan): **Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A** (26 Oktober 1999—23 Agustus 2000), lalu digantikan oleh **Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H.** (26 Oktober 2000—20 Juli 2001), kemudian digantikan oleh **Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar** (20 Juli—9 Agustus 2000), yang saat itu juga merangkap sebagai Menko Polsoskam.

• Menteri Hukum dan Perundang-undangan: **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.** (26 Oktober 1999—7 Februari 2001), nomenklaturnya berubah menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Menkeh dan HAM). Pada 7 Februari 2001, **Yusril Ihza Mahendra** digantikan oleh **Baharuddin Lopa, S.H.** (7 Februari—2 Juni 2001). Setelah itu, menteri ini diganti lagi oleh **dr. Marsilam Simanjuntak, S.H.** (2 Juni—21 Juli 2001). Dan, sejak 20 Juli 2001, orang keempat yang menduduki posisi ini adalah **Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H.**

• Menteri Keuangan (Menkeu): **Prof. Dr. Bambang Sudibyo, M.B.A.** (26 Oktober 1999—23 Agustus 2000), lalu digantikan oleh **Ir. Prijadi Praptosuhardjo** (23 Agustus 2000—

12 Juni 2001), kemudian digantikan lagi oleh **Dr. Rizal Ramli** (12 Juni—9 Agutus 2001).

• Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben): **Jenderal TNI (Purn.) Susilo Bambang Yudhoyono, M.A.** (26 Oktober 1999—23 Agustus 2000). Dalam perombakan pertama kabinet pada 23 Agustus 2000, nomenklaturnya berubah menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan posisi menterinya pun digantikan oleh **Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.A., M.Sc.**

• Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag): **Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla** (26 Oktober 1999—24 Agustus 2000), lalu digantikan oleh **Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan** sejak 24 Agustus 2000.

• Menteri Pertanian (Mentan): **Dr. Ir. Mohammad Prakosa** (26 Oktober 1999—23 Agustus 2000). Lalu, sejak perombakan pertama kabinet pada 23 Agustus 2000, namanya berubah menjadi Menteri Pertanian dan Kehutanan (Mentanhut) dan pejabtanya digantikan oleh **Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec.**

• Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Menhutbun):
Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Ismail, M.Sc. (26 Oktober 1999—15 Maret 2001). Ketika perombakan pertama kabinet pada 23 Agustus 2000, namanya berubah menjadi Menteri Muda Kehutanan. Lalu, pada 15 Maret 2001, menterinya diganti oleh **Dr. Ir. H. Marzuki Usman, M.A.**

• Menteri Perhubungan (Menhub): **Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar** (26 Oktober 1999—1 Juni 2001), lalu digantikan oleh **Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno** (sejak 1 Juni 2001).

• Menteri Eksplorasi Laut: **Ir. Sarwono Kusumaatmadja** (26 Oktober 1999—1 Juni 2001). Sejak perekonomian

pertama kabinet 23 Agustus 2000, namanya berubah menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, dan pejabatnya pun digantikan oleh **Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S.** (sejak 1 Juni 2001).

• Menteri Tenaga Kerja (Menaker): **Dr. H. Bomer Pasaribu, S.H., S.E.** (26 Oktober 1999—23 Agustus 2000). Ketika perombakan kabinet pertama pada 23 Agustus 2000, namanya berubah menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) digantikan **Ir. Al Hilal Hamdi** (23 Agustus 2000—9 Agustus 2001).

• Menteri Kesehatan (Menkes): **dr. Achmad Sujudi, M.H.A.** Sejak perombakan pertama pada 23 Agustus 2000, namanya berubah menjadi Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial .

• Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas):
Dr. Yahya A. Muhaimin.

• Menteri Agama (Menag):
Drs. K.H. Muhammad Tholchah Hasan.

• Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah Republik Indonesia (Menkimbangwil): **Dr. Ir. Rozik Boedioro Soetjipto** (26 Oktober 1999—23 Agustus 2000). Pada perombakan pertama kabinet pada 23 Agustus 2000, namanya berubah menjadi Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (Menkimpraswil), dan menteri yang menjabat juga digantikan oleh **Dr. Ir. Andi Erna Anastasja Walinono, M.Si.** (Erna Witoelar).

• Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek):
Dr. Muhammad A. S. Hikam, M.A.

• Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (Menkopkm): **Drs. H. Zarkasih Nur**. Ketika perombakan

kabinet pertama pada 23 Agustus 2000, namanya berubah menjadi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM).

• Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH): **Dr. Alexander Sonny Keraf**.

• Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia: **Dr. M. Ryaas Rasyid, M.A**. (26 Oktober 1999—23 Agustus 2000). Ketika perombakan kabinet pertama pada 23 Agustus 2000, kementerian ini dihapus dan digabungkan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

• Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian: **Drs. H. Hidayat Jaelani** (26 Oktober 1999—23 Agustus 2000), lalu digantikan oleh **Drs. I Gede Ardhika** (sejak 24 Agustus 2000). Pada perombakan kabinet pertama pada

23 Agustus 2000, namanya berubah menjadi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

• Menteri Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN): **Ir. H. Laksamana Sukardi** (26 Oktober 1999—26 April 2000). Lalu digantikan oleh **Drs. H. M. Rozy Munir, M.Sc.** (26 April—23 Agustus 2000). Ketika perombakan kabinet pertama pada 23 Agustus 2000, kementerian ini dihapuskan.

• Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora): **Drs. Mahadi Sinambela, M.Si.** (26 Oktober 1999—23 Agustus 2000). Ketika perombakan kabinet pertama pada 23 Agustus 2000, kementerian ini dihapuskan.

• Menteri Negara Pekerjaan Umum (Menneg PU): **Dr. Ir. Rozik Boedioro Soetjipto** (26 Oktober 1999—23 Agustus 2000). Ketika perombakan kabinet pertama pada 23 Agustus 2000, kementerian ini dihapuskan.

• Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan:
Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si.
Sejak perombakan kabinet pertama pada 23 Agustus 2000, menteri ini juga merangkap Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

• Menteri Negara Hak Asasi Manusia (Menham):
Dr. Hasballah M. Saad (26 Oktober 1999—23 Agustus 2000). Dalam perombakan kabinet pertama pada 23 Agustus 2000, kementerian ini dihapuskan dan digabungkan dengan Kementerian Hukum dan Perundang-undangan. Sehingga, nomenklaturnya berubah menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

• Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan (Mentransduk): **Ir. Al Hilal Hamdi** (26 Oktober 1999—23 Agustus 2000). Ketika perombakan kabinet pertama pada

23 Agustus 2000, kementerian ini dihapuskan dan digabungkan dengan Kementerian Tenaga Kerja, sehingga nomenklaturnya menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menkertrans).

• Menteri Negari Pendayagunaan Aparatur Negara: **Laksamana Madya TNI (Purn.) Freddy Numberi** (26 Oktober 1999—29 Agustus 2000), lalu digantikan oleh **Dr. Ryaas Rasyid, M.A.** (29 Agustus 2000—7 Februari 2001), kemudian digantikan lagi oleh **Drs. Amwar Supriyadi, M.Sc.** (sejak 7 Februari 2001).

• Menteri Negara Masalah-masalah Kemasyarakatan:
Dr. Anak Agung Gde Agung (26 Oktober 1999—23 Agustus 2000). Ketika perombakan kabinet pertama pada 23 Agustus 2000, kementerian ini dihapuskan.

• Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia: **Drs. Manuel Kaisiepo** (sejak 23 Agustus 2000). Kementerian ini dibentuk ketika perombakan pertama kabinet pada 23 Agustus 2000.

• Menteri Muda Urusan Restrukturisasi Ekonomi Nasional: **Ir. Cacuk Sudarjianto**. Kementerian ini dibentuk ketika perombakan kabinet pertama pada 23 Agustus 2000. Namun, dalam perombakan kedua kabinet pada 1 Juni 2001, kementerian ini dibubarkan.

• Sekretaris Negara (Sesneg): **Dr. Ir. Alirahman, M.Sc.** (26 Oktober 1999—15 Februari 2000), lalu digantikan oleh **Ir. Bondan Gunawan** (15 Februari—29 Mei 2000), kemudian setelah **Bondan** mengundurkan diri, jabatan ini digantikan oleh **Drs. Djohan Effendi, M.A.** (29 Mei 2000—23 Juli 2001).

• Jaksa Agung: **Marzuki Darusman, S.H.** (1999—1 Juni 2001), lalu digantikan oleh **Baharuddin Lopa, S.H.** (6 Juni—3 Juli 2000). **Baharuddin Lopa** meninggal ketika masih menjabat sebagai Jaksa Agung, lalu digantikan oleh **dr. Marsilam Simanjuntak, S.H.** (sejak 11 Juli 2001).

• Sekretaris Kabinet (Seskab): **dr. Marsilam Simanjuntak, S.H.** (4 Januari 2000—5 Juli 2001), lalu digantikan oleh **Marzuki Darusman, S. H.** (5—23 Juli 2001).

• Sekretaris Pengendalian Pemerintahan (Sesdalprin): **Ir. Bondan Gunawan** (4 Januari—29 Mei 2001).

• Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI): **Laksamana TNI Widodo Adi Sutjipto** (26 Oktober 1999—7 Juni 2002).

• Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri): **Jenderal Pol. K.P.H. Rusdihardjo** (4 Januari—22 September 2000). **Jenderal Pol. Rusdihardjo** menggantikan Kapolri sebelumnya, **Jenderal Pol. Roesmanhadi** (29 Juni 1998—3 Januari 2000). Namun, **Jendera Pol. Rusdihardjo** diakhiri jabatannya oleh Gus Dur, dan diangkatlah **Jenderal Pol. Surojo Bimantoro** pun dinonaktifkan hingga akhirnya diberhentikan. Lalu, pada 21 Juli 2001, presiden melantik **Jenderal Pol. Chairuddin Ismail** sebagai Pjs. Kapolri.

Dalam pemerintahan Gus Dur, Kabinet Persatuan Nasional ini mengalami dua kali perombakan, yaitu pada 23 Agustus 2000 dan pada 1 Juni 2001. Sebenarnya, ada juga perubahan, meskipun tidak sebanyak perombakan pertama dan kedua, yaitu pada 12 Juni 2001.

Selain itu, Gus Dur menandatangani Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2000 tentang Sekretaris Pengendalian Pemerintahan pada 4 Januari 2000. Saat itu, Bondan Gunawan diminta untuk membantu Gus Dur di dalam pemerintahan sebagai Sekretaris Pengendalian Pemerintahan (Sesdalprin). Fungsi ini masih melekat, juga ketika ia dilantik menggantikan Alirahma sebagai Sesneg. Namun, fungsi Sesdalprin tersebut tidak ada lagi ketika mengundurkan diri sebagai Sesneg pada 29 Mei 2000.[226]

Hal ini pun diakui oleh pendukung Gus Dur, salah satunya Al Zastrouw. Menurutnya, susunan Kabinet Gus Dur telah memancing banyak kritikan dari masyarakat. Para pengkritik ini menyatakan bahwa banyak menteri yang "salah duduk", tidak sesuai dengan kedudukan dan keahlian yang dimiliki. Beberapa contoh yang bisa ditunjuk adalah Susilo Bambang Yudhoyono, seorang perwira militer yang menangani Departemen Pertambangan dan Energi; Sony Keraf, ahli filsafat jadi Menteri Negara Lingkungan Hidup; dan Muhammad A.S. Hikam, ahli politik jadi Menteri Negara dan Riset dan Teknologi.

Kritik tajam yang dilakukan masyarakat karena presiden menempatkan orang yang keahlian dan jabatanya tidak sesuai itu mencerminkan adanya pola pikir yang konvesional, linierr, dan satu arah sehingga profesionalisme hanya diukur dengan satu ukuran belaka.

Pemikiran seperti ini yang hendak dikikis oleh Gus Dur. Profesionalisme tidak bisa diukur dengan melihat satu sisi semata, mengingat tugas seorang menteri bukan hanya

226 Bondan Gunawan, *Hari-Hari Terakhir Bersama Gus Dur* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2018), hlm. 183—189.

menangani satu bidang belaka. Misalnya, tugas Menteri Riset dan Teknologi tidak semata melakukan kerja mekanik mengembangkan teknologi.

Hal-hal seperti itu tampaknya tidak terlihat karena bidang teknologi selama ini hanya dikuasai para teknokrat yang cenderung berpikir mekanik dan eksak, sehingga nilai-nilai sosial dan kultural tidak pernah mendapat perhatian yang memadai.

Ketidaksesuaian antara keahlian dan jabatan yang terjadi dalam Kabinet Gus Dur bisa dipahami sebagai terobosan untuk menjawab masalah tersebut. Jabatan menteri adalah jabatan politik, bukan jabatan karir. Karena itu yang menjadi dasar pertimbangan bukan semata-mata keahlian yang dimiliki seseorang.

Lebih dari itu adalah kemampuannya berpikir alternatif dan kecakapannya dalam mengorganisasi serta mengonsolidasi para pakar yang ada dibawah tanggung jawabnya untuk diarahkan kepada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, ukuran profesionalisme tidak saja dilihat dari kesesuaian antara profesionalisme dengan lembaga yang ditanganinya. Namun, sejauh mana orang tersebut bisa menciptakan iklim kerja yang baik serta menerapkan keahliannya secara bertanggung jawab pada bidang kerja yang diembannya.[227]

Gus Dur mempraktikkan gagasan keberagamannya dengan tidak menomorsatukan kekuatan Islam politik dalam pemerintahannya. Meskipun, ia dipilih oleh kekuatan Islam politik saat pemilu. Gus Dur hanya ingin membentuk pemerintah dengan melakukan perbaikan secara cepat dengan memilih orang yang dianggap jujur. Oleh sebab itu, syarat keilmuan tidak dinomorsatukan.[228]

---

227 "*Profesionalisme ala Gus Dur*", Tempo, 7 November 1999.

228 Wawancara dengan Khatibul Umam Wiranu di Jakarta, 10 Maret 2019.

Pada awal pemerintahan Presiden Gus Dur, Golkar menempatkan tiga wakilnya menjadi menteri yaitu Jusuf Kalla (Menteri Perdagangan dan Perindustrian), Mahadi Sinambela (Menteri Pemuda dan Olahraga), dan Bomer Pasaribu (Menteri Tenaga Kerja). Selain itu, kader Partai Golkar Marzuki Darusman menjadi Jaksa Agung RI.[229] Dari 34 orang anggota kabinet yang diumumkan sekitar 67,6% (23 orang) merupakan wakil partai dan militer yakni Partai Golkar (PG) (4 orang), PAN (4 orang), PDIP (3 orang), PPP (2 orang), PBB (1 orang), PK (1 orang), TNI (5 orang).[230]

Tugas pemerintahan Gus Dur di bidang ekonomi adalah mendesain ulang sistem ekonomi konglomerasi menjadi ekonomi kerakyatan. Pemerintahan Habibie hanya sampai upaya pembuatan undang-undang yang tergesa-gesa dan belum tentu dapat dijalankan. Sayangnya, kabinet Gus Dur adalah kabinet "supermi" atau super kompromi karena berasal dari semua partai politik atau koalisi.

Akhirnya, keraguan publik, pers, dan masyarakat luas sampai pada ultimatum untuk melihat kabinet kerja pada 100 hari pertama. Belum genap 100 hari, perjalanan kabinet masih penuh kontroversi dan tak padu satu sama lain. Bahkan, setelah 50 hari berjalan, *reshuffle* sudah dilakukan oleh Gus Dur.

Kritik terhadap kabinet Gus Dur yakni, pertama, kabinet gemuk berjumlah 35 orang. Padahal sebelumnya publik berharap kabinet ramping berisi 17 sampai 25 yang terdiri dari ahli di bidangnya. Kedua, masuknya orang-orang Orde Baru dalam kabinet Gus Dur, Sarwono Kusumaatmadja dan Bomer Pasaribu.[231]

Mengenai kabinet yang dianggap sebuah kompromi berbagai macam kekuatan politik, Akbar menyatakan bahwa memang terdengar kritik-kritik tajam terkait Kabinet

229 Akbar Tandjung, *The Golkar Way* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 277.

230 Syamsuddin Haris, *Op.cit.*, hlm. 85.

231 M. Anwar Djaelani, *Gus Dur dan Kritik, Kontroversi Itu untuk Apa?* (Surabaya: Yayasan Kampusina, 2000), hlm. 5.

Persatuan Nasional yang baru terbentuk. Dikatakan kabinet ini merupakan kabinet kompromi, bahkan over kompromi di antara partai-partai politik. Ada kekhawatiran bahwa dengan kabinet yang kompromis seperti ini, tidak akan ada partai politik oposisi.

Ketiadaan partai politik oposisi dikhawatirkan akan kembalinya kesalahan lama, yaitu ketiadaan kekuataan kontrol yang kuat dan efektif. Padahal siapapun yang berkuasa akan dikontrol atau diawasi oleh DPR sebagai konsekuensi logis dari sistem politik kita. Tak hanya DPR yang melakukan kontrol, partai politik pun melakukan kontrol terhadap kekuasaan.[232]

Berbeda pada saat masa Orde Baru, peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya sebatas menyetujui semua kebijakan eksekutif. Akbar ingin peran DPR juga sebagai pengawas eksekutif seperti idealnya pembagian tugas antara eksekutif dan legislative di negar-negara demokrasi. Ia menegaskan, dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004, presiden tak lagi bertindak selaku mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)—yaitu satu-satunya lembaga tinggi yang diberi mandat oleh majelis dan melaksanakan GBHN seperti dalam paradigma lama.

Artinya, kedudukan DPR dan presiden sejajar, sehingga DPR tidak bisa langsung menjatuhkan presiden jika presiden diduga melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) atau GBHN. Kuatnya DPR terletak pada keanggotaannya yang merangkap anggota MPR. Kalau anggota DPR di MPR dapat meyakinkan semua anggota MPR bahwa presiden melanggar UUD atau GBHN, maka MPR dapat meminta pertanggungjawaban presiden.[233]

Presiden sebagai kepala pemerintahan menerima tugas dari majelis untuk melaksanakan pemerintahan. Sedangkan,

232 Akbar Tandjung, *Moratorium Politik Menuju Rekonsiliasi Nasional* (Jakarta: Golkar Press, 2003), hlm. 193—195.
233 Indra Surya Lubis (ed), *Bahaya Tirani DPR Konflik DPR vs Presiden* (Jakarta: Lembaga Studi Politik Merdeka, 2001), hlm. 34.

lembaga-lembaga tinggi negara lainnya melaksanakan fungsi sesuai kewenangannya itu. Lembaga-lembaga tinggi negara lainnya juga wajib melaporkan pelaksanaan tugas tersebut dalam sidang tahunan MPR. Dalam Sidang Umum (SU) MPR 1999 juga dilakukan amandemen beberapa pasal. Salah satunya adalah pasal-pasar tentang pemberdayaan DPR dan pembatasan presiden. Dengan semakin kuatnya semua lembaga tinggi negara, terutama DPR, maka dapat dipastikan mekanisme *check* and *balance* dapat berjalan baik.[234]

Akbar Tandjung, selaku Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar, pun mulai aktif mengkritik Gus Dur secara terbuka. Baginya, terpilihnya Gus Dur menjadi presiden yang mendapat dukungan dari pihak nasional dan internasional dapat dikatakan sebagai awal dari harapan akan pulihnya kehidupan nasional setelah krisis. Tugas yang dihadapi oleh Gus Dur hanya tinggal menjaga modal legitimasi politik yang sudah ada untuk melaksanakan amanat reformasi dan pemulihan ekonomi.

Namun, nyatanya pemerintah belum mampu menjalankan hal itu menjadi visi kepempimpinannya. Justru yang muncul adalah kebijakan-kebijakan dan pernyataan-pernyataan kontroversi dan berpotensi untuk menimbulkan ketidastabilan dan ketidakpastian politik yang pada gilirannya semakin mempersulit pemulihan ekonomi. Gus Dur cenderung menyia-nyiakan modal politiknya dan terkesan kurang fokus serta kurang sungguh-sungguh dalam menjalankan program pemulihan ekonomi.

Tolok ukur pemulihan ekonomi, salah satunya, adalah masuknya investasi dan berkembang. Dengan demikian, masalah pengangguran dan kemiskinan yang jumlahnya membengkak pasti akan mulai teratasi. Kenyataannya, investasi belum masuk dan berkembang.[235]

---

234 Akbar Tandjung, *Op.cit.*, hlm. 190.
235 *Ibid.*, hlm. 150—151.

Kebijakan ekonomi pada masa Gus Dur ini masih akan menunggu seberapa jauh tingkat ketangguhan kolektif para kabinet di bidang EKUIN. Kalau masih berpaku pada patron, maka kabinet ini diperkirakan akan lamban, bahkan cenderung gagal.[236]

Masa kepemimpinan Gus Dur sangat berat terutama harus mengembalikan perekonomian Indonesia pascakrisis 1998. Permasalahan ekonomi juga yang menyebabkan pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak oleh DPR. Ada sepuluh masalah ekonomi, warisan dari rezim Soeharto dan Habibie, yang harus dihadapi oleh Gus Dur.

Pertama, Habibie menyatakan, selama 17 bulan memimpin Indonesia hanya memiliki utang 52 miliar USD, sedangkan Sri Mulyani menyebut utang Habibie mencapai 80 miliar USD. Selain itu, cara untuk membayar utang dengan memprivatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak meyakinkan. Dari target 91 miliar USD, hasil 49% penjualan BUMN hanya 800 juta USD.

Kedua, mengenai rekapitalisasi perbankan, Habibie menyebut 250 triliun rupiah. Sedangkan, kenyataannya, menurut Faisal Basri, rekapitalisasi perbankan mencapai angka 570 triliun rupiah. Ketiga, ekonom Sjahrir mengungkapkan reaksi pasar yang negatif atas kebijakan Habibie mengadakan program Jaringan Pengamanan Sosisal (JPS) yang bersifat antipasar dan ada penyalahgunaan dana JPS sebesar 8 triliun rupiah (Gatra, 23 Oktober 1999).

Keempat, sepanjang Januari—Agustus 1999 nilai investasi Jepang telah mengalami penurunan 70% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penanaman modal asing secara keseluruhan juga menurun. Kelima, peringkat daya saing Indonesia anjlok. *World Economic Forum* (WEF) merilis

236 Didik J. Rachbini, *Ekonomi di Era Transisi Demokrasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 26-27.

peringkat Indonesia di posisi 37 dari 59 negara. Padahal pada krisis 1998, Indonesia menempati posisi 31. Keenam, defisit neraca perdagangan belum bisa diatasi.

Ketujuh, angka penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sebanyak 136, 91 juta jiwa. Hal ini semakin parah, karena diperkirakan sebanyak 182,28 juta orang tak memiliki daya beli. Sedangkan, penduduk yang masih memiliki daya beli hanya 25,16 juta orang. Kedelapan, berdasarkan data Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) 1999, angka pengangguran langsung dan tak langsung berjumlah 60,76 juta orang. Ini merupakan indikator tentang suramnya prospek lapangan pekerjaan.

Kesembilan, upah pekerja di Indonesia lebih murah dibandingkan dengan Vietnam. Kebijakan untuk menaikan upah sangat penting dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ini juga termasuk gaji Pegawai Negeri Sipil dan militer. Kesepuluh, masih terjadinya sistem patron bisnis. Pola ekonomi skala besar yang terkait dengan patron politik tingkat tinggi merupakan inefisiensi dan pemborosan ekonomi, serta menyuburkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).[237]

Kwik Kian Gie mencatat, pada umumnya, program-program ekonomi partai peserta pemilu 1999 sangat mirip, jika kita tak ingin sebut sama. Program-programnya adalah daftar kehidupan ekonomi yang bagus, makmur, adil, dan sejahtera. Bagaimana cara mencapainya, tidak disinggung. Bila menuliskan yang dinamakan program adalah menulis hal-hal normatif yang bagus dan ideal, menjadi problematis, apakah itu dinamakan platform partai?

"Partai Golkar ingin mengembangkan ekonomi rakyat, memberdayakan usaha kecil, menengah, dan koperasi. Prioritas-

237 Irwan Suhanda (ed), *Perjalanan Politik Gus Dur* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 34—37.

tertingginya jaringan pengamanan sosial. Pengendalian nilai tukar rupah dan inflasi.......... penjabaran pasal 33 UUD 1945. Membenahi ekonomi biaya tinggi. Bagaimana cara mencapai ini semua tidak disebutkan.

PKB ingin memperjuangkan terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan sosial. Sistem ekonomi pasar yang bertumpu pada kemampuan individu, tetapi ada kerja sama antara sesama anggota masyarakat. Menghormati kepemilikan individu. Negara menjamin persamaan kesempatan usaha.......... Cara mencapai ini semua dan perincian yang lebih dalam tak ada. PAN ingin menwujudkan kesejahteraan sosial lewat kemakmuran yang berkeadilan. Kemakmuran ditopang tiga pilar utama: pertumbuhan, stabilitas, dan efisiensi. Keadilan disangga kebebasan, persamaan, dan tertib sosial. Pembangunan ekonomi tak mengenal perbedaan ras, suku, dan agama......... Caranya juga tidak ada."[238]

Penyelesaian krisis ekonomi tidak mungkin terjadi tanpa penyelesaian politik. Meski pergantian presiden terjadi, tetapi kestabilan politik belum tercipta sepenuhnya karena tidak terjadi pergantian rezim secara menyeluruh. Tak adanya pergantian rezim politik telah menimbulkan proses rekonsiliasi nasional. Pergantian rezim merupa sebuah kondisi di mana anasir-anasir rezim lama tidak boleh dilibatkan sepenuhnya untuk mengendalikan pemerintahan dan memiliki kontrol atas kekuasaan politik.[239]

Upaya menghadapi krisis tersebut adalah dengan memulihkan kembali kepercayaan terhadap rupiah dengan memegang aset dalam dominasi rupiah tidak akan anjlok nilainya. Intervensi Bank Indonesia (BI) ke pasar modal untuk menahan kejatuhan rupiah adalah salah satu upaya menyelesaikannya. Namun, tidak bisa terus-menerus karena

---

238 Kwik Kian Gie, *Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Transisi Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 202—203.

239 Hermawan Sulistiyo, *Op.cit.*, hlm. 16—17.

membutuhkan cadangan devisa yang tak sedikit. Upaya selanjutnya memulihkan kepercayaan masyarakat kepada sistem perbankan.

Upaya ketiga, mengembalikan kepercayaan masyarakat atau dunia kepada sektor swasta dengan cara membenahi mekanisme dan aturan main bisnis di Indonesia yang lebih transparan, *fair*, dan mengikuti mekanisme pasar bebas yang sehat. Upaya terakhir adalah mempertahankan kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri kepada kebijaksanaan pemerintah. Salah satu faktor penentunya adalah seberapa jauh pemerintah dapat merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai realistis dan kondusif terhadap pembangunan ekonomi, serta tak terdapat defisit anggaran yang mengakibatkan distorsi ekonomi.[240]

Jika, itu terjadi maka akan berlangsung proses rekonsiliasi yang kondusif. Di Indonesia tidak terjadi hal ini. Dengan demikian anasir-anasir rezim lama akan kembali bersatu untuk bertahan dalam kekuasaan dan sebagian lainnya akan coba merebut kembali kekuasaan. Saat Gus Dur terpilih menjadi presiden, Gus Dur terpaksa mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik lainnya. Konsolidasi kekuasaan Gus Dur berlangsung meski hanya pada tingkat reshuffle kabinet.

Akbar menilai, tugas utama pemerintahan Gus Dur ini harus memiliki *sense of crisis* dan *sense of urgency* dalam merumuskan program prioritas penyelenggaraan negara. Ada tiga hal utama yaitu: pertama, pemulihan kondisi nasional; kedua, pemulihan keamanan dan ketertiban; ketiga, penanganan berbagai gejolak sosial-politik di beberapa daerah yang mengarah pada disintegrasi negara. MPR melalui GBHN, baik secara implisit maupun eksplisit, telah menugaskan kepada presiden untuk memprioritaskan ketiga hal ini dengan sungguh-sungguh.[241]

240 Ambia B. Boestam, dkk (ed), *Kahmi, Reformasi, dan Civil Society* (Jakarta: Majelis Nasional KAHMI, 2000), hlm. 23—24.
241 Akbar Tandjung, *Op.cit.*, hlm. 197.

Awal bongkar pasang itu terjadi ketika Presiden Gus Dur berada di Hotel Watergate, Washington, Amerika Serikat (14/11/99). Ia menyatakan sudah mempunyai daftar tiga menteri yang akan dicopot dan hanya menunggu pembuktian pengadilan. Muncul spekulasi bahwa tiga menteri tersebut adalah Menkokesra Hamzah Haz, menerima dana Bank Bali, Yusril Ihza Mahendra, Menkumdang dituduh menggelapkan dana dari Habibie, dan Menaker Bomser Pasaribu terlibat penyimpangan dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).[242]

Menteri lain yang diduga melakukan KKN adalah Bomer Pasaribu. Bomer diduga tersangkut *mark up* senilai 72 miliar rupiah pembangunan Menara Jamsostek ketika ia menjabat sebagai Komisaris PT Jamsostek. Sedangkan, Jusuf Kalla tersangkut kredit macet yang membuat lima perusahaannya harus berada di bawah penangangan Badan Penyehatan Perbankan (BPPN). Salah satu perusahaan Jusuf Kalla yang menjadi sorotan adalah PT Banten Jaya Persada (BJP) dengan kredit 1,4 triliun rupiah dari Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo).[243]

Terkait ucapan Gus Dur yang menyatakan ada tiga menteri yang terlibat KKN, ia mendapat tentangan keras dari Hamdan Zoelva Anggota PBB di DPR. Ia menegaskan tindakan Gus Dur yang menyebut ada tiga menteri yang KKN tanpa penyelidikan terdahulu itu menujukkan presiden bersikap otoriter. “Jadi harus memenuhi proses penyelidikan dulu. Tanpa itu, tidak benar dong. Jadi otoriter (lagi) negara ini, jika tanpa melalui prosedur hukum,” ucap Hamdan.[244]

Saat Gus Dur baru pulang dari luar negeri, Hamzah Haz langsung menemui Gus Dur dan meminta Gus Dur mengoreksi pernyataannya yang menyebut Hamzah Haz terindikasi KKN. “Saya sangat kaget, tiba-tiba Gus Dur mengumumkan

---

242 Mohammad Sobary, dkk (ed), *Op.cit.*, hlm. 42.

243 *Ibid.*, hlm. 166.

244 Yudi Pramuko, *Yuzril Ihza Mahendra: Sang Bintang Cemerlang* (Jakarta: Putera Berdikari Bangsa, 2000), hlm. 59.

bahwa saya digantikan Basri Hasanuddin karena saya minta mengundurkan diri. Padahal yang saya bisikkan kepada Gus Dur bukan minta mundur, melainkan minta supaya Gus Dur mengumumkan bahwa saya tidak melakukan KKN," kata Hamzah Haz sambal tertawa.[245]

Gus Dur dinilai sering membuat manuver dan sering mengabaikan kepentingan partai koalisi. Mendapat tekanan, Gus Dur bermanuver dengan memecat Hamzah Haz, selaku Menko Kesra, dari PPP dan Wiranto (Menko Polkam). Menurut Akbar, kebijakan, kinerja, dan gaya pemerintahan Gus Dur banyak memicu ketidakpuasan partai-partai politik.[246]

Sedangkan, Amien menilai bahwa ada gelagat bahwa Gus Dur akan menjalankan pemerintahan secara ekslusif sejak hari pertama Gus Dur terpilih sebagai presiden dengan menolak komunikasi dengan anggota DPR/MPR. Ia mengaku ditolak bertemu Gus Dur oleh protokoler istana, beberapa hari setelah terpilih.[247]

Sementara itu, pada jenjang birokrasi di bawahnya sangat sedikit terjadi perubahan rezim kekuasaan. Jika proses ini tak terhambat oleh bertahannya mayoritas kekuatan-kekuatan lama di dalam birokrasi, maka jangka waktu konsolidasi kekuasaan hingga mampu menciptakan stabilitas politik sampai masa pemerintahan berikutnya.[248]

Gus Dur juga melakukan reformasi di Sekretariat Negara (Setneg) dengan merombak serta mengubah struktur dan fungsinya yang sebelumnya terpusat pada satu menteri. Gus Dur memecahnya menjadi lima sekretariat yaitu: sekretaris negara, sekretaris kabinet, sekretaris kepresidenan, sekretaris militer, dan sekretaris pengendalian pemerintahan.

245 Mohammad Mahfud MD, *Setahun Bersama Gus Dur* (Jakarta: Murai Kencana, 2010), hlm. 92.
246 Akbar Tandjung, *Op.cit.*, hlm. 277.
247 Wawancara dengan Amien Rais di Jakarta, 9 Januari 2019
248 Hermawan Sulistiyo, *Op.cit.*, hlm. 18.

Reformasi di Era Gus Dur

Langkah reformasi pemerintahan yang pertama dilakukan Gus Dur adalah membina sekelompok orang yang dipercayanya untuk mengawasi proses reformasi dan pengelolaan negara. Tindakan resmi pertamanya adalah membubarkan dua departemen, yakni Departemen Penerangan (Deppen) dan Departemen Sosial (Depsos).

Departemen Penerangan dianggap lebih banyak memiliki sifat merugikan bagi masyarakat. Pendekatannya yang Stalinis terhadap pengendalian reformasi dan juga dianggap sering memeras uang dari penerbit media. Rasionalisasi pembubaran Departemen Sosial adalah korupsi dan praktik-praktik pemerasan telah sedemikian merasuki departemen ini, sehingga lembaga ini tak lagi dapat direformasi dan kegiatannya harus dilakukan oleh departemen-departemen lain.

Walaupun Gus Dur terhambat oleh keharusan untuk sedapat mungkin bekerja sama dengan koalisinya, Gus Dur dapat dengan cepat merampingkan departemen-departemennya dan memulai proses reformasi agar mereka dapat secara berangsur-angsur ikut serta. Selain itu, Gus Dur juga mengurangi kekuasaan Setneg, yang pada masa Soeharto merupakan pemerintahan dalam pemerintahan dan mengendalikan aspek-aspek pemerintahan jauh di luar cakupan kewenangannya.[249]

Bukan tanpa alasan langkah reformasi pertama Gus Dur adalah di bidang reformasi. Pasalnya, hingga era Habibie justru birokrasi sama sekali belum tersentuh gerakan reformasi. Padahal salah satu tuntutan terpenting dari gerakan reformasi adalah penghapusan KKN dan birokrasi menjadi lumbung atau jaringan KKN terbesar. Bahkan Sumitro Djojohadikusumo menyatakan ada kebocoran anggaran hingga 30% di birokrasi.[250]

Pembubaran Deppen dan Depsos mendapat protes

249 Greg Barton, *Op.cit.*, hlm. 382
250 Syamsuddin Haris, *Reformasi Setengah Hati* (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 71.

dari pegawai dua departemen tersebut. Mereka langsung berdemonstrasi dipimpin Menteri Penerangan Yunus Yosfiah. Yunus menilai kebijakan presiden itu kurang arif karena di saat krisis justru menghapus departemen yang memiliki 50.875 pegawai.

Menanggapi demonstrasi tersebut, Gus Dur menegaskan bahwa pembubaran Deppen sesuai dengan prinsip yang ia pegang sejak dulu, bahwa pemerintah sebaiknya tidak terlalu banyak campur tangan dalam urusan masyarakat. Rakyat sudah banyak menderita di tangan pemerintah, maka Gus Dur bertekad untuk memperbaikinya dengan melakukan penataan dan efisiensi. Pekerjaan Deppen, kata Gus Dur, dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri. Bantuan yang diberikan pemerintah tidak harus sampai membentuk departemen. Departemen terlalu besar hanya untuk mengurus soal penerangan.

Sedangkan untuk Depsos, Gus Dur berpendapat bahwa kerja sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah yang semestinya hanya menjadi fasilitator masyarakat. Kerja sosial sendiri sebaiknya harus dilakukan oleh masyarakat.[251]

Selain itu, Gus Dur juga ingin menghapuskan TAP MPRS No. XXV/1966, tentang pelarangan ajaran Marxisme dan Lenninisme. Golkar mengentang keras kebijakan Presiden Gus Dur yang ingin mencabut TAP MPRS tentang pelarangan Parta Komunis Indonesia (PKI). Menurut Golkar, hal itu tidak sejalan dengan ideologi Pancasila. Tak hanya itu, Golkar lahir sebagai antitesis komunisme.[252]

Dampak lain dari kebijakan Gus Dur yang ingin menghapuskan TAP MRS NO.XXV/1966 tentang pelarangan komunisme adalah adanya tuduhan kepada Gus Dur dan menteri-menterinya sebagai persekongkolan komunis. Tak hanya itu, Masyararakat Anti-Komunis Indonesia (MAKI)

---

251 L. Misbah Hidayat, *Op.cit.*, hlm. 63—64.
252 Akbar Tandjung, *Op.cit.*, 2007, hlm. 209.

mengklasifikasikan Rizal Ramli, Wimar Witoelar, Marsillam Simanjuntak, Bondan Gunawan, dan Letjen Agus Wirahadikusumah sebagai prokomunis yang akan membangkitkan kembali PKI. MAKI juga menuduh Gus Dur dan sekutunya melakukan konspirasi untuk menyerang kepentingan Golkar, tentara, dan Islam.[253]

Mengenai rencana pencabutan TAP MPRS oleh Gus Dur, Yusril berpendapat ada dua hal yang harus dibedakan yakni komunisme sebagai paham yang dilarang dan perlakuan terhadap eks komunis serta keluarganya. Menurutnya, yang semestinya dihapus itu adalah peraturan-peraturan zaman Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).

Sebenarnya yang berwenang mencabut TAP tersebut, kata Yusril, adalah MPR bukan pemerintah. TAP tersebut tidak memerintahkan sikap diskriminasi hukum. Kebijakan itu hanya pelaksanaan dari kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru.

Yusril juga setuju apabila ketentuan yang diskriminatif dicabut dan departemennya akan membantu bagi orang Indonesia yang menginginkan naturalisasi akibat kebijakan yang salah tersebut. Sikap Yusril ini sejalan dengan sikap dirinya sebagai Ketua Umum PBB. PBB akan menolak tegas gagasan pencabutan TAP MPRS tersebut.[254]

Sedangkan, menurut Khatibul Umam, anggota DPR Fraksi PKB menyatakan bahwa usulan Gus Dur tersebut lebih disebabkan oleh implikasi sosial rasa humanisme. Bukan sebagai upaya atau manuver politik. Hanya saja, ucapan dan tujuan Gus Dur tersebut dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu untuk mengkritik Gus Dur.[255]

Gus Dur meminimalkan peran militer di dalam politik dengan mereformasinya. Pertama, memisahkan Menteri-

---

253 Max Lane, *Unfinisihed Nation* (Yogyakarta: Djaman Baroe, 2014), hlm. 336.
254 Yudi Pramuko, *Op.cit.*, 55—56.
255 "*Di Atas Kertas Gus Dur Jatuh*", Garda, No. 60/Th II, 27 April—3 Mei 2000.

Pertahanan (Menhan) dengan jabatan Panglima TNI. Menempatkan sipil menjadi menhan. Memilih Panglima TNI dari matra Angkatan Laut, Widodo AS dengan alasan bahwa wilayah Indonesia merupakan kelautan. Kedua, melikuidasi lembaga Badan Koordinasi Strategi Nasional (Bakortanas) dan Penelitian Khusus (litsus) dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 38/2000 pada 10 Maret 2000.[256]

Militer yang selama 32 tahun menjadi bagian dari kekuasaan rezim Soeharto harus ditata ulang. Nepotisme di militer harus dihilangkan di era reformasi. Sebab, kedekatan elite militer dengan rezim sebelumnya membawa dua akibat. Pertama, hubungan moral dengan otoritas lama itu membuat para komandan TNI tidak bebas bereaksi. Kedua, hubungan itu juga menghambat banyak prajurit profesional dan berkualitas untuk berkarier.[257]

Reshuffle Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla

Pada 24 April 2000, Gus Dur mengambil keputusan yang memunculkan dinamika dalam koalisinya. Gus Dur memecat Jusuf Kalla, Menteri Perdagangan dan Perinsdustrian dari Partai Golkar, dan Laksamana Sukardi, Menteri BUMN dari PDIP. Alasan pemecatan Laksamana Sukardi adalah karena dianggap tidak mampu bekerja dengan anggota-anggota timnya dan juga karena Gus Dur tak senang dengan pejabat-pejabat yang diangkat oleh Sukardi.[258]

Namun, laporan di media massa menyebutkan baik Jusuf Kalla dan Sukardi ternoda korupsi. Greg Barton menyaksikan Gus Dur membantah pernah mengatakan hal ini dalam rapat tertutup dan tak seorang pun wartawan yang hadir. Laksamana Sukardi tokoh kunci di PDIP dan dianggap "anak kesayangan" Megawati. Catatan kariernya pun cemerlang sebagai *banker*

256 L. Misbah Hidayat, *Op.cit.*, hlm. 65.
257 F. X. Bambang Irawan, *Op.cit.*,, hlm. 37.
258 Greg Barton, *Op.cit.*, hlm. 398.

profesional dan berintegritas. Namun, karena profesionalitas dan integritasnya itu, Sukardi mendapat hambatan di pemerintahan Gus Dur.

Sukardi sangat getol mengejar koruptor dan tak peduli bahwa pengejarannya ini melampaui batas kewenangannya. Gus Dur sudah beberapa kali mencoba menahan aksinya agar tak melakukan pengejaran terhadap tokoh-tokoh tertentu mengingat konsekuensi politik yang akan timbul akibat aksi pengejarannya.[259] Secara pribadi Jusuf Kalla sangat marah dengan tuduhan tersebut. Apalagi, ia tak pernah diberi kesempatan untuk mengklarifikasi tuduhan tersebut kepada Gus Dur. Jusuf Kalla bahkan sampai menyebut Gus Dur tukang fitnah.[260]

Gus Dur memberikan bukti dugaan korupsi Jusuf Kalla kepada Akbar Tandjung setebal sekitar 400 halaman itu berisi tumpukan fotokopi dokumen penting. Ada berkas yang membahas impor belalai gajah, peralatan untuk melayani penumpang di bandar udara—oleh Bukaka, perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki Jusuf Kalla.

Di catatan kaki dokumen itu terlihat tulisan: Bukaka melakukan *mark up* besar-besaran. Harga belalai gajah itu sampai 400.000 USD. Padahal seharusnya cuma 10.000 USD. Ada lagi "kecurangan" Jusuf Kalla lainnya: mengimpor mesin dari Cina yang tak sesuai dengan faktur.

Awalnya, Jusuf Kalla dituding Gus Dur melakukan berbagai penyimpangan: kasus proyek listrik, impor beras oleh Badan Urusan Logistik (Bulog), dan kebijakan mobil mewah.

Dalam kasus listrik, Jusuf Kalla didakwa melakukan KKN saat memenangkan proyek jaringan listrik tegangan tinggi Klaten—Tasikmalaya. Lintasan kawat itu rencananya dibangun PT Bukaka Teknik Utama, namun dibatalkan Menko Ekuin

259 *Loc.cit.*
260 "*Jusuf Kalla: Gus Dur Tukang Fitnah*", Tempo, 7 Mei 2000.

Kwik Kian Gie, atas instruksi Gus Dur. Padahal Bukaka menang melalui tender terbuka pada Juni 1998.

Gus Dur mengatakan, Bukaka memenangkan tender karena dibeking B.J. Habibie, yang saat itu menjabat presiden. Versi Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi, Muzani Syukur, lain lagi. Katanya, Bukaka dinilai tak memuaskan saat membangun proyek serupa di 1995. Sementara Menteri Pertambangan dan Energi, Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan bahwa Bukaka tak siap secara teknis dan finansial.

Dalam kasus Bulog, Gus Dur mendakwa salah satu adik Jusuf Kalla kongkalikong mengimpor beras. Itu berkaitan dengan rencana pemerintah untuk mengimpor bahan pangan sebanyak 1 juta ton pada 2000. Jusuf Kalla juga ditengarai "bermain" dalam impor mobil mewah. Kata tuduhan itu, Jusuf menerima 75 juta rupiah per mobil impor di atas 4.000 cc.[261]

Saat Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla meminta penjelasan lebih spesifik terkait dugaan KKN hingga dapat dipecat, Gus Dur pun menjawab, "Enggak usah debat, enggak usah apa-apa, saya pakai hak saya. Saya ganti saudara!" tegas Laksamana menirukan Gus Dur.[262] Laksamana menyatakan, beberapa saat kemudian tensi kemarahan Gus Dur menurun. Lalu, ia menawarkan konsesi kepada Laksamana dan Jusuf Kalla. "Saya masih punya hak untuk mengangkat lima Duta Besar. Ada kuota yang belum pakai. Saudara boleh pilih," kata Gus Dur, kemudian ditukas oleh Laksamana. Laksamana pun menimpali, "Gus, kalau begitu, dubes-dubes itu koruptor semua!".[263]

Namun, pemecatan Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla telanjur tak bisa diterima dan dipahami oleh PDIP dan Golkar yang kemudian mengajukan hak interpelasi di parlemen. Padahal awalnya, Megawati tak begitu marah dengan pemecatan Laksamana Sukardi. Mereka pun mengakui bahwa

---

261 "*Siap Buka-Bukaan*", Majalah Gatra, 24 Juli 2000.

262 Tjipta Lesmana, *Dari Soekarno Hingga SBY, Intrik dan Lobi Para Penguasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 184.

263 Tjipta Lesmana, *Op.cit.*, hlm. 219.

Laksamana terindikasi melakukan KKN. Selain itu, mengenai tak ada pembelaan dari Megawati secara langsung karena iuran Laksamana Sukardi kepada partai cukup kecil. Bahkan, tak sebanding dengan gaji jabatannya sebagai menteri. Pemecatan Laksamana Sukardi memang menimbulkan masalah di DPR, terutama anak-anak kos PDIP yang ingin tampil.[264]

Effendie Choirie, anggota DPR PKB mengungkapkan rencana penggunaan hak interpelasi ini sebenarnya manuver Golkar. "Kalau Jusuf Kalla dan Laksamana tidak puas, mereka boleh menuntut ke pengadilan. Tapi secara pribadi, bukan partainya, bukan DPR. Ini semua tak terlepas dari manuver Golkar. Bagaimana ia ingin dianggap reformis," kata Effendi yang mengakui manuver ini didukung oleh PDIP.

"PDIP sama emosinya dengan Golkar, terutama kalangan kapitalisnya, karena Laksamana digeser," ujarnya. Effendi juga menuding keterlibatan Ginandjar Kartasasmita sebagai elite yang berada di belakang manuver Fraksi Partai Golkar. "Ginandjar itu kan sekarang penyandang dana di Golkar. Sangat mungkin dia yang buat. Fuad Bawazier, Ade Komarudin, bahkan Akbar Tandjung jelas mendukung. Mereka ini kelompok-kelompok pro *status quo* yang mendompleng kereta reformasi sehingga sekarang masih duduk di DPR," papar Effendi.[265]

Gus Dur dibuat gusar, keinginannya untuk melakukan klarifikasi secara tertutup ditolak. Kedua, mereka menerima permohonan maaf Presiden Gus Dur. Pembahasan tentang sikap kelima fraksi tersebut dilakukan di Hotel Crown lantai tiga, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, kemarin, dari pukul 14.00 sampai 17.00 WIB.

Turut hadir dalam pertemuan itu, antara lain Fraksi PDI Perjuangan (Zulvan Lindan, Meilono Soewondo, Didi Suprianto, Heri Akhmadi, Chandra Wijaya), Fraksi Reformasi-

264 Wawancara dengan X di Jakarta, 20 Februari 2019.
265 "*Interpelasi, Uji Coba Menggoyang Gus Dur*", Media Indonesia, Minggu, 28 Mei 2000.

(Hatta Radjasa, Alvin Lie), Fraksi PBB (Ahmad Soemargono), Fraksi PPP (Suryadarma Ali, Bachtiar Chamsyah), dan Fraksi PG (Ade Komaruddin, Daryatmo, Hafi, Ali Yahya).

Alasan yang mendasari rapat konsultasi secara terbuka untuk mengklarifikasi KKN Laksamana Sukardi dan Yusuf Kalla disebabkan isu KKN terhadap kedua mantan menteri tersebut telah menjadi wacana publik. Zulvan Lindan, anggota Fraksi PDIP, yang dilakukan Presiden Gus Dur menurutnya, adalah kebohongan publik sekalipun itu dilakukan dalam rapat tertutup. "Bayangkan, semula alasan pemberhentian itu tidak bekerja sama, tapi dalam rapat konsultasi itu dia bilang karena KKN. Presiden *kok* ngomongnya begitu. Mau di bawa ke mana negara ini yang tidak konsisten," tegas mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini.

Ade Komaruddin, salah seorang motor penggerak interpelasi dari Fraksi PG mengatakan jika Gus Dur ingin terus sampai 2004, maka ia harus mengubah perilakunya yang inkonsisten. Ade juga menyesalkan pernyataan Gus Dur yang menuding Laksamana dan Kalla terlibat KKN. "Tuduhan dan fitnah yang dilakukannya tidak dapat dibuktikan. Itu meresahkan masyarakat dan munculnya instabilitas politik. Kebiasaan itu (menuduh) harus dihentikan," ujarnya.[266]

Akhir Juni 2000 atau satu bulan sebelum Gus Dur memberikan jawaban atas hak interpelasi DPR, ia membuat rilis daftar-daftar musuh politiknya yang berupaya melengserkan Gus Dur sebagai presiden. Gus Dur beranggapan ada dua hal yang lawan politiknya ingin menjatuhkannya. Pertama, makin memanasnya konflik Maluku, yang menurut Gus Dur dibiayai oleh orang-orang di Jakarta untuk mendelegitimasi kekuasannya. Kedua, kasus hukum Soeharto dan keluarga serta kroni-kroninya.

266 "*Maaf Diterima, Klarifikasi Jalan Terus*", Media Indonesia, 23 Juli 2000.

Gus Dur menyatakan akan menangkap beberapa anggota DPR yang meprovokasi suasana politik. "Hari ini saya telah menandatangani izin kepolisian untuk memeriksa beberapa anggota DPR yang terlibat dalam berbagai kerusuhan," ungkap Gus Dur di depan peserta Forum Rembuk Nasional (FRN) di Denpasar, 1 Juli 2000.

Ade Komaruddin dan Fuad Bawazier merupakan bagian dari beberapa anggota DPR yang namanya disebut-sebut akan diperiksa. Ade Komaruddin menyatakan, itu hanya manuver Gus Dur untuk mempertahankan kekuasannya. Ade menolak sebagian anggota DPR disebut biang kerok masalah bangsa, justru biang kerok masalah bangsa adalah eksekutif.

Sedangkan, Fuad Bawazier mengatakan bahwa itu adalah represi pemerintahan Gus Dur. Bahkan, Fuad menyatakan tindakan represif adalah pekerjaan bodoh, pemerintah bisa menggali kuburannya sendiri.[267]

1. **Fuad Bawazier** (mantan Menkeu), menggerakkan kekuatan anti-Gus Dur
2. **Ginandjar Kartasasmita** (mantan Menko Ekuin), menggalang kekuatan anti-Gus Dur
3. **Arifin Panigoro** (Ketua Fraksi PDIP di DPR), menggalang hak interpelasi dan *impeachment* atas Gus Dur
4. **Parni Hadi** (Republika), menggalang opini anti-Gus Dur
5. **M. Jusuf Kalla** (Bukaka), Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
6. **Agung Laksono** (Golkar), mengeksploitasi kesehatan Gus Dur
7. **Amien Rais** (Partai Amanat Nasional), merongrong kewibawaan Gus Dur
8. **Akbar Tandjung** (Golkar), HMI Connection
9. **Beddu Amang** (mantan Kepala Bulog), HMI Connection

267 M. Anwar Djaelani, *Op.cit.*, hlm. 108.

10. **Syahril Sabirin** (Direktur Bank Indonesia), kasus Bank Bali
11. **Ja'far Umar Thalib** (Laskar Jihad), menggerakkan Laskar Jihad
12. **Fahmi Idris** (mantan Menaker), kaki tangan Orde Baru
13. **Mochtar Pabottingi** (peneliti LIPI), Sinis terhadap Gus Dur
14. **Achmad Tirto Sudiro** (Ketua Umum ICMI), HMI Connection
15. **Eggi Sudjana** (Ketua Umum PPMI), Islam garis Keras
16. **Dawam Rahardjo** (Rektor Unisma, Bekasi), Sinis pada Gus Dur
17. **Adi Sasono** (capres dari Partai Daulat Rakyat), musuh lama dan sinis terhadap Gus Dur
18. **Bustanil Arifin** (mantan Kepala Bulog), HMI Connection
19. **Mar'ie Muhammad** (mantan Menkeu), HMI Connection
20. **Wiranto** (mantan Menko Polkam), pro-kubu Habibie
21. **R. Hartono** (mantan Mendagri), kaki tangan Orde Baru
22. **Indria Samego** (LIPI), kritis terhadap Gus Dur
23. **Harmoko** (Golkar), kaki tangan Orde Baru
24. **Eki Syachrudin** (Golkar), HMI Connection
25. **A.A. Baramuli** (mantan Ketua DPA), Kasus Bank Bali
26. **A. Watik Pratiknya** (The Habibie Centre), pro-kubu Habibie
27. **Yorrys Raweyai** (Pemuda Pancasila), Pendukung Papua Merdeka
28. **Djaja Suparman** (mantan Pangkostrad), pro-kubu Habibie
29. **Nugroho Djajoesman** (mantan Kapolda Metro Jaya), pro-kelompok Habibie
30. **Syarwan Hamid** (mantan Mendagri), kaki tangan Orde Baru
31. **Feisal Tanjung** (mantan Panglima ABRI), kaki tangan Orde Baru

32. **Rahardi Ramelan** (mantan Memperindag), pro-kubu Habibie
33. **Jimly Ashiddiqie** (The Habibie Centre), pro-kubu Habibie
34. **Farid R. Fagih** (Gowa), mengeksploitasi kasus Bulog
35. **Rustam Kastor** (Ambon, purnawirawan TNI), provokator Maluku
36. **Abdul Qadir Jaelani** (Partai Bulan Bintang), Islam Radikal
37. **Habib Rizieq** (Front Pembela Islam), Islam Garis keras
38. **Ahmad Sumargono** (KISDI), Islam Garis keras
39. **Al Chaidar** (penulis), Islam Radikal
40. **Soeharto** (keluarga Cendana), Biangnya Orde Baru.[268]

Empat puluh nama-nama musuh Gus Dur dan perannya sebenarnya hanya tindak lanjut atau perincian dari tindakan Gus Dur yang memecat Jusuf Kalla dan Laksamana Sukardi serta intervensinya. Setidaknya, ada empat kekuataan saat itu yang sudah mencoba untuk menurunkan pamor Gus Dur sebagai presiden. Pertama adalah kelompok yang kecewa karena kalah dalam pemilihan presiden. Kedua adalah sisa-sisa Orde Baru. Ketiga, Poros Tengah, dukungan itu semula diberikan dengan harapan mereka akan mendapatkan konsesi politik dan ekonomi. Namun, apa yang mereka harapkan tidak terlaksana, sehingga sikap mereka pun berbalik arah. Keempat, TNI yang tak senang dengan supremasi sipil yang Gus Dur lakukan.[269]

Ginanjar Kartasasmita, Wakil Ketua MPR dari Partai Golkar merasa geli atas pemberitaan tersebut. Ia berpendapat sumber beritanya sangat rendah. Ginanjar membantah ingin menjatuhkan Gus Dur, meski dalam beberapa diskusi

268 "*Gus Dur Mengincar Kakap*", Majalah Gatra, 3 Juli 2000.
269 "*Lima Menggoyang Kuasa*", Forum Keadilan, No. 47, 5 Maret 2000.

diakuinya memang ada wacana untuk menjatuhkan Gus Dur. Dia merasa tak pernah berbicara dengan tokoh-tokoh politik untuk menggerakkan massa, mendorong situasi ke arah ketidakstabilan. Ia menanggap bahwa Gus Dur menggunakan isu KKN untuk melabeli siapapun yang tidak sejalan dengan idenya.[270]

Bukan tanpa sebab, Gus Dur mengincar Ginanjar. Ginanjar dianggap sebagai salah satu kroni terkuat Orde Baru yang masih berkuasa setelah reformasi. Sejumlah jabatan strategis dan vital pernah ia emban. Bahkan, Jeffrey A. Winters mencatat bahwa Ginanjar Kartasasmita merupakan anggota Tim Sepuluh yang mengurus dan mengendalikan kebijakan perekonomian domestik pasca-era *booming* minyak pada 1978.[271]

Tak hanya itu, dalam waktu setahun Tim Sepuluh telah lahir—mungkin merupakan badan pemerintahan nonmiliter yang paling kuat dan paling jahat yang ada di Indonesia sejak masa kejayaan Ibnu Sutowo di Pertamina.[272] Karena kekuasannya yang besar pada masa Orde Baru, ia dianggap punya kekuatan dan pengaruh untuk balas dendam politik setelah reformasi.

Pada Kamis 20 Juli, Presiden Gus Dur menyampaikan jawaban atas interpelasi dewan. Sayangnya, dalam jawaban itu Gus Dur tidak menyentuh substansi yang ditanyakan. Juga dalam jawaban tertulis pada Jumat 21 Juli, kepala negara tidak menyentuh substansi persoalan, selain meminta maaf atas ketidakpuasan anggota dewan menyampaikan pendapat.

Sebanyak 252 dari 500 anggota DPR, kemarin mengajukan hak pernyataan pendapat atas ketidakpuasan mereka terhadap jawaban Presiden Gus Dur mengenai alasan pemecatan dua menteri yang ditanyakan dalam interpelasi dewan.[273] Tak hanya memberikan keterangan, Gus Dur juga memberikan dokumen kepada Akbar Tandjung yang diduga laporan KKN yang

270 "*Rezim Zalim Pasti Jatuh*", Majalah Gatra, 3 Juli 2000.
271 Jeffrey A. Winters, *Power in Motion: Modal Berpindah, Modal Berkuasa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1999), hlm. 179.
272 Jeffrey A. Winters, *Op.cit.*, hlm. 171.
273 "*252 Anggota DPR Tidak Puas*", Media Indonesia, 25 Juli 2000.

dilakukan oleh Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla.

"Dokumen itu diserahkan langsung Presiden Gus Dur kepada Ketua DPR. Tapi surat pengantar dua halaman itu tak ditandatangani Gus Dur, " kata Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR Aly Yahya di Jakarta kemarin.

Menurut dia, dokumen setebal 400-an halaman dengan sampul berwarna kuning itu diberi judul "*Jawaban atas Interpelasi DPR mengenai Pemberhentian Laksamana Sukardi dan Yusuf Kalla*". Namun, menurut Aly Yahya yang mengaku telah membaca dokumen tersebut, data yang ada dalam laporan tersebut sangat sumir dan tidak akurat.

"Isinya kebanyakan fotokopi *voucher*. Kasihan Gus Dur. Sangat berbahaya orang yang menyerahkan atau membisikkan kepada Gus Dur bahwa dokumen itu bisa dijadikan alasan untuk menuntut Laksamana dan Jusuf Kalla terlibat KKN," kata Aly Yahya.[274]

Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla menyatakan tidak puas atas penjelasan Presiden Gus Dur dalam menjawab pertanyaan anggota DPR yang menggunakan hak Interpelasi. Padahal kalau salah informasi, seharusnya Gus Dur minta maaf. Sehingga, masalahnya selesai.

"Cuma, pembantu-pembantu Gus Dur tidak profesional. Tidak tanggap terhadap perkembangan keadaan. Sehingga persoalan yang kecil menjadi besar dan rumit. Padahal kalau Gus Dur mau minta maaf, masalahnya selesai," tegas Laks, panggilan Laksamana kepada wartawan usai Rapat Paripurna DPR dengan agenda jawaban presiden atas penggunaan hak interpelasi DPR kemarin di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta. "Tampaknya ini sulit sekali dilakukan Gus Dur. Kita tidak tahu kekerasan hati Gus Dur. Tampaknya dia sulit sekali minta maaf," ujar Jusuf Kalla kemudian.[275]

---

274 "*Akbar Terima Dokumen KKN Laks dan Kalla*", Media Indonesia, 27 Juli 2000.
275 "*Laks dan Kalla Desak Gus Dur Minta Maaf*", Media Indonesia, 21 Juli 2000.

Sidang paripurna DPR Juni 2000 mengesahkan hak interpelasi dengan hasil voting 332 setuju, 63 menolak, dan 36 abstain. Dengan hal ini, konfrotasi dimulai. Gus Dur membalas dengan menyatakan hak interplasi sama sekali tak diakui dalam pemerintahan presidensial. Ketegangan kembali memuncak, tapi kembali reda setelah Gus Dur meminta maaf. Hasilnya, parlemen menangguhkan interpelasi.[276]

Sementara itu, Greg Barton memiliki pandangan berbeda. PDIP sangat marah karena pemecatan Laksamana Sukardi. Meski begitu, Megawati mengimbau agar anggota PDIP di DPR untuk tetap objektif terhadap Gus Dur. Gus Dur benar-benar merasa bahwa penggunan hak interpelasi sehubungan dengan pemecatan Jusuf Kalla dan Sukardi sangat tidak tepat dan hanya dapat dijelaskan sebagai usaha untuk menjatuhkan dirinya atau setidaknya melemahkan otoritasnya.[277]

Priyo Budi Santoso meyakini bahwa pemecatan Jusuf Kalla bukan satu-satunya yang membuat Golkar dan teman-teman eks Orde Baru marah terhadap Gus Dur, melainkan juga kasus-kasus Soeharto diangkat kembali oleh Gus Dur.[278] Selain itu, Priyo mengatakan ini bukan hanya persoalan Orde Baru sendiri, melainkan juga Megawati masih merasa marah karena tak menjadi presiden, padahal PDIP partai pemenang pemilu.[279]

Hal itu pun diungkap oleh Fuad Bawazier. Fuad berujar bahwa Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla baru saja dilantik, tapi tiba-tiba tanpa ada alasannya dan bukti yang konkret dipecat dengan tuduhan KKN. Sebenarnya, Gus Dur melemahkan pemerintahannya sendiri. Akhirnya pemerintahan terbelah dan Poros Tengah juga mulai kritis. Ini yang membuat titik temu antara Golkar atau eks Orde Baru dengan PDIP. Akhirnya, Gus Dur juga dikucilkan oleh PDIP yang juga ikut menjatuhkannya karena berharap naik menjadi presiden.[280]

---

276 Akbar Tandjung, *Op.cit.*, hlm. 278.
277 Greg Barton, *Op.cit.*, hlm. 413.
278 Wawancara dengan Priyo Budi Santoso di Jakarta, 30 Januari 2019.
279 Wawancara dengan Priyo Budi Santoso di Jakarta, 30 Januari 2019.
280 Wawancara dengan Fuad Bawazier di Jakarta, 25 Januari 2019.

BAB 5

BULOGGATE DAN *BRUNEIGATE*

Beberapa minggu pascapemecatan Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla, terkuak skandal yang sangat merugikan Gus Dur. Skandal itu dikenal dengan istilah *Buloggate*. Isu *Buloggate* pertama kali berembus ke media setelah Gus Dur melakukan rapat konsultasi dengan DPR yang bersifat tertutup. Akan tetapi, sesuai rapat tersebut, anggota DPR dari Partai Golkar, Eki Syachrudin, membocorkan kepada pers potongan-potongan cerita yang terjadi di dalam pertemuan tersebut.

Eki membentuk opini publik bahwa presiden orang yang dikesankan bersih dan bebas KKN ternyata sama dengan penguasa sebelumnya. Tindakan Eki merupakan sebuah reaksi dari manuver Gus Dur yang ingin membubarkan Golkar.[281]

Pada Januari 2000, Gus Dur ingin membantu rakyat Aceh dengan memberikan program kesejahteraan masyarakat. Langkah ini juga dimaksudkan untuk meredakan konflik yang bergejolak dengan pasukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menginginkan kemerdekaan Aceh. Akan tetapi, Gus Dur memiliki kesulitan mendapatkan dana untuk melakukan program sekecil apapun. Ia berinisiatif untuk meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk memberikan keterangan mengenai cadangan uang tunai yang ada pada Bulog.

281 Derek Manangka, *Jurus dan Manuver Politik TaufiqKiemas* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 92—93.

Gus Dur lantas mencari jalan untuk meminjam dana cadangan yang disimpan oleh badan-badan pemerintah, seperti Bulog, untuk menjalankan program kesejahteraan di Aceh.

Sebenarnya, cara itu bukan cara baru. Soeharto dan Habibie pun melakukan hal serupa. Hanya saja, ketika diberitahu bahwa Gus Dur harus melapor ke DPR, ia tidak melakukannya. Gus Dur berpendapat jika harus melalui prosedur DPR, maka akan memerlukan waktu lama dan juga sulit secara politis.

Pada awal Mei, Gus Dur mendengar lewat orang yang bekerja di Bulog bahwa uang sebesar hampir 4 juta USD telah hilang dari rekening dana cadangan. Gus Dur juga mendengar bahwa orang yang diserahi uang itu adalah Suwondo, bekas tukang pijit Soeharto dan juga pernah memijit Gus Dur.

Suwondo mengakui mengambil uang karena presiden memerintahkannya sebagai utusan khusus. Sebagian besar uang itu dapat diperoleh kembali dalam beberapa bulan. Tak ada indikasi bahwa terdapat hubungan antara Gus Dur atau keluarganya dengan Suwondo. Akan tetapi, musuh-musuh politik Gus Dur menyatakan bahwa ia terlibat dalam manipulasi uang ini.

Skandal lainnya yang hampir terjadi bersamaan adalah *Bruneigate*. Saat akhir Februari 2000 Gus Dur ke Brunei. Ia mendapatkan dana sumbangan pribadi dari Sultan Brunei sebesar 2 juta USD untuk membantu rakyat Aceh. Menurut pandangan Sultan, jumlah ini kecil dan agar bantuan ini tak diumumkan kepada masyarakat. Sultan memercayakan uang tersebut kepada Gus Dur sebagai ulama dan orang beragama dan percaya bahwa Gus Dur akan menggunakan sebaik-baiknya.

Gus Dur tidak menyatakan telah menerima uang ini dan tidak menempatkannya di rekening pemerintah. Sebagian, kata Gus Dur, karena Sultan Brunei telah memintanya untuk menjaga kerahasiaan pemberian ini dan sebagian lagi karena Sultan tidak mempercayai mereka yang mempunyai akses

terhadap rekening-rekening pemerintah.[282]

Kasus Bulog dan Brunei dirasa perlu direspon secara politis oleh Partai Golkar. Dalam perkembangannya, 236 anggota DPR (sebagian besar Golkar dan PDIP) berinisiatif mengajukan pembentukan panitia khusus (pansus) penyelidikan skandal itu. Dengan dukungan 307 anggota DPR, dibentuklah pansus itu.

Pada tahap pembentukan pansus ini, posisi Gus Dur mulai dilemahkan. Persoalan fundamental yang dihadapi bersumber pada posisi presiden sebagai sebuah lembaga yang sangat lemah. Pokok soalnya adalah nasib presiden tergantung pada DPR. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut sistem multipartai, yamg artinya presiden tidak akan mampu menguasai mayoritas di lembaga politik tertinggi ini. Tanpa dukungan mayoritas, dia tidak akan sanggup bertindak dan menafikan partai-partai yang ada. Kalau mengambil risiko, dia bisa terlempar dari kursinya.

Hal itu berdampak langsung pada pengelolaan kebijakan. Presiden tidak dapat memimpin kabinet karena posisinya yang sangat rentan dilengserkan. Presiden dapat memecat menterinya, tapi tak bisa memaksakan arah kebijakan yang serius atau sekadar mengoordinasikan Menteri. Jika ia memecat Menteri, penggantinya harus dicari dari kalangan yang mendapat banyak persetujuan dari partai.

Posisi Menteri pun dalam posisi sulit. Meski mereka memiliki kehendak untuk melakukan atau mendorong kebijakan reformis, kemampuannya untuk melakukan terbatas. Otoritas Menteri ada di tangan Presiden, dan Menteri tak dapat mendesak DPR karena pimpinan partai di DPR turut menentukan nasib presiden.[283]

Konsekuensi logis dari pembentukan pansus *Buloggate* dan *Bruneigate* adalah DPR kerap arogan dengan menyatakan sebagai perwakilan rakyat dan menjadi interpreter terhadap konstitusi. DPR tidak hanya memiliki kekuasaan eksekutif,

282 Greg Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid* (Yogyajarta: LKiS, 2002), hlm. 400—401.
283 Indra Surya Lubis (ed),), *Bahaya Tirani DPR Konflik DPR vs Presiden* (Jakarta: Lembaga Studi Politik Merdeka, 2001), hlm. 3.

tetapi juga yudikatif dalam kasus *Bruneigate* dan *Buloggate*. Kalau ini terus dilakukan, bahkan tidak ada pengawasan, maka yang terjadi adalah tirani parlemen.[284]

Gus Dur mempertanyakan keabsahan dan kewenangan pansus yang memeriksanya seperti dalam sebuah pengadilan hukum pada 22 Januari 2001. Namun, yang dilakukan bukan pengadilan hukum, melainkan pengadilan politik. "Kalau bersidang terus, artinya pansus tidak ingin mencari penyelesaian hukum, melainkan penyelesaian politik. Lha, kenapa tidak berani menyatakan ini untuk menyelidiki kasus hukum dan itu bagi saya tidak dapat diterima. Karena itu, dengan melihat tidak adanya kepastian seperti ini, saya rasa kita tidak perlu melanjutkan lagi pertemuan ini. Cukup sekian. Sebab, saya telah menghabiskan waktu cukup banyak untuk kepentingan ini."[285]

Akbar Tandjung tidak ikut menandatangani, tetapi pada hari berikutnya, ia menyatakan," DPR akan meminta didadakannya pengadilan atas Gus Dur jika penyelidikan yang dilakukan oleh pansus presiden diduga terlibat dalam skandal. Kemudian, adalah hal yang sah untuk mendesak MPR agar mengadakan sidang istimewa seandainya presiden dinyatakan bersalah."[286]

Apalagi, terdapat apel sejuta umat pada Januari 2000, Tempo menuliskan 200.000 orang, Gatra menulis raturan ribu orang, salah satu tokoh apel itu adalah Al Chaidar. Jawa Pos pada 30 Januari 2000 menyatakan bahwa Al Chaidar ditangkap. Padahal, sebelumnya nama Al-Chaidar tidak masuk dalam penangkapan, yang justru masuk adalah Amien Rais dan Ahmad Sumargono.[287]

Dukungan Poros Tengah berkurang drastis menyusul pernyataan Gus Dur tentang rencana beberapa kelompok Islam berjihad ke Maluku saat menggelar "Aksi Sejuta Umat" di Monas (7/1/00) yang dimotori oleh Ketua MPR Amien Rais.

284 *Ibid.*, hlm. 54.
285 Syamsuddin Haris, Syamsul Hadi dkk, *Disintegrasi pasca Orde Baru*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2007), hlm. 110.
286 Greg Barton, *Op.cit.*, hlm. 454—455.
287 M. Anwar Djaelani, *Gus Dur dan Kritik, Kontroversi Itu untuk Apa?* (Surabaya: Yayasan Kampusina, 2000), hlm. 5.., 65.

"Saya tidak peduli mau jihad, jihad mau apa saja, pokoknya asal mengancam kesalamatan negara, kita ambil tindakan. Kalau perlu, dilacak ke Jakarta, siapa yang suruh," kata Gus Dur.

Bahkan, Gus Dur menilai aksi tersebut justru memperkeruh suasana. "Mereka sedang cari-cari penyakit. Mereka memaksa saya untuk turun dari jabatan ini, ya ndak apa-apa," sambungnya.[288]

DPR RI
Keputusan DPR RI
Nomor: 05/DPR RI/2000-2001
Tentang
Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Mengadakan Penyelidikan terhadap Kasus Dana Milik Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (YANATERA) Badan Urusan Logistik (BULOG) dan Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Ds. Kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.

(Kedua : Komposisi keanggotaan panitia khusus sebagaimana pada DIKTUM PERTAMA, keputusan ini terdiri dari 50 (lima puluh) orang anggota dengan pertimbangan dari masing-masing fraksi sebagai berikut:

Fraksi	**Jumlah Anggota**
PDI P	12
Golkar	6
PPP	5
PKB	4
Reformasi	4
TNI/Polri	1
PBB	1
Kesatuan Kebangsaan Indonesia	1
Persatuan Daulatul Ummah	1
Partai Demokrasi Kasih Bangsa	15
Jumlah	**50**

288 Mohammad Sobary, dkk (ed), *Gus Dur di Istana Rakyat* (Jakarta: LKBN Antara, 2000),hlm. 82.

LAMPIRAN Keputusan DPR RI
Nomor: 05/DPR RI/2000-2001
Tanggal : September 2000

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENGADAKAN PENYELIDIKAN TERHADAP KASUS DANA MILIK YAYASAN DANA SEJAHTERA (YANATERA) BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG) DAN KASUS DANA BANTUAN SULTAN BRUNEI DS. KEPADA PRESIDEN K.H. ABDURRAHMAN WAHID.

No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	FRAKSI
1	2	3	4
1	Didi Supriyanto, S.H.	114	F.PDIP
2	H. Karimun Usman	64	F.PDIP
3	Zulfan Lindan	64	F.PDIP
4	Irmasi Lubis	72	F.PDIP
5	Jahar Harahap	75	F.PDIP
6	H. Julius Usman	98	F.PDIP
7	Ny. Hj. Tumbu Saraswati, S.H.	104	F.PDIP
8	Dwi Ria Latifa, S.H.	112	F.PDIP
9	Ir. Tarto Sudiro	116	F.PDIP
10	Widjanarko Puspoyo, M.A.	151	F.PDIP
11	Ir. Mindo Sianipar	155	F.PDIP
12	H. Amin Aryoso, S.H.	157	F.PDIP
13	Ir. Meilono Soewondo, MBA.	177	F.PDIP
14	Drs. I Made Urip	192	F.PDIP
15	Alexander Litaay	209	F.PDIP
16	Drs. H. Mohammad Hatta, BBA.	312	F.PG
17	Drs. Enggartiato Lukita	315	F.PG
18	Drs. Ade Komaruddin	318	F.PG
19	Ir. H. Soehasojo	334	F.PG
20	Ir. Ny. Hj. Nikentari Moesdiono	335	F.PG
21	Ir. H.M. Ridwan Hisyam	343	F.PG
22	M. Akil Mochtar, S.H.	348	F.PG

23	Ir. Ny. Hj. Eka Komariah Kuncoro, M.A.C.Ed.	355	F.PG
24	Drs. Immanuel Ekadianus Blegur	366	F.PG
25	Hasanuddin Mochdar, S.H.	397	F.PG
26	Ir.S.M. Tampubolon	399	F.PG
27	Drs. Simon Patrice Morin	402	F.PG
28	H. Bachtiar Chamsyah, S.E.	7	F.PPP
29	Drs. H.M. Djamal Do'a	44	F.PPP
30	Drs. Akhmad Muqowan	35	F.PPP
31	Drs. Suryadarma Ali	36	F.PPP
32	K.H. Moh. Ismail Muzakki	43	F.PPP
33	Habil Marati, S.E.	58	F.PPP
34	H. Imam Mawardi Sanjaya, S.H.	407	F.KB
35	Drs. Ali As'ad	426	F.KB
36	Ir. Ny. Tari Siwi Utami	444	F.KB
37	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.	444	F.KB
38	Drs. H.M. Sofwan Chudorie	446	F.KB
39	Alvin Lie Ling Piao, M.Sc.	243	F.Reformasi
40	Ir. Samuel Koto	239	F.Reformasi
41	Drs. Achmad Arief	242	F.Reformasi
42	H. Syamsul Balda, S.E., MBA., MM., M.Sc.	269	F.Reformasi
43	Sangiang Makmur Siregar, S.IP.	466	F.TNI/POLRI
44	Ny. Hj. Zawiah Ramli, Skm., M.Sc.	479	F.TNI/POLRI
45	H. Suparno Muanam, S.E.	489	F.TNI/POLRI
46	Drs. Supriadi	500	F.TNI/POLRI
47	H. Ahmad Sumargono, S.E.	258	F.PBB
48	Drs. Anthonius Rahail	282	F.KKI
49	Drs. K.H. Abdullah Al Wahdi	276	F.PDU
50	Prof. Dr. Ing. K. Tunggal Sirait	214	F.PDKB

Jakarta, 5 September 2000

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

AKBAR TANJUNG.

KEPUTUSAN
DPR
RI
NOMOR: 13/PIMP/I/2000-2001

PENETAPAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENGADAKAN PENYELIDIKAN TERHADAP KASUS DANA MILIK YAYASAN DANA SEJAHTERA (YANATERA) BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG) DAN KASUS DANA BANTUAN SULTAN BRUNEI DS. KEPADA PRESIDEN K.H. ABDURRAHMAN WAHID.

PERTAMA : Menetapkan pimpinan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengadakan penyelidikan terhadap Kasus Dana Milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan Badan Urusan Logistik (Yanatera Bulog) dan Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Ds. Kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.

KEDUA : Nama-nama Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut:

1.	Ketua	: H. Bachtiar Chamsyah, S.E.	A-07	(F.PPP)
2.	Wakil Ketua	: Didi Supriyatno, S.H.	A-114	(F.PDIP)
3.	Wakil Ketua	: Drs. H. Mohammad Hatta, BBA.	A-312	(F.PG)
4.	Wakil Ketua	: Alvin Lie Piao, M.Sc.	A-243	(F.REF)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 September 2000

LAPORAN PANITIA KHUSUS
DPR
RI

UNTUK MENGADAKAN PENYELIDIKAN TERHADAP KASUS DANA MILIK YAYASAN DANA SEJAHTERA (YANATERA) BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG) DAN KASUS DANA BANTUAN SULTAN BRUNEI DS. KEPADA PRESIDEN K.H. ABDURRAHMAN WAHID

DISAMPAIKAN PADA
RAPAT PARIPURNA DPR RI
TANGGAL 29 JANUARI 2001

Di tengah kuatnya tekad bersama untuk menjadikan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagai musuh bersama bangsa ini, seperti diamanatkan oleh Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maraknya polemik di media massa mengenai dana Yanatera Bulog sebesar 2 juta USD yang mengaitkan nama Presiden Abdurrahman Wahid, menyebabkan seluruh anggota dewan yang terhormat, khususnya 236 anggota DPR, sangat prihatin. Keprihatinan tersebut diwujudkan 236 anggota yang terhormat itu dengan mengajukan surat kepada pimpinan DPR pada 29 Juni 2000 berisi usul penggunaan hak mengadakan penyelidikan terhadap kedua kasus tersebut.

Rapat paripurna DPR pada 28 Agustus 2000 menyetujui dan memutuskan usul 236 anggota itu menjadi hak mengadakan penyelidikan DPR-Ri terhadap penggunaan dana bantuan dari Sultan Brunei Darsussalam. Keputusan Rapat Paripurna tersebut dituangkan dalam Keputusan DPR-RI No. 01/DPR-RI/II/2000-2001 tertanggal 28 Agustus 2000 tentang Persetujuan DPR-RI untuk mengadakan penyelidikan terhadap penggunan Dana Milik Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Badan Urusan Logisitik (YANATERA Bulog) Dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam.

Sebagai tindak lanjut keputusan tersebut, pada 5 September 2000 dengan surat keputusan No. 05/DPR-RI/I/2000-2001, DPR mengesahkan pembentukan Panitia Khusus DPR RI untuk mengadakan penyelidikan terhadap kasus Dana Milik Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Badan Urusan Logistik Dan Kasus Bantuan Sultan Brunei Darussalam Kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Oleh karena itu, perlu ditegaskan legalitas pansus ini tidak perlu diragukan.

II. Dasar Hukum, Maksud, dan Tujuan, serta Susunan Keanggotaan Pansus

Pengertian penyelidikan yang dilakukan oleh pansus adalah: *"serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pansus penyelidikan terhadap penggunaan dana milik Dana Milik Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Badan Urusan Logisitik (YANATERA Bulog) dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam untuk mengumpulkan segala fakta dan dokumen yang berkaitan dengan kasus Bulog dan Brunei Darussalam dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan DPR-RI."*

Tugas penyelidikan tersebut bertujuan untuk:

1. Melakukan penyelidikan guna mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan penggunaan dana milik Yanatera Bulog dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam kepada Presiden Republik Indonesia, K. H. Abdurrahman Wahid, dalam rangka mencari kebenaran dan akuntabilitas publik;
2. Mewujudkan mekanisme *checks* and *balances* agar tercipta penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*);
3. Melaksanakan fungsi pengawasan DPR RI terhadap jalanya pemerintahan negara Republik Indonesia.

III. Pendalaman terhadap Fakta

4. Ada upaya-upaya sistematis dan terencana dari sejumlah pihak untuk mengaburkan penyelidikan atas kasus Yanatera Bulog. Upaya-upaya sitematis dan terencana tersebut tampak dari:
   a. Temuan penyidik bahwa ada upaya mengalihkan kasus pidana menjadi masalah perdata.
   b. Akta perjanjian Hutang diproses pada bulan April 2000, dan akte notaris diproses awal Mei 2000, sehingga perjanjian bersifat *backed dated*–ditanggali lebih awal, yaitu 12 Januari 2000.
   c. Dimunculkanya nama Aris Junaidi dalam kasus dana Yanatera Bulog untuk menggugurkan elemen keterlibatan langsung Presiden.

Kesimpulan pansus tersebut merupakan hasil voting dari dua opsi yaitu:
Opsi pertama : terdapat indikasi yang kuat bahwa orang-orang dekat Presiden Abdurrahman Wahid memanfaatkan momentum pencairan dana Yanatera Bulog untuk kepentingan kelompoknya
Opsi kedua : patut diduga bahwa Presiden Abdurrahman Wahid berperan dalam pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog.

Dalam voting tersebut dihadiri oleh 44 orang anggota yang terdiri dari:

F.PDIP	=	14 Anggota
F.PG	=	11 Anggota
F.PPP	=	6 Anggota
F.KB	=	4 Anggota
F.Reformasi	=	4 Anggota
F.TNI/POLRI	=	3 Anggota
F.PBB	=	1 Anggota
F.KKI	=	1 Anggota

Dengan hasil sebagai berikut:

- Opsi pertama = 10 suara
- Opsi kedua = 33 suara
- Abstain = 1 suara

5. Mengenai ke mana dana bantuan Sultan Brunei Darussalam disalurkan, terjadi kesimpangsiuran. Menurut Presiden, dana tersebut disalurkan ke Aceh, Kalimantan Barat, Ambon, dan Irian Jaya. Sedangkan menurut H. Masnuh, dana tersebut disalurkan ke Aceh dan Riau.
6. Mengenai jumlah yang telah disalurkan pun terjadi kesimpangsiuran:
   a. Menurut H. Masnuh, dari 14 miliar rupiah (2 juta USD) dana bantuan tersebut, telah 60% (8,4 miliar rupiah) yang disalurkan melalui transfer bank.
   b. H. Masnuh menyebut dana telah disalurkan ke Aceh sebesar 5 atau 6 miliar rupiah, ke Ambon 50 juta rupiah, dan ke Riau tanpa menyebut jumlahnya.
   c. Menurut Presiden, dana yang telah disalurkan ke Aceh sebesar 600.000 USD atau sekitae 4,2 miliar rupiah.
   d. Menurut Afdal Yasin, dana bantuan Sultan Brunei Darussalam yang diterimanya sebesar 6,565 miliar rupiah.

Kesimpulan pansus tersebut adalah hasil *voting* dari satu opsi yang dihadiri oleh 28 anggota pansus yang terdiri dari:

FPDIP	=	7 Anggota
FPG	=	7 Anggota
FPPP	=	3 Anggota
FKB	=	2 Anggota
FReformasi	=	4 Anggota
FTNI/POLRI	=	3 Anggota
FPBB	=	1 Anggota
FKKI	=	1 Anggota

Hasil voting yang menyatakan setuju sebanyak 26 orang.
Sedangkan yang tidak setuju 2 orang.

Dokumen Perencanaan

Sebelum memutuskan membentuk pansus, beberapa elite politik merancang sebuah rapat. Rapat tersebut dilatarbelakangi pemecatan Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla. Hal itu menjadi titik balik dukungan mereka kepada Gus Dur. Gus Dur yang ingin menciptakan reformasi di bidang politik dan birokrasi, malah membangkitkan kekuatan-kekuatan lama di bidang politik dan birokrasi, terutama Golkar.

Selain itu, Golkar juga seperti mendapatkan teman untuk mengkritisi Gus Dur yakni PDIP, meskipun pada pemilu 1999 kedua partai ini berseberangan. PDIP tentu masih merasa kesal karena sebagai partai pemenang pemilu, mereka tak bisa menjadikan Megawati sebagai presiden.

Titik temu dua kekuatan besar ini tercatat dalam sebuah surat laporan bersifat rahasia pada 3 Juli 2000. Ada sebuah surat yang ditulis oleh Priyo Budi Santoso ditujukan kepada Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung. Surat tersebut merupakan sebuah notulensi atau hasil catatan pertemuan dari pertemuan terbatas yang dilaksanakan pada 27 Juni 2000, pukul 21.00 WIB di kediaman Arifin Panigoro, Jalan Brawijaya.

Priyo sendiri dalam pembukaan suratnya mengaku tak menghadiri rapat tersebut, tetapi ia diminta menuliskan hasil pertemuan tersebut berdasarkan catatan yang dibuat oleh Arifin Panigoro. Priyo menuliskan rapat tersebut yang dihadiri oleh Fuad Bawazier, Ginandjar Kartasasmita, Arifin Panigoro, Kepala Kepolisisan Republik Indonesia (Kapolri) Rusdihardjo, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Mayjen Nurfaizi, Asisten Intel Kapolri Mayjen Pol Guntur, dan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiwa Islam (PB HMI) M. Fakhruddin. Sebenarnya, Priyo juga mengundang Wiranto, Djaja Suparman, Adi Sasono, dan Dawam Rahardjo, tetapi mereka berhalangan hadir. Sedangkan, Eggi Sujana menolak hadir pada rapat tersebut.

Rapat tersebut membahas kemungkinan menjatuhkan Gus Dur pada Sidang MPR di bulan Agustus melalui mobilisasi massa di Jakarta. Dan juga kemungkinan menggantikan Gus Dur dengan Megawati yang sudah dbicarakan dengan Ginanjar sebulan sebelum rapat tersebut digelar.

Dalam dokumen tersebut dituliskan juga rencana-rencana yang akan ditempuh untuk mejatuhkan Gus Dur. Pertama adalah tentang melemahnya posisi Gus Dur, pokok pembicaraan ini dipimpin oleh Ginanjar Kartasasmita. Secara umum, kampanye untuk menjatuhkan Gus Dur dinilai cukup berhasil karena sudah terlihat polarisasi antara yang pro-Gus Dur dan anti-Gus Dur.

Isu tentang hak interpelasi yang dimotori oleh Arifin Panigoro mampu membuat garis demarkasi antara pendukung dan anti-Gus Dur. Isu interpelasi ini juga sekaligus menghancurkan aliansi politik Poros Tengah, Golkar, dan Gus Dur melawan PDI menjadi Poros Tengah, Golkar, PDI, melawan Gus Dur. Hal ini terjadi karena solidaritas terhadap pencopotan Jusuf Kalla dan Laksamana Sukardi telah menciptakan satu persatuan yang menjadi alternatif kekuataan politik riil antara Golkar dan PDIP. Sementara, Poros Tengah hanya akan digunakan untuk memancing historia umat Islam, terutama kampanye anti-Gus Dur yang dilakukan oleh Amien Rais di media massa dan oleh Fuad Bawazier melalui jaringan HMI dan mahasiswa berjubah Islam.

Aliansi ini akan diuji lagi nanti pada penggalangan kekuatan untuk menggunakan hak angket terhadap Gus Dur karena skandal Bulog dan kasus bantuan dari Sultan Brunei. Direncanakan dalam tahap selanjutnya, interpelasi atau hak angket ini ditambah dengan isu pemeriksaan kesehatan Gus Dur yang akan menjadi jembatan untuk terselenggaranya Sidang Istimewa sekaligus menjatuhkan Gus Dur.

Sesuai rencana, dalam skandal Bulog, Gus Dur dinilai semakin terpojok, ditambah lagi dengan keberanian Rusdihardjo melalui Nurfaizi dan Alex Bambang Riatmojo, untuk memeriksa kroni-kroni Gus Dur dengan eskpos yang sangat luar biasa di media massa. Khusus pemeriksaan terhadap Gus Dur, sebenarnya hanya untuk konsumsi politik publik. Gus Dur sebenarnya tidak diperiksa.

Hal tersebut dianggap sebagai titik balik Golkar dan PDIP, melalui Rusdiharjo untuk menurunkan pamor Gus Dur dengan berpura-pura menolong Gus Dur melalui pemeriksaan terhadapnya. Hasil pemeriksaan terhadap kroni Gus Dur pada skandal Bulog sengaja dibuat mengambang di publik, terutama keterkaitannya dengan keterlibatan Gus Dur. Sehingga, pada saat yang tepat, hasil pemeriksaan terhadap kroni Gus Dur direncanakan akan diumumkan ke publik. Semuanya hanya tinggal menunggu tekanan dari masyarakat terutama dari jaringan HMI menjelang sidang umum nanti akan berkali-kali demonstrasi ke Polri untuk membuka pemeriksaaan terhadap kroni Gus Dur. Polri, yang diwakili oleh Rusdihardjo akan mengumumkan hasil pemeriksaan tersebut. Diharapkan pengumuman itu akan semakin memojokkan Gus Dur atau setidaknya akan menghentikan kebijakan Gus Dur yang mempreteli basis ekonomi Golkar dan PDIP pada BUMN-BUMN dan lembaga-lembaga penting, seperti Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara ataupun Gubernur BI.

Kedua, pembahasan tentang rencana jangka pendek menaikkan Megawati menjadi presiden. Pembahasan tersebut dipimpin oleh Arifin Panigoro dan Fuad Bawazier. Mereka membahas bahwa jika aliansi PDIP, Golkar, dan Poros Tengah tetap solid—setelah nanti teruji dalam penandatanganan hak angket, maka jalan untuk menjatuhkan Gus Dur akan lebih terbuka. Karena hal itu untuk memudahkan mendapat

dukungan dari kalangan rakyat luas, maka mereka perlu mendapatkan figur yang tepat untuk menggantikan Gus Dur.

Keberhasilan mereka menurunkan pamor Gus Dur, ditambah dengan semakin memburuknya perekonomian, akan menjadi sia-sia jika salah menentukan figur. Paling tidak ada empat alternatif, yaitu Amien Rais, Megawati, Nurcholis Madjid, atau Akbar Tandjung. Usulan mencalonkan kembali Habibie ditolak. Dari keempat nama tersebut, yang problematik adalah Akbar Tandjung.

Walaupun Akbar diakui mampu mengubah banyak penampilan Golkar, tetapi rasanya sulit bagi Akbar Tandjung untuk diterima di kalangan PDIP atau PKB, baik di DPR dan MPR, apalagi di kalangan luas. Sebab, masa lalu Golkar belum hilang dari memori anggota dewan dan rakyat luas—masih ada kebencian terhadap masa lalu.

Pilihan mengerucut menjadi tiga nama, yaitu Amien, Megawati, atau Nurcholis. Posisi Amien juga mengandung risiko. Sebab, Amien Rais masih belum dapat diterima di kalangan PDIP. Sebagian besar anggota PDIP masih merasa sakit dengan tingkah laku Amien melalui Poros Tengah ketika membangun kekuatan untuk memotong Megawati di Sidang Umum 1999 lalu. Belum lagi kekuatan minoritas Kristen dan Katolik terhadap cita-cita negara Islam yang dibangun Amien Rais. Amien dinilai lebih baik memainkan peran mendiskreditkan Gus Dur. Moral politik Amien Rais sebagai tokoh reformasi diharapkan berhasil memainkan fungsi ini.

Meski secara moral dan intelektual, Nurcholis tidak perlu diragukan, namun secara politis belum teruji. Dalam berbagai pertemuan seminar, diskusi, dan lokakarya, Nurcholis selalu didorong untuk bermain politik. Akan tetapi nampaknya Nurcholis selalu menjaga jarak dengan politik. Dia lebih memilih menjadi intelektual dan guru bangsa, berada di atas

semua golongan. Tidak terlihat ambisi menggapai kekuasaan. Bagi dia kekuasaan adalah urusan partai politik. Itu kelemahan Nurcholis.

Pilihan terakhir ada pada Megawati. Secara konstitusional—isu konstitusional ini tidak dapat ditolak, bahkan oleh Gus Dur sendiri—jika Gus Dur jatuh, maka Megawati berhak naik dan kemungkinan besar didukung oleh PDIP dan Golkar, juga oleh Poros Tengah demi kepentingan taktis menjatuhkan Gus Dur. Hal yang menjadi masalah utama di kalangan Poros Tengah adalah isu Megawati anti-Islam dan kepemimpinan perempuan. Sampai kemungkinan terburuk Poros Tengah tidak mendukung Megawati pun, tetapi aliansi PDIP dan Golkar solid, maka jalan menurunkan Gus Dur dan menampilkan Megawati sebagai alternatif menjadi tidak sulit. Jadi, Megawati-lah yang menjadi alternatif paling utama untuk mengganjal Gus Dur.

Ketiga, pembahasan tentang kemungkinan serangan mobilisasi massa pendukung Gus Dur. Pembahasan ini diutarakan oleh Arifin Panigoro dan Mayor Jenderal Guntur. Menurut mereka, karena posisi Gus Dur terjepit di DPR/MPR, maka kemungkinan besar Gus Dur akan menggunakan dukungan ekstraparlementer. Berdasarkan perkembangan politik dan data di kepolisian, tercatat beberapa kekuatan yang diidentifikasi sebagai kekuatan yang mendukung Gus Dur. Baik yang berbasis massa maupun yang mengandalkan kampanye di media massa. Adapun yang berbasis massa adalah:

- *Pertama*, massa NU dan PKB serta pesantren di luar Jakarta (terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah).
- *Kedua*, massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Barisan Ansor Sebaguna (Banser).
- *Ketiga*, dukungan dari Partai Rakyat Demokratik (PRD) (mereka mendukung Gus Dur dengan isu demiliterisasi dan pengikisan kekuatan lama). Bahkan sudah ada pertemuan antara tokoh PKB dan tokoh-tokoh PRD.

- *Keempat*, gerakan mahasiswa seperti sebagian di Forum Kota (Forkot), Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), dan lain-lain. (Sedangkan sebagian aktivis Forkot masih mematron kepada Arifin Panigoro).
- *Kelima*, etnis minoritas Cina dan elemen Kristen/Katolik yang dijamin pluralismenya oleh Gus Dur.

Sedangkan yang tidak berbasis massa adalah:

- *Pertama*, LSM-LSM seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta kelompok perempuan.
- *Kedua*, intelektual-intelektual kampus, seperti Arbi Sanit, Sri Mulyani, dll.
- *Ketiga*, aktivis-aktivis yang yang akan aktif dalam acara Rembuk Nasional di Bali.

Mereka diyakini sudah merencanakan akan melakukan kampanye dan aksi-aksi dukungan terhadap Gus Dur sampai dengan sidang umum nanti. Gus Dur sudah mengumpulkan beberapa pengusaha untuk mendukung mobilisasi tersebut.

Sedangkan, kekuatan massa yang dapat digunakan untuk meredam dukungan terhadap Gus Dur adalah:

- *Pertama*, massa Poros Tengah, seperti Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, massa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan lain-lain.
- *Kedua*, massa jaringan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan HMI.
- *Ketiga*, dan diharapkan massa PDIP, jika mulai diangkat isu Megawati menjadi presiden menggantikan Gus Dur.

Untuk massa PDIP ini sudah mulai dikonsolidasikan untuk menyambut isu Megawati menjadi presiden. Sedangkan massa

Poros Tengah sudah dikonsolidasikan dengan kekuatan massa minimal, seperti Rapat Akbar di Monas, dalam acara solidaritas untuk Tragedi Ambon. Menurut kabar, Gus Dur lebih khawatir dengan aksi sejuta umat di Monas ketimbang dengan Laskar Jihad.

Dengan pembacaan situasi nasional tersebut, maka dibuat rencana dan pembagian tugas untuk melaksanakan rencana tersebut. Setidaknya ada tujuh rencana pembagian tugas yang dibuat.

Pertama, rencana tugas di DPR akan dilakukan oleh Arifin Panigoro, Fuad Bawazier, dan Ginandjar Kartasasmita, serta akan dibantu oleh A. M. Fatwa. Tugasnya adalah memaksa Gus Dur menjawab hak interpelasi, mengampanyekan dan memperjuangkan penandatangan hak angket menyangkut skandal Bulog dan bantuan Sultan Brunei.

Selain itu juga, akan mengampanyekan isu memburuknya kesehatan Gus Dur, mengampanyekan isu perbandingan antara pemerintahan Gus Dur dan pemerintahan Habibie. Dari mulai kestabilan politik, kurs, dan kabinetnya. Terakhir, memperjuangkan terlaksananya Sidang Istimewa DPR menggantikan Gus Dur dengan Megawati. Arifin Panigoro juga diharapkan mampu mendorong Megawati untuk bersedia menggantikan Gus Dur.

Kedua, kampanye di media massa akan dijalankan oleh Fuad Bawazier dibantu oleh Parni Hadi dan Agung Laksono. Tugas mereka adalah memimpin kampanye anti-Gus Dur di luar media Kompas dan Suara Pembaharuan yang sudah diidentifikasikan mendukung Gus Dur. Kampanye yang penting diutamakan adalah media televisi. Karena faktor televisi dinilai sangat penting seperti ditunjukkan di saat krisis kekuasaan Soeharto.

Ketiga, memobilisasi massa yang akan dipimpin oleh Fuad Bawazier, Arifin Panigoro, dan M. Fakhruddin. Fuad Bawazier

memobilisasi massa Poros Tengah seperti FPI, Laskar Jihad, dan sejumlah organisasi Islam garis keras, serta KAHMI. Arifin Panigoro memobilisasi sebagian massa Forkot dan mobilisasi massa PDIP di Jakarta, Jawa barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Lampung.

Fakhruddin ditugaskan untuk memobilisasi jaringan HMI, membawa seluruh massa anggota HMI terutama di Jawa dan Sumatra ke Jakarta. Juga kepada Fuad Bawazier untuk mendorong pertemuan KAHMI bulan mendatang untuk mengampanyekan pergantian Gus Dur secara konstitusional. Selain itu, mereka juga meminta Adi Sasono untuk mengorganisir ikatan-ikatan alumni perguruan tinggi yang juga efektif mendiskreditkan Gus Dur.

Keempat, mencegah persatuan Gus Dur dan Megawati yang akan dijalankan oleh Fuad Bawazier. Tugas Fuad Bawazier dalam hal ini adalah menggagalkan setiap upaya bertemunya Gus Dur dan Megawati dalam satu forum, semacam Forum Ciganjur. Diupayakan jika pun ada pertemuan-pertemuan dihadiri harus *minus* Megawati atau *minus* Gus Dur.

Tujuannya agar di tingkat DPR/MPR dan di kalangan massa luas tidak terjadi persatuan antara dua kekuatan ini. Jika sempat terjadi, maka akan menghancurkan skenario yang sudah dibuat. Mereka menginginkan Megawati berani menentukan sikap. Akan tetapi, melihat *track record*-nya, Megawati selalu *ewuh pakewuh* dan selalu tersubordinasi jika satu forum dengan Gus Dur. Megawati kalah kualitas dan sering minder.

Kelima, kampanye internasional dipimpin oleh Ginandjar Kartasasmita. Dengan pengalaman Ginandjar, diharapkan akan mampu memotong basis dukungan internasional, baik politik maupun ekonomi, yang terlebih dahulu dimiliki inisiatif politiknya oleh Gus Dur. Isu kesehatan Gus Dur, pencabutan ketetapan tentang komunisme (terutama ke Amerika), skandal Bulog dan ketidakmampuan Gus Dur mengatasi konflik

Maluku, Poso, dan sejumlah kerusuhan di teritorial kecil, dapat dijadikan salah satu isu utama yang akan dikampanyekan di dunia internasional.

Keenam, memobilisasi TNI. Pada pertemuan ini, TNI belum mengambil kesimpulan sikap. Oleh sebab itu, masih harus menunggu konfirmasi dari Wiranto dan Djaja Suparman. Namun, melihat kecenderungannya, TNI masih berkutat mengatasi friksi untuk tidak mengarah pada faksionalisasi dan memperbaiki citranya yang hampir hancur. Jadi, kemungkinan TNI akan mengambil alih kekuasaan dengan cara paksa sangat kecil. Tetapi, tidak juga dapat disimpulkan bahwa TNI akan melakukan dukungan penuh terhadap Gus Dur.

Gus Dur sendiri masih belum mendapatkan tentara yang loyal selain Agus Wirahadikusumah. Agus Wirahadikusumah berhasil melakukan penyelamatan setelah kawan-kawannya yang lain dimutasi akibat dokumen Bulak Rantai. Keberhasilan TNI membuat dokumen Bulak Rantai adalah menggagalkan konsolidasi Gus Dur terhadap TNI melalui Agus Wirahadikusumah.

Secara umum, walau belum mendapat konfirmasi dari Wiranto dan Djaja, posisi TNI adalah menunggu hasil pertarungan politik yang konstitusional. Mereka tidak sedang mengambil posisi inisiator. Jika rencana ini berhasil, maka TNI diharapkan memberikan dukungan.

Ketujuh, pengamanan lapangan yang akan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Rusdihardjo dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya Nurfaizi. Menghentikan atau minimal menghambat proses pemeriksaan dan penangkapan sebagai komoditi politik berupa serangan balik Gus Dur terhadap lawan-lawannya, seperti penangkapan pada Syahril Sabirin (Gubernur BI) yang akan melibatkan banyak orang. Fuad Bawazier segera ditugaskan

mendekati media-media massa untuk mengalihkan isu penangkapan akibat isu rentetan kasus Syahril Sabirin dengan isu bahwa Gus Dur akan melakukan penangkapan terhadap lawan-lawan politiknya, dengan harapan Gus Dur terjebak.

Kapolri dan Kapolda juga diharapkan membuka dan memproses dengan cepat setiap upaya KKN yang dibangun oleh pendukung-pendukung Gus Dur atau oleh Gus Dur sendiri seperti kasus Bulog. Selain itu, polisi diminta menghambat mobilisasi massa pendukung Gus Dur dari luar Jakarta dan jika mungkin, dilakukan penangkapan. Menangkap atau minimal melokalisir aksi-aksi pendukung Gus Dur menjauhi Gedung DPR/MPR. Terakhir, melonggarkan aksi mobilisasi massa anti-Gus Dur dari luar Jakarta dan tidak menghambat massa tersebut mendekati Gedung DPR/MPR.

Priyo meyakini bahwa 60-70% isi dokumen tersebut merupakan idenya. Akan tetapi, dia menolak merinci poin-poin mana saja yang merupakan idenya. Selain itu, Priyo juga mengklaim bahwa bukan dirinya yang menuliskannya ke Akbar Tandjung. Priyo menduga dokumen tersebut dibuat oleh intelijen.[289]

Sementara itu, Fuad Bawazier mengaku mungkin lupa dengan pertemuan tersebut. Tetapi, katanya, memang proses menjatuhkan Gus Dur itu memang ada setelah Gus Dur seolah menjalankan pemerintahanya hanya seorang diri, proses *impeachment* itu memang berjalan.[290]

Sedangkan, Fakhruddin mengakui memang terlibat dalam aksi-aksi awal hingga penjatuhan Gus Dur dan membuka jaringan dengan siapapun yang sejalan dengan HMI. Menurutnya, itu merupakan konsekuensi logis dari sebuah sinergi atau konsolidasi. Gagasan utamanya, HMI sekadar memberikan kritik terhadap kekuasaan. "Anak HMI itu supaya kembali dihitung, karena masa lalu HMI tidak menguntungkan.

289 Wawancara dengan Priyo Budi Santoso di Jakarta, 30 Januari 2019.
290 Hasil Wawancara dengan Fuad Bawazier di Jakarta, 25 Januari 2019.

Cenderung akomodatif dengan kekuasaan, dianggap bagian dari kekuasaan. Jadi kita ingin membangun *image* baru," ujar Fakhruddin.[291]

Hamdan Zoelva, politisi PBB, mengakui bahwa proses pemakzulan Gus Dur berlangsung hampir satu tahun, yakni dengan dimulainya pansus Bulog dan Brunei pada Agustus 2000 hingga Juli 2001.[292] Secara garis waktu, pernyataan Hamdan Zoelva memperkuat keberadaan dokumen tersebut.

Tanggapan Dokumen

Pansus dimulai pada September 2000. Setelah bekerja hampir selama lima bulan. Pansus menyelesaikan penyelidikan yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR tanggal 5 Januari 2001. Inti laporan tersebut menyimpulkan bahwa Gus Dur patut diduga berperan dalam pencairan dan penggunaan dana Yantera Bulog dan terdapat inkonsistensi pernyataan presiden tentang masalah bantuan Sultan Brunei Darussalam, sehingga menunjukkan bahwa presiden telah menyampaikan keterangan tidak benar kepada masyarakat.[293]

Gus Dur tak mau datang ke DPR untuk memenuhi undangan pansus, DPR kemudian menyatakan bersedia menemui Gus Dur, jika Gus Dur mau menerima. Akan tetapi, Gus Dur hanya mau menerima pansus di luar istana, yakni di *Jakarta Convention Center* (JCC). Pertemuan yang sedianya memperbaiki keadaan, malah memperburuk keadaan.

"Nggak-nggak, saya nggak datang. Saya nggak akan datang biarpun dipanggil," kata Gus Dur yang didampingi Sekjen DPP PKB Muhaimin Iskandar. Gus Dur menyatakan tak ada alasan untuk datang memenuhi panggilan oleh Rapat Pleno DPR. "Ngapain, urusan begitu. Masih banyak urusan lain," tandasnya.[294]

---

291 Hasil Wawancara dengan M. Fakhruddin di Aceh, 2 Februari 2019.
292 Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 149.
293 *Ibid.*, hlm. 144.
294 "*Itu Hak DPR*", Republika, 14 Oktober 2000.

Di kesempatan lain, Gus Dur yang ditemani pengacaranya, Luhut Pangaribuan, tak mau mengikuti agenda pansus yang menurutnya mau mengungkit masalah secara tidak proporsional. "Saya ingin mendapat penjelasan, apakah ini forum politik atau forum hukum?" tanya Gus Dur dengan nada marah yang kemudian meninggalkan ruangan pertemuan tanpa mau mendengarkan pihak pansus sampai selesai.[295]

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Menkeh dan HAM) Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa pansus tak punya wewenang untuk memanggil presiden. Menurutnya, yang seharusnya memanggil Gus Dur sebagai presiden adalah DPR sebagai institusi atau lembaga bukan pansus. Sebab, sekalipun yang melaksanakan penyeledikan itu sebuah Pansus, akan tetapi Pansus tersebut merupakan unit kerja dari DPR. Jadi, sebaiknya yang mengundang Gus Dur adalah DPR sebagai institusi.[296]

Aliran Dana *Buloggate*

295 Mohammad Mahfud MD, *Setahun Bersama Gus Dur* (Jakarta: Murai Kencana, 2010), hlm. 99.
296 "*Pansus DPR Tidak Punya Wewenang Panggil Presiden*", Kompas, 16 Oktober 2000.

Pada awalnya, dasar hukum pembentukan pansus *Buloggate* dan *Bruneigate* ada pada Peraturan Tata Tertib DPR yang sedang berlaku dan UU No. 6/1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR. Namun jika hanya berpijak pada aturan tersebut masih banyak kelemahan.

Gus Dur berpendapat keberadaan pansus tersebut tidak legal. Alasannya antara lain karena UU No. 6/1954 terkait erat dengan sistem parlementer dan pembentukan pansus itu belum diumumkan di Berita Negara. Pendapat Gus Dur ada benarnya kalau hanya melihat pada UU No. 6/1954 itu saja. Tetapi jika ditelaah dasar hukum lainnya yang juga digunakan DPR dalam membentuk pansus itu, semua pihak tampaknya tidak perlu tergesa-gesa untuk mengatakan keberadaan pansus itu ilegal.[297]

Pakar Hukum, Harun Alrasyid berpendapat bahwa keberadaan kedua pansus tersebut tidak berdasarkan UU meski DPR menganggap itu sebagai pelaksanaan dari UU No. 6/1954. "Padahal UU tersebut isinya tentang hak angket yang bisa dilakukan oleh DPR sebagai pengawas atau pengontrol dari kerja lembaga eksekutif. Berarti pula harusnya DPR mendirikan panitia angket yang kemudian dimasukkan ke dalam berita acara. Bukan seperti sekarang ini, DPR malah mendirikan pansus."

Bahkan Harun menambahkan istilah *Buloggate* dan Bruneigate sebagai nama pansus menampakkan upaya untuk menjatuhkan kedudukan Gus Dur. "Ini terlihat ada keinginan untuk menjatuhkan kedudukan presiden. Padahal kita jangan menuduh dahulu, belum tentu demikian," tegasnya kembali.[298]

Oleh sebab itu, DPR melakukan manuver dengan mendaftarkan pembentukan pansus Buloggate dan Bruneigate ke Direktorat Lembaran Negara dan Perundang-Undangan, Departeman Kehakiman dan HAM di Jalan Percetakan Negara, Jakarta. Pendaftaran dilakukan 28 November 2000.

297 "*Keabsahan Pansus Bulog dan Brunei, Media Indonesia*", 4 Desember 2000.
298 "*Kegiatan Pansus Buloggate Harus Dihentikan*", Media Indonesia, 11 Desember 2000.

Berdasarkan pendaftaran yang dilaksanakan 28 November itu, pansus Buloggate dan Bruneigate terdaftar dalam urutan nomor surat 95 dan 96. Diperkirakan, satu atau dua minggu lagi Direktorat Lembaran Negara dan Perundang-Undangan memberikan jawaban atas permohonan Sekjen DPR itu.[299]

Pansus akhirnya menarik kesimpulan bahwa Gus Dur telah melakukan "penyalahgunaan kekuasaan, kebohongan terhadap masyarakat, dan lahirnya KKN Baru.[300] Kesimpulan pansus disetujui oleh semua fraksi—kecuali PKB—dan pada saat yang sama DPR telah memutuskan dan menindaklanjuti hasil pansus dengan mengeluarkan memorandum. Isi memorandum: melanggar UUD 1945 pasal 9 tentang Sumpah Jabatan dan melanggar Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaran Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

7 Januari 2000

Pukul 14.00 Wakabulog Dr. Sapuan bersama pengurus Yanatera Bulog Ir. Soleh Sofyan dan Ir. Mulyono diterima Staf Kepresidenan Wahyu Muryadi di Istana Negara. Buku tamu baru diisi pukul 16.00 ketika hendak diterima presiden. Setelah bertemu dengan Gus Dur, mereka membicarakan usaha pencairan dana nonneraca Bulog sebesar 185 miliar rupiah.

8 s.d 11 Januari 2000

Suwondo, penasehat spiritual dan tukang pijit Gus Dur, menyampaikan kabar pada Sapuan bahwa Gus Dur membutuhkan dana 35 miliar rupiah untuk kegiatan kepresidenan.

---

299 "*Pansus Buloggate sudah Terdaftar*", Media Indonesia, 5 Desember 2000.

300 Akbar Tandjung, *Op.cit.*, hlm. 279.

12 Januari 2000
Dibuat perjanjian pinjam-meminjam antara Sapuan dan Suwondo.

13 Januari 2000
Melalui kurir, Sapuan memberikan cek Yayasan Yanatera Bulog kepada Suwondo.

14 Januari 2000
Cek No. 514423 senilai 5 miliar rupiah dicairkan oleh Leo Purnomo (Kie Hau) di BCA Tomang, Jakarta.

20 Januari 2000
Cek No. 530603 senilai 10 miliar rupiah dicairkan oleh Tety Nursetiati di Bank Mandiri Pulo Mas, Jakarta. Lalu cek No. 520604 senilai 15 miliar rupiah dicairkan oleh Suko Sudarso di City Bank di Jalan Sudirman, Jakarta.

20 Februari 2000
Bondan Gunawan bertemu dengan Dr. S dan dua orang lainnya di Sekretariat Negara. Bondan menanyakan kemungkinan penggunaan dana taktis Bulog oleh Setneg.

Tanggal tak tercatat
Sapuan dua kali bertemu dengan Jaksa Agung Marzuki Darusman. Pertemuan pertama pada suatu pagi di Hotel Mahakam Blok M, Jaksel. Marzuki didampingi Widjanarko P., anggota Komisi III DPR RI, menanyakan mekanisme pemanfaatan dana taktis Bulog. Sapuan minta agar soal itu dikonsultasikan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pertemuan kedua berlangsung malam hari di Hotel Regent, Jakarta. Hadir Deputi Khusus BPKP, Erwin Sofyan, yang menyarankan agar dana itu dimasukan ke APBN Pos 16, sehingga dapat digunakan presiden setiap saat bila dibutuhkan.

3 April 2000
Pagi hari, dalam perjalan antara Jalan Lembang Istana Negara, Menperindag dan Kabulog Jusuf Kalla menerima telepon dari Menteri Luar Negeri Alwi Shihab menanyakan apakah dana permintaan Gus Dur sudah ditransfer atau belum.

20-30 April 2000
Rumor tentang pemberian dana Bulog kepada Gus Dur dan kerabat kepresidenan berkembang. Berita Buloggate muncul di media massa.

23 Mei 2000
Kapolri Rusdihardjo membuat pernyataan bahwa Suwondo sudah berada di luar negeri. Menlu memberikan pernyataan bahwa Suwondo sulit ditemukan. "Suwondo sudah menghilang," kata Alwi.

24 Mei 2000
Suwondo memberikan pernyataan tertulis akan membayar utang sebelum Agustus 2000. Ia juga mentransfer 1.575 miliar rupiah ke rekening Yanatera Bulog sebagai pembayaran bunga pinjaman.

24 Mei 2000
Sapuan ditahan oleh Satserse Polda Metro Jaya.

25 Mei 2000
Suko Sudarso memberikan pernyataan bahwa dana 15 miliar rupiah adalah titipan kawannya buat membayar tanah seluas sekitar 100 hektar untuk rumah kebun karyawan Bulog di Desa Simagalih, Sindang Barang, 116 KM selatan Cianjur.

29 Mei 2000
Alwi Shihab menyatakan diri bersih dari *Buloggate*. "Saya 100 persen bersih. Bagaikan kertas putih."
Menanggapi soal telepon dia kepada Jusuf Kalla yang menanyakan soal pencairan dana Bulog, Alwi mengatakan," Saya memang menanyakan kepada Pak Jusuf. Saya bilang ada rumor bahwa Bulog mengeluarkan uang. Saya tanyakan benar atau nggak."

29 Mei 2000
Bondan Gunawan (Pjs Sekretaris Negara/Sekretaris Pengendalian Pemerintahan) menyatakan mundur. Bondan menegaskan tak tahu menahu soal Bulog dan tak ingin membebani Gus Dur. Soal Bulog dia berkata. "Semua orang butuh duit. Saya juga. Tapi kalau datangnya seperti itu, tidaklah."

30 Mei 2000
Petugas Ditserse Polda Metro Jaya datang ke rumah Jusuf Kalla di Makasar untuk meminta keterangan soal Buloggate. Menurut Jusuf, pertemuan itu adalah untuk meminta klarifikasi tentang pencairan dana Bulog. Katanya, "Seperti beberapa kali saya katakan bahwa setelah Pak Sapuan menghadap Bapak Presiden, beberapa hari kemudian Sapuan meminta saya mencairkan dana Bulog 10 miliar rupiah yang menurut Pak Sapuan sesuai petunjuk Bapak Presiden.

Di bulan **Juni 2000**, empat orang Tetty Nursetiati (istri Suwondo), Siti Farikha (kerabat Gus Dur), Suko Sudarso dan Aris Djunaedi (Kerabat Gus Dur) diperiksa polisi. Uang sejumlah 15 miliar rupiah diambil dari Citibank dan dikembalikan kepada Yanatera melalui polisi.

1 Juni 2000
Jaksa Agung Marzuki Darusman mengaku bertemu Sapuan sebelum dana Yanatera Bulog dicairkan.

2 Juni 2000
Di depan rapat Komisi III DPR, Sapuan mengatakan kunci kasus Buloggate itu ada pada Gus Dur dan

Suwondo. Ia menjelaskan, Presiden Gus Dur butuh dana untuk menyelesaikan masalah Aceh. Karena ingin mendengar langsung, maka **Kamis, 6 Januari 2000**, Sapuan minta kepada Suwondo agar mempertemukannya dengan Presiden. "Bagaimana Suwondo tidak meyakinkan, Kamis minta ketemu Presiden, Jumat sudah dikabulkan," kata Sapuan.

2 Juni 2000
Dalam acara Rembug Paripurna Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional di Hotel Setia, Cipanas, Gus Dur mengaku pusing dengan kasus *Buloggate*. "Jangan tanya soal Bulog ke saya, nanya ke yang lain."

2 Juni 2000
Beberapa orang aktivis HMI mengaku pernah melihat Suwondo di kantor pusat sebuah ormas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Suwondo terlihat tengah main tenis meja dan dijaga beberapa orang.

4 Juni 2000
Tokoh pengajian majelis 'Reboan' dan anggota DPR RI, Eki Syachrudin, usai bertemu Gus Dur di Istana Negara mengatakan, "Gus Dur siap memberikan penjelasan kasus Bulog ke DPR."

6 Juni 2000
Kaditserse Polda Metro Jaya yang waktu itu–Kol Pol Alex Bambang Riatmodjo–mengatakan keyakinanya bahwa Suwondo masih berada di sekitar Jakarta. Suwondo dinilainya orang biasa-biasa saja yang tidak memiliki kemampuan pergi ke luar negeri.

7 Juni 2000
Kapolri telah mengamankan uang 30 miliar rupiah milik Yanatera Bulog. Sebanyak 15 miliar rupiah di antaranya berupa sertifikat yang telah diberikan oleh Hendri Arioseno.

7 Juni 2000
Istri Suwondo, Tetty Nursetiati, menyerahkan uang 5 miliar rupiah yang dicairkan dari BCA Sudirman ke Polda Metro Jaya.

7 Juni 2000
Pengacara Sapuan, M Assegaf SH, mengatakan presiden telah mengeluarkan Keppes No. 142/M/2000 pemberhentian Sapuan sebagai Wakabulog.

16 Juni 2000
Kapolri Rusdihardjo mengatakan akan segera memeriksa Presiden dalam kasus Bulog.

26 Juni 2000
Jusuf Kalla di Makassar mengutarakan, bahwa Presiden memang butuh dana untuk Aceh.

22 Agustus 2000
Pengadilan Sapuan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

28 Agustus 2000
DPR sepakat membentuk pansus *Buloggate* dan *Bruneigate*.

13 Oktober 2000
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Lalu Mariyun S.H., dalam putusan selanya menolak eksepsi (pembelaan) Sapuan. Jaksa menuntut Sapuan sesuai dakwaan primer pasal 374 tentang penggelapan juncto pasal 55 ayat (1) kedua "e", juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan subsider pasal 372 tentang penipuan juncto pasal 55 ayat (1) kedua "e", juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

14 Oktober 2000
Pukul 13.30 polisi menangkap Suwondo yang tengah tiduran di vilanya di Kampung Sampai, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Bogor. Pukul 15.30, Suwondo tiba di Polda Metro Jaya dan menjadi tersangka kasus Bulog.

15 Oktober 2000
Polisi menyatakan Sapuan belum bisa diperiksa intensif karena stres.

16 Oktober 2000
Tim Psikiater kepolisian RS Polri Kramat Jati Jakarta menyatakan Suwondo sehat. "Dari pemeriksaan selama sejam lebih, Suwondo ternyata sehat secara fisik maupun psikis," kata Senior Superintendent Budiarto, Psikiater RS Polri Kramat Jati.[301]

Gus Dur Diminta Mundur

Bersamaan dengan sidang pansus yang coba mengadili Gus Dur secara politis, pelemahan terhadap pemerintahan Gus Dur juga mulai gencar dilakukan. Amien Rais, tokoh yang mencalonkan Gus Dur sebagai presiden mengungkapkan penyesalannya telah mencalonkan Gus Dur sebagai presiden.

Keterangan itu disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan KAHMI di Jakarta pada 25 Oktober 2000. Ikut pula menjadi pembicara Ketua DPR Akbar Tandjung dan Sekjen PPP Alimarwan Hanan. "Saya minta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia atas pilihan yang keliru. Karena kita manusia, jadi bisa keliru. Sekarang jelas bahwa Gus Dur memang tidak bisa bertahan lebih lama lagi demi bangsa dan kelanjutan dari republik, serta keutuhannya di masa mendatang," kata Amien.

Amien menjelaskan ungkapan itu merupakan bentuk tanggung jawab sebagai orang yang pernah menjadi pendorong utama pencalonan Gus Dur di kursi kepresidenan. Ia mengaku tulus dalam mengutarakan semua pernyataanya itu."Justru sayalah yang kini punya komitmen. Saya-lah sekarang yang dihujat masyarakat sebagai orang yang paling bertanggung jawab saat mempresidenkan Gus Dur. Sekarang saya ingin menebus dosa dan kesalahan saya itu," tegasnya.[302]

---

301 "*Kronologi Buloggate*", Republika, 18 Oktober 2000.
235 "*Amien Rais Minta Maaf*", Republika, 26 Oktober 2000.

Tak cukup mengungkapkan penyesalannya, Amien juga memprediksi, pada hari-hari mendatang, akan semakin banyak tokoh yang menyarankan agar Gus Dur mundur. "Ya, ini seperti apa yang dikatakan A. M. Fatwa, bila mundur ongkosnya akan lebih murah. Baik itu dari segi biaya, risiko, dan waktu yang akan terbuang," ungkapnya.

Amien juga menyarankan supaya Gus Dur dan semua pihak menjawab pertanyaan radikal. "Apakah kepemimpinan Gus Dur ini bisa dipertahankan karena seluruh indikasi yang ada menuju ke arah negativisme? Padahal republik ini sudah semakin rentan setelah Timor Timor lepas, tanah rencong Aceh dan Papua semakin tipis tarikannya ke republik, sehingga mungkin akan bisa lepas dalam beberapa tahun mendatang," urai Amien.[303]

Pasca pernyataan Amien, pengejewantahan rencana untuk menurunkan Gus Dur seperti yang dituliskan dalam dokumen yang ditulis oleh Priyo Budi Santoso mulai dijalankan. Praktis, pernyataan politisi atau kelompok yang mengkritik Gus Dur mulai banyak mendapatkan ruang di media massa, terutama Republika yang sejak awal didirikan menjadi corong kelompok Islam dan Media Indonesia yang dimiliki Surya Paloh, salah seorang anggota Partai Golkar.

Media Indonesia mulai membuat survei untuk melakukan *framing* bahwa kinerja Gus Dur jauh dari yang diharapkan dan mundurnya Gus Dur merupakan tuntutan akal sehat.

"...Sejumlah 52,44% responden menyatakan tuntutan agar Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mundur adalah berdasarkan akal sehat. Sedangkan 64,97% responden berpendapat, jika Gus Dur mundur maka yang seharusnya naik menjadi presiden adalah Megawati Soekarnoputri. Demikian pandangan mayoritas responden dalam jejak pendapat *Media-*

303 *Loc.cit.*

Indonesia Online (www.mediaindo.co.id), yang berlangsung Selasa (31/10) hingga Jumat (3/11), dan diikuti 1. 724 responden.

Mayoritas juga mengatakan, polemik usulan mundur terhadap Gus Dur ini jika diteruskan bisa berdampak sangat buruk terhadap politik dan ekonomi. Antara lain, bisa terjadi kerusuhan sosial (59,54%), dan intervensi TNI karena sipil tidak becus (15,12%). Sementara itu, responden juga menyoroti kinerja anggota MPR/DPR yang dianggap banyak bicara dan sedikit bekerja."[304]

Sedangkan dalam sebuah opini di Republika, bahkan menyebut Gus Dur sebagai presiden terburuk dan harus segera mundur dari jabatannya, baik melalui jalur konstitusi yakni SI MPR maupun revolusi. "Sering diungkapkan bahwa menjatuhkan Gus Dur di tengah jalan dapat menjadi preseden buruk. Pernyataan ini antara lain disampaikan oleh Prof. Dr, Nurcholis Madjid—atau Cak Nur. Cak Nur bahkan berani mendramatisir masalah dengan mengatakan lebih baik menderita lima tahun di bawah kepemimpinan Gus Dur ketimbang menjatuhkan Gus Dur di tengah jalan, karena akan membuat bangsa ini selamanya menderita.

Dengan membiarkan Gus Dur terus-menerus melakukan kesalahan fatal, bangsa ini seperti membuka kembali kesempatan kepada pemimpinnya untuk membawa bangsa ini ke jurang kehancuran. Kalau hari ini Gus Dur dimaafkan dalam melakukan pelanggaran Tap MPR No. VII/2000 dan 15 kesalahan lainnya, bukan hal luar biasa kalau di masa mendatang Gus Dur dan para pemimpin Indonesia lainnya melakukan kesalahan yang jauh lebih besar, yang membuat bangsa ini makin terpuruk ke dalam jurang kehancuran.

Demi kepentingan berjalannya bangsa ini di atas rel konstitusional, siapa pun memang tidak layak diberi

---

304 "*Gus Dur Mundur adalah Tuntutan Akal Sehat*", Media Indonesia, 5 November 2000.

kesempatan mengganti pemimpin lewat jalan kudeta, revolusi, atau jalan di luar konstitusional. Namun, bila proses pergantian itu melalui konstitusi serta memiliki alasan obyektif, rasional, dan proporsional, tak ada alasan menolaknya."[305]

Amien memainkan peran antagonisnya terhadap Gus Dur. Tak cukup dengan menyatakan penyesalannya, ia juga mulai menggiring isu bahwa Megawati layak menggantikan Gus Dur, apabila Gus Dur lengser. "Jika Gus Dur mundur, maka Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, sesuai konstitusi, naik menjadi presiden. Namun, NU minta suksesi hanya dilakukan melalui pemilu. Sedangkan posisi RI-2 (wakil presiden), kata Amien, akan ditentukan oleh MPR yang sekaligus menyepakati konsensus nasional itu berlangsung sampai 2004. "Konsensus itu penting supaya antar-elite politik tidak saling tabrak sampai 2004."[306]

Amien bahkan sudah mewacanakan untuk menaikan Akbar Tandjung sebagai wakil presiden. Jika Presiden Gus Dur mundur atau diberhentikan melalui Sidang Istimewa MPR Amien Rais berpendapat, duet Megawati-Akbar adalah pilihan ideal menggantikannya. "Sesungguhnya mengapa bukan duet Megawati-Akbar yang menggantikan Gus Dur. Apalagi secara formal Megawati-Akbar ini secara formal mengontrol kursi DPR/MPR. Yang satu menang pemilu 33 persen. Dan yang satunya menang pemilu 22 persen," kata Amien Rais.

Amien menandaskan, duet Megawati-Akbar juga dapat dipakai sebagai representasi kekuatan politik dan wilayah antara Jawa dan luar Jawa. "Keduanya pun masing-masing bisa saling menutupi. Megawati seperti banyak dikatakan banyak orang mempunyai kharisma tapi lemah dalam *managerial*. Sedangkan Akbar punya pengalaman dan kemampuan dalam mengatur pemerintahan," katanya lagi.[307]

---

305 "*Husein Migdad, Menanti Keberanian DPR dan MPR*", Republika, 25 Oktober 2000.
306 "*Gus Dur Mundur, Megawati Naik*", Media Indonesia, 29 Oktober 2000.
307 "*Bila Gus Dur Mundur, Duet Mega-Akbar Tepat Menggantikannya*", Republika, 13 November 2000.

Gus Dur pun bergeming, ia menantang pernyataan yang banyak memintanya mundur. "Kalau saya tidak mau mundur, mau apa?" ujar Gus Dur. Ia sekali lagi mengungkapkan, setidaknya ada tiga pihak yang melakukan rongrongan pada pemerintahannya saat ini yaitu mantan pejabat, mantan perwira tinggi TNI, dan para politis yang hanya bisa naik dengan kecurangan bukan kejujuran.[308]

Namun menariknya, pada tahap ini kubu PDIP tak bergeming. DPP PDIP melalui sebuah rapat pleno menyatakan sikap bahwa PDIP ingin terus mempertahankan Gus Dur sebagai presiden hingga 2004. Keputusan tersebut dicapai dalam rapat pleno DPP PDIP yang berlangsung kemarin dan dipimpin langsung ketua umumnya, Megawati Soekarnoputi. Keputusan rapat tersebut disampaikan kepada wartawan oleh Ketua DPP PDIP Roy BB Janis dan Wakil Sekjen Pramono Anung. "Dengan demikian PDIP tidak akan ikut dan tidak akan larut dalam genderang politik yang disampaikan secara inkonstitusional," kata Pramono Anung mengumumkan hasil rapat pleno tersebut.

Pramono menjelaskan bila PDIP tidak ikut dengan genderang politik partai lain bukan berarti PDIP membela Gus Dur. PDIP tidak ingin situasi saat ini menjadi lebih hiruk-pikuk. "Itulah sebabnya Ketua Umum meminta agar partai ini jangan menambah persoalan baru di masyarakat, tetapi mencari penyelesaian masalah secara konstitusional," tegas Anung.[309]

Namun sikap Megawati tidak menolak kekuasaan, tetapi menolak untuk merebut kekuasaan. Hal itu diungkapkan oleh Sophan Sophian, menurutnya, Wakil Presiden Megawati tidak akan merebut kekuasaan, karena cara seperti itu dinilai tidak sesuai dengan mekanisme konstitusi. Namun, tambahnya, Megawati tidak menolak kekuasaan asalkan sesuai konstitusi.

---

308 "*Gus Dur: Kalau Saya tidak Mau Mundur, Mau Apa?*", Republika, 27 Oktober 2000.
309 "*PDIP Pertahankan Gus Dur*", Media Indonesia, 1 November 2000.

Sebagai seorang wakil presiden, kata Sophan, Megawati harus bijaksana dalam mengeluarkan pernyataan dan tidak boleh sembarangan mengeluarkan di berbagai pernyataan yang bisa membuat kesan seolah-olah terjadi perebutan kekuasaan. "Sejak menjadi ketua umum partai, Megawati selalu berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandas Sophan.[310]

Pada saat kasus Laksamana Sukardi, internal PDIP sudah mulai terbelah dan dinamikanya semakin kencang antara pengurus lama—biasa disebut kelompok 87—dan anak-anak *indekos*. Novi yang tergabung dalam pengurus lama menyatakan bahwa harus menjaga keutuhan pemerintahan Gus Dur dan Megawati. Tujuannya agar Megawati dapat belajar dan mematangkan diri sebelum pemilu 2004.[311]

Sedangkan anak kos sebaliknya, mereka selalu memprovokasi Megawati untuk menyiapkan dan mengambil langkah untuk menaikkan Megawati. Provokasi yang cukup gencar pada masa awal pemerintahan Gus Dur yaitu saat Megawati merasa ditinggal untuk mengurusi masalah dalam negeri. Saat awal interpelasi juga Megawati tak ingin adanya polarisasi yang tajam antara eksekutif dan legislatif. Megawati menyatakan dalam sebuah rapat internal agar jangan ada cara-cara menaikkan atau menurunkan presiden seperti zaman Soekarno.[312]

Mengenai anak kos-kosan, Haryanto Taslam—atau Hartas, Wakil Sekjen PDIP menganologikan ibarat rumah, PDIP sudah dibeli dan dikuasai kelompok kos-kosan. "Pemiliknya diusir dan semua perabotannya dikuasai, mulai dari jabatan strategis di DPR/MPR hingga kepengurusan pusat partai. Tapi kader PDIP masih yakin akan bisa merebut kembali haknya," kata Hartas.

---

310 "*Mega Bersedia tapi Tidak Mau Merebut*", Media Indonesia, 16 November 2000.
311 Wawancara dengan Noviantika Nasution di Jakarta, 1 Maret 2019.
312 Wawancara dengan Noviantika Nasution di Jakarta, 1 Maret 2019.

Ironisnya, kelompok 87 terusir begitu saja, walaupun telah berjuang membesarkannya. Partai yang dulu diperjuangkannya bersama Megawati telah berubah visi. Itu setelah partai dikuasai oleh orang-orang baru. "Di sekitar Ibu Megawati, itu banyak sekali orang-orang baru, mereka lebih punya legalitas untuk membuat *policy.* Meski demikian kami tetap memberi masukan, diterima ya alhamdulillah, nggak ya.. mau bagaimana lagi?" katanya.[313]

Gerakan PDIP di DPR

Pada pertengahan November, pegiat anti-Gus Dur di DPR mengonsolidasikan jumlah mereka dalam persiapan untuk melakukan tekanan terakhir ke DPR. Kwik Kian Gie yang tersinggung karena dikeluarkan dari kabinet mengorganisir apa yang dinamakannya "pertemuan informal anggota-anggota DPR yang sepaham". Pertemuan itu dihadiri 200 dari 500 anggota DPR. Niat awal pertemuan itu untuk mendiskusikan berbagai masalah, tapi pembahasan didominasi dengan topik bagaimana dan kapan presiden harus dijatuhkan. Menjelang November, 151 anggota DPR menyerahkan dokumen resmi ke Ketua DPR Akbar Tandjung. 151 anggota DPR itu adalah 47 PDIP, 37 Partai Golkar, 22 PPP, dan 34 dari Fraksi Reformasi yang didominasi PAN.

Kwik Kian Gie juga menginisiasi forum curhat DPR. "Sifat pertemuan tidak formal yang hadir tidak mempunyai pretensi mewakili partainya, tetapi semata-mata sebagai pribadi yang kebetulan anggota DPR/MPR," kata Kwik. "Saya mohon dimengerti dan dipercaya oleh saudara bahwa dari pihak saya tak ada pretensi dan maksud apa pun kecuali memfasilitasi pertemuan itu. Curah pendapat nasional yang saya usulkan itu adalah ajakan saya sebagai warga negara dan ditujukan kepada

313 "PDIP Sudah Dikuasai Kelompok Kost-Kostan", Duta Masyarakat, 11 Juni 2001.

warga negara yang kebetulan duduk di DMP/MPR," katanya.[314]

Suasana tenang sempat mewarnai rencana pertemuan itu. Ada kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya penyerbuan oleh massa pendukung Presiden Gus Dur. Mereka tentu berpendapat bahwa curah pendapat ini adalah bagian dari skenario besar untuk menyingkirkan presiden. Bisa saja mereka menyerbu untuk menggagalkan pertemuan itu. Maka, hingga sehari sebelumnya, panitia masih merahasiakan tempat berlangsungnya acara itu.

Namun, jika kepedulian presiden hanya untuk mempertahankan kursinya, dapat saja ia mengabaikan forum curah pendapat tersebut. Forum ini tidak mempunyai kekuatan apa pun untuk menurunkannya sebagai presiden. Namun, jika presiden peduli terhadap masa depan bangsa, maka ia harus meresponnya secara positif.

Forum Curah Pendapat menyatakan bahwa mundur adalah salah satu pilihan langkah nyata. Pilihan lainnya adalah kerelaan Presiden untuk mengubah pola kepemimpinannya dari yang dianggap sekehendaknya sendiri menjadi kepemimpinan yang mendengarkan semua pihak. Forum curah pendapat telah mengingatkan bahwa sekarang adalah saat bagi Presiden Gus Dur agar mengambil salah satu pilihan tersebut. Itu demi kebaikan bangsa ini maupun presiden sendiri untuk masa mendatang.[315]

Meskipun dalam publikasi hasil forum curah pendapat yang disebut "Kaukus 11 November" di Hotel Mulia Jakarta, oleh Ketua Panitia, Ade Komaruddin, Kwik Kian Gie, Wakil Ketua DPR AM Fatwa, Ketua Fraksi Reformasi Hatta Rajasa, Ketua FPG MPR Fahmi Rajasa, Ketua FPG MPR Fahmi Idris, Alvin Lie, Didi Supriyanti, Suryadharma Ali, Faisal Baasir, dan Subagio Anam, agar presiden memperbaiki kinerja dan tabiatnya. Demi

314 Mohammad Sobary, dkk (ed), *Op.cit.*, hlm. 109—110.

315 "*Setelah Curah Pendapat*", Republika, 13 November 2000.

menguatkan Kaukus 11 November tersebut, Kwik menjadi motor agar DPR mengeluarkan memorandum I untuk Gus Dur.[316] Wakil Ketua Fraksi PDIP DPR Meilono Suwondo, mengatakan mayoritas anggota fraksi akan sependapat dengan ajakan mengeluarkan memorandum itu. "Jangankan mayoritas fraksi, mayoritas DPR arahnya ke sana (mengeluarkan) memorandum."[317]

Panasnya situasi elite, merambat ke akar rumput. Saling unjuk kekuataan massa pun tak terelakkan lagi. Dalam dokumen tersebut ditulis bahwa kubu Anti-Gus Dur akan dimotori oleh massa HMI. Sedangkan, kubu Gus Dur dianalisis akan menggunakan PMII, Forkot, dan Santri.

Situasi ini mulai berkembang pada awal November 2000. Massa pendukung dan anti Gus Dur pun mulai melakukan aksi demontrasi. Sedikitnya 20.000 santri menggelar aksi parlemen jalanan mendukung Gus Dur di Pasuruan, Jawa Timur, Kemarin. Mereka mendatangi DPRD setempat menuntut Amien Rais dan Ketua DPR Akbar Tandjung mundur, serta menyerukan warga NU dan Muhammadiyah tetap bersatu. "Manuver Amien Rais adalah upaya untuk membuka luka lama antara NU dan Muhammadiyah," demikian pernyataan sikap mereka.

Aksi mendukung Gus Dur mulai muncul di sejumlah kota seiring dengan maraknya dukungan terhadap ketua MPR Amien Rais yang menuntut Gus Dur mundur. Sejumlah kelompok unjuk rasa di Jakarta, kemarin, menghendaki Gus Dur lengser.

Sementara di Surabaya, sekitar 50 orang yang tergabung dalam kelompok Peduli Masyarakat Surabaya Pendukung Gus Dur menduduki kantor HMI. Mereka menilai HMI yang melakukan aksi demonstrasi di Jakarta sehari sebelumnya melecehkan Gus Dur.

"HMI harus bertanggung jawab masalah ini. Kita tidak

316 "*Kwik Cs Imbau Fraksi DPR Ajukan Memo SI*", Republika, 16 November 2000.
317 "*Sejumlah Fraksi Siap Bicarakan Memo Kwik*", Republika, 17 November 2000.

ingin Gus Dur terus dicaci maki, kita akan menghadapi mereka semua," ujar seorang pengunjuk rasa sambil melakukan corat-coret bangunan itu.

Situasi makin memanas tatkala di dalam kantor HMI ada sejumlah aktivis, sehingga nyaris terjadi baku hantam. Petugas dari Polresta Surabaya Timur cepat mengamankan situasi, para demonstran akhirnya hanya bisa melempari batu.[318]

Ribuan massa yang terdiri dari elemen mahasiswa dan masyarakat kembali tumpah ruah di halaman Gedung MPR/DPR Senayan Jakarta, kemarin. Mereka memberi dukungan kepada pansus *Buloggate-Bruneigate* untuk mengusut tuntas skandal yang diduga melibatkan Presiden Gus Dur itu.

Ini merupakan aksi unjuk rasa terbesar pada awal tahun 2001 ini. Elemen mahasiswa mengenakan jaket almamater masing-masing bercampur baru dengan masyarakat umum. Mahasiswa yang ikut dalam aksi kemarin adalah HMI, BEM UI, BEM IPB, Mahasiswa Muhammadiyah.

Sedangkan elemen masyarakat tergabung dalam Forum Rakyat Anti Korupsi (Fraksi), Gerakan Santri Selamatkan Reformasi (Gesser), Gerakan Bersama Rakyat Antikorupsi (Gebrak), Barisan Rakyat Anti Korupsi (Bara Api), Masyarakat Bekasi Antidusta (Mbadut), dan Gerakan Massa Peduli Rakyat dan Umat (Gempar).

Massa dari berbagai unsur tersebut mulai mendatangi Gedung DPR sejak pagi pukul 10.00 WIB. Sesuai jadwal, seharusnya kemarin pansus mendengarkan penjelasan Presiden Gus Dur mengenai kasus Bulog dan Brunei, namun sejak awal Kepala Negara sudah menegaskan tidak memenuhi undangan tersebut.

Dalam orasinya, para demonstran juga menyatakan keinginan mereka bertemu dengan pansus *Buloggate* dan *Bruneigate*. Keinginan tersebut pun dipenuhi dengan kehadiran

318 "*Massa Gus Dur – Amien Beraksi*", Media Indonesia, 2 November 2000.

Ketua Pansus Bachtiar Chamsjah, Wakil Ketua Alvin Lie, Julius Usman, Ade Komaruddin. Di tengah yel-yel anti-Gus Dur, Bachtiar Yulius, dan Ade Komaruddin didaulat naik ke kap mobil untuk memberikan orasi. Atas nama Pansus, Bachtiar berjanji akan melaksanakan kepercayaan rakyat sebaik-baiknya dan tidak akan menutup-nutupi kebenaran.[319]

M. Fakhruddin, Ketua PB-HMI, menilai bahwa selama pemerintahannya Gus Dur tidak berhasil memperbaiki kondisi bangsa dan menjalankan amanat reformasi. Karena itu harus mengundurkan diri. "Selama pemerintahannya, bangsa Indonesia justru mengalami *set back*, baik di bidang ekonomi, politik, dan hukum."

Fakhruddin mengemukakan, terlepas dari terlibat tidaknya dalam kasus Bulog dan Brunei, yang kini masih diusut Pansus DPR, Gus Dur selaku pimpinan eksekutif gagal melakukan kewajibannya memperbaiki kondisi bangsa. "Karena itu tidak ada pilihan lagi. Jalan terbaik adalah meninjau kembali mandat yang telah diberikan kepada Gus Dur," katanya.[320]

Selain itu, alasan lain massa HMI melakukan demonstrasi karena pemerintahan Gus Dur yang pada awalnya dianggap sebagai representasi kebangkitan kekuatan Islam politik, dalam perjalanannya malah cenderung berpihak ke kalangan minoritas dan kalangan nasionalis. Hal ini yang membuat kekuatan Islam politik kecewa dengan Gus Dur.

Gus Dur juga dianggap menafikan peran politik Amien Rais dan tokoh-tokoh lainnya yang berjasa dalam menjadikan Gus Dur sebagai presiden. Semua tokoh yang menaikkannya dinafikan. Jadi, peran politiknya dia yang ciptakan. Sikap arogansinya yang berlebihan, yang menyebabkan muncul kelompok perlawanan.[321]

Hal ini yang membuat HMI mengambil sikap untuk menjadi

319 "*Ribuan Demonstran Serbu DPR*", Media Indonesia, 18 Januari 2001.
320 "*Presiden dan MPR Harus Diganti*", Media Indonesia, 24 Januari 2001.
321 Wawancara dengan M. Fakhruddin, 2 Februari 2019.

oposisi terhadap pemerintahan Gus Dur. Namun, Fakhruddin menyatakan menjadi oposisi bukan sekadar menyebarkan sentimen terhadap Gus Dur melainkan juga memberikan kritik yang rasional dan memberikan alternatif. Konsekuensi menjadi oposisi perlu ada komunikasi dengan kekuatan-kekuatan antipemerintah termasuk tentara, tak terkecuali Menkopulkam Susilo Bambang Yudhoyono, Fakhruddin juga menyatakan sempat berkomunikasi dengan Prabowo Subianto. Tentara memberi bantuan, tapi hanya dukungan untuk bergerak. Di kalangan sipil, ia juga berkomunikasi dengan Arifin Panigoro.[322]

Sementara itu, massa mahasiswa pendukung Gus Dur, Adian Napitupulu, aktivis Forkot menilai kesalahan yang terjadi saat ini adalah kesalahan kolektif. "Karena itu jika ingin diganti seharusnya diganti secara keseluruhan, baik eksekutif maupun legislatif." Dia menegaskan, Gus Dur tidak sendirian dalam melakukan kesalahan karena kalau dia melakukan kompromi berarti ada partner. Adian menegaskan, ke depan Forkot akan menjalankan mahkamah rakyat yang diarahkan pada pembersihan rezim. Artinya, Forkot ingin membangun Indonesia baru yang demokratis dengan melakukan investasi-investasi budaya dan gerakan-gerakan rakyat.

"Kita menginginkan mahkamah rakyat karena kita ingin membangun sportivitas politik. Mahkamah rakyat bagi kita merupakan sesuatu yang tidak bisa ditolak lagi. Siapa pun yang bersalah harus diseret ke pengadilan dan diberikan sanksi," jelasnya.[323]

Momentum besar dari gerakan Badan Ekesekutif Mahasiswa (BEM) dan senat mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ini muncul ketika mereka berkumpul melaksanakan apel reformasi Rabu (24/10) di Kampus Universitas Trisakti. Ribuan mahasiswa

---

322 Wawancara dengan M. Fakhruddin, 2 Februari 2019.

323 "*Presiden dan MPR Harus Diganti*", Media Indonesia, 24 Januari 2001.

dari 10 PT (UI, IPB, Usakti, Mercu Buana, ITB, ITS, Unibraw, STAN, Politeknik Negeri Jakarta, Unas Jakarta), berkumpul dan membuat pernyataan sikap atas jalannya pemerintahan ini yang dianggap tidak mampu memperbaiki keadaan.

Selama bergerak di Jakarta mereka berkumpul di dua posko, yakni kampus Trisakti dan UI Salemba. Posko itu dinamakan Posko Penyelamat Reformasi. Dari situ mereka yang menghimpun kekuatan untuk aksi. Penggalangan masa ini, ini tidak terlepas dari dukungan birokrasi kampus. Hal ini tidak mengherankan, karena sebagian dari kampus-kampus ini tergabung dalam Forum Rektor mempunyai andil. Akan tetapi, dukungan ini tidak saja datang dari pihak rektor, tetapi beberapa staf pengajar di daerah yang meminta dukungan dari salah satu tokoh nasional di Jakarta untuk memobilisasi para mahasiswanya untuk menuntut Gus Dur mundur.

Tak hanya itu, beberapa anggota Pansus Buloggate/ Brunaigate, seperti Zulvan Lindan dari PDIP, sudah intensif melakukan koordinasi dengan para pimpinan mahasiswa dari kampus-kampus besar sejak November.[324] Sedangkan, kalau dilihat dari latar belakang dari para pimpinan Senat dan BEM ini, umumnya dari HMI dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAHMI). Sudah pasti para seniornya turun tangan membantu memperjuangkan adik-adiknya ini. Apalagi senior mereka itu tergabung dalam KAHMI yang sekarang dipimpin Fuad Bawazier.

Banyaknya kritik yang dilakukan KAHMI dan HMI menjadikan stigma bahwa ada HMI connection. Namun Fakhruddin menyatakan itu hanya sebuah kebetulan bahwa beberapa kekuatan politik yang berbenturan dengan Gus Dur berangkat dari keluarga HMI. Tak semuanya KAHMI sejalan dengan HMI, di dalam kabinet Gus Dur juga ada Mahfud MD

324 "*Hari-hari Penentuan dari Senayan*", Media Indonesia, 28 Januari 2001.

yang juga anggota KAHMI.[325]

Tak hanya Amien Rais, Fuad Bawazier juga salah satu tokoh vokal yang mengkritisi Gus Dur. Ia yang juga anggota KAHMI mulai mengumpulkan dukungan untuk mendukung penjatuhan Gus Dur. Bahkan, Fakruddin menyebut bahwa Fuad merupakan jangkar dari semua kegiatan mengkritisi Gus Dur.[326] Meski ia mewakili PAN di dalam fraksi reformasi, hubungannya dengan Akbar Tandjung juga cukup erat sebagai anggota KAHMI. Oleh sebab itu, ia dalam beberapa kesempatan mendukung Akbar Tandjung untuk menggantikan Gus Dur.

"KAHMI berpartisipasi dalam menaikan dan sekaligus juga dalam menurunkan Gus Dur," kata Ketua Presidium Majelis Nasional KAHMI Fuad Bawazier dalam ceramah umum pembukaan Musyawarah Wilayah IV KAHMI Sumatera Selatan, Palembang. Ia mengatakan pemerintahan Gus Dur dinilai banyak orang sudah tidak efektif lagi dan saatnya harus diturunkan diganti dengan pemerintahan baru.

Sedangkan menurut Akbar Tandjung, desakan mundur terhadap Gus Dur adalah tindakan yang diperbolehkan dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak warga negara dalam mengeluarkan pendapat. "Itu sah-sah saja, selama masih dalam koridor demokrasi," jawabnya.[327]

---

325 Wawancara dengan M. Fakhruddin, 2 Februari 2019.

326 Wawancara dengan M. Fakhruddin, 2 Februari 2019.

327 "*Akbar Tolak Jadi Pengganti Presiden, KAHMI Siap Turunkan Gus Dur*", Media Indonesia, 6 November 2000.

Peta Kekuatan Mahasiswa-Pemuda Pendukung dan Kontra Gus Dur

Pro:
• Gerakan Pemuda Ansor • PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) • Garda Bangsa • IPPNU (Ikatan Putra Putri Nahdatul Ulama) • IPNU (Ikatan Pemuda Nahdatul Ulama) • Forum Penegak Konstitusi dan Kedaulatan Bangsa (FKKB)
Isu: Pansus Buloggate dan Bruneigate alat politik untuk jatuhkan presiden, DPR bagian Orde Baru, Gus Dur jatuh mengagalkan konsolidasi Demokrasi, politik massa adalah rekayasa Orde Baru.
Garis Tengah:
• Forkot (Forum Kota) • Famred (Front aksi mahasiswa untuk reformasi dan demokrasi) • LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi) • FKSMJ (Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta) • KAM (Kesatuan Aksi Mahasiswa) Jakarta • Front Kota • Front Nasional • Forum Bersama • GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) • PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) • GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) • FPPI (Front Perjuangan Pemuda Indonesia) • Kamtri (Kesatuan Aksi Mahasiswa Trisakti) • KM YAI • KB UPN • FAM (Front Aksi Mahasiswa) UI • SPPJ (Solidaritas Pemuda Pelajar Jakarta)
Isu: Adili Soeharto dan penjahat Orba ke Mahkamah rakyat, bersih kan elite politik dan birokrasi dari rejim Orde Baru beserta antek-anteknya, cabut dwifungsi TNI, potong satu generasi, *landreform*.

Kontra:
• BEM UI, IPB, KM ITB, KM UGM, UNJ, UNDIP • Unibraw, Unsri • Senat Mahasiswa se-Jakarta • Presidium Masyarakat Mahasiswa Trisakti • PB HMI • HMI cabang Jakarta • Gerakan Pemuda Kabah (GPK) • GPI (Gerakan Pemuda Islam) • KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) • HAMMAS (Himpunan Mahasiswa Muslim Antar Kampus) • KMI (Konsorsium Mahasiswa Indonesia) • KOMPPI (Komite Mahasiswa Pemuda Peduli Indonesia) • IMM (Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah)
Isu: Gus Dur gagal laksanakan 6 visi reformasi, mandat Gus Dur harus dicabut karena gagal laksanakan perbaikan di bidang hukum, ekonomi, dan politik.

Meski secara kuantitas banyak organisasi mahasiswa yang menolak Gus Dur. Akan tetapi, secara institusi, hubungan HMI paling tidak bagus atau dikucilkan dengan kelompok Cipayung dan kekuatan prodemokrasi. Kekuatan prodemokrasi karena melihat masa lalu Gus Dur sebagai simbol demokrasi karena membela hak-hak kaum terpinggirkan, minoritas dan sebagainya. Itu yang membuat mereka punya hubungan emosional dengan Gus Dur. Meski tetap tahu bahwa ada yang tidak beres dengan pemerintahan Gus Dur.[328]

Kendati demikian, hal itu tidak mengurangi situasi tekanan yang semakin besar terhadap Gus Dur membuat sikap PDIP mulai berubah. PDIP tak lagi pasif menjelang dijatuhkannya Memorandum I. Taufiq Kiemas, suami Megawati Soekarnoputri, membantah dirinya telah memberi jaminan bahwa PDIP tetap mempertahankan Presiden Gus Dur hingga 2004.[329]

328 Wawancara dengan M. Fakhruddin di Aceh, 2 Februari 2019.
329 "*Taufiq Kiemas Bantah Beri Jaminan kepada Gus Dur*", Media Indonesia, 10 Januari 2001.

Padahal, Gus Dur merasa yakin, Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri mendukung penuh dirinya untuk terus menjabat sebagai presiden sampai tahun 2004. Gus Dur yakin dukungan akan diberikan Megawati karena Megawati dinilainya sebagai sosok yang lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara dari kepentingan lainnya.[330]

Bahkan, Kwik Kian Gie menilai, Megawati tidak perlu tampil sebagai penengah konflik Gus Dur dan DPR. Sebab masalah Gus Dur dengan DPR dalam kasus Buloggate dan Bruneigate lebih merupakan masalah pribadi Gus Dur dengan DPR dalam masalah politik. Oleh sebab itu buat Megawati yang terpenting dalam kondisi darurat ini adalah berkonsentrasi mengurus pemerintahan dan kabinet.[331]

Seiring perjalanannya, Megawati dan Taufiq mulai terpengaruh oleh anak-anak kos. Misal dalam rapat DPP ia sudah memutuskan sesuatu, malam harinya bisa berubah lagi setelah bertemu Arifin Panigoro cs. Dari sisi Gus Dur juga menambah keyakinan Megawati dan Taufiq memercayai Arifin. Misalnya, Gus Dur dipengaruhi pembisik-pembisik yang tidak jelas. Novi meyakini pembisik-pembisik itu Rahman Tolleng dan teman-temannya Aktivis '66.[332]

Menurut Khatibul Umam, istilah pembisik hanya dibuat oleh pihak oposisi yang kesulitan membaca Gus Dur. Gus Dur sebagai seorang Kiai dari kalangan tradisionalis, ia memiliki "keyakinan" tersendiri dalam mendapatkan informasi. Tak hanya itu, Gus Dur banyak melakukan *check & recheck* terhadap informasi yang diberikan kepadanya. Keputusan akan dibuat sendiri oleh Gus Dur. Atau ketika Gus Dur memiliki rencana, baru ia meminta teman-temannya untuk memberikan informasi dan kemudian memverifikasinya dengan data lain.

330 "*Gus Dur Akui Didukung Mega*", Media Indonesia, 27 Januari 2001.
331 "*Gus Dur Jatuh Jika Ditinggalkan Mega*", Media Indonesia 29 Januari 2001.
332 Wawancara dengan Noviantika Nasution di Jakarta, 1 Maret 2019.

"Jadi salah besar kalau Marsillam dan Rahman Tolleng sebagai pembisik Gus Dur," tegas Khatibul Umam.[333]

Istilah "pembisik" Gus Dur baru muncul di media massa dan menjadi populer setelah Gus Dur diberikan Memorandum I oleh DPR. Istilah itu muncul karena pernyataan-pernyataan Gus Dur yang dianggap kontroversial. Hal tu dianggap sebagai hasil bisikan para juru bisik yang sengaja memberi informasi salah. Orang pertama yang memunculkan istilah pembisik adalah Amien Rais, ia memperingatkan para juru bisik agar tidak memberi informasi salah.

Akibatnya, satu per satu orang yang dianggap juru bisik diburu untuk dimintai keterangan. Bahkan, untuk mengurangi derajat kontroversi di balik pernyataan Gus Dur, Komisi I DPR akan memanggil beberapa orang dekat Gus Dur yang dianggap sering memberikan informasi.[334]

Sebagai contoh, Umam mengaku pernah dimintai Gus Dur untuk mendapatkan informasi tentang kerusuhan Ambon. Saat sudah menyusun laporan investigasi dan menyampaikannya kepada Gus Dur, Gus Dur hanya bertanya, "Di mana Kivlan?"[335] Setelah itu, Gus Dur berbicara kepada media bahwa pelaku rusuh di Ambon adalah Jenderal K.

Tak lama kemudian, Kivlan mendatangi Gus Dur dan menyampaikan bahwa ia tak terlibat kerusuhan Ambon. Gus Dur kemudian mengatakan kepada Umam bahwa pelakunya bukan Kivlan, melainkan Kentot Harseno, Mantan Pangdam Jaya. Lantas, setelah Umam mencari tahu hal tersebut di kalangan Angkatan Darat, banyak yang membenarkan informasi tersebut. "Ya, dia anak buahnya Wiranto," kata Umam. Namun, Umam tak mengetahui alasan kenapa Gus Dur tak menguumumkannya kepada media.

---

333 Wawancara dengan Khatibul Umam Wiranu di Jakarta, 10 Maret 2019.
334 "*Memburu Juru Bisik Gus Dur*", Majalah Gatra, 19 Februari 2000.
335 Wawancara dengan Khatibul Umam Wiranu di Jakarta, 10 Maret 2019.

Orang lain yang dianggap sebagai pembisik Gus Dur adalah Letkol Djuanda dari Korps TNI Angkatan Laut. Letkol Djuanda pula yang dianggap membisiki presiden untuk menendang Jenderal Wiranto dan Letnan Jenderal Djadja Suparman. "Gus Dur itu mendapatkan info dari banyak sumber. Saya cuma salah satu. Itu pun yang saya sampaikan hanya berupa analisis," kata Djuanda.

Djuanda mengaku banyak membuat laporan analisis. Semuanya tanpa nama, juga tanpa judul. Ia hanya membuat analisis keadaan republik. Ternyata, analisisnya banyak yang benar. Misalnya soal bergeraknya fundamentalis Islam, upaya memecah belah Gus Dur dengan Megawati, dan lain-lain.

Djuanda mencontohkan dalam kasus prediksi apabila presiden dijatuhkan. Ia membuat analisis seperti apa, akibatnya apa, implikasi globalnya bagaimana, kemudian reaksi terhadap implikasi berikut rekomendasinya, positifnya apa dan negatifnya apa. Seperti itulah kira-kira. "Masukan dari saya itu menyangkut tiga hal: *politicing & policy*, *image building*, dan *network*. Gus Dur sendiri tidak 100% percaya kepada saya. Mungkin cuma 10%," kata Djuanda.[336]

Peran Taufiq Kiemas di partai sangat vital dan juga ia dianggap sebagai penyeimbang Megawati. Taufiq dikenal luwes, diplomatis, dan lebih kompromistis. Hal-hal itu yang tidak dimiliki oleh Megawati, yang sebenarnya sangat dibutuhkan bagi politisi. Pada konteks ini pula, Taufiq kelak dianggap berhasil meyakinkan Megawati untuk bersedia menjadi presiden menggantikan Gus Dur.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dalam pengarahannya di depan rapat DPP PDIP meminta anggota fraksi agar tidak memberi penilaian sendiri-sendiri terhadap hasil kerja Pansus. "Pimpinan PDI Perjuangan hanya memberi wewenang kepada ketua fraksi di DPR untuk memberi

336 "*Gus Dur Hanya Percaya 10%*", Majalah Gatra, 10 Juli 2000.

komentar tentang hasil kerja Pansus," kata Bendahara PDIP, Noviantika Nasution seusai rapat itu. Dengan pesan Ketua Umum itu, katanya, maka suara PDIP nanti akan bulat dalam menyikap hasil kerja Pansus.[337]

Amien mengklaim bahwa saat MPR mengirimkan Memorandum I, ia sudah berkomunikasi dengan Gus Dur yang menyatakan akan mendukung penuh Gus Dur hinga 2004, dengan catatan jangan membuat pernyataan-pernyataan kontroversi lagi.[338]

Hal menarik di sela-sela sidang Pansus *Buloggate* dan *Bruneigate* muncul isu bahwa Gus Dur akan membubarkan parlemen setelah menerima hasil keputusan Pansus. Juru bicara Kepresidenan Yahya Staquf mengungkapkan bahwa presiden tidak akan membubarkan DPR atau membicarakan mengenai hal itu. Pembubaran DPR oleh eksekutif, kata dia, itu hanya merupakan wacana yang berkembang di masyarakat dan secara teoretis memang dimungkinkan.

Pernyataan dekrit Gus Dur pertama kali keluar saat ia melakukan pertemuan Rapat Pimpinan Nasional Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta (Rapimnas BKS PTIS) pada akhir Januari 2001. Gus Dur merasa kesal dengan DPR yang ingin menjatuhkannya melalui kasus *Buloggate* dan *Bruneigate* dengan mengeluarkan memorandum yang inkonstitusional.[339]

Mahfud tak setuju dengan dekrit, sebab dekrit merupakan tindakan inkonstitusional. Akan tetapi, lanjut Mahfud, tindakan inkonstitusional bisa menjadi konstitusional apabila didukung oleh kekuatan politik atau militer sehingga dekrit itu dapat dimenangkan dalam konteks pertarungan politik.[340] Alasan atau prasyaratnya adalah negara dalam keadaan darurat sehingga dekrit perlu diambil untuk menyelamatkan negara dan rakyat.

---

337 "*DPR Garap Tiga Opsi*", Media Indonesia, 31 Januari 2001.
338 Wawancara dengan Amien Rais di Jakarta, 9 Januari 2019.
339 Wawancara dengan Mahfud MD di Jakarta, 19 Juni 2019.
340 Wawancara dengan Mahfud MD di Jakarta, 19 Juni 2019.

Sedangkan, Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan, tidak ada alasan yang kuat bagi Presiden Gus Dur untuk mengeluarkan dekrit membubarkan DPR. Ia mengungkapkan, melakukan dekrit dan membubarkan parlemen (DPR) adalah satu tindakan inkonstitusional dan hal itu juga hampir mustahil dilakukan pada saat ini.[341]

Pembubaran parlemen merupakan dialektika yang berkembang saat itu. Musababnya, Gus Dur merasa bahwa ia sudah tak didukung lagi oleh parlemen. Gus Dur melakukan rapat terbatas dengan ahli hukum dan Menkopolkam terkait sah atau tidaknya penjatuhan presiden oleh parlemen dalam sistem presidensial.[342]

Amien mengaku sebagai yang pertama menasehati Gus Dur tentang idenya yang ingin membubarkan MPR dan DPR. "Anda bukan Bung Karno dan bukan Pak Harto, Gus. Kalau Bung Karno didengarkan bangsa dan dilaksanakan. Kalau Pak Harto itu punya partai ABG dan pengusaha. Semua di belakang, dia punya TNI, dia punya polri, dia punya birokrasi. Jadi jauh lebih kuat Anda sama seperti saya anda dari NGO (*Non-Government Organization*—red) besar. Anda NU dan saya Muhammadiyah. Jadi, Anda harus hati-hati, kalau Anda keluarkan dekrit, saya gak bisa menjamin Anda tidak akan di-*impeach*," tegas Amien.[343]

Namun, isi ini memang masih dianggap hanya sebagai angin lalu, baik oleh anggota DPR maupun oleh pemerintah, dan dianggap melampaui tuntutan kalangan aktivis. Pada saat itu, terutama setelah reformasi salah satu agenda politik pembersihan rezim Orde Baru adalah pembubaran Golkar.

Hariyadi Darmawan, salah satu pegiat anti-Golkar dan Mantan Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) masih tegaknya Partai Golkar merupakan penghalang pelaksanaan enam agenda reformasi yang digulirkan mahasiswa.

---

341 "*Tidak Ada Alasan DPR Dibubarkan*", Media Indonesia, 31 Januari 2001.
342 Wawancara Wimar Witoelar di Jakarta, 26 Februari 2019.
343 Wawancara dengan Amien Rais di Jakarta, 9 Januari 2019.

Bahkan, mereka juga menuduh Golkar berada di balik rekayasa Pansus Buloggate dan Bruneigate DPR, dan berusaha menyembunyikan borok-borok Orde Baru.[344]

Menjelang Memorandum I, gaya kepemimpinan Gus Dur diakui membawa kekhawatiran juga bagi Forum Demokrasi (Fordem). Terlebih Gus Dur selalu memberikan komentar yang kontroversi ini yang menyebabkan situasi politik juga jadi memanas.[345] Forum Demokrasi juga mengakui bahwa tingkah laku dan ucapan-ucapan Presiden sering kali telah turut memprovokasi ketidaksabilan politik. Semua kekurangan dan kelemahan itu, dengan sendirinya telah ikut menyumbang pada terbentuknya kondisi politik yang *statelesness* dan terjadinya kemacetan konstitusional sekarang ini.

Menurut catatan Fordem, beberapa masalah fundamental yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah namun sama sekali tidak digubris, yakni seperti pengaturan hubungan eksekutif-legislatif, perlakuan terhadap tokoh-tokoh Orde Baru—terutama yang tergolong pelaku pelanggaran HAM dan KKN, penataan hubungan sipil-militer yang berbasis civilian supremacy, serta hubungan rasional dalam soal pusat dengan daerah. Khusus untuk kasus kurang harmonisnya hubungan antara presiden dan DPR, Fordem mengimbau sebaiknya segera dibentuk sebuah komisi nasional.[346]

Rahman Tolleng menjelaskan, dengan adanya komisi nasional yang keberadaannya ditetapkan oleh MPR itu diharapkan bisa berfungsi sebagai jembatan yang bisa menghubungi lembaga legislatif dengan eksekutif. "Selama aturan ketatanegaraan dan pelembagaan politik tidak dibenahi mulai dari dasar filosofi serta deduksi konstitusionalnya, maka selama itu pula kita tidak akan memiliki pemerintah yang efektif. Ini berlaku buat siapa saja yang menjadi presiden, termasuk

---

344 "*Akbar Tolak Pembubaran Golkar*", Media Indonesia, 31 Januari 2001.
345 Wawancara Budi Murdono di Jakarta, 24 Maret 2019.
346 "*Fordem Soroti Kelemahan Gus Dur*", Media Indonesia, 12 Januari 2001.

Gus Dur sendiri," kata Rahman Tolleng.[347]

Sebenarnya adalah suatu hal yang wajar jika terjadi konflik antara presiden dan DPR-nya. Hal ini berlaku buat negara di mana pun. Namun sayangnya, konflik yang mereka ciptakan itu tidak lebih bersifat antagonistis semata yakni tidak menyumbang hal-hal yang bermanfaat terhadap negara ini, khususnya kepada proses peningkatan kualitas demokrasi.

Dokumen Fuad Bawazier

Pada 29 Januari 2001 atau dua hari sebelum penjatuhan Memorandum I oleh DPR kepada Gus Dur, terdapat surat laporan terkait rencana-rencana yang sudah dilakukan untuk menjatuhkan Gus Dur. Surat yang ditulis oleh Fuad Bawazier untuk Akbar Tandjung menyebut bahwa surat itu adalah satu pelaksanaan rencana Semut Merah (Semer).

Tugas yang diberikan kepada Fuad Bawazier berkaitan dengan penggalangan opini, dukungan masyarakat luas, mahasiswa, media, ormas, pengusaha, cendekiawan, preman, kelompok kanan, serta masyarakat lainnya di seluruh Indonesia, dalam rangka penjatuhan kredibilitas Presiden Wahid melalui kasus *Buloggate* dan *Bruneigate* yang telah berjalan sesuai rencana.

Bahkan lebih dari itu, kekuatan dan efek dari operasi tahap pertama ini–menurut pandangan Fuad—sudah harus ditingkatkan kepada pelaksanaan operasi skenario kedua, yakni: memaksa Gus Dur mundur dan mendorong Megawati Soekarnoputri menjadi presiden, yang akan bisa dikendalikan dan pada akhirnya akan disingkirkan juga.

Berikut laporan garis besar dan beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan skenario pertama:

1. BEM PTN dan PTS seluruh Indonesia yang selama ini kita telah dikoordinir di Cilosari dan Diponegoro (PB HMI)

347 *Loc.cit.*

serta kelompok kanan ormas Islam yang tersentral di tiga titik lainnya yakni: Masjid Sunda Kelapa, Istiqlal, dan Al-Azhar mulai bergerak secara masif, bergelombang, dan bersamaan hampir di seluruh Indonesia dengan satu komando isu menuntut Gus Dur mundur. Khusus untuk pengepungan Senayan dalam rangka mem-pressure DPR agar menerima hasil kerja pansus yang menyatakan Gus Dur telah menyalahgunakan kekuasan (*abuse of power*) secara langsung dipelopori oleh para ILUNI pro-kita, para rektor serta BEM UI dan UMJ. Mereka ini bergerak di bawah komando langsung Ketua Umum PB HMI, Fakhruddin CS.

2. Pada saat sidang paripurna digelar, adik-adik mahasiswa ini akan bergabung langsung dengan seluruh massa aksi rekan-rekan Pemuda Partai Keadilan yang langsung di bawah komando saudara Hidayat Nur Wahid, Gerakan Pemuda Ka'bah yang dimobilisir oleh saudara Ali Marwan Hanan, massa PBB di bawah saudara Hamdan Zoelva, massa PAN di bawah saudara Patrialis Akbar, dan massa rakyat dan preman yang diorganisir oleh saudara Yapto dan DPP Pemuda Pancasila. Pada saat itulah komando akan saya pegang langsung, sedangkan operator lapangan akan dipimpin oleh Ketua Umum KAMMI, AMPI, GPK, BM PAN, PB HMI, HAMMAS, dan IMM.

3. Gerakan ini Insya Allah akan memperoleh dukungan penuh dari Zoelvan Lindan dan Julius Usman yang telah mampu mempengaruhi beberapa kantong massa PDIP untuk bergabung melakukan demonstrasi menyikat Gus Dur di Sidang Parlemen.

4. Kita juga telah melakukan aksi borong *dollar* di pasar valuta asing dan bursa efek –untuk menjatuhkan nilai tukar-

rupiah— di dalam dan luar negeri (terutama di London, Hongkong, dan Singapura) secara langsung di bawah kendali Bendahara Umum DPP Golkar (Fadel Muhammad-pen). Aksi borong dollar ini juga didukung oleh Bambang Trihatmojo dan Liem Sioe Liong, Arifin Panigoro.

5. Seluruh kerja media massa (cetak dan elektronik) yang bertugas mem-blow up secara kolosal dan provokatif semua pemberitaan berkaitan dengan tuntutan mundur terhadap Gus Dur sudah di-arrange langsung oleh saudara Parni Hadi dan Surya Paloh, sedangkan operator teknis di lapangan saya telah menyiapkan banyak kaki terutama di parlemen.

6. Penggiringan opini publik oleh para tokoh dan cendekiawan atas kegagalan pemerintahan Gus Dur lewat tulisan di media massa yang dimobilisir langsung oleh Azyumardi Azra, Dr. Syahrir, dan rekan-rekan KAHMI telah mampu meyakinkan publik bahwa Gus Dur memang benar-benar gagal mengemban amanat reformasi.

7. Tugas saudara Dien Syamsuddin untuk mengendalikan MUI lewat kasus Ajinomoto telah berhasil memaksa para ulama dan tokoh agama mencabut dukungannya kepada presiden.

Dengan posisi Wakil Presiden, Mas Amien bisa bermain lincah untuk melakukan penggembosan dari dalam lewat isu ketidakbecusan Megawati dalam mengatasi krisis ekonomi dan penyelesaian disintegrasi bangsa.

Untuk itu, mulai sejak sekarang harus kita pegang dan bantu secara konkret saudara-saudara kita dari luar Jawa yang menginginkan kemerdekaan. Sedangkan, untuk persoalan

krisis ekonomi, sabotase akan terus dijalankan melalui jalur kawan-kawan lama kita di era Pak Harto yang sakit hati melihat ini semua.

Tetapi semuanya ini tergantung anggota tim yang lain, apakah usulan Fuad ini diterima atau tidak. Sebagai bahan pertimbangan operasi di lapangan, Fuad meminta kabar dari Akbar dan kawan-kawan tentang perkembangan di dalam Gedung Senayan lewat jalur yang sudah tersedia saja yaitu seluruh perkembangan situasi di dalam gedung kirim saja melalui saudara Anas Urbaningrum sebagai penghubung Fuad dan Akbar. Fuad optimis skenario ini akan berjalan mulus.

Dengan begitu, aksi untuk menyelamatkan seluruh aset politik dan ekonomi serta investasi kita serta pengeluaran dana operasi sebesar 4 triliun, yang sudah Fuad sediakan tidak menjadi sia-sia dan dapat mengembalikan kejayaan kita yang telah dirampas sejak reformasi.

Akhirnya, semua ini tergantung perjuangan Bang Akbar bersama rekan-rekan yang berada di dalam Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Demikian, atas dukungan dan keseriusan rekan-rekan di Gedung Senayan, Fuad sampaikan terima kasih.

Menanggapi dokumen tersebut Akbar menyatakan keraguannya terkait ada atau tidaknya dokumen tersebut. "Mungkin saja datanya, mungkin juga tidak. Kalau pun ada, saya tidak terlalu fokus atau memperhatikannya," kata Akbar Tandjung.[348]

Kendati demikian, Akbar mengakui bertemu dengan Fuad Bawazier beberapa kali. Hanya saja, lanjut Akbar, tak pernah membicarakan detail atau sejauh seperti yang tertulis di dokumen tersebut.[349]

Sedangkan, Fuad Bawazier mengaku tak pernah membuat surat kepada Akbar Tandjung. Menurutnya, proses penjatuhan

348 Wawancara dengan Akbar Tandjung di Jakarta, 24 Januari 2019.
349 Wawancara dengan Akbar Tandjung di Jakarta, 24 Januari 2019.

Gus Dur disebabkan oleh tindakan Gus Dur sendiri yang sering menimbulkan kontroversi.[350]

Memorandum I

Rapat paripurna DPR pada 1 Februari 2001 akhirnya mengeluarkan Memorandum I kepada Gus Dur yaitu mengingatkan Presiden yang dianggap telah melanggar Haluan Negara, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 ketetapan MPR No. III.MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar-lembaga-lembaga Tinggi Negara yang berbunyi: "Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menganggap Presiden sungguh melanggar Haluan Negara, maka DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden." Keputusan itu diambil setelah DPR menerima hasil kerja pansus dengan 393 suara mendukung mosi, empat suara menolak, dan 58 abstain.

DPR menindaklanjuti keputusan ini dengan menyampaikan memorandum bahwa presiden sungguh melanggar haluan negara yaitu melanggar UUD 1945 pasal 9 tentang Sumpah Jabatan dan Melanggar TAP MPR No. XI/MPR/ 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.[351]

Berdasarkan pasal 7 Tap MPR No. III.MPR/1978 juga menyebutkan apabila dalam waktu tiga bulan presiden tidak memperhatikan Memorandum, DPR akan menyampaikan Memorandum Kedua. Dan apabila dalam waktu satu bulan Memorandum Kedua tak diindahkan oleh presiden, DPR meminta MPR mengadadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban presiden.

Jawaban itu disampaikan oleh Baharuddin Lopa di Sidang Paripurna DPR pada 28 Maret 2001. Bagi presiden, isi Memorandum DPR mengandung hal-hal yang kurang logis

350 Wawancara dengan Fuad Bawazier di Jakarta, 25 Januari 2019.

351 L. Misbah Hidayat, Reformasi Administrasi: *Kajian Komparatif Pemerintahan di Tiga Presiden* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 71—72.

dan tidak memenuhi syarat konstitusi untuk diterima oleh presiden. Oleh sebab itu, jawaban atas Memorandum DPR juga penting untuk menjaga kehormatan dari tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan telah terjadi pencampuradukan antara fakta dan sangkaan.

Pelanggaran	Penjelasan
UUD 1945	
1. Pasal 9 UUD Sumpah Jabatan	Tidak menjalankan UU. Melanggar, menentang untuk melaksanakan UU.
Ketetapan MPR:	
1. Tap MPRS XXV/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Leninisme	Menentang, mengusulkan tap ini.
2. Tap XI/1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	Memerintahkan penangguhan hukum tiga konglomerat.
3. Tap VII/2000 tentang Peran TNI dan Polisi Negara	Memberhentikan/mengangkat Kapolri tanpa persetujuan DPR.
4. Tap VIII/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR	Melalaikan kewajiban untuk melaksanakan tap ini dalam upaya serius memulihkan ekonomi nasional, keamanan nasional, menegakan hukum, dan pemberantasan KKN.
5. Tap VIII/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR	Pelimpahan tugas Presiden kepada Wapres seperti dalam Keppres No. 121/2000 tidak dilaksanakan maksimal. Presiden masih sibuk menjalankan urusan pemerintahan yang seharusnya menjadi tugas Wapres.

GBHN 1999:	
1. Bidang Hukum	Tidak konsisten menegakan hukum. Menangguhkan proses hukum tiga konglomerat dan mengadakan pertemuan rahasia dengan Tommy Soeharto.
2. Bidang Ekonomi	Melakukan komitmen pinjaman luar negeri tanpa melalui mekanisme dan prosedur persetujuan DPR, melalaikan kewajibannya melakukan renegosiasi dan mempercepat restrukturisasi utang luar negeri dengan berbagai lembaga international dengan memperhatikan kemampuan bangsa dan negara, dan lain-lain.
3. Bidang Luar Negeri	Melakukan perjanjian international menyangkut hajat hidup orang banyak tanpa mendapat persetujuan DPR.
4. Penyelenggaraan Negara	Tidak melakukan langkah-langkah konkret untuk membersihkan penyelenggara negara dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme, serta tidak mengembangkan etik dan moral aparat negara.

Gus Dur pun menjawab memorandum tersebut:

"…..Selaku Presiden Republik Indonesia saya akan menggunakan hak konstitusional saya melalui forum yang terhormat ini untuk memberikan jawaban atas Memorandum DPR tersebut yang saya pandang mengandung hal-hal yang ridak obyektif berdasarkan ukuran-ukuran konstitusi. Saya memandang bahwa isi memorandum DPR tersebut mengandung hal-hal yang kurang logis yang tidak memenuhi syarat konstitusi untuk bisa diterima oleh Presiden. Saya akan mengemukakan alasan saya tentang penolakan saya atas isi Memorandum tersebut dengan sepenuhnya berpedoman pada konstitusi terutama pada Tap MPR yang mengatur tentang tata cara menjatuhkan Memorandum.

Dengan memberi jawaban atas Memorandum yang dikeluarkan pada tanggal 1 Februari berarti saya selaku Presiden menerima Memorandum sebagai kenyataan politik yang tidak dapat dihindarkan. Ini perlu saya tegaskan karena sebelum lahirnya Memorandum tersebut saya mengatakan bahwa Pansus yang menjadi instrumen penting bagi lahirnya Memorandum ini adalah ilegal, setidak-tidaknya masih dipermasalahkan status hukumnya karena seyogyanya Pansus tersebut didaftarkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan UU No 6 Tahun 1954…."[352]

Dua hari pasca dijatuhkannya Memorandum I dijatuhkan kepada Gus Dur, Gus Dur justru merasa tertantang untuk membalas Memorandum I tersebut. Melalui Wimar Witoelar, Gus Dur menyatakan mengumandangkan tema reformasi tanpa kompromi, selanjutnya pemerintah akan menyiapkan secara rinci kasus-kasus korupsi yang akan diberantas. Hal ini diambil Gus Dur untuk mengambil kembali kepercayaan rakyat. Sebab, Gus Dur menyadari bahwa dukungan atau kepercayaan kepada publik kepadanya sudah berkurang.

---

352 "*Jawaban Presiden atas Memorandum DPR*", Kompas, 29 Maret 2001.

"Kalau dibilang merebut hati rakyat, ya di situlah kami ingin merebutnya. Pansus DPR (Panitia khusus DPR soal *Buloggate* dan *Bruneigate*) boleh punya pendapat mengenai pemerintah, tetapi pemerintah juga mengharapkan dari masyarakat, berdasarkan apa yang telah dilakukan pemerintah dan akan dijalankan dalam memberantas korupsi besar," papar Wimar.

Dalam kaitan itu, lanjutnya, di dalam sidang kabinet juga dibicarakan di antara para menteri tentang persiapan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. "Itu menjadi pekerjaan rumah para menteri," kata Wimar. Misi inti dari Presiden Abdurrahman Wahid, demikian Wimar, membentuk pemerintahan yang demokratis dan pemberantasan KKN.[353]

Seminggu kemudian, 9 Februari 2001, Gus Dur langsung mempraktikan pernyatannya tersebut. Gus Dur menyatakan, pemerintah akan menangkap sepuluh penjahat kelas kakap, paling lambat dalam waktu tiga minggu. Pada 10 Februari, Menhan Mahfud MD mengungkapkan, Partai Golkar menerima dana 90 miliar rupiah dari Bulog untuk pemilu 1999.[354]

Mahfud MD mengaku memiliki data penggunaan dana nonbudgeter Badan Urusan Logistik oleh Partai Golongan Karya. Saat kasus penyelewengan dana itu dibongkar, Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung malah meminta Mahfud untuk mempercepat kompromi politik dengan pemerintahan Gus Dur. Itu pun setelah mengetahui bahwa Mahfud sebagai sosok pemegang data penggunaan dana.[355]

Akan tetapi, hal itu dibantah Bendahara Partai Golongan Karya Fadel Muhammad. Fadel membantah tudingan bahwa ia mengetahui penggalangan dana untuk kampanye Golkar dari kas nonbudgeter Badan Urusan Logistik. Bahkan, ia menegaskan, dana senilai 90 miliar rupiah itu bukan untuk kampanye Golkar, melainkan telah digunakan untuk kepentingan lain, seperti

353 "*Menjawab Memorandum DPR Pemerintah Akan Bentuk Tim Hukum dan Politik*", Kompas, Minggu 4 Februari 2001.
354 L. Misbah Hidayat, *Loc.cit.*
355 "Mahfud MD: Golkar Memang Menggunakan Dana Nonbujeter", liputan6.com, diakses dari https://www.liputan6.com/news/read/22448/mahfud-md-golkar-memang-menggunakan-dana-nonbujeter, pada 19 Mei 2019, Pukul 09.51 WIB.

untuk dana kemanusiaan.[356]

Kasus Bulog yang melibatkan Akbar Tandjung dan Golkar ini menjadi alat Gus Dur untuk membubarkan Golkar. Di parlemen, Fraksi PKB coba untuk menginisasi pembentukan Pansus *Buloggate* II, seperti yang menimpa Gus Dur sebelumnya. Sayangnya, PKB tak punya kekuatan di parlemen, karena sudah ditinggalkan oleh koalisi Poros Tengah.

Pada 14 Februari, Kejagung memeriksa Sigit Hardjojudanto dengan korupsi dalam kasus korupsi kilang minyak Balongan dan memanggil Wakil Ketua MPR Ginandjar Kartasasmita, mantan Menteri Pertambangan dan Energi, untuk diperiksa sebagai saksi.[357]

Sayangnya, hingga tujuh minggu ancaman Gus Dur untuk para koruptor, belum ada satupun yang resmi ditahan. Hanya ada pengenaan status tersangka terhadap beberapa pengusaha dan mantan pejabat Orde Baru seperti Ginanjar Kartasasmita, IB Sudjana, Mbak Tutut, Rosano Mubarak dan Akbar Tandjung.

Baru pada 31 Maret 2001, Jaksa Agung Marzuki Darusman menetapkan dan menahan Ginandjar Kartasasmita di tahanan Kejaksaan Agung. Ginandjar diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam persetujuan Technical Assistance Contact (TAC) antara Pertamina dan PT Ustraindo Petro Gas (UPG) pada sumur minyak di Bunyu, Jatibarang, sehingga negara dirugikan sebesar 24,8 juta USD.[358]

Namun, penahanan Ginandjar hanya dilakukan satu bulan. Pada 2 Mei 2001, ia dibebaskan dari tahanan, setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan pra-peradilannya. Gus Dur hanya bisa menjawab *no comment* atas pembebasan Ginandjar.

Setelah kasus Ginandjar, Gus Dur tak terlihat sungguh-

356 "*Fadel Muhammad: Golkar Tak Pernah Menerima Dana Bulog*", liputan6.com, diakses dari https://www.liputan6.com/news/read/8197/fadel-muhammad-golkar-tak-pernah-menerima-dana-bulog, pada 19 Mei 2019, Pukul 09.56 WIB.
357 "*Respons Presiden atas Memorandum DPR*", Kompas, 11 Februari 2001.
358 Tjipta Lesmana, *Op.cit.*, hlm. 188.

sungguh untuk mengejar dan menetapkan tersangka para konglomerat. Perhatian Gus Dur teralihkan kembali ke perseteruan antara dirinya dan DPR.

Selain itu, Gus Dur lagi-lagi menunjukkan ketidak-konsistennya. Sikap ini dilihat ketika Gus Dur berdialog dengan para budayawan yang tergabung dalam Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Pada kesempatan itu, Gus Dur menolak untuk melakukan budaya Tumpes Kelor, yakni menumpas habis seluruh anggota rezim lama sehingga tidak menganggu pemerintah baru. "Budaya ini harus dijauhi sekuat-kuatnya, karena hal itu tidak manusiawi," ucapnya.[359] Namun, sikap Gus Dur ini, dapat juga dianggap sebagai upaya meredam reaksi yang akan diterima, apabila terus-menerus mengusut kasus KKN atau hukum kekuasaan lama.

Banyak penasihat ekonomi Gus Dur menekan agar Gus Dur bertindak keras terhadap koruptor dan menghukum yang terlibat. Namun, Gus Dur memiliki alasan untuk tidak terlalu cepat bertindak. Pertama, belum memadainya sistem hukum di Indonesia untuk pelaksanaan hal tersebut dan bahwa Marzuki Darusman sebagai Jaksa Agung sudah memiliki banyak tugas.

Kedua, meski korup, Gus Dur dapat dibujuk oleh para pelobi dari pengusaha-pengusaha itu, karena mereka tetap memegang kunci bagi pemulihan ekonomi dalam jangka pendek dan menengah. Contohnya, pengadilan konglomerat Texmaco, akan menimbulkan risiko bahwa konglomerat itu akan mengalami kegagalan ekonomi.

Ketiga, Gus Dur berada di bawah tekanan supaya ia menghentikan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi yang berkaitan dengan orang-orang ini dan unsur-unsur lainnya yang memiliki koneksi erat dengan rezim lama.

Keempat, terdapat perbedaan tajam antara Gus Dur

359 "*Turunkan Suhu Politik*", Kompas, 5 Februari 2001.

dan para penasihatnya mengenai pemecahan masalah ekonomi. Gus Dur tak yakin dengan teori-teori ekonomi neoliberal adalah jawaban bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Gus Dur ragu dan khawatir atas biaya sosial dari cara-cara neoliberal.[360]

360 Greg Barton, *Op.cit.*, hlm. 405

BAB 6

MENUNTUT SOEHARTO DAN KELUARGA

Setelah Habibie gagal membentuk komisi atau komite independen untuk mengusut harta Soeharto, Habibie lantas menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 30 tahun 1998 tentang pemberantasan KKN. Mensesneg Akbar Tandjung berpendapat penerbitan Inpres dimaksudkan agar Jaksa Agung segera mengambil tindakan proaktif, efektif, dan efisien dalam memberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).[361] Inpres ini merupakan cara baru untuk mengulur-ulur waktu bagi pengadilan Soeharto dan sekadar performa untuk menghentikan aksi unjuk rasa mahasiswa yang mulai mengarah ke Cendana dan Istana Negara.

Setelah Habibie gagal untuk menuntut Soeharto dan keluarganya ke pengadilan untuk tuduhan KKN, bola panas ini jatuh di tangan Gus Dur untuk mengusut dan mengadili Soeharto dan Keluarga. Gus Dur pada 1 November 1999 meminta Jaksa Agung Marzuki Darusman untuk membuka kembali kasus Soeharto. Marzuki menindaklanjuti permintaan Gus Dur dengan mengeluarkan surat pencabutan SP3 kasus Soeharto pada 6 Desember 1999, sehingga penyelidikan dilanjutkan

361 Syamsuddin Haris, *Reformasi Setengah Hati* (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 206.

dengan fokus Soeharto sebagai ketua dari tujuh yayasan, yaitu Dharmais, Super Semar, Dakab, Gotong Royong, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Trikora, dan Dana Sejahtera Mandiri.[362]

Meski dalam berbagai kesempatan Gus Dur menyatakan keinginannya untuk memberi ampunan ke Soeharto asalkan menyerahkan kepada negara sebagian harta yang diduga hasil KKN. Dalam surat dakwaan dikatakan hanya berkaitan dengan pengelolaan dan yayasan maka mengakibatkan kerugian negara 1,4 triliun rupiah dan 419 juta USD. Namun, pada 31 Maret 2000, tim penyidik kejagung menetapkan Soeharto sebagai tersangka dalam kasus KKN tujuh yayasan. Pada 15 April 2000, Jaksa Agung mengumumkan status hukum Soeharto naik menjadi tahanan kota dan dilarang bepergian ke luar negeri. Kemudian, dilanjutkan 29 Mei 2000 status tahanan kota menjadi tahanan rumah.[363]

Bahkan, pada September 2000, saat di Amerika, Gus Dur menyatakan apabila Soeharto tidak bersedia atau tidak dapat hadir di persidangan, maka Soeharto dapat diadili secara *In Absentia*. Mengenai pengadilan Soeharto, Gus Dur menyatakan, "Kalau mengenai masalah tuntutan terhadap Soeharto, itu kan tidak *urgent* untuk kondisi sekarang. Kapan saja bisa diadili," kata Gus Dur. Pengadilan Soeharto tidak mungkin dilakukan di tengah-tengah sistem pengadilan yang masih berada di bawah bayang-bayang kekuasaan lama.

Kalau tuntutan dilakukan di tengah iklim politik dan hukum yang masih labil, keadaan akan tambah kacau karena akan terjadi benturan kepentingan. Kalau tidak diadili segera, Soeharto akan melakukan konsolidasi dan upaya menumbangkan kroni Soeharto menjadi tertunda.[364]

Gus Dur melanjutkan, "Kalau urusan dendam dan benci pada Pak Harto, saya juga benci karena hampir lima belas tahun-

---

362 Mohammad Sobary, *Gus Dur di Istana Rakyat* (Jakarta: LKBN Antara, 2000), hlm. 380.
363 *Ibid.*, 381.
364 Al Zastrouw Ng., *Gus Dur, Siapa sih Sampeyan?* (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 216.

saya diinjak-injak, dan dipersekusi terus-menerus........... Saya mau mengajari rakyat bahwa balas dendam dengan sikap emosional itu tidak menyelesaikan masalah, ada cara-cara lebih beradab untuk menaklukan lawan tanpa harus dengan kekerasan dan cara-cara yang kasar dan tidak beradab."[365]

Ketika Soeharto masih menjadi presiden, kasus korupsi yang kasat mata dibiarkan, asalkan jumlah uang yang ketahuan telah dicuri dikembalikan. Tampaknya pola ini yang dipakai dengan perkecualian Soeharto dan kerabat yang tidak mempunyai *backing* di pemerintahan. Ini yang mungkin diartikan oleh Gus Dur bahwa Pak Harto yang masih banyak pendukungnya itu bisa mengamuk.[366]

Maka tak jarang, apabila Gus Dur dianggap berkompromi dengan Soeharto dan keluarganya. Salah satu contoh adalah adanya pertemuan antara Gus Dur dan Tommy Soeharto di Hotel Borobudur pada awal Oktober 2000. Putra mantan Presiden Soeharto itu dipersalahkan dalam kasus tukar guling tanah antara Bulog dan PT Goro Batara Sakti. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman penjara 18 bulan pada Tommy. Sejak diputuskan pengadilan, meski telah ada surat jaminan dari istrinya (Tata), Tommy masih juga melarikan diri.

Tak pelak, pertemuan tersebut menimbulkan kecurigaan di masyarakat serta di kubu pro dan kontra Gus Dur. Bagi lawan politik Gus Dur, ini dijadikan kesempatan untuk kembali mengkritisi dan ingin membentuk Pansus layaknya kasus Bulog dan Brunei.[367] Erman Umar, salah seorang pengacara Tommy, menuturkan kliennya pernah menyatakan dirinya akan diperas. "Ada kesan kita pada posisi terjepit dan tampaknya mau diperas," ujar Erman menirukan Tommy. Itu dikemukakan Tommy di kantor Humpuss sebelum pertemuan di Hotel Borobudur.

365 *Ibid.*, hlm. 214.
366 Kwik Kian Gie, *Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Transisi Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 295.
367 "*FPBB: Bentuk Pansus Borobudurgate*", Republika, 18 November 2000.

Tak hanya pengacara Tommy yang menuding kasus itu tak murni yuridis. Djoko Susilo, anggota DPR Fraksi Reformasi menduga, *ngeyel*nya Tommy atas perintah masuk penjara karena memiliki kartu truf berkat pertemuannya dengan Presiden di Hotel Borobudur awal Oktober 2000. Alvin Lie pun menduga hal yang sama. Anggota dewan itu mensinyalir, sikap pembangkangan Tommy tak dapat dilepaskan dari kasus Hotel Borobudur. Bahkan, Alvin lebih berani lagi, dia menuding Tommy buron karena diperintah Presiden sebagai balas jasa atas kebaikan Keluarga Cendana. Dan nanti jika PK-nya dikabulkan.[368]

Akan tetapi, Jaksa Agung Marzuki Darusman memastikan, tak ada *deal* apapun antara Hutomo Mandala Putra dengan Presiden Gus Dur. Sekalipun ada pertemuan, jauh sebelumnya presiden telah menyatakan menolak grasi tersebut. Marzuki membenarkan Tommy Soeharto yang kini buron, pernah mengadakan pertemuan dengan Presiden. "Saya tegaskan tak ada *deal* apapun yang dilakukan presiden dengan terpidana dan pertemuan itu tidak ada pengaruhnya dengan penolakan grasi," kata Marzuki.[369]

Lawan politik Gus Dur semakin marah saat Gus Dur memecat Kapolri Rusdihardjo karena menolak menaati perintah agar Tommy Soeharto ditangkap. Presiden Gus Dur telah memberhentikannya dengan hormat sebagai Kapolri dengan alasan faktor keamanan membutuhkan Kapolri baru. Sesuai Keputusan Presiden No. 64 Tahun 2000, sejak tanggal 18 September 2000 Rusdihardjo diberhentikan.

Berkaitan dengan pemberhentian Rusdihardjo oleh presiden, Jaksa Agung Marzuki Darusman menegaskan apa yang dilakukan presiden tersebut merupakan suatu kebijakan karena adanya dorongan publik. Alasan utama pemberhentian Kapolri itu, menurut Marzuki, adalah alasan keamanan.

368 "*Sikap Pembangkangan Tommy dan Skandal Borobudurgate*", Media Indonesia, 21 November 2000.
369 "*Jaksa Agung Bantah Ada Deal Antara Presiden dengan Tommy*", Republika, 25 November 2000.

“Hal ini pun dapat diartikan sebagai tekad pemerintah untuk meningkatkan upaya memberi jaminan keamanan kepada publik,” ungkap Marzuki.

Ia juga memaparkan, pemberhentian Kapolri tersebut adalah simbol dari usaha pemerintah untuk sesegera mungkin menyelesaikan dan mengungkap kasus-kasus yang belum terpecahkan, seperti ledakan bom di Bursa Efek Jakarta (BEJ).[370]

Pada 14 September 2000, sehari sebelum sidang pengadilan Soeharto dilakukan, terjadi ledakan bom di BEJ. Ledakan bom itu terjadi sekitar pukul 15.17 WIB. Sedikitnya, 15 orang meninggal dan belasan orang lainnya luka-luka akibat bom mobil yang meledak di parkir basement Gedung BEJ.

Aparat kepolisian datang sekitar 15 menit setelah ledakan. Mereka langsung melakukan upaya penyelamatan, namun asap yang tebal menghalangi. Sementara itu, tim pemadam kebakaran mencoba memadamkan api melalui lubang penghubung antarlantai di lobi. Petugas sulit mendekati tempat itu karena gelap dan dipenuhi asap.

Empat lampu merkuri yang dipasang pada Jip petugas tak mampu menembus pekatnya gumpalan asap. Pada pukul 18.30, beberapa anggota Marinir Brigif II Batalyon 4 Cilandak, dilengkapi masker dan tabung oksigen, masuk ke basement. Satu jam kemudian, lima korban ditemukan tewas di P2. Puluhan korban luka-luka juga diselamatkan dan dibawa ke Rumah Sakit Pusat Pertamina.

Lantai P2 baru bisa dimasuki pukul 21.30 WIB. Kondisi ruang itu sangat parah. Dari sekitar 50 mobil, setengahnya terbakar. Beberapa di antaranya remuk tak berbentuk. Akibat ledakan, lantai di atas P2 jebol seluas 6 x 4 meter. Pipa air putus bergelantungan. Air pun muncrat dari pipa dan splinker. Ditambah air siraman pemadam kebakaran, lantai P2 tergenang sampai setengah lutut.

---

370 Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol640/kapolri-diberhentikan-karena-dorongan-publik/, pada 24 April 2018, Pukul 12.30 WIB.

Gus Dur menyebutkan kemungkinan terkaitnya orang-orang tertentu dengan ledakan bom di Gedung BEJ. Salah satu nama yang disebut Tommy Soeharto. Selain Tommy, polisi juga diperintahkan untuk menciduk Ali Baagil, seorang habib di Jalan Kramat Kwitang, Jakarta Pusat. Gus Dur tak merinci bukti-bukti yang ada di kantongnya. Ia hanya menduga, pemboman di BEJ, juga kasus-kasus sebelumnya, dipicu oleh pengadilan Soeharto. "Saya mau jujur sama rakyat sendiri. Kenapa sih setiap kali Pak Harto mau dibawa ke pengadilan, kok ada ribut-ribut," katanya.[371]

Pernyataan Gus Dur dapat dikatakan benar. Sebab, ketika Tommy dipanggil Kejaksaan Agung, 4 Juli silam, sebuah bom sempat meledak di bagian belakang Gedung Pidana Khusus Kejagung. Peristiwa itu terjadi hanya berselang sekitar satu jam setelah Tommy meninggalkan Kejagung, usai diperiksa berkaitan dengan pembelian tanah seluas 144 hektare di Desa Citeureup, Bogor, Jawa Barat.

Menurut seorang saksi mata, ledakan bom itu telah menghancurkan ruangan kamar kecil dan dapur yang ada di lantai dasar. Bahkan, beberapa bagian dinding pada ruangan tersebut terlihat retak, kaca pintu belakang, dan kaca jendela ventilasi kamar kecil hancur berantakan. Alhasil, dari kamar kecil itu, air mengucur dengan deras. Kata polisi, pelakunya berciri orang timur dan memiliki janggut tipis. Ciri fisik lainnya adalah tinggi badan sekitar 170 sentimeter, berambut pendek (cepak), berbadan tegap, berkulit hitam, dan berusia kira-kira 35 tahun.[372]

Marzuki menduga pengeboman itu dilakukan oleh pihak yang tertekan dan sakit hati. Sebab, bom meledak di saat Kejagung tengah serius menuntaskan kasus KKN. Tak hanya itu, Jaksa Agung Marzuki Darusman menyebutkan bahwa jawaban

371 "*Sapi Keramat di Tangan Gus Dur*", Majalah Gatra, 18 September 2000.

372 Diakses dari https://www.liputan6.com/news/read/6765/menangkap-elize-menuding-tommy, pada 15 Juni 2019, Pukul 15.55 WIB.

atas peledakan bom yang terjadi beruntun belakangan ini ada di militer. Pasalnya, Bom itu teridentifikasi sebagai produk pabrik bahan peledak di Turen, Malang, Jawa Timur, yang dikelola PT Perindustrian Angkatan Darat. TriNitroToluena (TNT) itu tercatat telah didistribusikan lewat sebuah gudang logistik milik TNI di Saradan, Madiun.

Polisi mengidentifikasi bom berbahan dasar RDX (*Research Development X*). Bahan ini memiliki unsur kimia *Ciclotrimetilen Trinitramin*. Ahli peledak di Markas Besar Polri mengatakan, bahan peledak RDX yang digunakan itu sama dengan yang dipakai untuk meledakkan Kedubes Filipina dan Kedubes Malaysia. Menurutnya, bahan RDX ini harganya mahal dan belum bisa diproduksi di dalam negeri. Bom jenis ini juga dinilai sama dengan bom yang meledak di Kedubes Filipina 1 Agustus dan Kedubes Malaysia 27 Agustus 2000.[373]

Teror bom tak cukup sampai di situ, pada malam natal 24 Desember 2000, bom meledak di beberapa gereja pada pukul 21.00 WIB. Beberapa bom meledak serentak di halaman sejumlah gereja di Jakarta ketika berlangsung Misa perayaan Natal. Rumah ibadah umat Kristen Katolik dan Protestan yang terkena ledakan adalah Gereja Katedral di Jalan Lapangan Banteng dan Gereja Kanisius, Menteng, Jakarta Pusat. Sementara dari kawasan Jakarta Timur, bom meledak di Gereja Santo Yoseph, Matraman, Gereja Koinonia, Jatinegara, dan Gereja Persekutuan Oikumene, Halim juga diledakkan.

Ledakan juga terjadi di Medan, Pematang Siantar, Batam, Pekanbaru, Bekasi, Sukabumi, Bandung, Pangandaran, Kudus, Mojokerto, dan Mataram. Salah satu tersangka bom natal, Abdul Jabar mengaku mengetahui semua lokasi ledakan bom malam natal yang terjadi tahun 2000. Jabar juga ikut serta dalam rapat perencanaan bom yang dilakukan pada Oktober

373 "*Bom Ciganjur untuk BEJ*", Majalah Gatra, 25 September 2000.

sampai November 2000 di Jalan Anggrek No. 4, Klender, Jakarta Timur.[374]

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaku pemboman BEJ dan Kedutaan Besar Filipina merupakan jaringan yang sama. Jika, mengacu pada surat pertama yang ditulis oleh Priyo Budi Santoso untuk Akbar Tanjung dan dikutip oleh Djaja Suparman dalam bukunya, maka isi surat tersebut bukan isapan jempol belaka. Sebab, jenis bom dan target-target pemboman juga sesuai denga isi surat tersebut.

Namun, Gus Dur meyakini terdapat kaitan antara peristiwa-peristiwa pemboman Gedung BEJ dan usaha-usahanya untuk menuntut anggota-anggota senior dari rezim sebelumnya ke pengadilan, khususnya anggota-anggota keluarga bekas Presiden Soeharto.[375]

Gus Dur sangat ingin sekali mengadili keluarga Soeharto. Bahkan, Gus Dur sesumbar kepada Wimar Witoelar bahwa tak masalah jika dirinya harus ditembak, asalkan paling tidak tujuh orang yang berkaitan dengan Soeharto dapat diproses ke pengadilan.

Pertama, ia ingin menangkap Tommy. Kedua, ia ingin Soeharto. Ketiga, ia ingin sekali menangkap kroninya Soeharto, terutama Ginanjar Kartasasmita.[376] Namun, Gus Dur menemui kendala, sebab, Jaksa Agung Marzuki Darusman bekerja sangat lambat. Sebenarnya, ini dapat dimengerti karena Marzuki Darusman berasal dari Partai Golkar. Oleh sebab itu, ia kemudian digantikan oleh Baharuddin Lopa.

Militer

Isu kudeta oleh militer Indonesia terhadap pemerintahan Gus Dur dan terjadinya kerusuhan di Indonesia terutama di Mataram, telah menjadi indikasi tak terbantahkan bahwa

---

374 Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/1916/abdul-jabar-tahu-lokasi-lokasi-bom-natal-2000, pada 15 Juni 2019, Pukul 16.20 WIB.

375 Greg Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta : LkiS, 2002), hlm. 444—445.

376 Wawancara Wimar Witoelar di Jakarta, 26 Februari 2019.

ternyata kehidupan berbangsa dan bernegara kita masih renggang dan bahkan tegang, 22 Januari 2000.[377]

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, munculnya dua kubu militer progresif dan nonprogresif dalam mereformasi ABRI pada awal-awal reformasi membawa dua kubu tersebut pada sebuah "perlombaan". Mereka saling berebut pengaruh ke presiden agar ide dan tujuan mereka masing-masing bisa dilaksanakan. Gus Dur sendiri lebih condong kepada militer progresif yang dipimpin oleh Umar Wirahadikusuma. Oleh sebab itu, Gus Dur sangat mendukung pemisahan TNI-Polri serta tak segan-segan melakukan intervensi internal TNI.

Apa yang dilakukan Gus Dur merupakan penerapan prasyarat yang mesti dimiliki dan dilakukan pada konteks peralihan rezim otoriter ke rezim demokratis, yaitu penataan ulang peran militer dalam kehidupan politik. Bagi Gus Dur, mundurnya militer dari politik dimaknai sebagai kembalinya militer yang pernah melakukan intervensi politik ke dalam peranannya yang instrumental dan membiarkan kepemimpinan sipil dalam posisi yang tidak terganggu untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya serta membiarkan mereka membuat semua keputusan demi negara.[378]

Sedangkan, menurut Samuel Huntington, setidaknya ada tiga prasyarat penting untuk menciptakan kondisi supremasi sipil. *Pertama*, adanya suatu keniscayaan atas profesionalisme militer dan sebaliknya pengakuan perwira militer terhadap keterbatasan kemampuannya. *Kedua*, subordinasi efektif dari militer kepada politisi sipil yang membuat keputusan dasar mengenai kebijakan pertahanan dan luar negeri. *Ketiga*, penerimaan dan pengakuan oleh pemerintahan sipil terhadap wilayah-wilayah kemampuan profesional dan otonomi militer.[379]

377 M. Anwar Djaelani, Gus Dur dan Kritik, *Kontroversi Itu untuk Apa?* (Surabaya: Yayasan Kampusina, 2000), hlm. 28.
378 Dewi Fortuna, dkk, *Gus Dur Versus Militer* (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 65.
379 *Ibid.*, hlm. 66.

Gus Dur sungguh-sungguh ingin memisahkan TNI-Polri dan juga membentuk militer yang profesional. Hal itu pun sudah ia komunikasikan dengan Wiranto. Tugas Wiranto kemudian adalah mensosialisaikan keinginan Gus Dur ke petinggi-petinggi TNI. Pada sebuah Rapim TNI, beberapa saat setelah Gus Dur terpilih, ia menyepakati tujuh poin keputusan.

Pertama, TNI akan selalu menempatkan diri sebagai bagian dari sistem nasional yang memiliki tugas pokok hanya di bidang pertahanan negara. Tidak lagi bertanggung jawab sepenuhnya di bidang keamanan yang telah menjadi tanggung jawab Polri dan tidak lagi melaksanakan fungsi sosial-politik.

Kedua, reformasi internal TNI terus dilanjutkan dengan percepatan yang diperlukan, meliputi aspek pembenahan piranti lunak, seperti merevisi UU tentang pokok pertahanan dan doktrin, aspek struktural dalam bentuk validasi organisasi sesuai urgensinya dan aspek kultural yang membudayakan sikap dan tingkah laku prajurit yang profesional, dan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai HAM.

Ketiga, TNI tetap merupakan institusi negara yang secara konstitusional wajib melaksanakan dan mengamankan kebijakan pemerintah yang sah.

Keempat, pengunaan anggaran diprioritaskan kepada peningkatan profesionalitas dan pemeliharaan alur sistem untuk mendukung kesiapan operasional satuan TNI.

Kelima, tugas pembinaan dan pembangunan TNI ke dalam diarahkan untuk mewujudkan TNI yang profesional, efektif, efisien, dan modern.

Keenam, TNI akan terus membantu Polri menegakkan keamanan di berbagai daerah sesuai perundangan dan peraturan yang berlaku.

Ketujuh, semua prajurit TNI perlu berperan aktif untuk meluruskan opini publik guna membangun citra positif TNI, baik di dalam negeri maupun luar negeri.[380]

---

380 *Ibid.*, hlm. 96—97.

Dalam upaya menegakkan supremasi sipil, Gus Dur ingin melakukan demiliterisasi dalam segara bidang termasuk Departemen Pertahanan (Dephan). Sebab, Dephan merupakan bagian dari pelaksana tugas pemerintah yang mesti tunduk kepada supremasi sipil dan tidak harus didominasi militer seperti yang dipraktikan selama pemerintahan Orde Baru.[381]

Namun, bukan berarti makna supremasi sipil harus menyingkirkan militer, penekanannya kepada militer mesti menundukkan diri sepenuhnya kepada keputusan-keputusan lembaga politik dan tidak ikut campur dalam keputusan politik. Militer boleh saja menduduki jabatan-jabatan sipil dalam batas bahwa orang-orang sipil tidak dapat melakukannya.[382]

Akan tetapi keinginan itu tak mudah. Pada 1 Februari 2000, tentara mulai menunjukan sikap tak menghormati Gus Dur. Saat itu Gus Dur menyatakan akan memberhentikan Menko Polkam Wiranto karena terlibat pelanggaran HAM di Timtim. Kekerasan di Timor Timur menguat setelah militer Indonesia memasuki wilayah tersebut sejak 1975 dengan pembentukan dan penggalangan sipil bersenjata yang di kemudian hari disebut WANRA. Sebagian dari tenaga-tenaga tersebut diorganisir ke dalam TNI melalui program militerisasi atau Milsas dan digaji sebagai tentara reguler. Milsas oleh para pejabat tinggi militer di Jakarta disebut sebagai anggota TNI putra daerah dan mereka hanya bertugas di Timtim dalam membantu operasi TNI di Timor Timur, dan elite dari kelompok Prointegrasi dijadikan pejabat birokrasi. Contohnya, Joao Tavares - Bupati Bobonaro sekaligus pemimpin satuan Halilintar.

Situasi Timor Timur setelah adanya dua opsi dari pemerintah Indonesia mengalami perubahan-perubahan yang spesifik. Perjanjian New York 5 Mei 1999, memberi peluang bagi pengamat internasional untuk mengamati pelanggaran hak asasi manusia serta pemenuhan kewajiban pemerintah Indonesia

381 Wawancara dengan Mahfud MD di Jakarta, 19 Juni 2019.

381 Mahfud MD, *Setahun Bersama Gus Dur* (Jakarta: Murai Kencana, 2010), hlm. 84—85.

untuk menjaga keamanan dan perdamaian. Dalam waktu yang bersamaan muncul berbagai kebijakan politik dan keamanan, hal ini memperkuat kelompok-kelompok sipil bersenjata yang dikenal sebagai milisi dan meningkatnya bentuk-bentuk kekerasaan, serta munculnya reaksi dari kelompok masyarakat Pro-kemerdekaan. Rangkaian kekerasan ini berlangsung seiring dengan kebutuhan penggalangan pemenangan otonomi khusus. Setelah tawaran opsi, dikembangkan pula satuan-satuan milisi yang digalang dari kalangan muda.

Menurut laporan Pangdam Udayana Mayjen Adam R. Damiri kepada Menko Polkam dinyatakan bahwa Kelompok prointegrasi dimotori oleh para pemuda yang mendirikan organisasi Cinta Merah Putih. Laporan-laporan lainnya menyebutkan para pemuda yang membentuk organisasi Cinta Merah Putih, sebelumnya adalah anggota Gada Paksi atau Garda Muda Penegak Integrasi yang dihimpun, dilatih, dan dibiayai oleh Kopasus tahun 1994 - 1995.

Eurico Guterres pemimpin milisi Aitarak di Dili adalah tokoh dalam Gada Paksi ini. Kelompok-kelompok milisi itu kemudian bergabung ke dalam Pasukan Pejuang Integrasi dengan panglimanya Joao Tavares dan wakilnya Eurico Guterres serta Kastafnya Herminio da Costa da Silva. Kelompok-kelompok prointegrasi ini menurut keterangan para Bupati dan Gubernur Timor Timur disebut Pam Swakarsa. Keberadaan milisi Prointegrasi diakui oleh Jenderal TNI Wiranto dan dituangkan dalam Rencana Menghadapi Kontinjensi.

Sebagai tindak lanjut pengakuan terhadap milisi prointegrasi terjadi penggalangan massa besar-besaran yang melibatkan aparat militer di berbagai tingkat. Tujuannya untuk mematahkan dominasi kelompok prokemerdekaan dan sekaligus menggalang dominasi kelompok prointegrasi dalam masyarakat.

Dari sejumlah fakta diketahui bahwa jelas ada keterkaitan antara milisi prointegrasi dan militer, dan sebagian besar pimpinan dan personil inti milisi adalah para anggota Kamra, Wanra, Milsas, Gada Paksi, Hansip dan anggota TNI-AD. Mereka dilatih dan dipersenjatai dengan jenis SKS, M 16, Mauser, G-3, granat, dan pistol di samping diberi senjata peninggalan Portugis. Dari kesaksian yang diperoleh KPP-HAM, *dropping* senjata pernah dilakukan dari tangan Komandan Satgas Tribuana dan Kodim Suai kepada kelompok milisi. Hubungan lain juga terungkap dalam operasi-operasi atau patroli-patroli yang mereka lakukan bersama.

Dukungan aparat TNI AD, terhadap operasi-operasi yang dilakukan, telah berakibat tidak berfungsinya institusi kepolisian untuk melakukan tindakan hukum dalam kasus-kasus kekerasan, seperti dalam kasus penyerangan Gereja Liquisa.

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa: pertama, terdapat hubungan dan keterkaitan yang kuat antara aparat TNI, Polri serta birokrasi sipil dengan milisi; kedua, kekerasan yang terjadi di Timor Timur mulai pasca pengumuman pemberian opsi hingga pasca pengumuman jajak pendapat bukan diakibatkan oleh suatu perang saudara melainkan hasil dari suatu tindakan kekerasan yang sistematis.

Ada tiga jenis pelaku terpenting yang diidentifikasi oleh KPP HAM sebagai penanggung jawab rangkaian tindak kekerasan di Timtim. Pertama, pelaku yang melakukan tindak kekerasan di lapangan secara langsung, yaitu para milisi, aparat TNI, dan POLRI. Kedua, para pelaku yang melakukan tindak pengendalian operasi lapangan termasuk di dalamnya aparat birokrasi terutama Bupati-bupati, Gubernur dan para pimpinan militer, serta kepolisian lokal. Ketiga, pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk di dalamnya para pejabat

tinggi militer yang terlibat dan yang mengetahui terjadinya rangkaian tindak kekerasan tetapi tidak mengambil tindakan untuk mencegahnya.[383]

Keseluruhan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur, langsung atau tidak langsung, terjadi karena kegagalan Panglima TNI dalam menjamin keamanan dari pelaksanaan pengumuman dua opsi oleh pemerintah. Struktur kepolisian yang pada waktu itu masih dibawah komando Menteri Pertahanan telah turut memperlemah kemampuan aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas pengamanan berdasarkan perjanjian New York. Untuk itu, Jendral TNI Wiranto selaku Panglima TNI adalah pihak yang harus diminta pertanggungjawabannya.[384]

Selain itu, pemecatan Wiranto juga erat kaitannya dengan kepentingan Gus Dur di dunia internasional terkait pembantaian yang dilakukan TNI di Timor Timur. Gus Dur mesti menunjukkan dirinya mampu menguasai keadilan di Indonesia. Selain itu, secara simbolis Gus Dur juga ingin menunjukkan kemampuanya menguasai militer. Pemecatan Wiranto oleh Gus Dur juga bukan merupakan sikap antimiliter, melainkan mencegah atau bertindak preventif agar tidak muncul militerisme.

Pemecatan Wiranto dilakukan saat Gus Dur sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Eropa, Gus Dur berkomentar mengenai kondisi dalam negeri dan prospek reformasi militer banyak mengalami hambatan karena Faisal Tandjung dan Wiranto. Tetapi, tak banyak reaksi dari pihak militer mengenai ucapan Gus Dur. Padahal, Faisal pada masa Soeharto banyak memiliki pendukung.

Sedangkan Wiranto dinyatakan sedang banyak menemui banyak jenderal dan Habibie saat Gus Dur di luar negeri untuk

383 KPP HAM TIM-TIM, Laporan Investigasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur, Maluku, Tanjung Priok, dan Papua (Jakarta: Komnas Perempuan, 2003), hlm. 23.

384 *Ibid.*, hlm. 28.

melakukan konsolidasi kekuataan melawan Gus Dur. Marsillam meminta Gus Dur harus segera bertindak. Gus Dur memecat Wiranto dan tak ada banyak reaksi juga atas tindakan Gus Dur.[385]

Dipecatnya Wiranto, tak bisa dilepaskan dari informasi yang diberikan Todung Mulya Lubis, salah satu pendiri Fordem kepada Gus Dur. Pada awal pemerintahan, Fordem memberikan cukup banyak masukan dan dukungan kepada Gus Dur dalam menjalankan pemerintahan—terutama untuk melakukan reformasi TNI-Polri. Todung Mulya sebagai salah satu anggota Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM) Timor Timur, mengaku melakukan komunikasi intens terkait pelanggaran HAM yang melibatkan jenderal-jenderal TNI—salah satunya keterlibatan Wiranto.[386]

3 Februari 2000, Gus Dur mendapat kabar bahwa ada pertemuan sejumlah jenderal di Jalan Lautze, Jakarta. Gus Dur memperingatkan agar para jenderal tidak melakukan sesuatu yang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban.[387] "Saya mendapat laporan dari kawan-kawan di Nahdlatul Ulama, bukan dari pemerintah setempat bahwa ditemukan sejumlah orang dari Jakarta, umumnya dari militer, yang sengaja menciptakan kerusuhan di sana," ucap Gus Dur. Gus Dur dalam perjalanan ke Amerika, menghubungi Kapolri. "Kalau mereka melawan, tembak!" seru Gus Dur.[388]

Ada tiga orang "intel" Gus Dur yang melapor terkait aktivitas Wiranto. dari ketiga intel itu, Gus Dur mendapat informasi: Pertama, Selasa 8 Februari Wiranto mendatangi Habibie untuk meminta sejumlah pertimbangan sebelum menyatakan pengunduran diri. Ketika itu, Habibie menyatakan dukungan penuhnya kepada Wiranto dan memintanya tidak mengundurkan diri. Kedua, mereka melaporkan pula adanya gerakan para jawara dari Banten, yang dipimpin seorang mubalig.

385 Greg Barton, *Op.cit.*, hlm. 388.
386 Wawancara Todung Mulya Lubis di Jakarta, 17 Mei 2019.
387 M. Anwar Djaelani, *Op.cit.*, hlm. 10.
388 F. X. Bambang Irawan, Bambang Irawan, *Supremasi Sipil? Agenda Politik Militer* Gus Dur (Yogyakarta: Elstreba, 2000), hlm. 35.

Konon, mereka yang sudah berlatih di Kawasan Jasinga, Bogor, itu siap masuk ke Jakarta jika Wiranto diberhentikan.[389]

Agum Gumelar, Menteri Perhubungan pun menanggapi pernyataan Gus Dur tentang adanya rencana kudeta dari militer. Ia tidak mempercayai isu tersebut. "Alangkah bodohnya jika militer sampai berbuat demikian itu dan justru di saat kepercayaan rakyat terhadap kami berada di pasang surut yang terendah. Bisa saja selalu terdapat beberapa anggota militer yang merasa tidak puas dengan situasi yang sedang berlangsung. Tapi itu bukanlah kudeta, itu pembangkangan. Jika sampai terjadi, maka saya lah yang akan pertama melawannya," ujar Agum.[390]

Forum Komunikasi Purnawirawan (FKP) TNI-Polri tidak mempersalahkan pemecatan Wiranto dari Kabinet dengan alasan demi berlangsungnya proses hukum yang bebas, jujur, dan berkeadilan. "Kami data menerima alasan-alasan Presiden Gus Dur melalui tindakan penonaktifan tersebut. TNI menghormati setiap keputusan yang baik bagi keselamatan bangsa."[391]

Meski tak menimbulkan riak perlawanan di media, tapi di internal TNI, pemecatan Wiranto ini yang menimbulkan perkembangan yang sangat dinamis. Sejumlah Jenderal TNI kabarnya sempat mengontak Presiden Wahid untuk memprotes keputusan itu. Polemik pun berlangsung di kalangan militer. Presiden terus menerus di kontak para stafnya untuk melaporkan diskusi yang berkembang di kalangan tentara sehubungan dengan tetap diperhankannya Wiranto dalam kabinet. Dikabarkan pula bahwa sejumlah kalangan di kabinet juga menyesalkan keputusan mempertahankan Wiranto. Wahid yang tengah beristirahat dari lawatannya akhirnya dibuat sibuk dengan menganalisis keadaan siang itu.[392]

389 *Ibid.*, hlm. 40—41.
390 *Ibid.*, hlm. 133.
391 Mohammad Sobary, dkk (ed), *Op.cit.*, hlm. 46.
392 Dewi Fortuna, dkk, *Op.cit.*, hlm. 73.

Meski demikian, isu kudeta yang akan dilakukan oleh Wiranto atau militer tetap berkembang. Terutama setelah Wiranto dan Djaja Suparman dinilai aktif terlibat pertemuan dengan kelompok Islam garis keras. Kegiatan rapat tersebut dilakukan oleh Kelompok Wiranto seperti rapat bulan Mei-Juli sebanyak 14 kali di berbagai tempat dan hotel yang dihadiri antara lain oleh target, tokoh-tokoh lain, dan dari kelompok Islam garis keras, salah satunya tokoh Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Disebutkan juga tanggal, hari, jam, tempat, dan materi yang dibahas yang isinya tentang langkah, sikap, dan gerakan yang negatif untuk melawan pemerintahan Gus Dur.[393] Dokumen yang tersebar di kalangan terbatas, kalangan itu seperti beberapa Anggota DPR. Petinggi TNI-Polri mengenalnya dengan sebutan Dokumen Perkembangan Situasi. Djuanda merupakan seorang Letkol dari Korps TNI Angkatan Laut yang diduga menjadi salah satu pembisik Gus Dur.

Berikut isi dokumen tersebut yang dimuat dalam biografi Djaja Suparman, berikut isi surat tersebut:

1. Tanggal 10 Mei 2000 di kamar 620 Hotel Mercure. Rapat dihadiri Wiranto, Djadja Suparman, Syafrie Syamsudin, Zacky Makarim, Fuad Bawadzier, Hariman Siregar, Muslim Abdurahman, Burzah Zanubi, Habib Rizieq, Eggi Sudjana, dan beberapa aktivis ormas kanan. Pokok bahasan: mendorong aksi-aksi separatis di berbagai kota di Tanah Air, melakukan penetrasi, penunggangan dan provokasi ke dalam gerakan mahasiswa yang menuntut adili Soeharto di Jalan Cendana agar menjadi aksi anarkis dan mengupayakan aksi itu menyebar di seluruh ibu kota.

393 Djaja Suparman, *Jejak Kudeta 1997—2005* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013), hlm. 255.

Memobilisasi gerakan Front Pembela Islam (FPI) untuk melakukan sweeping malam dengan target memancing kerusuhan meluas. Semetara tugas utama para perwira tinggi aktif untuk melakukan anektasi, pembelahan dan pendiskriditan terhadap militer professional dan anti dwi fungsi.

2. Tanggal 11 Mei 2000 di kamar 202 Hotel Borobudur. Rapat dihadiri Djadja Suparman, Zacky Makarim, Fuad Bawadzier, Ucu Kambing, Habib Ali, Bethor Suryadi, Amir Daulay, dan beberapa aktivis muda lainnya dari kelompok Hammas. Pokok bahasan: melakukan penetrasi dan provokasi kembali pada gerakan mahasiswa dalam peringatan 12 Mei dan aksi di Jalan Cendana, lontarkan gosip yang bisa menyebarkan di beberapa aktivis mahasiswa, suplai senjata kepada komando jihad yang berangkat ke Maluku.

   Selain itu, lakukan benturan dan kontak senjata kepada komando jihad yang berangkat ke Maluku, lakukan benturan dan kontak senjata antar pihak sipil, antara militer dan polisi, agar kondisinya terus mencekam, dukung semua kekuatan yang berupaya melakukan disintegrasi bangsa dan ciptakan kerusuhan mulai dari Irian sampai Aceh.

3. Tanggal 17 Mei 2000 di Rumah Sakit Baruna Central Cikini, Ruangan Hariman Siregar. Rapat dihadiri Wiranto, Adam Damiri, Ahmad Sumargono, Panda Nababan, Bethor Suryadi dan Saan, Sjafrie Syamsudin, Hariman Siregar. Pokok bahasan: menciptakan ruang konflik di tubuh TNI dan Polri sehingga saling hantam, rebut dukungan dewan dan lakukan pembelahan suara pendukung Gus Dur, penyebaran dan pencetakan uang palsu harus tetap dilaksanakan untuk menambah runyam kondisi ekonomi Negara dan keuntungan untuk mendanai gerakan provokasi.

4. Tanggal 26 Mei 2000 di kamar 612 Hotel Shangrila. Rapat dihadiri Wiranto, S. Bambang Yudhoyono, Djadja Suparman, Sulaiman Bais, Zacky Makarim, Fuad Bawadzier, Hariman Siregar, Ahmad Sumargono, Egi Sudjana. Pokok bahasan: mempetakan politik elite TNI antara lain kelompok pro Wiranto tetap di bawah komando Djadja Suparman, kelompok Tyasno cenderung bermain dua kaki, kelompok Widodo dan kelompok militer professional pro-Gus Dur akan segera digusur karena memperlambat kelompok Djadja dengan isu bermacam-macam, kelompok Djadja merasa mampu menguasai medan di Jakarta dengan aktivis mahasiswa dan LSM. Membuat setiap aksi demokrasi menjadi anarkis agar citra Gus Dur dan aparat keamanan jatuh di mata rakyat.

5. Tanggal 31 Mei 2000 di kamar 406 Sahid Hotel. Pokok bahasan: tentang situasi politik yang memanas yang ditandai dengan diangkatnya Kasus Bulog dan Skandal Brunei. Djadja memberikan bantuan kepada Saan dan Reza untuk melakukan penetrasi ke pers dalam rangka semakin menggencarkan opini sehingga terjadi bentrokan dalam kubu pendukung Gus Dur. Kemudian menyiapkan teror dan bom di berbagai kota, khususnya di Jakarta. Mendorong pihak FPI dan Laskar Jihad untuk melakukan tindakan razia maksiat di ibu kota, seolah-olah dekat pendukung Gus Dur sehingga mereka lengah.

6. Tanggal 5 Juni 2000 di kamar 203 Hotel Novus Bogor. Pokok bahasan: membahas setiap gerakan ke depan antara lain Gus Dur harus lebih goyah sehingga gampang mengobok-obok posisi militer dan kabinet tidak terkoordinasi, pecah kekuatan mahasiswa garis keras anti Orde Baru, gencarkan operasi yang bersandi "Politik No, Islam Yes" di kalangan

Laskar Jihad, FPI, Ahlusunnah Waljamaah, Front Hisbullah, dan Gerakan Pemuda Kabah untuk memerangi kafir-kafir yang berkedok Islam dan politik kerakyatan, tebarkan isu terhadap mahasiswa dan pendukung Gus Dur bahwa mereka reinkarnasi komunis. Untuk menjaga gerakan kelompok Islam di Jakarta, tetap dengan militansi memerangi maksiat dan narkoba.

7. Tanggal 8 Juni 2000, Gang Awi Apus No. 19 RT 3 Cidaun Bogor tempat aktivis FPI. Membahas tentang konkrenlisasi (?) dalam rangka penggulingan Gus Dur, memprakondisikan mutase pimpinan TNI, menyiapkan kader TNI yang akan ditempatkan dengan menekan panglima TNI. Jatuhkan Gus Dur dengan mem-*follow* up kasus Bulog dan Bruneigate, tekan dan pengaruhi pendukung Amin dan Akbar Tanjung untuk membantu kelompok Wiranto.

8. Tanggal 12 Juni 2000, di Wisma DPR Puncak Bogor. Membahas tentang Kelompok Burzah dan Egi sudah mulai main di Jakarta, Jawa Barat, Yogya, Lampung. Kelompok Wiranto sudah selesai mensosialisasikan ide penggusuran Gus Dur ke kelompok Islam garis keras dengan kompromi bahwa Gus Dur telah dikitari oleh kafir-kafir dan komunis. Mendukung interpelasi yang dilakukan anggota dewan di parlemen yang menjadi ajang pembantaian kredibilitas Gus Dur hingga jatuh. Untuk *link* negeri digunakan Habibie Centre yang sudah kokoh di Jerman dan kelompok Islam luar negeri menjadi tanggung jawab Kisdi.

9. Tanggal 17 Juni 2000, Gang Awi Apus No. 19 RT 3 Cidaun Bogor tempat aktivis Front Pembela Islam. Membahas agenda program mutase dan *setting* ke depan, antara lain

kelompok Wiranto menekan kelompok Tyasno agar digusur dari Kasad dan Djaja naik jadi Kasad.

Ahmad Sumargono melakukan lobi ke luar negeri untuk mempengaruhi para petinggi Negara Islam garis keras dengan alasan Gus Dur didukung komunis Cina dan Rusia. Agar Negara Islam itu mengirimkan agen-agen teroris ke Indonesia untuk melakukan Masterplan kerusuhan. Zacky Makarim secara khusus mendapat tugas menyiapkan operasi intelijen, sabotase, terhadap berbagai hal yang dibutuhkan masyarakat, BBM, beras, dan listrik.

10. Tanggal 5 Juli 2000, di Jalan Guntur, tempat kost Saan. Rapat dihadiri Bursah Zanubi, egi Sudjana, Bethor Suryadi, Saan, dan Reza Pahlevi. Pokok bahasan: mendorong aksi mahasiswa yang mulai kencang dan isu taktis bubarkan Golkar. Melakukan intens pelatihan aksi dan sabotase setiap minggu berikut evaluasi pelatihan, menyiapkan bom molotov sebanyak-banyaknya. Menggiring setiap aksi mahasiswa tetap keras dan anarkis sehingga timbul banyak korban dan menyebar di seluruh Jakarta. Ini akan makin membuat terpuruknya TNI dan Polri, terutama kelompok Widodo.

11. Tanggal 8 Juli 2000, di Pondok Cibogo Bogor. Rapat dihadiri Wiranto, Djaja Suparman, Syafrie Syamsuddin, Zacky A. Makarim, Adam Damiri, Hari Sabarno, Tayo Tarmadi, Sulaiman, Fuad Bawazier, Eky Syahruddin, Priyo Budi Santoso, Bursah Zarnubi, Egy Sujana dana Saan. Membahas poin-poin untuk memperkuat dukungan semua pihak anggota dewan melalui kerja sama Fraksi Partai Golkar, TNI/Polri, dan Fraksi Reformasi serta kelompok kanan lainnya lewat Amien Rais.

Mendorong kelompok kanan untuk bergerak pada saat interpelasi terhadap Gus Dur agar Gus Dur marah dan hilang legitimasinya di mata rakyat, setting kelompok kanan adalah hantam mahasiswa dan Gus Dur.

12. Tanggal 24 Juli 2000, di Hotel Cipayung Bogor. Rapat dihadiri Wiranto, Djaja Suparman, Hari Sabarno, Syafrie Syamsudin, Priyo Budi Santoso, Panda Nababan, Burzah Zarnubi, dan Egi Sujana. Membahas tentang kelompok kanan tetap membuat terror bom, memprovaksi aksi 27 Juli massa PDI Perjuangan sehingga menjadi momentum warming up aksi-aksi massa menuju ajang Sidang Tahunan 2000 menjadi lebih besar.

    Tekanan Akbar Tanjung melalui *bargaining* kelompok Wiranto dan Habibie serta pendukung Soeharto untuk berbuat lebih keras apabila Sidang Umum nanti tidak diarahkan menjadi SI menggusur Gus Dur. Menyiapkan barisan pendukung dari daerah terutama massa dari pinggiran Jakarta. Untuk mengepung Jakarta gunakan massa FPI, Front Hisbullah, dan Laskah Jihad yang kembali dari Maluku.

    Isu yang dibangun pada Sidang Umum nanti bahwa Gus Dur akan tetap mencabut TAP MPRS tahun 66 tentang pelarangan PKI. Jadi Gus Dur sekarang berada dalam gengaman komunis yang ingin kembali menanamkan paham itu.

    Provokasi kantong-kantong kelompok kanan di wilayah Jakarta untuk penetrasi dan aneksasi pada pihak keamanan pro pemerintahan Gus Dur. Ini menjadi tugas kelompok Wiranto melalui operator Djaja Suparman, Syafrie Syamsudin, dan Zacky Makarim.

Rekruitmen *Sniper* dan pembuat bom telah dilakukan sebanyak 500 personil, pasukan PAM Sidang Umum berjumlah 4.000 orang di bawah komando. Pasukan *Sniper* telah melakukan latihan di berbagai tempat di luar daerah, Tasikmalaya dan Sukabumi menggunakan standar militer dan Polri.

13. Tanggal 29 Juli 2000 di Cilangkap. Rapat dihadiri Djaja Suparman, Syafrie Syamsudin, Hari Sabarno, Fuad Bawazier, Eky Syahrudin, Habib Rizieq, Hariman Siregar, Egi Sujana, Bethor Suryadi, dan Saan. Pokok bahasan: anggota dewan dikondisikan untuk mempertajam hak angket sehingga dapat membangun komitmen berikutnya pada Sidang Umum Tahunan yakni Sidang Istimewa untuk menggusur Gus Dur. Konsolidasi kesepakatan Fraksi TNI/Polri, Golkar, PDIP, dan Poros Tengah.

    Kelompok Wiranto dan Habibie akan memberikan informasi yang menyesatkan Gus Dur sehingga Gus Dur salah langkah, misalnya soal keamanan, intelijen, dan stabilitas politik, membuat opini dan menghantam kelompok kanan yang seolah-olah dilakukan oleh Gus Dur. Titik gerakan dan eskalasi antara lain di Blok M, Hotel Indonesia, LBH, Cendana, Matraman, Manggarai, Senen, tanjung Priok, Kota, DPR/MPR, Monas (Istana), Senayan, dan BI.

    Juga peledakan bom waktu dengan sasaran Hotel Indonesia, BEJ, Blok M, Kejaksaan, Gereja Kathedral, Bina Graha, Stasiun Gambir, Atmajaya, Trisakti, Sarinah, Kedubes AS, Kedubes Australia, Kedubes Malaysia, dan gedung sekitar Monas. Standar bom milik AD. Sejumlah provokator disiapkan membawa bom Molotov untuk

membakar Gedung-gedung di sekitar Jakarta. Daerah yang disiapkan untuk Meletus kerusuhan yaitu Ujung Pandang, Purwokerto, Pekalongan, Cianjur, Surabaya, Ambon, Tasikmalaya, Garut, Medan, Palembang, Lampung, Yogyakarta, Bali, Bandung, dan Semarang.[394]

Djaja Suparman jelas menolak isi surat tersebut. Ia mengaku tak berkomunikasi dengan Wiranto pada periode itu. Djaja menuduh Kelompok Perubahan Abu-Abu (KPAA) yang mengembuskan isu tersebut. KPAA dinilai sebagai sebuah kelompok yang memanfaatkan penguasa melalui orang terdekatnya untuk melakukan manuver lewat penggalangan opini, pembentukan citra postif di masyarakat, dan yang paling penting adalah menggusur perwira-perwira TNI yang dianggap sebagai lawan mereka dengan cara menyebar isu dan melakukan pembunuhan karakter serta lobi tingkat tinggi.[395]

Namun, tuduhan ini sulit untuk dibuktikan, bahkan tak jelas siapa yang dimaksud dari KPAA ini. Tetapi, Letkol Djuanda yakin dengan analisisnya. "Ya saya temukan beberapa nama yang memang menjadi biang kerok. Bagi saya, yang biang kerok asli, ya orang-orang Orde Baru. Mereka mengeksploitasi Islam sebagai bendera. Fuad Bawazier itu boleh dipikir. Itu asli, saya siap frontal dengan dia," ujar Djuanda.[396]

Lengsernya Wiranto ternyata mewariskan sejumlah persoalan setidaknya di jajaran pimpinan TNI. Hanya berselang satu minggu setelah lengsernya Wiranto (21 Februari 2000), Panglima TNI Widodo AS menandatangani surat keputusan (Skep/133/II/2000) pada 28 Februari 2000 yang isinya memutasikan 74 perwira menengah dan tinggi di Dephan dan Mabes TNI. Keputusan itu sendiri diumumkan oleh Kapuspen TNI (waktu itu), Graito Usodo, lima jam setelah penandatanganan Skep.

394 *Ibid.*, hlm. 309—313.
395 *Ibid.*, hlm. 267.
396 "*Gus Dur Hanya Percaya 10%*", Majalah Gatra, 10 Juli 2000.

Penandatangan pengangkatan Skep tersebut dapat diartikan bahwa Gus Dur mencoba untuk mengonsolidasikan kekuatan tentara yang pro terhadap kebijakannya atas penegakkan supremasi sipil. Pada saat penandatangan ini pula mulai terjadi persaingan secara terbuka antara kubu Agus Wirahadikusumah (AWK) dan Wiranto.

Proses naiknya AWK sendiri sebagi Pangkostrad berlangsung alot. Rapat yang dipimpin Tyasno konon pada awalnya merekomendasikan sejumlah posisi. AWK misalnya diposisikan sebagai Kasum, Mayor Jenderal Ryamizard Ryacudu untuk posisi Pangkostrad, Mayor Jenderal Amirul Isnaeni untuk posisi Komandan Jenderal Kopassus. Namun, paket usulan ini rupanya mendapat tantangan keras dalam rapat-rapat Wanjakti, terutama menyangkut posisi AWK.

Akhirnya pos Kasum diisi oleh Letjen Agus Widjojo, sedangkan kursi Kaster diisi oleh Marsda Slamet Efendi, mantan Direktur Bais. Hasil sidang Wanjakti ini diserahkan ke Panglima TNI, namun tidak ditandatangani sampai ia berkonsultasi dengan Presiden Wahid. Hasil akhir proses mutasi pada Februari 2000 memang akhirnya terlihat adanya kompromi yang sangat kuat antara Panglima TNI dan Presiden. Bahkan dua hari setelah mutasi, Presiden Wahid mengakui bahwa ia telah menitipkan nama AWK pada Panglima TNI untuk Jabatan Komando di lingkungan TNI.[397]

Upaya Gus Dur ini tentu mendapat tentangan dari sebagian besar TNI. Bahkan, sebuah dokumen bernama Bulak Rantai ditemukan yang tujuannya bermaksud untuk menggagalkan konsolidasi TNI pro-Gus Dur. Pada saat bersamaan, tentara melihat Megawati merupakan sosok yang stabil dibandingkan Gus Dur. Mulai pada titik ini, Megawati dan tentara menjadi cukup dekat.[398] Dokumen-dokumen Bulak Rantai juga mengindikasikan kedekatan anatara TNI dan PDIP.

---

397 Dewi Fortuna, dkk, *Op.cit.*, hlm. 75.

398 Wawancara dengan X di Jakarta, 20 Februari 2019.

Dokumen ini, berisi rencana mutasi di jajaran tinggi TNI dengan melibatkan Pjs. Sekretaris Negara (waktu itu) Bondan Gunawan, KSAD Tyasno Sudarto, Pangkostrad (waktu itu) Agus Wirahadikusumah, Aster KSAD (waktu itu) Mayjen TNI Saurip Kadi dan Kasdam Jaya Brigjen Romulo Simbolon. "Dokumen Bulak Rantai" sebenarnya lebih merupakan notulen diskusi.

Dalam dokumen itu disebutkan ada dua kali pertemuan di kediaman Agus Wirahadikusumah (AWK) di Jalan Bulak Rantai Jakarta. Pertemuan pertama, 16 April 2000 (antara pukul 19.30 – 23.30 WIB). Mereka yang hadir di antaranya orang yang dekat dengan AWK seperti Saurip Kadi, Romulo Simbolon, Letkol Baktiman (perwira menegah Mabes ABRI) dan Bondan Gunawan. Hadir juga sejumlah mahasiswa dan aktivis LSM. Diskusi pada 16 April ini sudah mengarah pada kemungkinan naiknya Tyasno Sudarto menjadi Panglima TNI, diikuti dengan naiknya AWK menjadi KSAD dan R. Simbolon menjadi Pangdam Jaya. Diskusi dilanjutkan pada 20 April, masih bertempat di rumah AWK, namun pesertanya diperluas.

Selain Bondan hadir pula Simbolon, Saurip Kadi, Rahman Tolleng, Franz Magnis Suseno, beberapa perwira menengah, serta aktivis mahasiswa dan aktivis LSM. Hasilnya, diskusi meneguhkan rumusan pertemuan sebelumnya, yakni agar secepatnya dilakukan pergantian kepala dan gerbong di tubuh TNI. Bahkan, disepakati agar Tyasno dan AWK menguasai jajaran TNI dan segera mengusir orang-orang Wiranto, yang dianggap memiliki paradigma lama dalam menempatkan posisi militer dalam politik. Perwira-perwira yang termasuk dalam jaringan Wiranto, antara lain, Agus Widjojo, dan Dansesko TNI Letjen TNI Djadja Suparman. Mereka memang tidak memegang komando, tapi diberitakan pengaruhnya masih cukup kuat di lingkungan AD.[399]

399 Dewi Fortuna, dkk, *Op.cit.*, hlm. 102—103.

Pada pembahasan selanjutnya, dalam sebuah dokumen rapat yang ditujukan kepada Akbar Tandjung disebutkan bahwa dokumen Bulak Kapal dibuat oleh beberapa politisi sipil untuk menggagalkan konsolidasi TNI pro-Gus Dur. Dengan dokumen tersebut pula, perseteruan kubu AWK dan Wiranto semakin sengit.

Hal ini dapat diamati dari gebrakan AWK membongkar skandal korupsi di lingkungan Kostrad pada pertengahan Juli 2000 memancing kemarahan kubu Wiranto. Terungkapnya skandal ini tidak urung meresahkan para senior-senior militer yang mengomandani kesatuan elite, karena merasa khawatir bakal ikut terseret.

Skandal korupsi Kostrad sendiri menyangkut pembobolan Yayasan Dharma Putra, yayasan milik Kostrad, senilai 190 miliar rupiah. Yang menggegerkan, kasus ini menyeret nama Letjen Djadja Suparman, Pangkostrad sebelum AWK, serta sejumlah petinggi Kostrad lainnya.[400]

Djaja Suparman menolak tudingan tersebut, menurutnya tuduhan tersebut hanya untuk membuat opini publik bahwa pimpinan-pimpinan militer itu korup. Selain itu, isu tersebut dapat digunakan untuk mengangkat isu penghapusan bisnis militer dan menghancurkan karier bagi pejabat yang dianggap sebagai lawan politik mereka.[401]

Hal lainnya yang dilakukan AWK yang mengundang ketegangan di kalangan TNI ialah kelompok AWK dinilai mempunyai agenda sendiri. Sebagai contoh, dalam sebuah pertemuan di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat di Bandung, presentasi AWK soal reformasi militer dicurigai ditunggangi kepentingan Bondan Gunawan dan kelompoknya. Kubu AWK juga dituding terlalu eksklusif, dengan menganggap perwira di luar mereka sebagai tidak reformis. AWK membalas

400 Djaja Suparman, *Op.cit.*, hlm. 292.
401 *Ibid.*, hlm. 290.

dengan menyatakan bahwa doktrin Dwifungsi ABRI adalah anak haram Orde Baru, menyulut kemarahan para petinggi di Cilangkap.

Selain itu, AWK dan kelompoknya memiliki tekad untuk segera mungkin menghapus pilar penting Dwifungsi ABRI, yakni komando teritorial. Ide ini tak pelak mendapat banyak sorotan di kalangan militer. Agus Widjojo bahkan secara tegas mengatakan ketidaksetujuannya. Menurut dia, langkah penghapusan komando teritorial tidak mungkin dilaksanakan pada saat itu karena akan menguatkan ancaman disintegrasi.[402]

Tak hanya itu, militer juga sangat jengkel dengan Gus Dur, bukan saja Gus Dur tidak mengedepankan cara militeristik dalam menyelesaikan masalah Aceh dan Papua, melainkan juga Gus Dur sangat simpati terhadap permintaan dunia internasional untuk mengadakan pengadilan bagi pelanggar HAM di Timtim.

Sikap berbeda ditunjukan kepada Megawati. Pada akhir Desember 2000, Megawati mendatangi perayaan ulang tahun Kostrad dengan menggunakan seragam perang Kostrad dan baret hijau. Militer merasa nyaman berhubungan dengan Megawati, karena Megawati dapat tunduk pada tekanan militer dan memiliki naluri nasionalisme konservatif. Megawati juga melihat keinginan tentara untuk mempertahankan negara.

Djaja mengakui dalam bukunya bahwa Megawati lebih menghargai eksistensi TNI.[403] Paling tidak dalam beberapa alasan yang dijabarkan oleh Djaja, hal yang paling menjadi masalah paling mendasar adalah Gus Dur ingin menegakkan supremasi sipil secara drastis, sedangkan Megawati masih berhati-hati dan mau berkompromi dengan militer.

Gus Dur digambarkan sebagai "seorang yang tidak sehat mental dan jasmaninya" karena secara tak masuk akal jelas-jelas

---

402 Dewi Fortuna, dkk, *Op.cit.*, hlm. 79.
403 Djaja Suparman, *Op.cit.*, hlm. 217—224

menentang pemecahan masalah bentrokan horizontal dengan kekerasan. Militer juga marah oleh kecenderungan Gus Dur untuk campur tangan dalam apa yang mereka anggap sebagai urusan internal tantara dan memilih perwira-perwira reformis dalam rotasi rutin jabatan.[404]

ABRI harus dikembalikan kepada fungsi utamanya sebagai aparat yang menjaga keamanan dan pertahanan bangsa dari berbagai ancaman yang datang dari dalam dan luar, bukan menjadi politisi yang mengurus segala macam urusan politik dan jabatan struktural di kekuasaan dan berbagai perusahaan. Namun, Gus Dur berpendapat situasi sosial-politik yang ada tidak memungkinkan hal itu terjadi secara mendadak. Dwifungsi ABRI tak hanya menjadi konsep dalam sistem politik di Indonesia, tetapi juga menjadi ideologi bagi masyarakat Indonesia yang keberadaannya dan pelaksanaannya harus diterima begitu saja.[405]

Sekilas hanya terdapat dua kubu faksi di dalam TNI antara kubu Wiranto dan AWK. Namun, Wakil Kepala BAKIN, Letkol Djuanda menyatakan ada 13 faksi di dalam TNI, ada faksinya AWK (Agus Wirahadikusumah), faksi Wiranto, faksi Prabowo, Benny Moerdani, Feisal Tanjung, ada faksi Angkatan 45, ada Try Sutrisno, TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, ada polisi, ada faksi tradisional, dan lain-lain. Pada intinya, satu pun tidak reformis.

"Mereka itu masih bergaya Orde Baru. Makanya, saya usul kepada Pak Tyasno supaya diadakan dulu itu seminar Angkatan Darat. Agar kita bisa mengoreksi diri. Kita menginginkan tentara yang baik, kok. Negara ini dalam keadaan bahaya, dan kita menginginkan TNI yang baik. Justru keadaan ini menjadi alatnya asing. Motivasinya masih uang, masih politik, masih jabatan," jelas Djuanda.[406]

---

404 Greg Barton, *Op.cit.*, hlm. 452—453.
405 Al Zastrouw Ng, *Op.cit.*, hlm. 161.
406 "*Gus Dur Hanya Percaya 10%*", Majalah Gatra, 10 Juli 2000.

Konflik Ambon dan TNI

Kerusuhan Ambon pertama kali terjadi pada 19 Januari 1999, konflik yang terjadi adalah antarsuku. Awalnya, seorang pengemudi angkutan kota suku Ambon cekcok dengan preman suku Bugis, hal ini dilanjutkan dengan tawuran antarpenduduk kedua kampung yang bersangkutan. Tawuran itu berkembang menjadi kerusuhan yang melibatkan etnik Ambon dan etnik Bugis, Belitung, serta Makassar (BBM) di seluruh kota Ambon.

Akibat kerusuhan yang banyak menimbulkan korban jiwa itu, penduduk BBM mengungsi. Kebanyakan ke Sulawesi, tetapi tidak berlangsung lama mereka berangsur-angsur kembali ke Ambon. Kembalinya mereka ke Ambon karena melihat keamanan yang sudah mulai terkendali. Namun, tampaknya masalah tidak berakhir di sini. Meski sempat kondusif beberapa bulan kemudian, kondisi aman dan terkendali ternyata tidak bertahan lama. Beberapa bulan setelah kerusuhan pertama, pecah kerusuhan kedua.

Realitas keterbelahan antara kaum merah (Kristen) dan putih (Islam) ini yang menjadi faktor komplikatif paling serius dari konflik Maluku. Konflik ini makin diperparah oleh sikap ambivalen dan sikap berpihak dari aparat keamanan.[407] Seharusnya, mereka merupakan pihak yang paling bertanggung jawab menegakkan hukum dan keteraturan. Aparat keamanan sangat diperlukan untuk mencegah luasnya eskalasi kekerasan. Dan ini sebagai prasyarat awal memulai proses resolusi konflik dan rekonsiliasi.

Dengan jernih Gerry van Klinken melihat, konflik Maluku lebih tepat untuk dikatakan sebagai dampak perebutan kedudukan birokrasi, bukan intrik agama. Pada tahun 1990, Maluku memiliki 55.000 pegawai negeri sipil. Jumlah ini lebih besar bahkan dibandingkan Jawa Timur yang penduduknya 17 kali lipat dibanding Maluku.[408]

---

407 "*Konflik dan Bahaya Ingatan Kolektif*", Majalah Gatra, 25 Desember 2000.
408 Gerry van Klienken, *Perang Kota Kecil* (Jakarta: Yayasan Obor, 2007), hlm. 155.

Peralihan kekuasaan dari militer ke gubernur nonmiliter dari jaringan ICMI—pada 1992 Gubernur Maluku tak lagi dari militer, melainkan sipil muslim bernama M. Akib Latuconsina, yang pada saat itu tengah mendapat momentum dari menguatnya kelas menengah Islam di Indonesia, memicu perubahan yang cukup berarti dalam tatanan birokrasi di Ambon.[409] Beberapa pejabat strategis beragama Protestan diganti dengan tokoh-tokoh Islam. Hal ini menimbulkan prasangka bahwa warga lokal yang mayoritas beragama Protestan akan disingkarkan perannya baik secara politik dan ekonomi.

Penelitian Gerry sebenarnya semakin mempertegas penelitian yang dilakukan Parsudi Suparlan (1999)[410] dan Syarif Ibrahim Alqadrie (1999).[411] Secara garis besar, konflik di beberapa tempat di Maluku lebih banyak berakar pada penumpukan rasa dendam, karena perlakuan tidak adil dalam memperebutkan sumber daya ekonomi.

Dalam perjalanan upaya penyelesaian konflik, keluarga Cendana dikaitkan dengan konflik kronis di Ambon. Saat berdialog dengan tokoh masyarakat seusai salat Jumat, di Masjid Al-Munawaroh, Ciganjur, Jakarta Selatan, Presiden Gus Dur sempat menyebutkan orang kaya dan berpangkat di Jakarta sebagai provokator huru-hara Maluku. "Mereka tidak mau melihat perubahan, dan ingin mempertahankan *status quo*, jadi... *ngaco* di sana," katanya.[412]

Dua hari sebelumnya, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, dalam dengar pendapat dengan Komisi I DPR, mengatakan bahwa orang-orang yang pernah duduk di pemerintahan Orde Baru terlibat dalam pertikaian Maluku. Alasannya, untuk menggoyang Gus Dur. Juwono tak merincinya. "Saya tidak tahu nama-namanya," katanya.[413]

---

409 *Ibid.*, hlm. 156.

410 Selengkapnya lihat Jurnal Universitas Indonesia berjudul *Kemajukan, Hipotesis Kebudayaan Dominan, dan Kesukubangsaan*, 1999.

411 Selengkapnya lihat Jurnal Universitas Tanjung Pura berjudul *Konflik Etnis di Ambon dan Sambas: Suatu Tinjauan Sosiologis*, 1999.

412 "*Tuduhan Mesin Ulang Cendana*", Majalah Gatra, 3 Juli 2000.

413 *Loc.cit.*

Dugaan keterlibatan militer dan kroni-kroni Soeharto dalam keterlibatan konflik Ambon bukan tanpa alasan. Pasalnya, para raksasa bisnis di sekitar mantan Presiden Soeharto memiliki puluhan perusahaan yang beroperasi di Maluku.[414] Mereka diindikasikan memiliki kedekatan dengan kelompok-kelompok yang bertikai di Ambon. Keterlibatan mereka dalam konflik secara tidak langsung memberikan keuntungan dengan adanya konflik tersebut.

Setidaknya militer memiliki lima agenda dalam melanggengkan konflik di Maluku. Agenda yang pertama dan paling langsung, membalas oposisi para mahasiswa terhadap dwifungsi ABRI dengan mengalihkan konflik vertikal menjadi konflik horizontal. Kedua, adalah mempertahankan konsep Wawasan Nusantara. Ketiga, mempertahankan struktur teritorial TNI, khususnya Angkatan Darat. Keempat, adalah mempertahankan kepentingan bisnis militer. Kelima, mencegah pemeriksaan dan peradilan para perwira tinggi dan purnawirawan ABRI yang dituduh terlibat kejahatan korupsi serta pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Selain itu, Kapolri Jenderal Roesmanhadi yang menyebutkan bahwa ada permainan elite politik di balik kerusuhan Ambon pada 19 Januari 1999. Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI SBY juga menduga adanya keterlibatan jaringan tingkat nasional yang mengacaukan keadaaan selain masalah lokal.[415] Bahkan, Gus Dur sempat menyatakan bahwa adanya keterlibatan Mayjen K dalam kerusuhan tersebut.

Sedangkan, George Junus Aditjondro menyebut adanya keterlibatan dua orang jendral purnawirawan, tiga orang jendral aktif, dan seorang pensiunan perwira TNI/AU, terlibat dalam jaringan ini. Mereka terdiri dari Jendral (Purn.) Wiranto, Mayor Jenderal Kivlan Zein, Letjen (Purn.) A.M. Hendropriyono,

---

414 Syamsul Hadi dkk, *Disintegrasi pasca Orde Baru*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2007), hlm. 173.
415 *Loc.cit.*

Letjen Djadja Suparman, Letjen Suaidy Marasabessy, Mayjen Sudi Silalahi, dan Mayor TNI/AU (Purn.) Abdul Gafur.[416]

Secara garis besar, George menuliskan sedikitnya ada tiga kekuatan besar yang terlibat dalam konflik Maluku. Pertama, Keluarga Cendana. Kedua, militer—terutama AD—. Ketiga, kelompok Islam garis keras.

Keterlibatan kelompok Islam garis keras dari tokoh-tokoh politisi Poros Tengah seperti Amien Rais, Hamzah Haz, dan Fuad Bawazier, tidak terlepas dari perbedaan pendapat mereka dengan Presiden Gus Dur soal peranan Islam dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Dirintis melalui ICMI di bawah pimpinan BJ Habibie, para politisi Islam itu mengkampanyekan "demokrasi proposional" dalam sistem politik dan ekonomi Indonesia. Alasannya, karena umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia, maka mereka harus mendominasi pemerintahan, tentara, parlemen, dan ekonomi Indonesia, yang menurut mereka saat itu masih didominasi oleh golongan minoritas Kristen dan Tionghoa.[417]

Hal tersebut makin dikuatkan dengan adanya salah satu poin dalam dokumen yang ditulis Fuad Bawazier kepada Akbar Tandjung untuk mendukung gerakan separatis di daerah-daerah. Meskipun, Fuad menyangkal menuliskan hal itu, tetapi M. Fakhruddin Ketua Umum PB HMI saat itu, yang hadir saat perencanaan beberapa gerakan untuk menjatuhkan Gus Dur, mengakui bahwa kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah dibentuk salah satunya untuk mengkritik dan medelegitimasi kepemimpinan Gus Dur.[418]

Menurut data Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Mediasi di Maluku (KPMM), konflik di Maluku atau Ambon dan sekitarnya yang berlangsung hampir 2 tahun telah menelan korban sedikitnya 1.011 orang meninggal dunia

416 George Junus Aditjondro, *Orang-Orang Jakarta di Balik Tragedi Maluku*, 7 Juni 2001.
417 Robert W. Hefner, *Civil Islam* (Jakarta: ISAI, 2000), hlm. 141-142, 147-148, 150, 212.
418 Wawancara M. Fakhruddin di Aceh, 2 Februari 2019.

(jumlah tersebut terhitung sejak Januari 1999 sampai dengan Oktober 2000), sementara di Maluku Utara sedikitnya 2.069 orang meninggal dunia (data tersebut di atas terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2000 sampai dengan tanggal 12 Maret 2000 dan tidak termasuk korban kecelakaan kapal pengungsi yang menuju Manado sejumlah 425 orang serta kecelakaan kapal di Loloda sejumlah 24 orang).[419]

Gus Dur di Mata Media

Gus Dur sering mengeluarkan pernyataan kontroversi, tapi Gus Dur juga sering berkelit dengan caranya sendiri. Pertama, Gus Dur tak mengakuinya itu sebagai pernyataan langsung darinya. Ia menyatakan bahwa isu itu berasal dari pembisik. Kedua, Gus Dur menyalahkan wartawan sebagai tidak lengkapnya menulis atau salah kutip.

23 Februari 2000, Gus Dur menyebut bahwa Jakarta dalam Siaga Satu. Namun, pernyataan tersebut diluruskan oleh Menko Polkam *ad interim* Soerjadi Soedirja yang menyatakan konteks pernyataan Gus Dur adalah dalam konteks sebenarnya menyatakan Indonesia berada dalam keadaan aman dan kondusif bagi investor untuk menanamkan modalnya.[420]

Pada Maret 2000, Gus Dur mendapat tekanan besar. Media massa tak pernah bersimpati lagi padanya. Salah satu alasannya adalah gaya Gus Dur yang sering kali merusak kredibilitasnya. Meski pada situasi yang baik, Gus Dur dapat menjadi komunikator yang baik. Namun sering kali Gus Dur melakukan salah komunikasi sehingga kedudukannya menjadi lemah. Hal itu dipicu karena Gus Dur tak mampu menilai konteks suatu pembicaraan yang melibatkan dirinya. Hal ini dikarenakan Gus Dur tak dapat melihat siapa saja yang ada di ruangannya atau memantau reaksi terhadap apa yang ia katakan.

419 KPP HAM TIM TIM, *Laporan Investigasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur, Maluku, Tanjung Priok, dan Papua* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2003), hlm. 31.
420 M. Anwar Djaelani, *Op.cit.*, hlm. 38.

Alasan serius lainnya adalah kelompok profesional berharap agar Gus Dur dapat memecahkan krisis ekonomi, memperbaiki hubungan antarkelompok, mereformasi militer, mereformasi kepegawaian, mereformasi, dan menciptakan lagi sistem legal yang tradisional hanya dalam enam bulan sampai satu tahun masa kepresidenan Gus Dur.

Faktor ketiga, karena Gus Dur memimpin di masa transisi, ada kekuatan-kekuatan rezim lama yang ingin kembali berkuasa. Bahkan, Gus Dur sering menyebutnya sebagai "kekuatan hitam". Argumen Gus Dur lebih terkesan spekulasi yang tak masuk akal. Karena Gus Dur tidak menyebutkan buktinya.[421]

Melemahkan legitimasi Gus Dur yang paling efektif adalah dengan mensubversi media massa. Hal ini relatif mudah dilakukan karena adanya kebiasaan yang telah tertanam untuk memberikan amplop berisi uang kepada jurnalis. Belum lagi media massa banyak dimiliki oleh anak-anak dan kerabat Soeharto.[422]

Dianggap banyak mengeluarkan pernyataan kontroversi, orang-orang sekitar Gus Dur merasa perlu seorang juru bicara yang dianggap mengerti pernyataan-pernyataan Gus Dur. Oleh sebab itu, Gus Dur pun mengamini saran orang-orang terdekatnya untuk mencari seorang juru bicara.

Pilihan jatuh kepada Wimar Witoelar. Ia dipanggil Gus Dur untuk menjadi juru bicara presiden pada 8 Oktober 2001, pukul 04.00 WIB. Wimar mengingat bahwa Gus Dur hanya menanyakan, "Kapan Anda bisa mulai bekerja? Jika bisa hari ini juga, maka hari ini Anda harus bekerja."[423]

Wimar mengaku tak tahu alasan pasti kenapa Gus Dur memilihnya. "Mungkin karena saya sering membela Gus Dur melalui tulisan saya di media massa," kenang Wimar. Tugas utama Wimar adalah mengondisikan informasi-informasi yang

421 Greg Barton, *Op.cit.*, hlm. 396.
422 *Ibid.*, hlm. 397.
423 Wawancara Wimar Witoelar di Jakarta, 26 Februari 2019.

dapat disampaikan kepada publik dan tidak menimbulkan kegaduhan politik.[424] Tak lama kemudian, humas kepresidenan Gus Dur menertibkan aturan-aturan pers di Istana agar lebih rapi, karena banyak wartawan yang menemui Gus Dur sehingga Gus Dur kelelahan. Saat itu, lawan politik Gus Dur, termasuk unsur-unsur yang bersatu dengan rezim terdahulu sedang memanipulasi media massa secara besar-besaran lewat uang dan intimidasi.[425]

Penanganan Konflik Aceh

Terkait masalah Aceh, legislatif memberikan beberapa rekomendasi agar masalah Aceh segera diselesaikan. Pertama, secepatnya memproses perandilan pelanggar-pelanggar HAM di Aceh baik selama maupun setelah pemberlakuan Daerah Operasi Militer. Kedua, segera mengintensifkan dialog dengan semua komponen masyarakat aceh, termasuk lembaga legislative dan eksekutif di Aceh.

Ketiga, mencegah diberlakukannya keadaan "darurat sipil" atau "darurat militer" di Aceh untuk memberi kesempatan pelaksanaan dialog sebagai prioritas penyelesaian masalah. Keempat, mendesak TNI/Polri untuk menangkap semua provokator dan actor intelektualnya.

Kelima, melaksanakan sungguh-sungguh Ketetapan MPR No. IV/MPR/ 1999 tentang GBHN yang mengamanatkan pemberian otonomi khusus bagi Aceh dan secepatnya bersama DPR menyusun UU tentang otonomi Khusus dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan UU No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh.

Keenam, mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan komitmen pemerintah yang terdahulu seperti menghidupkan kembali pelabuhan bebas Sabang, mempercepat

424 Wawancara Wimar Witoelar di Jakarta, 26 Februari 2019.
425 Greg Barton, *Op.cit.*, hlm. 395.

pelaksanaan bandara dan pelabuhan, pembangunan kereta api, memberi kompensasi material dan spiritual bagi korban-korban pelangaran HAM, serta membangun kembali dan merehabilitasi fasilitas umum yang rusak dan hancur.

Ketujuh, segera menangani pengungsi di dan dari Aceh serta mengembalikan mereka ke tempat tinggalnya dengan menjamin kemananannya. Kedelapan, mengkaji kembali tentang referendum Aceh merdeka. Kesembilan, mengajak semua pihak di Aceh untuk menahan diri guna menciptakan suasana kondusif. Kesepuluh, menetapkan jadwal penyelesaian permasalahan di Aceh secara terinci.[426]

Namun, Gus Dur punya cara sendiri untuk menyelesaikan kasus Aceh. Salah satunya ialah dengan menghimpun dukungan internasional melalui lawatannya ke beberapa negara. Gus Dur sadar bahwa salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya pengakuan dari negara lain, maka Gus Dur meminta agar negara-negara yang dikunjunginya itu tetap bersahabat dengan Indonesia dan memohon agar negara-negara tersebut tak mengakui jika kelak berdiri negara Aceh. Sayangnya, menurut M. Anwar Dajelani, tak pernah ada ukuran yang jelas dukungan dunia internasional untuk Aceh.[427]

Sejak awal, Gus Dur sebagai Presiden RI berbagi tugas dengan Megawati sebagai wakil presiden dalam menangani konflik-konflik yang terjadi di daerah. Gus Dur menangani kasus Aceh, sementara Megawati menangani kasus Maluku. Tujuannya agar tak terjadi lagi masalah-masalah serupa di tempat lain.

Penyelesaian kedua kasus tersebut terbukti sangat sulit. Strategi Gus Dur di Aceh adalah dengan mengantisipasi pengakuan dunia internasional terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada khususnya dan pengakuan terhadap

426 Akbar Tandjung, *Moratorium Politik Menuju Rekonsiliasi Nasional* (Jakarta: Golkar Press, 2003), hlm. 57.
427 M. Anwar Djaelani, *Op.cit.*, hlm. 17.

entitas Aceh Merdeka. Suatu strategi Panjang yang dilakukan melalui serangkaian Panjang ke luar negeri dan strategi yang pada awalnya tak diketahui publik.[428]

Selain itu, dengan seringnya Gus Dur ke luar negeri, hal lain ini dinilai membuat Fordem cukup sulit berkomunikasi dan kurang produktif membantu Gus Dur untuk membahas isu-isu terkini adalah seringnya Gus Dur melakukan perjalanan keluar negeri.[429]

Kritik atas kunjungan Gus Dur ke luar negeri tak hanya pada agenda safarinya ke luar negeri, tapi juga terkait dengan niatnya untuk membuka hubungan diplomasi dengan Israel. Gus Dur ingin membuka hubungan dagang dengan Israel. Alasannya, pertama, Investasi dari luar diharapkan akan mengalir ke Indonesia, sebab meski Israel negara kecil, tapi mereka memiliki lobi kuat berskala internasional di bidang ekonomi. Kedua, melalui hubungan dagang tersebut, Indonesia bisa membuka jalur komunikasi dengan Israel yang kemudian dapat digunakan untuk kepentingan Palestina.[430]

Ahmad Sumargono, Ketua Pelaksana Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam menyatakan, Israel bukan pasar yang menggiurkan bagi produk-produk Indonesia yang bukan *high tech*, terlebih penduduk Israel hanya 6 juta jiwa.[431] Menlu Alwi Shihab berpendapat, "Program utama kita sekarang kan perbaikan ekonomi. Kita sudah merangkul Cina, Singapura, Jepang, India, dan AS. Anda tahu kan perusahaan multinasional di AS umumnya dikuasai keturunan Yahudi. Sekitar 70% keuangan AS dikuasai Jewish Community. Jadi sasaran kita sebenarnya bukan Israel, tapi lobi Yahudi di AS."[432]

Kunjungan Gus Dur ke berbagai negara ASEAN dan Amerika Serikat dianggap sebagai langkah yang positif dari sisi

428 Hermawan Sulistiyo, *Darah, Nasi, dan Kursi* (Jakarta: Pensil 324, 2011), hlm. 50—51.
429 Wawancara Todung Mulya Lubis di Jakarta, 17 Mei 2019.
430 M. Anwar Djaelani, *Op.cit.*, hlm. 22.
431 Ishak Rafick, *Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia* (Jakarta: Ufuk, 2007), hlm. 338.
432 *Ibid.*, hlm. 339.

harapan pemulihan kepercayaan investor setelah ditinggalkan selama dua tahun terakhir. Ada dugaan bahwa setelah kunjungan tersebut investasi mengalir ke Indonesia. Pengusaha-pengusaha Singapura sudah siap memboyong uangnya ke Indonesia, terutama ke Batam dan beberapa daerah lainnya. Akan tetapi, tidak akan semudah itu, karena kelanjutan dan kesinambungan sistem politik baru di Indonesia ini menjadi perhatian investor yang dimonitor terus perkembangannya dari waktu ke waktu.[433]

Berebut Kekuasaan

Selama pemerintahan Gus Dur, terjadi dua kecenderungan konflik atas pertarungan kekuasaan, yaitu pertama, antara Golkar plus militer sebagai sisa-sisa kekuatan *status quo* Orde Baru dengan kelompok politisi luar Golkar. Kedua, konflik di antara para politisi partai-partai yang sejak awal berorientasi reformasi secara gradual.

Menurut Huntington, politik demokratis adalah sebuah sistem yang para pembuat keputusan kolektif paling kuat dalam sistem itu dipilih melaui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk berhak memberikan suara.[434]

Ada lima pola perubahan dari rezim otoriter menuju rezim demokratis. Pertama, pola siklus suatu negara secara berselang-seling menganut sistem otoriter dan demokrasi, masing-masing dengan rentang waktu yang pendek contohnya adalah negara-negara Amerika Latin seperti Argentina, Brazil, Peru, Bolivia, dan Ekuador.

Kedua, pola mencoba untuk kedua kalinya. Suatu negara yang pernah mengalami sistem otoriter yang cukup panjang dengan diselingi percobaan demokrasi dan otoritarianisme baru

433 Didik J. Rachbini, *Ekonomi di Era Transisi Demokrasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 74-76.
434 Samuel Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: Grafiti, 1997), hlm. 4—5.

yang berumur pendek, tetapi pada akhirnya memilih demokrasi yang stabil. Contohnya adalah Jerman, Italia, Austria, Jepang, Venezula, dan Polandia.

Ketiga, pola demokrasi terputus-putus seperti yang dialami India, Filipina, Uruguay, dan Cili. Pola ini mirip dengan pola kedua, hanya saja sudah membentuk sistem demokrasi yang bertahan lama dalam waktu yang lama pula.

Keempat, pola transisi langsung dari sistem otoriter yang stabil ke sistem demokrasi yang stabil juga. Contohnya adalah Rumania, Bulgaria, Taiwan, dan Meksiko. Kelima, pola dekolonisasi adalah tahap demokratisasi yang terjadi melalui pengenalan lembaga-lembaga demokrasi oleh penjajah kepada negara koloninya.[435]

Masalah tidak terletak pada Amien atau Megawati, tetapi pada orang-orang di sekitar mereka. Megawati makin dikuasai oleh beberapa orang yang baru saja bergabung dengan partai, terutama adalah Arifin Panigoro, mantan politisi Golkar yang aktif dan teman dekat Ginandjar Kartasasmita. Ginandjar adalah menteri yang lama mengabdi kepada Soeharto dan dianggap menteri paling pandai, cakap dan paling korup. Jeffrey Winters menuduhnya memiliki kaitan erat dengan Freeport.

Namun, pengamat menilai bukan hanya Ginandjar dan Arifin Panigoro saja, melainkan juga ada Fuad Bawazier. Salah satu orang terkaya di Indonesia dan mantan Direktur Jenderal Pajak serta Menteri Keuangan di era Soeharto. Fuad penyandang dana utama bagi PAN. Pada Agustus 2000 Fuad memiliki pengaruh kuat terhadap Amien dan partainya dengan menjadi Ketua Fraksi Reformasi di MPR, mewakili PAN dan partai-partai islamis.[436]

Amien Rais tidak konsisten dan mendua mengenai dukungannya kepada Gus Dur. Di berbagai kesempatan, Amien menyatakan akan mempertahankan kelangsungan pemerintah

435 *Ibid.*, hlm. 51—55.
436 Greg Barton, *Op.cit.*, hlm. 417.

hasil pemilu 1999—2004. Sementara, di kesempatan lain, Amien justru membuka peluang bagi para politis lain untuk menekan Gus Dur di parlemen terutama setelah pemecatan Jusuf Kalla dan Laksamana Sukardi.[437]

Pada 12 Maret 2001, Amien ikut bergabung demonstrasi bersama pimpinan MPR lainnya, BEM SI, KAMMI, Kammu, dan Gerakan Pemuda Kabah (GPK) menuntut Gus Dur mengundurkan diri. Ini merupakan kegagalan Amien menempatkan diri sebagai ketua MPR. Amien berkilah dengan menyatakan, "Saat itu kami bukan resmi sebagai pimpinan DPR/MPR. Kami datang sebagai wakil rakyat yang melihat puluhan ribu mahasiswa mengepung istana."

PDIP dan Golkar sempat lebih memilih menempuh cara mengeluarkan memorandum dan menolak percepatan Sidang Istimewa (SI) MPR. Akan tetapi, Amien Rais malah sebaliknya. Dalam sebuah wawancara khusus dengan Tempo, Amien ingin segera melaksanakan SI MPR.

"Saya lihat langkah kedua partai besar ini penuh beban, entah psikologis atau politik. Bagi Golkar, tekanan kuat yang mengaitkannya dengan masa lalu rupanya cukup menakutkan. Sementara itu, saya mendengar PDIP merasa saya khianati pada Sidang Umum MPR 1999. Padahal kami konsekuen. Kami antar Gus Dur sampai kursi presiden. Sekarang kami juga yang berkeras menurunkannya. Kini kami bisa menerima Megawati sebagai alternatif."[438]

Melihat keretakan di Poros Tengah membawa berkah tersendiri bagi Golkar dan PDIP. Arifin Panigoro, Ketua Fraksi PDIP begitu antusias mendukung Amien Rais untuk menjatuhkan Gus Dur dari kursi presiden. Kendati demikian, Megawati sampai akhir 2000 masih sangat berhati-hati dengan upaya tersebut. Namun, sikap Megawati didukung dan dipimpin secara informal oleh Taufiq Kiemas (suami Megawati)

---

437 Syamsuddin Haris, *Op.cit.*, hlm. 137.

438 *Ibid.*, hlm. 139.

dan Saifullah Yusuf Ketua GP Anshor dan juga keponakan Gus Dur yang menjadi anggota DPR dari PDIP.

Arifin marah karena Gus Dur berupaya menjerat Arifin melalui kasus-kasus dugaan penyalahgunaan dan publik kelompok bisnis Medco. Arifin diperiksa kejagung dalam kasus pinjaman salah satu sektor usahanya sebesar 75 juta USD dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BUMN). Kelompok Kaukus 11 November, dipimpin oleh Kwik Kian Gie memobilisasi anggota DPR menolak Gus Dur. Kelompok Jenggala, dipimpin oleh Arifin Panigoro.[439]

Pada rapat paripurna 30 April 2001, Akbar Tandjung enggan memimpin rapat. Padahal, ia dan pimpinan lainnya hadir. Interupsi pun banyak terjadi antara fraksi PKB yang terus mempertanyakan dan ingin Akbar Tandjung yang memimpin jalannya rapat dan fraksi Golkar yang membenarkan pilihan Akbar Tandjung yang enggan memimpin rapat. Fraksi Gokkar berpendapat, pimpinan DPR sudah membagi tugas dan Soetardjo dari Fraksi Golkar yang akan memimpin rapat.[440]

Akbar melakukan siasat untuk tidak menjadi orang yang paling bertanggungjawab dalam rapat paripurna yang akan menentukan diadakannya SI MPR. Selain itu, rapat paripurna kali ini diselenggarakan sebagai akibat terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh komponen DPT, mulai pansus hingga forum-forum paripurna. Sebagai ketua DPR, Akbar Tandjung layak dimintai pertanggungjawaban oleh anggotanya.

Saat itu kondisi Gus Dur semakin tersudut oleh elite politik di DPR dan massa anti-Gus Dur menjelang Memorandum II dijatuhkan. Gus Dur sebenarnya mendapatkan dukungan massa dari sebagian warga Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka menamakan diri sebagai Pasukan Berani Mati (PBM) dipimpin oleh Gus Nuril, pengasuh Pondok Pesantren Sindang Guo, Semarang, Jawa Tengah.

---

439 *Ibid*., hlm. 145—146.

440 Rodjil Guhfron, *Skandal Politik SI MPR RI 2001* (Jakarta: Factual Analysis Forum, 2001), hlm. 51—57.

Bahkan, di Warga Nahdliyin (NU) dari berbagai pelosok Jawa Timur itu, mendaftarkan diri untuk menjadi mereka para sebagai anggota Pasukan 'Siap Mati Syahid Membela Gus Dur'.

Hingga awal April, di Jawa Timur, sudah tercatat sekitar 4000 pendaftar, dan beberapa diantaranya adalah para gadis dan ibu-ibu. Diperkirakan jumlah itu akan terus bertambah, karena dalam pengumuman tertulis yang disebarkan ke segala penjuru Jawa Timur (kantung-kantung NU), disebut bahwa batas penutupan pendaftaran 'sampai tak terbatas'.[441]

Kalangan pro-Gus Dur yang fanatik (terutama dari NU dan PKB) memang tengah berjuang keras untuk menyelamatkan kursi kepresidenan dari ancaman DPR yang berkeinginan mengusulkan SI. Pada awal Maret misalnya, para ulama Nahdlatul Ulama (NU), menggelar rapat Bahtsul Matsail yang akan membahas berbagai masalah dari sudut agama, dan salah satunya masalah bughot (pemberontakan politik atau makar).

Sebanyak 40 anggota DPR menjadi target atau menjadi buruan Pasukan Berani Mati (PBM). "Nama saya masuk nomor dua setelah nama Ketua MPR Amien Rais," kata anggota DPR dari Fraksi Reformasi, Alvin Lie Lingpiao, kepada pers di Gedung DPR/MPR.

Ada 40 nama anggota DPR dan MPR termasuk nama Ketua MPR Amien Rais. "Nama Amien Rais ada di urutan pertama, lengkap dengan alamat dan nomor teleponnya. Lalu di urutan kedua nama saya lengkap dengan alamat dan nomor telepon rumah. Semua nama lengkap dengan alamat dan nomor telepon termasuk nama Patrialis Akbar dari Fraksi Reformasi dan Paskah Suzeta Dari Fraksi Golkar," katanya.[442]

Sementara itu, Gus Dur mengaku sangat tidak setuju dengan upaya berlebihan dari pendukungnya membentuk pasukan "berani mati" dengan nama "Front Pembela Kebenaran" yang

441 "*Siap Mati Syahid Membela Gus Dur*", Majalah Gatra, 4 April 2001.
442 "*40 Anggota DPR Diburu Pasukan Berani Mati*", Majalah Gatra, 19 April 2001.

jumlahnya semakin banyak. Meski tidak setuju, Gus Dur juga tak bisa melarang keberadaan FPK, hal itu disampaikan oleh Adhie Massardi, salah satu juru bicara kepresidenan. "Presiden sudah berulang kali mengatakan tidak usah demo dan tak usah ke Jakarta, toh datang juga. Tetapi itu juga akibat situasi yang dipanaskan oleh lawan-lawan Gus Dur," katanya.[443]

Meski tak setuju, Gus Dur juga tetap menunjukkan inkonsistensinya. Di kesempatan berbeda, Gus Dur menyatakan bahwa 400.000 massa pendukungnya siap membela dia jika parlemen berniat melengserkannya. "Mereka datang untuk mengantisipasi Memorandum II," kata Gus Dur. Bahkan, menurut Gus Dur pula, Ketua Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), S.A.E. Nababan, menyatakan siap mengirimkan ratusan ribu anggotanya untuk mendukung presiden.

Gus Dur mengatakan khawatir akan terjadi pemberontakan, karena DPR sangat tak bertanggung jawab dengan cara-cara mereka menurunkan presiden. Gus Dur juga menekankan bahwa Memorandum II tak sah, karena presiden hanya bertanggung jawab kepada MPR, bukan DPR. "Kinerja presiden akan dipertanggungjawabkan kepada MPR pada akhir masa jabatannya," katanya.

Gus Dur mengaku hanya bisa mengimbau agar mereka tak datang ke Jakarta. "Kita hanya bisa mengimbau, karena itu hak asasi manusia," katanya. Kalau yang lain boleh berdemonstrasi menentang presiden, tutur Gus Dur, mengapa yang lain tidak boleh demo mempertahankan presiden. "Kita ini tak senang kekerasan, tapi kita mengerti sebab terjadinya kekerasan," katanya lagi.[444]

Sementara itu, menjelang 30 April, ribuan pendukung Gus Dur dari berbagai daerah terutama Jawa Timur dikabarkan datang ke Ibukota mulai 25 April 2001 dan menduduki

---

443 "*Gus Dur Tak Setuju Pasukan Berani Mati, tapi Tak Melarang*", Majalah Gatra, 4 April 2001.
444 "*Teror Menjelang 30 April*", Majalah Gatra, 23 April 2001.

Gedung DPR/MPR. Mereka antara lain terdiri atas Front Pembela Kebenaran (FPK) yang sebelumnya telah dilatih ilmu kekebalan.

Anggota PBM sebagian besar berasal dari Jawa Timur. Kemudian, ada pula dari Jawa Tengah; Jawa Barat; dan seputar Jabotabek. Sementara dari luar Jawa diproyeksikan akan datang dari Lampung dan Sumatra Utara. Namun, jumlahnya tidak terlampau besar. Sebagian pengurus Ansor di luar Jawa seperti Sulawesi; Kalimantan; NTB; dengan tegas tidak akan mengirimkan 'bala bantuan' ke Jawa.

Kantong-kantong penampungan massa pro-Gus Dur tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Bekasi, dan Depok. Di Jakarta Utara terdapat di: Warakas, Gang 5, Tanjungopriok; Tanah Merah, Cilincing; pesantren di daerah Pademangan; Teluk Gong, Penjaringan. Di Jakarta Selatan: Pamulang; Pondok Cabe Hilir; Jalan Jeruk Purut Pasar Minggu; Ciputat, Kelurahan Bambu Apus; Tebet Timur Dalam.

Jakarta Timur: Klender, Duren Sawit; Jalan Perintis Kemerdekaan; Pulogadung; Kramat Jati, Cililitan; Pulogebang; Kalimalang; Cipayung; Ujungmenteng; Penggilingan, Cakung. Bekasi: Setiabudi, Cikarang; Kaliabang, Bekasi Utara; Kampung Mengkolan. Depok: Jalan Keadilan, Kelurahan Rangkapan Jaya, Pancoran Mas; Kampung Mampang, Pancoran Mas; Bojong Pondok terong, Pancoran Mas. Selain melakukan demonstrasi, mereka berencana akan menghadiri istigotsah yang diinisasi oleh PBNU 29 April dan menghadiri sidang paripurna DPR keesokan harinya.

Kendati demikian, Ketua DPR Akbar Tandjung menegaskan, berapa pun jumlah anggota Pasukan Berani Mati (PBM) yang akan dikirim ke Jakarta dan menduduki Gedung DPR/MPR pada 30 April 2001, tidak akan mempengaruhi keputusan

fraksi-fraksi DPR untuk mengeluarkan Memorandum II untuk Presiden Gus Duru—Gus Dur. Menurut Akbar, pada Rapat Paripurna DPR 30 April mayoritas fraksi-fraksi di DPR telah menyatakan sikap untuk memutuskan Memorandum II yang berlaku satu bulan. Fraksi-fraksi itu termasuk Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Golkar yang keduanya menguasai DPR dan MPR secara mayoritas.[445]

PBM dari kalangan NU—massa tradisional— ini sebenarnya bisa memanfaatkan simpul-simpul gerakan prodemokrasi yang mendukung Gus Dur untuk membuat satu aliansi kekuatan yang cukup besar untuk menandingi demontrasi anti-Gus Dur. Dengan membangun isu bersama anti-Golkar dan sisa-sisa kekuatan Orde Baru menjadikan titik temu diantara keduanya. Dua kubu tersebut sempat bertemu dan sepakat mendukung Gus Dur.

Sayangnya, dalam beberapa aksi, massa yang dijanjikan oleh pimpinan PKB dan PBM dalam praksisnya tak kunjung datang. Pun bila mereka datang, maka jumlahnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan.[446] Ini dianggap sebagai ketidakseriusan massa tradisional. Sedangkan, kelompok massa Islam yang berafilisasi dengan partai politik di parlemen menujukkan kesolidannya. Ditambah dengan organisasi para-militer dan preman-preman juga menambah kekuatan dan juga menyebarkan ancaman serta ketakutan di masyarakat.

Sebenarnya, hal itu dapat dimengerti. Sebab, massa pendukung Gus Dur masih terikat dengan satu kekuatan besar yakni NU. Dalam perjalanan sejarahnya, budaya NU yang patron-klien atau Kiai-Santri cukup "menghambat" gerak massa tradisional ini. Ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi menyatakan bahwa NU tidak mendukung aksi massa.[447]

Alhasil, massa tradisional tak banyak yang datang dan

---

445 "*Kedatangan Pasukan Berani Mati Tak Pengaruhi Keputusan DPR*", Majalah Gatra, 24 April 2001.

446 Max Lane, *Unfinisihed Nation* (Yogyakarta: Djaman Baroe, 2014), hlm. 344.

447 *Ibid.*, hlm. 350.

melakukan aksi di Jakarta. Mereka melakukan aksi berdasarkan wilayahnya saja seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Unjuk kekuatan pro-Gus Dur di Jawa Timur dengan melakukan aksi pendudukan kantor Golkar Jawa Timur. Tak hanya menduduki, mereka juga melakukan aksi perusakan. Seperti yang termuat dalam Harian Bernas, 6 Februari 2001 yang dikutip dalam Max Lane, "Ini (kerusuhan-pen) merupakan akibar dari perilaku elite politik di Jakarta seperti Amien Rais (Ketua MPR) dan Akbar Tandjung (Ketua DPR)... Rakyat di Jawa Timur tidak dapat ditarik mundur lagi."[448]

Hal serupa pun terjadi pada menjelang pembacaan dekrit di bulan Juli. Massa tradisional tetap tak banyak ikut mobilisasi massa di Jakarta. Pada ujung pemerintahan Gus Dur jelas sekali ada korelasi antara konflik di tingkat elite politik dengan perbenturan massa di tingkat bawah di berbagai kota. Contoh mencolok adalah di Surabaya. Kantor Golkar dihancurkan dan dibakar oleh pendukung Gus Dur. Sebaliknya, aksi tandingan juga dilakukan oleh pendukung Golkar untuk menentang Gus Dur. Mereka bersama kelompok lain menyerang kepemimpinan Gus Dur, yang paling mencolok adalah di Makassar.[449]

Peran Hasyim Muzadi sangat menentukan dalam pembatasan massa tradisional yang akan melakukan aksi. Baik secara langsung maupun tak langsung, Hasyim dapat dikatakan memutus Gus Dur dengan massanya.

Oleh sebab itu, yang dilakukan pimpinan PKB hanya sebatas menyatakan tak dapat menghentikan massa tradisional yang ingin datang ke Jakarta. Sebab, secara moral Gus Dur dan PKB membutuhkan dukungan dari luar parlemen. Meskipun, mereka sadar bahwa dukungan luar parlemen tak akan memengaruhi manuver partai politik dan keputusan di parlemen.

---

448 *Ibid.*, 349.
449 Hermawan Sulistiyo, *Op.cit.*, hlm. 53—54.

Memorandum II

Pada 30 April 2001, DPR memberikan Memorandum II kepada Gus Dur. DPR tidak menjalankan rekomendasi hasil Memorandum I. Justru sebaliknya, Gus Dur semakin tidak kompromi dengan parlemen. Bahkan, Gus Dur semakin berani untuk mengejar tersangka-tersangka KKN yang diduga melibatkan Golkar dan sisa-sisa kekuatan Orde Baru.

Dalam pemungutan suara (voting) yang dilakukan secara terbuka pada Senin malam (30/4), mayoritas anggota DPR setuju Memorandum kedua. Dari 457 anggota DPR yang hadir, 363 menyatakan setuju, 52 tidak setuju, dan 42 abstain.

Anggota DPR yang abstain berasal dari Fraksi TNI Polri (38 orang) ditambah Marah Simon (F-PDI), Muhibuddin Waly (F-PDU), Astrid Susanto (FPDKB), dan LS Susanto (F-KKI). Sementara yang menolak berasal dari anggota F-PKB dan F-PDKB.

Hasil voting ini memperkuat pendapat delapan fraksi yang mengusulkan kepada DPR untuk memberikan Memorandum Kedua pada Presiden Gus Dur. Sementara yang menolak untuk mengeluarkan Memorandum Kedua hanyalah fraksi PKB dan fraksi PDKB.

Pada pendapatnya, fraksi TNI/Polri mengambil sikap abstain dan bersikap netral. Posma Lumban Tobing, juru bicara fraksi itu menyatakan bahwa terhadap perbedaan penafsiran antara presiden dan DPR mengenai Tap No III tahun 1978 sebaiknya dikembalikan pada MPR. Sesuai pasal 7 Tap No III Tahun 1978, jika nantinya DPR mengeluarkan Memorandum Kedua, maka presiden akan diberi waktu satu bulan lagi untuk memperhatikan Memorandum tersebut.

Jika presiden dianggap tidak sungguh-sungguh memperhatikan Memorandum tersebut, DPR akan meminta MPR

234 Akbar Tandjung, *Op.cit.*, hlm. 190.
235 *Ibid.*, hlm. 150—151.

untuk melaksanakan SI (SI). Namun dalam tata tertib MPR dinyatakan bahwa MPR mempersiapkan SI dalam waktu dua bulan. Jika DPR meminta diadakan SI oleh MPR, maka SI itu baru dapat terlaksana dua bulan kemudian.

HASIL PEMUNGUTAN SUARA MEMORANDUM KEDUA

Fraksi	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Jumlah
PDI Perjuangan	128		1	129
Partai Golkar	115			115
PPP	50			50
PKB		48		48
Reformasi	40			40
TNI/Polri			38	38
PBB	13			13
KKI	8		1	9
PDU	8		1	9
PDKB			1	5
Non Fraksi	1			1
Jumlah	363	52	42	457

Dalam pandangan akhirnya, hampir semua fraksi yang menyetujui dijatuhkannya Memorandum II menyatakan salah satu alasan diusulkannya Memorandum Kedua karena dalam masa tiga bulan yang ada, presiden bukan memperbaiki

kinerjanya melainkan malah membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversial.

Pernyataan kontroversial itu, antara lain jika presiden mundur maka lima daerah akan melepaskan diri dari negara RI. Pernyataan lain yang kontroversial, jika memorandum kedua dijatuhkan maka akan terjadi pemberontakan nasional, serta pernyataan akan membubarkan DPR.[450]

Sama halnya seperti Memorandum I, pada Memorandum II ini pun tanggapan Gus Dur masih seputar keabsahan Pansus Brunei dan *Buloggate* yang menyeretnya ke dalam konflik eksekutif dan legislatif. "Sebenarnya ada keraguan bagi saya untuk menyampaikan respons atas Memorandum II DPR itu karena alasan landasan hukum dan politik yang masih belum jelas bagi saya," tulis Gus Dur.[451]

Alasan DPR menjatuhkan Memorandum II dengan menyatakan Gus Dur tak memperbaiki kinerjanya terkesan memaksakan. Sebab, pada 28 Mei Jaksa Agung mengirimkan surat hasil penyelidikan kasus Bulog dan Brunei yang menyatakan bahwa Gus Dur sama sekali tak terlibat. Berikut isi surat Jaksa Agung kepada DPR RI Nomor: R-268/A/F/05/2001 tanggal 28 Mei 2001 mengenai hasil penyelidikan kasus Dana Yantera Bulog dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam.

1. Sampai saat ini tidak ditemukan cukup alat bukti yang mengindikasikan Presiden Gus Dur dapat diproses lebih jauh secara hukum dalam kasus Yantera Bulog sebesar Rp.35 Miliar dengan alasan alat bukti yang mengarah ke hal itu hanya keterangan Roesdiharjo yang menurut Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (*unus testis nullus testis*).

450 Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2534/pasca-memorandum-ii-sulit-bagi-presiden-menghin-dar-dari-si,pada 20 Mei 2019, Pukul 13.10 WIB.

451 "*Presiden Menjawab Memorandum Kedua secara Tertulis*", Kompas, 30 Mei 2001.

2. Sampai saat ini tidak ditemukan cukup alat bukti yang mengindikasikan Presiden Gus Dur dapat diproses lebih jauh secara hukum dalam kasus apa yang disebutkan sebagai dana Sultan Brunei Darussalam dengan alasan tidak ditemukan adanya penyimpangan dalam pemberian dana tersebut.[452]

Tim 5 dan Tim 7

Demi mengatasi polemik politik, pemerintah membentuk tim lobi yang terdiri dari dua tim. Dua tim terdiri dari Tim Tujuh dan Tim Lima. Sebenarnya, tak ada instruksi resmi pembentukan tim ini dari Gus Dur, hanya saja, dua tim ini dikelompokan berdasarkan kelompok-kelompok kerja menteri-menteri di bidang Polsoskam. Penamaan Tim Tujuh dan Tim Lima juga muncul dari media massa, bukan dari Gus Dur.

Meski dinamai Tim Tujuh, anggota tim ini terdiri lebih dari tujuh orang yakni Menko Polsuskam (SBY), Menko Perekonomian (Rizal Ramli), Mendagri dan Otda (Surjadi Sudirja), Menkeh-HAM (Baharduuin Lopa), Menhan (Mahfud MD), Jaksa Agung (marzuki darusman), Menlu (Alwi Shihab), Kapolri (Bimantoro), dan Panglima TNI (Widodo AS).

Tim Tujuh secara aktif melakukan lobi ke berbagai pihak, baik pimpinan DPR, MPR, Wakil Presiden, partai politik maupun tokoh masyarakat. Pada 26 Mei 2001, Gus Dur memanggil Marsillam Simanjuntak, Panglima TNI Widodo AS, Menko Polsuskam SBY, dan Kapolri Surojo Bimantoro. Mereka ditugaskan oleh Gus Dur untuk menemui Megawati dan menanyakan jawaban terhadap usulan pelimpahan tugas-tugas konstitusional. Apabila Megawati menolak untuk berkompromi, rencananya presiden akan mengeluarkan situasi darurat hari itu juga pukul 12.00 WIB.[453]

---

452 Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 154.
453 Rodjil Guhfron, *Op.cit.*, hlm. 35.

Setelah menemui tokoh-tokoh publik seperti Nurcholis Majid dan Asman Budisantoso, Tim Tujuh merekomendasikan pembagian tugas kenegaraan dan pemerintahan antara presiden dan wakil presiden. Presiden menyelenggarakan tugas-tugas kenegaraan, sedangkan wakil presiden melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Tim Tujuh juga merekomendasikan agar MA—melalui mekanisme yang berlaku—dapat mengeluarkan fatwa atau pandangan hukum terhadap persoalan dan perdebatan tafsir konstitusi antara pemerintah dengan DPR, khususnya yang berkaitan dengan konstitusional atau tidak konstitusionalnya penyelenggaraan SI MPR dan rencana pengeluaran Dekrit Presiden untuk membekukan/membubarkan DPR dan MPR—ditinjau dari segi subtansi dan prosedur.

Guna dapat memelihara situasi sosial politik dan keamanan pada masa kritis ini, diharapkan jajaran Polri dibantu TNI terus melakukan langkah permisif dan preventif untuk mencegah memburuknya kondisi keamanan nasional, seraya memberikan ruang dan waktu kepada para pemimpin politik dan politisi untuk menyelesaikan permasalahan politik secara damai dan konstitusional.[454]

SBY, menurut Greg Barton, sangat loyal kepada Gus Dur, tetapi realistis dalam percaturan politik. Beberapa kali ia menyatakan harus membantu Gus Dur karena Gus Dur orang tua kita. "Mari kita bantu sekuat tenaga agar Gus Dur tidak jatuh karena beliau itu orang tua kita, Mas Mahfud. Tapi, jika kita tak dapat membendung upaya penjatuhan itu, mengingat perkembangan politik yang seperti ini, mari kita upayakan agar Gus Dur bisa *landing* dengan manis dan tidak dipermalukan," kata SBY.[455]

---

454 "*Tim Tujuh Tak Persoalkan SI MPR*", Kompas, 28 Mei 2001.
455 Mahfud MD, *Op.cit.*, hlm. 114—116.

Pada 8 Mei 2001, presiden memerintahkan Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengumpulkan tanda tangan yang mendukung dekrit, yang direncanakan presiden, dengan batas waktu 21 Mei 2001. Publik tidak tahu siapa saja menteri yang setuju dengan dekrit pembubaran MPR dan DPR oleh presiden.

Seminggu kemudian, 25 Mei, Gus Dur menawari Wakil Presiden Megawati mengenai rencana Keppres Pelimpahan Tugas Konstitusional—semacam Supersemar untuk Megawati. Namun, ia menolak karena yang ditawarkan itu tidak ada dasar hukum. Juga, karena SK 121 sebelumnya ternyata tidak efektif. Megawati lebih memercayai cara-cara yang normatif dan konstitusional. Megawati juga menolak dekrit pembubaran parlemen. Ia justru mendukung SI MPR untuk meng-*impeach* presiden.[456]

Tugas Tim Lima diakui lebih sulit karena ingin mendamaikan hubungan Gus Dur dan Megawati. Setelah Memorandum II, Megawati tampak sengaja menghindari pertemuan dengan Gus Dur. Sebab, parpol-parpol tampaknya sudah bulat untuk menjatuhkan Gus Dur dan jalan mudah itu akan kembali menjadi sulit jika Megawati bersikap kompromi dengam Gus Dur.[457]

Di saat bersamaan, gelombang untuk menaikkan Megawati sebagai presiden semakin gencar. Menurut Amien Rais, SI MPR hampir pasti akan dilaksanakan. "Untuk itu Mbak Mega harus siap-sial lebih aktif memimpin kabinet," kata Amien di Gedung MPR/DPR. Spekulasi mundurnya Presiden atau digelarnya SI MPR, katanya, menunjukan tidak bisa tidak bahwa Megawati harus menjadi Presiden.

Apabila Megawati menjadi Presiden, kata Amien lagi, ada dua hal yang harus dilakukan Megawati. Pertama, bersama TNI

456 Bondan Gunawan, *Hari-Hari Terakhir Bersama Gus Dur* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2018), hlm. 267.
457 *Ibid.*, hlm. 117.

mengatasi separatisme di Aceh dan Papua. Kedua, melakukan *recovery* di bidang ekonomi. Bahkan, Amien mengusulkan agar Megawati aktif bicara dengan IMF dan Bank Dunia, salah satu cara mengatasi penyembuhan ekonomi tersebut.[458]

Setelah Memoradum II diberikan, posisi Megawati dan PDIP tak lagi menunggu dan memperhatikan. Mereka sudah mulai aktif untuk menekan Gus Dur. Bahkan, Megawati Soekarnoputri mengatakan, mekanisme menuju SI MPR tidak bisa dihentikan, karena mekanisme itu merupakan suatu yang mengalir sesuai dengan konstitusi bangsa.[459] Megawati tidak lagi ingin mengadakan kompromi, tetapi hanya menjalankan apa yang dikehendaki konstitusi.

Hal itu yang menyebabkan, kompromi terakhir yang coba dilakukan adalah dengan melakukan *reshuffle* kabinet kembali oleh Gus Dur dengan jumlah menteri dari tiap partai disesuaikan dengan jumlah kursi di DPR. Nama Menteri itu diusulkan oleh ketua umum partai-partai yang ada, bukan dari Gus Dur. Bahkan, Akbar Tandjung memberi saran lebih khusus yaitu tidak semua jabatan Menteri berasal dari parpol, tetapi ada beberapa menteri yang harus diisi oleh profesional seperti Menteri Keuangan, Ketua Bappenas, dan Jaksa Agung. Usulan ini juga segera disampaikan ke PDIP.

Kompromi ini gagal karena PDIP dan PAN sudah memiliki sikap untuk menjatuhkan Gus Dur. Selain itu, Gus Dur juga menolak usulan tersebut. Sebab, Gus Dur bersikukuh bahwa pengangkatan Menteri merupakan hak prerogatif presiden. Oleh sebab itu, nama yang diusulkan juga dari presiden bukan dari ketua umum parpol.

Gus Dur pun melakukan *reshuffle* kembali setelah Memorandum II dan Sidang Paripurna DPR yang ingin melaksanakan SI MPR dengan agenda meminta pertanggung-

---

458 "*Presiden Siap Terima Memorandum II*", Kompas, 26 April 2001.
459 "*Megawati Soekarnoputri: SI Tak Bisa Dihentikan*", Kompas, 15 Mei 2001.

jawaban presiden. Hal ini membawa dampak perubahan bagi komposisi Kabinet terutama Menko Polsoskam. Gus Dur secara mendadak memberhentikan dengan hormat menteri-menterinya antara lain: Menko Polsoskam SBY; Menteri Kelautan dan Perikanan Sarwono; Menteri Muda Percepatan Restruksturisasi Nasional Cacuk Sudarijanto; dan Jaksa Agung Marzuki Darusman.

Gus Dur mengangkat Agum Gumelar sebagai Menko Polsoskam, Marsillam Simanjuntak sebagai Menteri Kehakiman dan HAM, Baharuddin Lopa sebagai Jaksa Agung, Rochmin Dahuri sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Budi Mulyawan Suyitno sebagai Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi.

Dipilihnya Agum Gumelar oleh Gus Dur untuk menggantikan SBY didasari dengan alasan dapat memperbaiki hubungannya dengan Megawati.[460] Alasan lain Gus Dur mencopot SBY dengan Agum Gumelar adalah karena SBY tak menjalankan rencana Gus Dur. SBY lebih mengamankan langkah-langkah konstitusional yang sedang berjalan di DPR.[461]

Ketika bertemu Amien Rais di Universitas Mercubuana, Mahfud menyatakan kepada Amien Rais agar memikirkan ulang rencana SI MPR. Pun, jika SI mesti diselenggarakan, sebaiknya agendanya adalah mencari solusi damai, bukan melakukan *impeachment* terhadap presiden.

Amien mengklaim bahwa saat MPR mengirimkan Memorandum I, ia sudah berkomunikasi dengan Gus Dur yang menyatakan akan mendukung penuh Gus Dur hingga 2004, dengan catatan jangan membuat pernyataan-pernyataan kontroversi lagi.[462]

Kekuatan yang menginginkan perubahan dengan mengganti Gus Dur melalui SI makin tak terbendung. Amien mengatakan,

---

460 "*Kabinet Dikocok Kembali*", Kompas, 2 Juni 2001.

461 Mahrus Ali dan M. F. Nurhuda Y., *Pergulatan Membela yang Benar: Biografi Matori Abdul Djalil* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 244.

462 Wawancara dengan Amien Rais, 9 Januari 2019

padahal kalau Gus Dur mau berkomunikasi dan kompak, kekuatan-kekuatan yang ingin perubahan itu dapat kita bendung bersama.[463]

Amien juga menyatakan, SI MPR tak mungkin diubah lagi dan kejatuhan Gus Dur hanya menunggu sidang itu berlangsung. Semua pimpinan partai setuju menjatuhkan Gus Dur, termasuk Matori Abdul Jalil, Ketua umum DPP PKB. "Justru pak Matori itulah yang paling ganas untuk menjatuhkan Gus Dur," katanya.[464]

Muhaimin Iskandar mencatat, sebagian besar anggota DPR dari PKB termasuk Muhaimin Iskandar patuh terhadap perintah partai yang menyerukan untuk tidak menghadiri SI MPR yang dianggap inkonstitusional. Sedangkan, Matori Abdul Jalil, Ketua Umum DPP PKB mendatangi SI tersebut yang berencana menjatuhkan Gus Dur.[465]

Matori memerintahkan kepada segenap pengurus DPP PKB yang terlibat secara langsung mendukung Gus Dur bersikap konfrontatif terhadap banyak pihak yang berpuncak pada keluarnya Dekrit Presiden, agar mengundurkan diri dari pengurus partai dan dari anggota DPR/MPR. Matori menyebut nama Alwi Shihab, Khofifah Indar Parawansa, Arifin Djunaidi, Khatibul Umam Wiranu, Effendy Choirie, Muhaimin Iskandar. "Omongan harus sesuai dengan tindakan. Oleh karenanya, saya ingin melihat apakah mereka termasuk sontoloyo, ksatria atau ksatria baja hitam," ujar Matori.[466]

Para politisi muda Partai Golkar bergerak dengan politisi-politisi lintas partai dan fraksi mengadang dan menggiring Gus Dur ke posisi politik yang kian tersudut. Sejumlah politisi muda dari enam fraksi besar di MPR memunculkan wacana untuk mempersiapkan rekomendasi yang memungkinkan

---

463 Wawancara dengan Amien Rais, 9 Januari 2019

464 Mahfud MD, *Op.cit.*, hlm. 179.

465 Muhaimin Iskandar, *Gus Dur yang Saya Kenal*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 203.

466 *Ibid.*, hlm. 204.

Presiden Gus Dur ditempatkan sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang Wakil Presiden Megawati.

Melihat situasi politik yang tak terkendali, pada 28 Mei 2001 Gus Dur tak jadi mengeluarkan dekrit, ia hanya mengeluarkan maklumat. Presiden menilai telah terjadi perkembangan menunjukkan tiga hal:

1. Adanya pihak-pihak yang ingin menegakkan demokrasi parlementer tanpa menunggu perubahan UUD 1945 tahun 2002. Berarti telah terjadi pelanggaran konstitusi.
2. Presiden melihat adanya upaya sistematis melalui media massa untuk merusak reputasi seseorang. Media sudah berpihak kepada orang-orang tertentu. Padahal sebuah pers yang benar menurut presiden adalah pers yang berdasarkan fakta, bukan berdasarkan serangan. Pada kesempatan itu dia masih meminta kepada kalangan pers untuk segera memperbaiki diri.
3. Adanya dua kekuatan pro dan kontra terhadap presiden yang akan beradu, di mana dua-duanya ini harus dihindari sekuat-kuatnya. Beliau berharap tidak terjadi malapetaka seperti itu sehingga dikeluarkanlah maklumat itu.

Selanjutnya, Gus Dur mempersilakan juru bicara kepresidenan M. Yahya Staquf untuk membacakan maklumat.

"Berhubungan dengan situasi politik darurat yang kita hadapi karena adanya kontroversi mengenai kemungkinan SI MPR-RI dan kemungkinan dekrit presiden, maka dengan ini saya memerintahkan Menko Polsuskam untuk mengambil tindakan-tindakan dan langkah-langkah khusus yang diperlukan, dengan mengoordinasikan seluruh aparat keamanan secara fungsional, guna mengatasi krisis serta menegakkan ketertiban, keamanan, dan hukum secepat-cepatnya"[467]

467 Rodjil Guhfron, *Op.cit.*, hlm. 38.

Tindakan mengeluarkan maklumat dianggap MPR sebagai pelanggaran serius terhadap konstitusi, karena menyangkut keberadaan lembaga negara yang sangat penting dalam demokrasi, khususnya dalam struktur ketatanegaraan negara. Sebab, saat itu MPR adalah lembaga tertinggi negara yang memiliki wewenang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat.[468]

Pada Rapat Paripurna 30 Mei 2001 untuk menentukan pelaksanaan SI, beberapa kali diskors. Rapat Paripurna yang dimulai pukul 09.00 WIB dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjo Soeritno. Selain Soetardjo, hadir lengkap pimpinan DPR, yakni Ketua DPR Akbar Tandjung, Wakil Ketua DPR Tosari Wijaya, AM Fatwa, dan Muhaimin Iskandar. Pada tiga jam pertama saat rapat dibuka, digunakan untuk berada argumen lewat puluhan interupsi.

Rapat paripurna yang terdiri dari 477 dari 500 anggota DPR baru bisa dimulai setelah dua kali skors. Dalam dua kali skors tersebut, pimpinan DPR dan pimpinan fraksi mengadakan lobi tertutup. Karena ada dua pendapat, Soetardjo mengambil keputusan voting untuk menentukan apakah sidang dilanjutkan atau tidak. Setelah di-*voting*, anggota dewan yang setuju sidang dilanjutkan 426, tidak setuju 46, dan lima abstain.

F-PDIP yang mendapat giliran pertama lewat juru bicara Sophan Sophiaan menguraikan Pasal 7 Tap. No III/MPR/1978 mengenai proses permintaan SI MPR lewat memorandum. F-PDIP menganggap, Memorandum I selama tiga bulan dan Memorandum II selama satu bulan, sudah cukup bagi presiden untuk melaksanakan perbaikan. Namun, F-PDIP menganggap presiden tidak mengindahkan memorandum, bahkan terkesan melakukan tindakan dan langkah yang justru bertolak belakang dengan maksud DPR memberikan Memorandum II tersebut.

---

468 Hamdan Zoelva, *Op.cit.*, hlm. 147.

Pernyataan-pernyataan presiden seperti "akan terjadi pemberontakan nasional" apabila memorandum kedua diterbitkan, pernyataan "akan ada lima daerah yang menyatakan kemerdekaan diri" serta pernyataan "apabila dirinya mundur bangsa Indonesia akan terpecah", merupakan pertimbangan yang "memberatkan" fraksi-fraksi, F-PDIP, F-PG, F-PBB, dan F-PPP, sehingga permintaan SI MPR tidak bisa dibendung lagi.

Permintaan agar DPR meminta MPR melaksanakan SI MPR untuk meminta pertanggungjawaban presiden, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Ayat 4 Tap No. III/MPR/1978, juga disampaikan F-PG lewat juru bicara Evita Asmalda, F-PPP lewat juru bicara Syahrudji Tandjung, dan Fraksi Reformasi lewat juru bicara Sutan Ambiab Boestam.

Fraksi TNI/Polri lewat juru bicara PL Tobing tidak menyebutkan secara tegas permintaan SI MPR, tetapi menyatakan akan menghormati semua keputusan yang diambil dalam rapat paripurna. Fraksi TNI/Polri berharap semua konflik yang terjadi dapat diselesaikan semua pihak melalui proses dan mekanisme secara institusional dan konstitusional dengan dilandasi semangat rela berkorban demi terwujudnya pemerintahan yang efektif.

Rapat Paripurna lanjutan yang dimulai pukul 19.45 WIB setelah diskors berlangsung menegangkan akibat adanya protes dari F-KB yang menggugat keberadaan tiga anggota F-PDIP , yakni Kwik Kian Gie, Laksamana Sukardi, dan Benny Pasaribu. Keberadaan tiga orang itu dipersoalkan F-KB karena dianggap tidak sesuai dengan UU No. 4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPRD. F-KB mempermasalahkan, ketiganya pernah menjadi pejabat eksekutif, tetapi kembali lagi ke DPR, sehingga apa pun keputusan rapat dianggap tidak sah.

Akan tetapi, Soetardjo melanjutkan sidang dengan agenda penting. Karena tidak setuju, F-KB memili WO atau *walk out*.

Hasil voting yang tanpa diikuti F-KB itu menunjukkan 365 anggota Dewan setuju DPR meminta MPR menyelenggarakan SI MPR dengan agenda memindahkan pertanggungjawaban Presiden, 4 tidak setuju, dan 39 absain. Anggota Dewan yang Abstain adalah dari 38 anggota Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Astrid Sulanto.[469]

Selanjutnya, Gus Dur dianjurkan untuk berkonsentrasi menghadapi SI MPR I pada Agustus 2001 untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya, yakni tuduhan pelanggaran terhadap sumpah jabatan dan Ketetapan MPR tentang KKN.

Menurut Akbar, yang sebaiknya dilakukan oleh presiden sekarang ini adalah bagaimana mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi SI MPR. Upaya itu antara lain berusaha melakukan berbagai langkah yang bisa memberikan perubahan terhadap citra dirinya. "Bila Gus Dur melakukan pergantian-pergantian anggota kebinet seperti itu, tidak akan banyak menolong. Kita bisa melihat hal itu sebagai manuver dalam rangka mempertahankan kekuasaannya. Padahal, yang diinginkan, Presiden melakukan langkah-langkah untuk menjamin adanya perubahan terhadap situasi sekarang ini," kata Tandjung.[470]

Sedangkan, di kalangan mahasiswa dan kelompok prodemokrasi masih berupaya untuk mendukung Gus Dur. Salah satunya adalah dengan mengupayakan untuk mempertemukan empat tokoh Ciganjur, Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, dan Sultan Hamengku Buwono X. Namun upaya ini gagal. Kecuali Presiden Gus Dur, ketiga tokoh lainnya tidak hadir pada diskusi "Refleksi Perjuangan Reformasi" di Hotel Indonesia (HI) Jakarta, Minggu (15/7).

"Amien dan Mega masih melirik kiri-kanan dan sepertinya

469 "*SI MPR Minta Pertanggungjawaban Presiden*", Kompas, 31 Mei 2001.
470 "*Sudah Terlambat, "Reshuffle" Kabinet dan Kompromi*", Kompas, 12 Juni 2001.

masih berhitung soal politik. Itu jelas sangat mengecewakan kami," kata Ahmad Hadi Hardilani, Ketua Panitia Pelaksana Diskusi. Ruang diskusi, kemarin sore, disesaki ratusan mahasiswa yang berniat melakukan dialog langsung dengan empat tokoh.

Kedatangan Presiden Gus Dur disambut mahasiswa dengan nyanyian "Bubarkan Golkar" dan "Revolusi Sampai Mati". Mereka berhenti bernyanyi ketika Gus Dur duduk di panggung. Hadi beranggapan, ketidakhadiran tiga tokoh "Ciganjur" ini menyiratkan tidak ada lagi aliansi solid untuk meneruskan reformasi yang dikumandangkan mahasiswa di awal keruntuhan Orde Baru."Kami ingin meminta pertanggungjawaban para tokoh itu, mengapa reformasi sampai bisa dibelokkan," kata Hedi.

Selain Gus Dur, tokoh yang hadir pada diskusi ini antara lain Rachmawati Soekarnoputri. Ketua Umum Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) Sri Bintang Pamungkas, dan mantan Ketua Ikatan Alumni UI (ILUNI) Hariadi Dharmawan. Di luar, di bibir Bundaran HI, puluhan wakil mahasiswa dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia (BEMI) berunjuk rasa menyerukan pemilu dipercepat tanpa Partai Golkar.[471]

Pada kondisi yang terkepung oleh DPR, Golkar, dan Polri, Gus Dur masih berupaya untuk mendapat dukungan dari militer. Namun, Gus Dur sudah kehilangan dukungan dari militer. Tepatnya pada 29 Mei 2001, Gus Dur sempat memanggil empat perwira tinggi TNI yaitu, Kepala Staf Umum TNI, Letjen Djamari Chaniago, Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) Marsekal Madya Ian Santoso Perdanakusumah, Panglima Komando Kawasan Barat Laksamana Muda Putu Ardana, dan Inspektur Jenderal Dapartmen Pertahanan Letjen Djonis Lumintang, untuk membicarakan pergantian Panglima TNI

471 "*Gagal, Upaya Pertemukan Empat Tokoh Ciganjur*", Kompas, 16 Juli 2001.

dan para Kepala Staf Angkatan.

Menurut beberapa sumber, dalam pertemuan itu telah disusun skenario perombakan jajaran petinggi militer di mana Ian Santoso Perdanakusumah diproyeksikan menjadi KSAU menggantikan Marsekal Hanafie Asnan, Djamari Chaniago menjadi KSAD menggantikan Jenderal Endiartono Sutarto, Putu Ardana menjadi KSAL menggantikan Laksamana Indroko Sastrowiryono, serta Djoni Lumintang menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Widodo AS.

Namun, skenario Gus Dur tersebut gagal total, karena para perwira tinggi tersebut menolak jabatan yang disodorkan Gus Dur. Menurut salah seorang perwira tinggi yang hadir dalam pertemuan itu, Djamari Chaniago yang pertama kali menolak usulan Gus Dur, dengan alasan bahwa rencana penggantian itu tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya.[472]

Sikap para perwira tinggi AD, AL, dan AU tersebut akhirnya menjadi sikap resmi TNI. Ini diperlihatkan dengan pernyataan Jenderal Widodo AS dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI, di mana ia menyatakan pergantian pimpinan di jajaran militer harus mengikuti mekanisme yang telah ditentukan. Pengangkatan seorang Kepala Staf Angkatan oleh Presiden harus dilakukan berdasarkan rekomendasi Panglima TNI.

Sedangkan, untuk jabatan lain di bawahnya, melalui keputusan Panglima TNI berdasarkan hasil rapat Wanjakti (Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi. Widodo AS juga menjelaskan sidang yang dilakukan Wanjakti saat itu hanya membahas pergeseran pos bintang dua ke bawah. Pernyataan Panglima TNI tersebut mengindikasikan bahwa peluang Presiden Wahid untuk merombak pimpinan teras TNI sebelum SI MPR 2001 praktis tersudah tertutup.

---

472 Dewi Fortuna dkk, *Op.cit.*, hlm. 83—84.

Ketidakpatuhan TNI dan Polri dalam menjalankan amanat Presiden Wahid mengundang banyak reaksi. Mereka yang tidak setuju melihat apa yang dilakukan TNI adalah suatu pembangkangan. Ini dikaitkan dengan Pasal 10 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Angkatan Udara."

Demikian juga jika dikaitkan dengan sumpah prajurit yang menyatakan bahwa seorang prajurit tidak akan pernah membantah perintah pimpinan. Menurut Menhan (waktu itu Mahfud MD), pelanggaran terhadap hal ini akan berhadapan dengan Pasal 103 Hukum Pidana Militer bahwa prajurit yang dengan sengaja tidak menataati perintah dinas diancam dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 4 bulan.[473]

Reaksi berbeda muncul dari Letjen Sahala Rajaguguk, mantan Wakasad. Ia mengatakan justru Presiden selaku Panglima Tertinggi telah melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, khususnya ketaatan pada hukum dan peraturan. Karena itulah perintahnya tidak perlu ditaati. "Pembangkangan Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan ataupun para prajurit merupakan hal yang sudah sesuai dengan norma-norma yang ada di tubuh TNI," katanya.[474]

Menanggapi pro dan kontra sikap TNI terhadap Dekrit Presiden tanggal 22 Juli 2001, Mabes TNI mengeluarkan pernyataan resmi berkaitan dengan hal tersebut. Dalam pernyataan resmi itu, ditulis bahwa untuk melindungi dan memelihara keutuhan serta kedaulatan bangsa dan negara, pengeluaran dekrit bukanlah satu-satunya solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan bangsa. Lebih lanjut dalam pernyataan ini, juga dijelaskan bahwa sikap TNI didasarkan pada faktor pertimbangan sebagai berikut:

---

473 *Ibid.*, hlm. 85.
474 *Loc.cit.*

Pertama, TNI menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai orientasi kepentingan yang utama.

Kedua, keputusan apapun yang diambil hendaknya dapat menghindarkan keadaan dari segala bentuk tindak kekerasan yang dapat membahayakan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketiga, mampu membangun kondisi untuk mencapai kesepahaman antar-kekuatan politik.

Keempat, mampu menciptakan keadaan yang kondusif bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif untuk mengatasi krisis ekonomi, politik dan disintegrasi bangsa.

Kelima, mampu mengimplementasikan konstitusi pada setiap pengambilan keputusan dalam kehidupan penyelenggaraan negara.[475]

Dengan demikian, Gus Dur sudah tak mendapatkan dukungan dari militer dan institusi negara manapun. Hal ini semakin menguatkan tesis bahwa kondisi darurat sebuah negara hanya dapat dilakukan atas dukungan militer. Pada Memorandum II, Megawati akhirnya membuat keputusan untuk menjatuhkan Gus Dur. Ia mengutus Ryamizard Ryacudu untuk mengarahkan *tank* ke Istana. Kudeta yang dilakukan oleh politisi sipil sekadar tes dan ramai di media saja. Begitu, tentara ikut menjatuhkan Gus Dur, politisi sipil ini seolah mendapatkan angin dan mendapatkan keberanian.[476]

475 *Ibid.*, hlm. 87.
476 Wawancara dengan X di Jakarta, 20 Februari 2019.

SI MPR Dipercepat

Jarak waktu antara Memorandum II dan SI yang semestinya tiga bulan atau paling tidak SI dilaksanakan pada 1 Agustus 2001, nyatanya dipercepat. Faktor yang mempercepat SI adalah pemecatan Kapolri Bimantoro. Menurut Gus Dur, tindakan-tindakan Kapolri Bimantoro sudah melampaui batas. Kesalahan fatalnya adalah dengan melakukan militerisasi di institusi Polri dengan melakukan pembelian senjata standar tempur AK-47 sebanyak 1300 pucuk secara diam-diam. Pembelian itu dilakukan tanpa meminta izin presiden, tetapi hanya dengan meminta persetujuan wapres. Ini jelas mengadu domba presiden dan wapres. Selain itu polri juga sudah melakukan demiliterisasi sejak 1 Juli 2000.

Wakil Ketua YLBHI Munir menyatakan 1000 dari 1300 pucuk senjata AK-47 berjenis AK-102 yang memiliki standar NATO. Dalam aturannya, polisi hanya dibolehkan memiliki senjata M-16. Senjata AK-47 jenis 102 dan 101 tidak pernah digunakan oleh kepolisian di seluruh dunia. Jenis senjata tersebut tergolong senjata standar tempur yang seharusnya dimiliki oleh militer.[477]

Selain itu, temuan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyebutkan Bimantoro diduga terlibat penggelembungan harga untuk pembelian senjata otomatis 14.000 pucuk AK dari Rusia untuk kebutuhan pasukan elite Polri, Brimob senilai 49,9 miliar rupiah. Sesuai kontrak pembelian 12 Oktober 2000, harga pembelian perunit terlalu mahal yakni 360 USD, padahal harga standar di daratan Eropa Timur hanya 252-300 USD per unit.[478]

Bimantoro juga dianggap melakukan KKN di Polri. Ia terlibat dalam skandal pengangkatan teman seangkatan dan perwira binaannya sendiri. Ia bahkan secara diam-diam mengangkat

---

477 Rodjil Guhfron, *Op.cit.*, hlm. 97.
478 *Ibid.*, hlm. 99.

rekan sesama kesatuannya (brimob) untuk menduduki jabatan-jabatan penting. Akibat kebijakan Bimantoro yang memihak kesatuannya sendiri, sejumlah perwira tinggi menganggur. Hingga Juni 2001, terdapat 133 jenderal dan 98 diantaranya menganggur. Bahkan, ketika sudah dinonaktifkan oleh Gus Dur, Bimantoro masih sempat melantik 94 perwira tinggi untuk memperkuat posisi.[479]

Bimantoro yang diangkat oleh Gus Dur pada 18 September 2000 ini resmi dberhentikan oleh Gus Dur pada 1 Juni 2001. Bimantoro tak terima dipecat begitu saja, ia melakukan perlawanan dengan mengumpulkan sejumlah purnawirawan polisi untuk mendukungnya. Sehari pasca-pemecatan, Pengurus Pusat Purnawirawan Kepolisain Negara RI (PP Polri Pusat) menyatakan sikap mendukung sikap Bimantoro yang menolak penggantian dirinya. Sehari berikutya, ia memobilisasi 98 perwira tinggi untuk mengeluarkan pernyataan sikap menolak campur tangan politik dalam internal organisasi Polri.

Bimantoro juga mengadakan pertemuan dengan ketua fraksi penentang presiden di Hotel Darmawangsa atas dukungan Arifin Panigoro. Selasa 5 Juni 2001, Bimantoro menggelar apel siaga bersama TNI—terutama Satuan Setingkat Kompi (SSK)— untuk persiapan SI MPR di silang Monas. Apel tersebut dihadiri aparat personil dari Polda Metro Jaya tampak satu SST (30 personil) kelompok satuan musik, satu SSK (100 personil), Pamen Gegosiator satu SSK (100 personil), Polwan satu SSK Pama, satu SST Provoost Polda Metro. Dari Polantas juga hadir satu batalyon (300 personil) yang dilengkapi dengan 15 kendaraan roda empat dan 15 kendaraan roda dua. Selain itu, personil perintis dari Polda Metro Jaya satu batalyon ditambah satu batalyon perintis Polres.[480] Pada apel siaga Polri itu dijadwalkan hadir Pangkostrad Letjen TNI Ryamizard Ryacudu,

479 *Ibid.*, hlm. 103.
480 "*Puluhan SSK Ikuti Apel Siaga Polri di Jakarta*", Majalah Gatra, 5 Juni 2001.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Sofjan Jacoeb dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Bibit Waluyo. Apel siaga juga diikuti Brimob Polda 7 SSK ditambah 50 unit Pasukan Motor, Dit IPP satu SSK, Diserse 2 SSK, Satpol Air satu SSK. Pasukan dari TNI PHH Kostrad dua batalyon, PHH Kodam 2 batalyon, Yonkaf satu batalyon, PHH Marinir satu batalyon, PHH Paskhas (AU) dua SSK. Sehari berikutnya, Bimantoro menghadap Amien Rais di DPR bersama Sofjan Jacoeb.

Sofjan merupakan loyalis Bimantoro, beberapa kali ia ikut serta Bimantoro menemui anggota DPR—terutama Amien Rais. Bahkan, Sofjan dengan tegas menentang penonaktifan Jenderal Bimantoro oleh Gus Dur. Sofjan menyatakan sampai saat ini Polri tetap satu dan menganggap bahwa Kapolri adalah Bimantoro. Sofjan Jacoeb juga menegaskan bahwa berdasarkan hukum yang sah maka sebagai Kapolri, tetap adalah Bimantoro. "Kami satu suara, dari Mabes Polri maupun Polda-Polda," katanya sambil menyebut bahwa tak ada satu Polda pun yang tidak mengakui Bimantoro sebagai Kapolri.[481]

17 Juli 2001, aparat keamanan TNI-Polri di bawah komando Kapolda Metro Jaya Sofjan Jacoeb dan Pangdam Jaya mengadakan apel bersama bernama "Mantap Brata" di Monas untuk mengamankan SI. Tak hanya Polda Metro jaya dan Pangdam Jaya yang hadir, tetapi juga Amien Rais, Ketua MPR dan para anggota Komisi I DPR.[482] Hal ini semakin menguatkan bahwa komunikasi antara Polri dan DPR/MPR sudah terjalin melalui kapolri Soerojo Bimantoro dan Kapolda Metro Jaya Sofjan Jacoeb. Apel tersebut diikuti enam ribu personel yang terdiri dari 3500 aparat Polda Metro Jaya, 500 personel Mabes Polri dan 2000 anggota TNI. Apel ini dimaksudkan sebagai unjuk kekuatan TNI-Polri yang mengindikasikan sudah tak lagi mendukung Gus Dur.

---

481 "*Apel Siaga Polri-TNI Untuk Evaluasi Tugas dan Antisipasi SI*", Majalah Gatra, 5 Juni 2001.
482 "*Polri Gelar Apel "Mantap Brata" Amankan SI MPR*", Majalah Gatra, 17 Juli 2001.

Mengatasi permasalahan tersebut, Gus Dur mengeluarkan Kepres Nomor 49/2001 pada 1 Juli 2001 yang berlaku retroaktif ke tanggal 30 Juni 2001. Ada tiga hal penting dalam keppres tersebut. Pertama, pencabutan status nonaktif Kapolri jenderal Pol. Soerojo Bimantoro. Kedua, pemberhentian dengan hormat Jenderal Pol. Soerojo Bimantoro sebagai Kapolri. Ketiga, ucapan terima kasih atas jasa-jasa Jenderal Pol Soerojo Bimantoro yang telah disumbangkan pada bangsa dan negara.

Dampak pengangkatan Chaeruddin Ismail sebagai Kapolri dan memberhentikan Bimantoro membuat Polri terbelah menjadi dua kubu antara Chaeruddin Ismail dan Bimantoro. Edy Budiyarso dalam bukunya menggambarkan bagaimana dua kubu tersebut berebut pengaruh. Loyalis Bimantoro termasuk paling kuat, sehingga Bimantoro dapat menahan delapan perwira menengah Polri yang tak loyal kepada dirinya dengan membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Polri.[483]

Ketika situasi politik antara presiden dan DPR semakin runyam, beredar kabar bahwa Gus Dur akan ditangkap oleh Kapolri Bimantoro dan Kapolda Metro Jaya Sofjan Jacoeb terkait kasus *Buloggate*. Info tersebut pun sampai ke Gus Dur. Dikabarkan bahwa pembisik isu tersebut adalah Chaeruddin Ismail.[484] "Tapi kalau dia mau menangkap saya, harus ada tindakan hukum. Siapa yang melakukan ya, Pak Chaeruddin Ismail, sebagai atasannya (bukan Bimantoro-pen)," ujar Gus Dur.[485]

Gus Dur pun semakin berang dan berkoordinasi dengan Menko Polsoskam untuk melakukan tindakan hukum. Tetapi, isu yang berkembang adalah Gus Dur meminta Menko Polsoskam untuk menangkap Bimantoro dan Sofjan Jacoeb.[486] Padahal, tindakan hukum tidak bisa langsung pada tahap penangkapan. Pernyataan tersebut yang berkembang di media sangat disayangkan oleh Wimar Witoelar.[487]

---

483 Edy Budiyarso, *Melawan Skenario Makar* (Jakarta: Pensil 324, 2009), hlm. 174.
484 *Ibid.*, hlm. 22.
485 *Ibid.*, hlm. 24.
486 *Ibid.*, hlm. 23.
487 *Ibid.*, hlm. 25.

Namun, informasi tersebut kadung beredar luas, terutama di kalangan Polri. Komandan Brimob Sjachroeddin Pagaralam segera memerintahkan pasukan Brimob untuk bergerak menjaga keselamatan polri—terutama kubu Bimantoro. Di Polda Metro Jaya—terutama di pos belakang, berderet senjata api laras panjang. Pos ini terletak persis di samping gedung tempat Sofjan Jacoeb bekerja.[488]

Namun, Bimantoro tetap melawan atau melakukan insubordinasi. Ia bersama Kapolda Metro Inspektur Jenderal Pol Jaya Sofyan Jacob dan Pangdam Jaya Mayjen Bibit Waluyo berencana membentengi Senayan untuk menjatuhkan Gus Dur. Ia menurunkan 40.000 polisi dan 50 panser milik kodam. Di sekitar Senayan juga dibentengi kawat berduri dan pagar *fiberglass*, tujuannya untuk menahan massa pendukung Gus Dur yang menolak SI MPR.[489]

Dinamika juga terjadi di DPR antara Golkar dan PKB. Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Khatibul Umam Wiranu, menyatakan ada konsultasi terjadi antara Tandjung, Ketua Umum Partai Golkar dengan Marzuki Darusman salah seorang Ketua Partai Golkar yang duduk dalam posisi Sekretaris Kabinet. "Jadi, itu (pelantikan Pemangku Sementara Jabatan Kapolri) merupakan saran Akbar Tandjung melalui Marzuki Darusman," kata Khatibul.

Sebelumnya, saat melantik Wakil Kapolri Komisaris Jendral Chaeruddin Ismail (20/07) sebagai Pemangku Sementara Jabatan Kapolri dan menaikan pangkatnya menjadi jenderal. Pimpinan MPR melakukan antisipasi, kemudian mengundang Rapat Paripurna dan terjadilah SI MPR. Presiden kepleset dengan melantik Chaeruddin. Saat memberikan sambutan, Presiden mengemukakan, pelantikan Chaeruddin Ismail atas persetujuan Ketua DPR Akbar Tandjung. Namun, itu dibantah

488 *Ibid.*, hlm. 27.
489 Rodjil Guhfron, *Op.cit.*, hlm. 130—131.

Akbar Tandjung. "Tidak pernah saya mengatakan demikian," kata Tandjung.[490]

Dengan tindakan menaikkan Chaeruddin Ismail menjadi Kapolri, dapat memberi kesan Gus Dur sedang menarik kembali Polri sebagai alat kekuasaan. Terlebih, Gus Dur tidak melakukan konsultasi atau pembahasan bersama dengan DPR.

Gus Dur melanggar ST-MPR Tahun 2000 yang mengambil keputusan untuk mengeluarkan TAP MPR No. VII/MPR/2000 yang mengatur untuk mengangkat/memberhentikan Panglima TNI dan Kapolri, Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR. Gus Dur menawarkan jabatan Dubes Malaysia untuk Bimantoro, tapi ditolak oleh Bimantoro. Tindakan Gus Dur tersebut menaikkan ekskalasi konflik politik di antara fraksi-fraksi DPR untuk mempercepat SI MPR.

Pimpinan MPR bersidang dan kemudian mengundang anggota MPR untuk melangsungkan Rapat Paripurna. Dalam rapat konsultasi pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi MPR, Partai Gokar sempat keberatan dengan percepatan SI MPR, meski akhirnya ia harus mengalah dengan arus mayoritas fraksi yang mengehendaki percepatan SI MPR. Realitas politik menunjukkan bahwa 592 anggota MPR menyetujui percepatan SI MPR. "Itu forum pengambil keputusan tertinggi," ujar ketua MPR Amien Rais usai rapat paripurna menanggapi orang yang mempertanyakan keabsahan percepatan SI MPR.

Menteri Negara Otonomi Daerah Ryaas Rasyid menceritakan bahwa ide *impeachment* saat SI MPR dilaksanakan, digagas oleh Amien Rais. Lantas, Amien melobi Taufiq Kiemas. Mereka berdua pada awalnya bertemu di Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru. Tapi, Taufiq bukan hanya dilobi oleh Amien Rais, Taufiq Kiemas juga banyak dilobi oleh politisi Islam lainnya. Pertemuan antara Taufiq Kiemas dan para politisi tersebut juga berbeda-beda.

490 "*Kepleset Pelantikan Chaeruddin*", Kompas, 22 Juli 2001.

Kadang-kadang di masjid setelah salat jumat. Terakhir di Kantor Pusat Pengurus Muhammadiyah.[491]

Megawati awalnya tidak bersedia. Musababnya, Megawati merasa belum siap menjadi presiden. Apalagi ia menganggap situasi politik belum kondusif. Taufiq membutuhkan waktu yang cukup lama untuk meyakinkan Megawati. "Sampai suatu ketika Gus Dur dinilai semakin ngawur, baru Megawati sadar, ia harus diganti," kata Ryaas.[492]

Gus Dur menanggapi alasan MPR mempercepat SI karena pencopotan Bimantoro. Semestinya, ucap Gus Dur, jika persoalan pengangkatan Jenderal Pol. Chaeuddin Ismail yang menjadi dasar SI MPR 2001, maka prosedur yang harus dilalui adalah pelayangan Memorandum dengan hak jawab presiden terlebih dahulu. Namun, hal itu tidak dilakukan oleh MPR, itu tentu melanggar ketentuan UUD dan tata tertib MPR sendiri.[493] Oleh sebab itu, Gus Dur menegaskan kembali sikapnya untuk tidak datang dan SI MPR 2001 harus dianggap sebagai kegiatan ilegal atau tidak sah.

Sementara itu, lima fraksi besar di DPR yakni Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PPP, Fraksi Reformasi, dan Fraksi PBB terus aktif melakukan pertemuan-pertemuan menjelang SI MPR, bahkan sudah memiliki kesepakatan. Pertemuan tersebut disepakati tidak hanya menyoroti manajemen pemerintahan Gus Dur yang tak memuaskan, tetapi juga menanggapi kemungkinan politik pasca Gus Dur lengser.

Menurut Bachtiar Chamsyah, Fraksi PPP menyepakati mempercepat SI MPR tanpa menunggu 1 Agustus 2001.[494] Gus Dur memberikan tugas kepada Menko Polsoskam Agum Gumelar dan Mehan Mahfud MD untuk membentuk tiga tim lobi yaitu tim lobi presiden, tim lobi MPR, dan tim lobi fraksi di DPR. Tujuan tim lobi tersebut untuk melakukan lobi-lobi

---

491 Derek Manangka, *Op.cit.*, hlm. 97.

492 Tjipta Lesmana, *Dari Soekarno Hingga SBY, Intrik dan Lobi Para Penguasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 227.

493 Rodjil Guhfron, *Op.cit.*, hlm. 145.

494 "*Lintas Fraksi Capai Titik Temu*", Republika, 19 Juni 2001.

jika SI MPR terlaksana dan mencari solusi terbaik untuk menyeselaikan kemelut politik.[495] Setidaknya agenda SI MPR untuk meminta pertanggungjawaban presiden, bukan untuk melakukan *impeachment*.

Namun, tim lobi ini gagal menjalankan tugasnya, bukan hanya fraksi MPR sudah bulat menjatuhkan Gus Dur, melainkan juga tim lobi ini tak terorganisasi dengan baik. Khatibul Umam misalnya, mesti melobi ketua fraksi, tapi adanya senioritas di dalam partai membuatnya tak dapat menemui dan melobi pimpinan fraksi di DPR.[496] Hal itu dirasa sulit, sebab setidaknya ada empat aspek yang harus dipenuhi oleh presiden agar DPR menerima pertanggungjawabannya yaitu hubungan legisliatif, eksekutif, dan yudikatif; mengenai pertanggungjawaban presiden; mengenai kinerja presiden; dan hubungan presiden dan Wapres.[497]

Tim Lobi	Anggota	Tugas
Tim Lobi Presiden	Khofifah Indar Parawansa	Melobi Ketua Umum Parpol
	Alwi Shihab	
	Mahfud MD	
	Muhaimin Iskandar	
	Masduki Baidawi	
Tim Lobi DPR	KH Jusuf Muhammad	Melobi sesama Anggota DPR
	Ali Masykur Musa	
	Andini Nadjmi	
	Erman Suparno	

495 "*Menhan Mahfud akan Melobi Partai Politik*", Kompas, 7 Juni 2001.
496 Wawancara dengan Khatibul Umam Wiranu, 10 Maret 2019.
497 "*Hindari Empat Hal di SI MPR*", Kompas, 24 Juni 2001.

Tim Lobi Fraksi DPR	Khatibul Umam Wiranu	Melobi agar SI MPR mendapatkan titik kompromi
	Suseno Yusuf	
	Nurhasan	
	Rojil Gufron	

Seperti diketahui, untuk menggelar SI-MPR, Badan Pekerja (BP) MPR telah merancang empat rancangan ketetapan (rantap) antara lain: pertanggungjawaban presiden, pemberhentian presiden, penetapan wapres sebagai presiden, dan pengangkatan wapres. Namun, dalam dinamikanya, BP-MPR tidak menetapkan rantap tentang penerimaan pertanggungjawaban presiden.[498] Pada tahap ini, Gus Dur hanya akan menghadapi rantap pemberhentian presiden.

Sebenarnya, Fraksi PKB melalui Ali Masykur Musa mengusulkan satu rantap "kompromi" yakni Rantap Rekonsiliasi Nasional sebagai agenda SI-MPR. Beberapa media menganggap rantap ini hadir karena Jaksa Agung Baharuddin Lopa memeriksa anggota DPR yang dianggap terjangkit KKN.

Saat itu, Baharuddin Lopa mulai meminta keterangan dari beberapa politisi seperti Akbar Tandjung, Arifin Panigoro, dan Nurhadin Halid atas beberapa kasus, telah menimbulkan reaksi keras dari DPR. Komisi II DPR, bahkan, memanggil Jaksa Agung untuk menjelaskan tindakan tersebut dalam forum raker.

Namun, Hamdan Zoelva, Fraksi PBB menyatakan kemunculan rantap tak ada kaitan dengan kinerja Jaksa Agung Baharuddin Lopa dalam menyelidiki anggota DPR yang dianggap melakukan KKN.[499] Dan memang rantap kompromi tak pernah dibahas oleh anggota DPR lainnya, penjatuhan Gus Dur hanya tinggal menunggu waktu.

498 "*Soal Pertanggungjawaban Presiden: Rantap Penerimaannya Tidak Disiapkan*", Kompas, 8 Juni 2001.
499 "*Rantap "Kompromi" Tak Ada Kaitannya dengan Gebrakan Lopa*", Kompas, 21 Juni 2001.

Selain melakukan lobi melalui menteri-menteri dan anggota PKB terhadap pimpinan partai politik lain di DPR, Gus Dur juga mengusulkan adanya percepatan pemilu. Hal itu dilakukan jika DPR tetap bersikeras menuntut pertanggungjawaban presiden pada SI MPR.[500]

Gus Dur sadar bahwa untuk mengeluarkan dekrit atau pemberlakuan situasi darurat membutuhkan dukungan dari militer. Oleh sebab itu, 22 Juli 2001 Letjen TNI Johny Lumintang, Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan diberitahu Panglima TNI Laksamana Widodo AS bahwa Gus Dur akan mengangkat dirinya sebagai Wakil Panglima TNI. Tujuannya tak lain untuk mendapatkan dukungan dari militer baik di kesatuan maupun di DPR melalui fraksi TNI/Polri. Johny pun menyatakan bahwa dirinya siap, tapi tidak ingin bernasib seperti Chaeruddin Ismail.[501]

Saat Widodo AS dan Johny menghadap Gus Dur. Pimpinan TNI yakni KSAD, KSAL, KASAU, Kepala BAIS, Pangkostrad Ryamizard Ryacudu mengadakan rapat darurat di Departemen Pertahanan. Widodo As pun langsung menuju Dephan setelah bertemu Gus Dur. Rapat tersebut menolak Johny sebagai Wakil Panglima TNI.

Widodo ditugaskan untuk menyampaikan hasil rapat tersebut kepada presiden. Widodo lantas menghubungi Johny untuk kembali menemui Gus Dur. Johny tak terkejut dengan keputusan tersebut, ia menyarakan agar jangan menyampaikan bahwa Pimpinan TNI menolak keputusan Gus Dur. Sebab, Presiden merupakan panglima tertinggi TNI. "Katakan saja bahwa TNI menilai jabatan Wakil Panglima saat ini belum diperlukan," kata Johny. Gus Dur sangat kesal dan marah mendengar jawaban Widodo AS dan Johny. Bahkan, Gus Dur menggebrak meja melampiaskan kemarahannya. Akan tetapi, Gus Dur tak mengeluarkan kata-kata.[502]

---

500 "*Presiden: Masih Ada Opsi Percepatan Pemilu*", Suara Pembaruan, 23 Juni 2001.
501 Tjipta Lesmana, *Op.cit.*, hlm. 212.
502 *Ibid.*, hlm. 213—214.

Dua hari sebelum pembacaan dekrit, Fadjroel mengatakan di kelompok prodemokrasi—termasuk Fordem—terdapat dua pendapat yang berkembang yakni meninggalkan Gus Dur atau tetap mendukung Gus Dur. Kedua pendukung gagasan ini saling menahan diri sambil terus mengikuti dinamika politik yang sangat cepat. Fajdroel bersama generasi kedua Fordem mengingatkan tak mungkin meninggalkan Gus Dur. Sebab, Gus Dur merupakan sosok penting dalam kekuasaan yang dinilai mampu menyelesaikan transisi demokrasi.[503]

Sedangkan, Rahman Tolleng menyatakan ini bukan lagi masalah Gus Dur, melainkan masalah demokrasi dan kelangsungan sejarah. Sebab, jika Fordem terus mendukung Gus Dur, maka akan ada kekhawatiran kelompok baru akan mengambl alih demokrasi dan keberadaan Fordem menjadi terancam.[504] Rahman Tolleng ingin siapa pun yang berkuasa akan tetap bisa menjalankan demokrasi sebagaimana mestinya. Selain itu, Fordem bisa menjalin hubungan dengan siapapun yang berkuasa dan tetap dapat menjaga kritisisme.[505]

Satu malam sebelum pembacaan dekrit, Fadjroel bertemu dengan Gus Dur, Marsillam Simanjuntak, dan Muhaimin Iskandar. Gus Dur masih bertanya tentang perlu tidaknya mengeluarkan dekrit. Fadjroel menyatakan, kalau pun harus mengeluarkan dekrit, maka cukup membubarkan Golkar dan mempercepat pemilu tanpa harus membubarkan parlemen.[506]

Bukan tanpa sebab, Fadjroel menolak membubarkan parlemen. Musababnya, jika Gus Dur membubarkan parlemen, maka akan membangkitkan penolakan atau perlawanan dari DPR. Sedangkan, jika hanya membubarkan Golkar, ada kemungkinan partai-partai lain masih mau mendukung Gus Dur. Selain itu, dengan membubarkan Golkar dan mempercepat pemilu

503 Wawancara Fadjroel Rahman di Jakarta, 27 Maret 2019.
504 Wawancara Fadjroel Rahman di Jakarta, 27 Maret 2019.
505 Wawancara Fadjroel Rahman di Jakarta, 27 Maret 2019.
506 Wawancara Fadjroel Rahman di Jakarta, 27 Maret 2019.

paling tidak satu tahun, maka diprediksi Golkar akan sulit untuk mengonsolidasikan kekuatan.

Generasi kedua Fordem ikut turun ke jalan mendukung Gus Dur di akhir-akhir sebelum dekrit diumumkan. Budi menyatakan keikutsertaan aksi tersebut lebih kepada perjuangan moral untuk membedakan dengan kelompok anti-demokrasi yang dipimpin Amien Rais.[507]

Pada waktu yang hampir bersamaan, Fadjroel sempat menghubungi Eros Djarot, Anggota PDIP yang juga pernah aktif di Fordem, sebelum penjatuhan Gus Dur. Fadjroel meminta bantuan Eros untuk meyakinkan Megawati agar tetap bersama Gus Dur. Sebab, jika Gus Dur jatuh, maka demokrasi akan diambil alih oleh eks orde baru dan kroni-kroninya. "Ini sudah tidak bisa dipertahankan," kata Fadjroel menirukan Eros Djarot.[508]

Rahman Tolleng menyatakan bahwa Fordem mesti membuat pernyataan untuk menyatakan bukan menjadi bagian yang terus mempertahankan kekuasaan, agar tidak disalahkan oleh pemerintah baru.[509] Rahman ingin memiliki jaringan baik kepada siapapun yang berkuasa. Tujuannya, agar kritisisme bisa terus terjaga.

Media Menjelang Dekrit

Yayasan Pantau menghadirkan sebuah laporan lengkap bagaimana media—terutama televisi—menayangkan hari-hari menjelang dan sesudah dekrit yang dikeluarkan oleh Gus Dur. Singkatnya, laporan yang berjudul "Kecepatan, Ketepatan, dan Perdebatan" menuliskan bagaimana media televisi memanfaatkan histeria kekacauan politik antara Gus Dur dan DPR. Akibatnya, media hanya mengejar rating dan pendapatan, tanpa dapat memverifikasi pernyataan narasumber.

507 Wawancara Budi Murdono di Jakarta, 24 Maret 2019.
508 Wawancara Fadjroel Rahman di Jakarta, 27 Maret 2019.
509 Wawancara Budi Murdono di Jakarta, 24 Maret 2019.

Menurut AC Nielsen, antara Sabtu 21 Juli dan Senin 23 Juli, SCTV mengantungi 3.182 miliar rupiah dari iklan program berita. RCTI mengantongi 1.741 miliar rupiah, Indosiar 1.380 miliar rupiah, TPI 683 juta rupiah, Antv 523 juta rupiah, serta Metro TV 282 juta rupiah. Menurut lembaga pemeringkat AC Nielsen peringkat Metro TV, Senin dini hari itu berkisar 0,3 sampai 1,2. Ini berarti 0,3 persen sampai 1,2 persen penduduk Indonesia nonton Metro TV. Jika populasi Indonesia 200 juta, maka yang menonton 600 ribu sampai 2,4 juta orang. Sebagian besar mereka ada di Jakarta karena jangkauan Metro TV paling banyak di ibukota. Ini cukup besar mengingatnya baru beroperasi sejak Desember 2000.[510]

Jika pada mengacu pada dokumen yang dituliskan oleh Fuad Bawazier, rencana ia dan kawan-kawanya di DPR untuk memaksimalkan media televisi untuk mengekspos kegagalan hingga penjatuhkan Gus Dur dapat dikatakan terbukti atau berhasil. Catatan Pantau menyebutkan bahwa media cetak dianggap kurang relevan oleh masyarakat karena tak menyediakan kecepatan, meski banyak melewatkan prinsip verifikasi dan penyuntingan informasi.

Dalam beberapa kesempatan, Gus Dur juga mengeluh kepada media. Ia menuduh sejumlah media massa memutar-balikkan atau memelintir sejumlah pernyataannya. Presiden mengemukakan contoh surat kabar *Media Indonesia* yang baru-baru ini menurunkan wawancara dengan Hakim Agung Artidjo Alkostar bahwa Artidjo pernah dihubungi Presiden untuk menjadi Jaksa Agung menggantikan almarhum Baharuddin Lopa.

Gus Dur juga menyebut majalah *Panji Masyarakat* yang pernah menurunkan tulisan hasil wawancara putri bungsunya, Inayah, padahal Inayah merasa tidak pernah diwawancarai.

510 Diakses dari http://www.andreasharsono.net/2001/09/kecepatan-ketepatan-perdebatan.html?m=1, pada 4 Juni 2019, Pukul 19.45 WIB.

"Itu semua isapan jempol yang dulu saya biarkan, sebab kalau saya adukan maka pers akan ketakutan," katanya.[511]

Wimar mengatakan, hubungan Presiden dengan wartawan sangat baik. Hanya saja, ketika sudah akan terbit kebijakan redaksinya membuat *angle* berita yang cukup pedas dan bahkan cenderung menyudutkan Gus Dur. "Ini konsekuensi yang harus diterima karena Gus Dur tak punya media," ujar Wimar.[512]

Pada kasus ini, politik kekuasaan belum mendasari empat persoalan mendasar. Pertama, kalau Gus Dur diganti Megawati dan Akbar Tandjung, pasti akan ada reaksi keras dari NU. Bagaimana politik kekuasaan menangani reaksi tersebut. Kedua, pendekatan tersebut belum mempertimbangkan kemampuan duet Megawati-Akbar.

Ketiga, kesepakatan tersebut belum menyingung secara eksplisit nasib peran reformasi peran TNI. Hal ini meragukan kemampuan koalisi PDI-P dan partai Golkar untuk tegas menegakkan supremasi sipil. Keempat, sistem politik masih setengah-setengah antara presidensiil dan parlementer.[513]

Detik-Detik Pembacaan Dekrit

Sore hari, 22 Juli 2001 Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Letnan Jenderal Ryamizard Ryacudu memimpin "apel bersama dalam rangka kesiapan jajaran Tentara Nasional Indonesia di wilayah Jakarta. Apel tersebut dihadiri 2.100 pasukan gabungan dari 21 Satuan Setingkat Kompi (SSK) yang berasal dari Kostrad, paskhas, Kodam Jaya, Marinir Armabar serta Kopassus. Dalam apel tersebut, pasukan juga dilengkapi dengan 30 panser jenis Scorpion milik Kosrad, 25 tank milik Marinir, tiga unit panser legkap dengan roket serta puluhan tank dari Kodam Jaya. Sebelumnya, pasukan melintas di Jalan Rasuna Said, Jalan Diponegoro, Jalan Kramat Raya dan Jalan Medan Merdeka Barat.

511 "*Gus Dur: Saya Tidak pernah Mengatakan Akan Mengeluarkan Dekrit*", Majalah Gatra, 20 Juli 2001.
512 Wawancara Wimar Witoelar, 26 Februari 2019.
513 Indra Surya Lubis (ed), *Op.cit.*, hlm. 24.

Pada Minggu, 22 Juli 2001, Istana Negara penuh sesak. Tamu-tamu dan massa menunggu pengumuman Dekrit Presiden yang dijadwalkan akan keluar pukul 18.00 WIB. Pada pukul 19.05 WIB, Gus Dur baru/hanya mengeluarkan *statement* berikut:

- Presiden menegaskan tak akan mundur.
- Presiden memerintah Fraksi TNI/Polri menarik dukungan atas percepatan SI MPR.
- Presiden akan mengeluarkan keputusan penting pada pukul 22.00 WIB (mulanya pukul 18.00 WIB)

Sebenarnya, anggota kabinet menolak rencana Dekrit Presiden. Hal itu sudah disampaikan Menlu Alwi Abdurrahman Shihab kepada Gus Dur. Upaya terakhir Gus Dur untuk memperoleh dukungan TNI/Polri—melalui Menko Polsoskam merangkap Menhan Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar, Panglima TNI Laksamana TNI Widodo Adi Sutjipto, dan Gubernur Lemhannas Letjen TNI Johny Josephus Lumintang—juga gagal.[514]

Malam hari, Ryamizard memasuki lapangan Monumen Nasional dengan mengendarai panser.

"Bismillahhirrahmannirahim," Ryamizard Ryacudu membuka pidatonya. "Pangdam Jaya, Komandan Korp Marinir, Danjen Kopassus, Panglima Kohanudnas, Pangkop AU, dan Paskhas, panglima Armabar, dan seluruh prajurit TNI terutama yang berada di daerah Jakarta Raya yang saya hormati, saya cintai dan yang sangat saya banggakan." Secara singkat Ryacudu mengatakan tujuan apel itu adalah "membangun kekompakan" antara semua prajurit. Dia mengingatkan pada 1998, kekompakan itu terganggu ketika "Kita diadu-adu sehingga timbul perkelahian di antara kita."[515]

Tindakan Ryamziard tersebut atas perintah oleh Megawati

514 Bondan Gunawan, *Op.cit.*, hlm. 273.
515 Diakses dari http://www.andreasharsono.net/2001/09/kecepatan-ketepatan-perdebatan.html?m=1, pada 4 Juni 2019, Pukul 19.45 WIB.

untuk memberi pesan kepada Gus Dur secara tersirat bahwa militer sudah tak bersama Gus Dur. Sebab, Megawati sudah jengkel dengan Gus Dur.[516] Melihat keberanian militer, politisi-politisi sipil di DPR seperti mendapatkan keyakinan untuk benar-benar melakukan SI MPR untuk menjatuhkan Gus Dur. Sebelumnya, fraksi-fraksi belum bulat dan masih mempertimbangkan untuk menggelar SI MPR pada 1 Agustus 2001.[517]

Malam hari, suasana istana seperti pasar: ramai sekali dan penuh ketegangan. Berbagai kelompok khususnya kalangan LSM dan petinggi pemerintahan, berdatangan untuk memberikan moral kepada Gus Dur pada detik-detik terakhir perlawanannya kepada Amien Rais, Akbar Tandjung dkk. Sebelumnya, pada 19.05 WIB, presiden melaksanakan konferensi pers di istana. Pada kesempatan tersebut, Gus Dur menyatakan tak akan mundur sebagai presiden.

Gus Dur pun memerintahkan Fraksi TNI/Polri di MPR untuk menarik dukungannya atas percepatan SI MPR. Beberapa jam setelah menerima laporan Panglima TNI tentang penolakan TNI atas penunjukkan Johny Lumintang sebagai Wakil Panglima TNI.[518]

Tepat pukul 01.10 WIB Senin dini hari, Presiden Gus Dur, di Istana Merdeka Jakarta, memberlakukan Dekrit yang berisi pembekuan DPR dan MPR dan Partai Golkar serta mempercepat Pemilu. Berikut adalah Pidato dan Maklumat Presiden selengkapnya :

"Pertama-tama saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada anda semua karena telah membuat anda menunggu begitu lama karena prosesnya tidak gampang.

Selama beberapa hari ini saya telah dibanjiri, baik oleh LSM, beberapa Parpol, ormas-ormas dan juga kalangan agamawan,

516 Wawancara dengan X, 20 Februari 2019.
517 Wawancara dengan X, 20 Februari 2019.
518 Tjipta Lesmana, *Op.cit.*, hlm. 214.

dan beberapa pihak lainnya yang mewakili rakyat, meminta agar saya memberlakukan dekrit.

Hal ini mencapai puncaknya, kemarin (Minggu 22/7), beberapa parpol utama berkumpul di Jl. Kebagusan, rumah Ibu Megawati Soekarnoputri (Wapres). Saat keluar dari sana, Mas Amien Rais (Ketua MPR RI) mengatakan bahwa dalam beberapa hari ini akan ada pemimpin nasional yang baru.

Dari apa yang kita diketahui, mengenai pertemuan itu jelas bahwa mereka tidak dapat mengendalikan keinginan orang-orang yang ini dan memaksa saya turun dari jabatan kepresidenan.

Sebetulnya masalah ini tidak ada masalah apa-apa. Tapi masalahnya adalah bahwa kalau saya turun atau diturunkan maka beberapa provinsi jelas akan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Padahal sumpah saya adalah memelihara keutuhan teritorial sebagai bagian dari memelihara integritas bangsa ini. Dengan demikian, jika dibiarkan akan ada dua buah pemerintahan kembar di negeri kita. Sesuatu yang tidak boleh terjadi karena mengakibatkan kekacauan yang luar biasa besarnya dalam kehidupan kita berbangsa.

Karena itu dengan berat hati selaku Presiden Indonesia maupun sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Indonesia, saya umumkan pemberlakuan Dekrit. Dekrit ini akan dibacakan Yahya Staquf (juru bicara Presiden) mengenai bunyi redaksionalnya. Sedangkan kita mulai bekerja besok pagi. Dalam hal ini, saya minta agar TNI dan Polri mengamankan pelaksanaan pengumuman ini dan memberlakukan dekrit.

Salah satu diktum ini adalah pembekuan DPR dan MPR karena itu TNI dan Polri berkewajiban untuk menghalangi adanya Sidang Istimewa yang akan digelar besok pagi karena tidak boleh ada pemerintahan tandingan di sebuah negara.

Dan terpenting adalah perlu saya nyatakan bahwa terjadi sebuah kejadian menarik bahwa hampir seluruhnya, baik itu dari masyarakat sendiri, kalangan pemerintah, TNI dan Polri, menyambut dengan baik dekrit ini.

Maka saya minta saudara Yahya Staquf untuk membacakan diktum-diktum tersebut. Yahya Staquf:

MAKLUMAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Setelah melihat dan memperhatikan dengan saksama perkembangan politik yang menujupada kebuntuan politik akibat krisis konstitusional yang berlarut-larut yang telah memperparah krisis ekonomi, dan menghalangi usaha penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, yang disebabkan pertikaian kepentingan politik kekuasaan yang tidak mengindahkan lagi kaidah-kaidah perundang-undangan.

Apabila hal ini tidak dicegah akan segera menghancurkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka dengan keyakinan dan tanggung jawab untuk menyelamatkan negara dan bangsa, serta berdasarkan kehendak sebagian besar masyarakat Indonesia, kami selaku Kepala Negara Republik Indonesia, terpaksa mengambil langkah-langkah luar biasa dengan memaklumkan:

1. *Membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan rakyat.*
2. *Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu satu tahun.*
3. *Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.*

Untuk itu kami memerintahkan seluruh jajaran TNI dan Polri untuk mengamankan langkah-langkah penyelamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang serta menjalankan kehidupan sosial dan ekonomi seperti biasa.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridoi bangsa dan negara Indonesia.

Jakarta, 23 Juli 2001

Presiden Republik Indonesia/
Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI,

KH Abdrurahman Wahid.

Sayangnya, harapan Gus Dur agar TNI/Polri melaksanakan dan mengamankan pelaksanaan dekrit ini gugur. Dari TNI, memang sedari awal rencana dekrit sudah ditolak. Sikap TNI dan TNI AD yang menolak pemberlakuan dekrit atau keadaan bahaya oleh presiden, menurut Wakil Kepala Staf TNI AD (Wakasad) Letjen Kiki Syahnakri bukan merupakan pembangkangan tapi bentuk kesetiaan dari pimpinan TNI dan TNI AD kepada pimpinan yang lebih tinggi. Bentuk "pembangkangan" seperti itu, menurut Kiki, dimungkinkan apabila perintah yang diberikan atasan sudah jelas-jelas melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, atau secara pasti melanggar etika keprajuritan, serta apabila sudah terjadi perubahan situasi.[519] Dengan kata lain, Gus Dur sudah dianggap melanggar Sapta Marga, maka melakukan perlawanan merupakan sebuah keharusan.

519 "*Wakasad: Penolakan Dekrit Bukan Bentuk Pembangkangan*", Majalah Gatra, 10 Juli 2001.

Sedangkan, upaya Gus Dur untuk mendapat dukungan Polri dengan menaikkan Chaeruddin Ismail menjadi Kapolri pun tak kunjung membuahkan hasil. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Sofjan Jacoeb menginstruksikan jajarannya agar tetap menjalankan tugasnya untuk mengamankan jalannya SI MPR dan tidak terpengaruh dengan terbitnya Dekrit Presiden. Irjen Sofyan Jacoeb di Jakarta, Senin dini hari, menegaskan bahwa aparatnya tetap melaksakanan tugas "Mantap Brata 8", yang intinya mengamankan jalannya SI (SI) MPR. Bahkan, Kapolda pada pagi, 23 Juli sudah barada di kompleks MPR Senayan untuk mengawasi langsung jalannya pengamanan kompleks, terutama sejak diberlakukanya Dekrit.[520]

Melihat situasi ini, Gus Dur mengeluarkan dekrit antara lain membubarkan Golkar. Akbar sebagai Ketua umum Golkar dan juga ketua DPR, mengirim surat ke Mahkamah Agung (MA). Dalam surat itu, Akbar mengatakan bahwa tidak menyetujui adanya dekrit Gus Dur.

Pertama, bertentangan dengan konstitusi. Kedua, karena melanggar hukum. Dan karena itu, Akbar sebagai ketua dewan mengirim surat kepada MA Akbar bertindak mewakili atas nama pimpinan dewan, meminta fatwa hukum kepada MA terhadap tindakan Gus Dur dengan mengeluarkan dekrit.[521] Adapun surat yang dimaksud sebagai berikut.

520 "*Polda Metro Jaya Tolak Dekrit, tetap Amankan SI MPR*", Majalah Gatra, 23 Juli 2001.
521 Wawancara dengan Akbar Tandjung, 24 Januari 2019.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270

Jakarta, 23 Juli 2001

Nomor : KS.02/3709.A/DPR RI/2001
Sifat : **Rahasia**
Derajat : **Sangat Segera**
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Fatwa Mahkamah

KEPADA YTH.

Agung

SDR. KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

J A K A R T A

Berkenan dengan dikeluarkannya **Dekrit Presiden R.I.** pada tanggal 23 Juli 2001 pukul 01.10 WIB yang menetapkan:

1. Pembekuan MPR dan DPR RI;
2. Pembekuan Badan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum dalam waktu 1 tahun;
3. Pembekuan Partai Golongan Karya sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung;

Selaku Pimpinan DPR RI dengan ini saya menyatakan menolak Dekrit Presiden R.I. tersebut dengan alasan antara lain karena bertentangan dengan jiwa dan semangat konstitusi khususnya Penjelasan Umum UUD 1945. Oleh karena itu diharapkan agar Mahkamah Agung R.I. segera **MENGELUARKAN FATWA** berkaitan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden R.I. tersebut di atas.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

K E T U A,

AKBAR TANJUNG

Tembusan:

1. Yth. Pimpinan MPR RI
2. Yth. Ketua Fraksi-fraksi DPR RI

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 Juli 2001

Nomor : KMA/419/VII/2001.
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Fatwa Mahkamah Agung

Kepada Yth.

SDR. KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Di

J A K A R T A

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 23 Juli 2001 Nomor: KS.02/3709.A/DPR RI/2001 perihal pada pokok surat tersebut di atas, maka dengan ini Mahkamah Agung R.I. memberikan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan dikeluarkannya Dekrit sebagaimana dinyatakan dalam Maklumat Presiden R.I. pada tanggal 23 Juli 2001 pukul 01.10 WIB sebagai berikut:

I. Hal Pembekuan MPR-RI dan DPR-RI:

a. Bahwa berdasarkan Penjelasan UUD 1945 angka VII dibawah sub judul Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat, disebutkan bahwa "Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan Sistem Parlementer)."

b. Bahwa Para Anggota Dewan Derwakilan Rakyat karena kedudukannya adalah juga anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan pasal 2 UUD 1945 beserta Penjelasan Umum Sub Judul VII dan berdasarkan Bab II bagian pertama Pasal 2 UU-RI No.4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c. Bahwa Presiden yang diangkat oleh Majelis, tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UUD 1945 Sub Judul III tentang Kekuasaan Negara yang Tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

d. Bahwa oleh karenanya ditinjau dari segi ketentuan hukum, Presiden tidak dapat membekukan DPR RI, apalagi membekukan MPR RI.

II. Hal Pembentukan Badan guna menyelenggarakan Pemilihan Umum dalam waktu satu tahun:

Bahwa mengenai pembentukan Badan guna menyelenggarakan Pemilihan Umum dalam waktu satu tahun di atas adalah kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor XIV/MPR/1998 tentang perubahan dan tambahan atas ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat R.I. No. III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum dan Penanggung Jawab pemilihan umum adalah Presiden, berdasarkan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

III. Hal pembekuan Partai Golongan Karya sambil menunggu putusan Mahkamah Agung RI:

a. Bahwa kewenangan membekukan Partai Politik ada pada Mahkamah Agung R.I berdasarkan Pasal 17 ayat (2) undang-undang RI Nomor: 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

b. Bahwa tindakan membekukan Partai Golongan Karya oleh Presiden, merupakan tindakan mencampuri kewenangan Badan Peradilan, sebab tentang masalah dibekukan atau tidak dibekukannya Partai Golongan Karya justru pada saat ini sedang dalam proses peradilan di Mahkamah Agung.

c. Bahwa selain daripada itu, dalam tindakan Presiden membekukan Partai Golongan Karya tidak dijelaskan secara cermat tentang pertimbangan yang menjadi alasan Partai tersebut harus dibekukakn, bertentangan dengan asas hukum yang berlaku dalam Hukum Administrasi Negara bahwa keputusan administrative harus didasarkan pada motivasi dan pertimbangan hukum yang jelas.

d. Bahwa pada dasarnya pemakaian istilah "Maklumat" dalam Pidato Presiden tanggal 23 Juli 2001 pukul 01.10 WIB tersebut tidaklah tepat sebab dalam tata urutan perundang-undangan menurut hukum ketatanegaraan kita tidak dikenal suatu produk hukum yang disebut Maklumat (vidr Ketetapan MPR Nomor: III/ MPR/2000).

e. Bahwa oleh karenanya tindakan pembekuan Partai Golongan Karya oleh Presiden adalah bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, sehingga dengan demikian pembekuan tersebut tidak berkekuatan hukum.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah Agung R.I berpendapat, bahwa dikeluarkannya Dekrit Presiden sebagaimana dinyatakan dalam Maklumat Presiden R.I tersebut di atas bertentangan dengan hukum.

Demikianlah pertimbangan hukum Mahkamah Agung R.I dan harap dijadikan maklum.

KETUA
MAHKAMAH AGUNG R.I

BAGIR MANAN

Tembusan:
1. Yth. Pimpinan MPR RI
2. Arsip.

Gus Dur memberikan penjelasan atas dekrit yang ia pilih dan tempuh dengan segala keterpaksaan. Menurut Gus Dur, keputusan itu dipicu pertanyaan Ketua MPR Amien Rais yang menyatakan bahwa sebentar lagi akan ada pemimpin nasional yang baru. "Itu artinya mereka tidak dapat mengendalikan orang-orang yang ingin memaksa saya turun dari jabatan Presiden. Kalau saya diturunkan, maka beberapa provinsi akan melepaskan diri dari NKRI. Padahal saya disumpah untuk menjaga keutuhan teritori. Karena itu dengan berat hati, selaku panglima tertinggi angkatan perang saya memberlakukan dekrit," kata Gus Dur. "Saya sudah memerintahkan TNI/Polri untuk mengamankan keputusan ini dan akan kerja esok pagi. TNI/Polri berkewajiban menghalangi pelaksanaan SI MPR karena tak boleh ada pemerintah tandingan," tegasnya.[522]

Sebenarnya, Gus Dur bisa saja selamat dari pemakzulan tanpa perlu mengeluarkan dekrit untuk membubarkan Golkar dan parlemen. Gus Dur mendapat sebuah tawaran akan didukung penuh, tetapi mesti harus mengeluarkan dekrit syariat Islam untuk Indonesia.[523] Tawaran tersebut datang menjelang pemberlakuan dekrit, seorang Anggota DPR dari PKB Ali As'ad meminta Mahfud MD untuk mempertemukan beberapa orang tersebut kepada Gus Dur.

Jika Gus Dur mau dekritkan berlakunya Syariat Islam di Indonesia, maka jutaan orang dari kami bisa datang ke Jakarta untuk mengamankan dekrit itu. Jika aparat tak mau melaksanakaannya, maka kami yang akan melakukan tindakan untuk melaksanakannya. Perintah Kepala Negara harus dilaksanakan," kata salah satu dari mereka kepada Mahfud terkait materi yang akan dibicarakan kepada Gus Dur.[524] Mahfud menolak usulan tersebut dan tidak akan melanjutkan pertemuan dengan Gus Dur. Ketika Mahfud menceritakan

---

522 "*Presiden Berlakukan Dekrit*", Kompas, 23 Juli 2001.
523 Wawancara dengan Mahfud MD di Jakarta, 19 Juni 2019
524 Mahfud MD, *Op.cit.*, hlm. 123.

pertemuan tersebut dengan Gus Dur, Gus Dur menolak tawaran tersebut.

Sayangnya, gerakan pro-Gus Dur tak terkoordinasi dengan baik. Awalnya Gus Dur juga mengharapkan dukungan massa NU untuk mendukungnya, tapi begitu polarisasi semakin tajam, Gus Dur tak lagi ingin menggunakan NU.[525] Gus Dur lebih memilih dirinya jatuh, ketimbang memanfaatkan NU dan NU mendapat citra buruk setelah Gus Dur jatuh.

Saat semua menteri dan kekuatan politik sudah beralih ke Megawati, Gus Dur pun sempat mencurigai bahwa Marsillam juga akan berkhianat meninggalkannya. Bahkan Marsillam sempat dicurigai sebagai Brutus—Istilah Brutus mengacu pada Markus Yunius Brutus, seorang senator Romawi yang berkhianat dan telibat pembunuhan Julius Caesar.[526] Marsillam secara pribadi tak setuju dengan adanya dekrit. Ia menyatakan bahwa konsep dan isi dekrit sudah Gus Dur dimiliki dan diserahkan kepadanya beberapa jam sebelum pembacaan dekrit oleh Yahya Cholil Staquf.[527]

Marsillam menyatakan tak akan mungkin meninggalkan Gus Dur, meski memang harus diakui memiliki kesalahan dan kekurangan dalam memimpin. Tapi, bagaimana pun, lanjut Marsillam, Gus Dur itu merupakan teman baiknya dari kecil. Jadi, sampai jatuh pun, Marsillam akan tetap menemani, "Gus Dur itu teman main bola dari kecil. Kalau harus tenggelam pun, ya tenggelam bersama-sama."[528]

Sementara itu, Pernyataan bahwa beberapa provinsi akan lepas dan memerdekakan diri dari Indonesia sudah beberapa kali Gus Dur sampaikan. Hal ini dapat dianggap sebagai ancaman kepada parlemen untuk menghendaki kompromi politik dengan Gus Dur.

---

525 Wawancara Budi Murdono di Jakarta, 24 Maret 2019.
526 Wawancara Budi Murdono di Jakarta, 24 Maret 2019.
527 Wawancara Marsillam Simanjuntak di Jakarta, 15 Januari 2016.
528 Wawancara Marsillam Simanjuntak di Jakarta, 15 Januari 2016.

Gus Dur Jatuh

Pada 1 Juni 2001, Gus Dur menegaskan bahwa dirinya tidak bersedia turun karena Indonesia menghadapi masalah disintegrasi bangsa. Gus Dur menyayangkan lawan-lawan politiknya yang tak mau mengadakan kompromi politik. Gus Dur mengancam akan melawan habis-habisan apabila menyangkut eksistensi negara atau integritas wilayah. "Saya sebagai presiden yang dpilih, tentu punya plihan sendiri. Orang-orang yang berpengaruh di daerah dan bukan pejabat pemerintahan adalah orang yang mengatakan kepada saya bahwa beliau menyatakan proklamasi kemerdekaan daerah masing-masing, jika saya diturunkan!"[529]

Sementara itu, saat Gus Dur mengumumkan dekritnya, Amien Rais menghubungi Fuad Bawazier. Saat itu, Amien bersepakat dengan Fuad untuk mengadakan rapat sebagai bentuk perlawanan atas dekrit Gus Dur di Gedung DPR/MPR. Mereka juga menghubungi dan meminta Sekjen MPR Umar Basalim untuk mengadakan rapat pukul 09.00 WIB bersama seluruh anggota DPR lainnya.[530] Walaupun, Umar sudah membagikan undangan SI pada 18 Juli 2001.[531] Dalam undangan itu, para anggota MPR diminta kehadirannya di Jakarta pada 19 Juli. Hal itu untuk mengantisipasi ancaman pemberlakuan dekrit keadaan bahaya dan pembubaran DPR pada 20 Juli.

Sedangkan, hingga 20 Juli, Gus Dur membantah pernah menyatakan akan mengeluarkan dekrit, padahal yang akan dilakukannya hanyalah menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Dia hanya ingin mengumumkan negara dalam keadaan bahayadengan status darurat sipil, bila kompromi tidak tercapai. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya menginginkan MPR mengeluarkan Ketetapan tentang masukan MPR bagi

529 Tjipta Lesmana, *Op.cit.*, hlm. 190 & 214.
530 Wawancara dengan Fuad Bawazier di Jakarta, 25 Januari 2019.
531 Diakses dari https://www.liputan6.com/news/read/16710/sekjen-mpr-undangan-si-sudah-disebar, pada 4 Mei 2019, Pukul 21.30 WIB.

pertanggung-jawaban Presiden pada akhir masa jabatan tahun 2004.[532]

Amies Rais menyerukan kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang dan bekerja seperti biasa. Amien saat itu didampingi seluruh pimpinan fraksi termasuk Matori Abdul Djalil (F-PKB) dan Hari Sabarno (F-TNI/Polri). Ia menyerukan kepada TNI/ Polri untuk tetap berpegang teguh pada Sapta Marga, Tribrata, dan Catur Prasetya. Amien melanjutkan, karena dikeluarkannya dekrit, agenda sidang berubah menjadi pencabutan mandat dari Presiden Gus Dur. "Kalau tidak ada halangan, Selasa besok kita sudah memiliki presiden baru dengan mengangkat Megawati menggantikan Abdurahman Wahid," tandas Amien.[533]

Pada 23 Juli 2001, pukul 01.00 WIB, Akbar menyatakan sempat berkomunikasi dengan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan bahwa DPR meminta untuk mengeluarkan surat meminta fatwa hukum dari Mahkamah Agung karena tindakan Gus Dur mengeluarkan dekrit. Akbar berharap supaya mahkamah agung memperhatikan surat DPR.[534]

Untuk diketahui, Bagir Manan pun merupakan anggota ICMI. Gus Dur tak begitu setuju dengan dua calon Hakim MA yang disodorkan namanya oleh DPR pada seleksi hakim MA akhir November 2000. Dua calon tersebut adalah Muladi dan Bagir Manan dianggap partisan dan bagian dari penguasa sebelumnya. Pada seleksi tahap akhir, sebenarnya Muladi mendapat nilai tertinggi dibandingkan dengan Bagir Manan. Muladi yang juga mantan Menteri Kehakiman memperoleh nilai rata-rata tertinggi: 8. Sedangkan, Mantan Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Bagir Manan, menempati urutan kedua dengan nilai 7,5.

Melalui Juru Bicara Kepresidenan Wimar Witoelar, Gus Dur sudah sempat melontarkan komentar. Masyarakat dan DPR agar

---

532 "Gus Dur: Saya Tidak pernah Mengatakan Akan Mengeluarkan Dekrit", Majalah Gatra, 20 Juli 2001.

533 Diakses dari https://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/14/09/05/nbewk729-moncong-senjata-arah-istana, pada 9 Juni 2019, Pukul 11.40 WIB.

534 Wawancara dengan Akbar Tandjung di Jakarta, 24 Januari 2019.

berhati-hati memilih calon Ketua MA. "Jangan sampai memilih calon yang partisan politik dan loyal pada rezim masa lalu," kata Gus Dur, seperti ditirukan Wimar saat itu.[535] Bahkan, Presiden Wahid enggan mengangkat dua calon pilihan DPR—Bagir dan Muladi. Pihak DPR pun ngotot tak mau memprosesnya lagi.

Proses pemimilihan MA pun berlarut-larut. Hingga, pada Februari 2001, Muladi mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai Ketua MA. Ia lebih memilih menjadi Ketua Habibie Center. Akan tetapi, dalam sebuah wawancara, Muladi mengungkapkan alasan pengundurannya karena ia tak mau dijadikan korban konflik politik. "Dengan pengunduran diri ini, saya harap tensinya akan sedikit mereda. Paling tidak, saya tak terlibat konflik itu. Saya kira, pengunduran diri saya ini pengunduran yang berbudaya. Kalau saya mau, tidak usah ke Gus Dur. Langsung saja diumumkan, pasti akan timbul pro-kontra yang keras," tutur Muladi.[536]

Setelah sempat tertunda satu tahun. Akhirnya, Gus Dur melantik Bagir Manan pada 19 Mei 2001. Gus Dur menyatakan bahwa "Saya dengar katanya Pak Muladi itu lebih terkonsentrasi ke Habibie Centre," kata Gus Dur. "Lalu saya tanyakan ke DPR apakah ada calon lagi. Ternyata tidak ada, makanya saya tandatangani SK ini," kata Gus Dur.[537]

Pelantikan yang terkesan terpaksa oleh Gus Dur ini mau tak mau harus dilakukan olehnya agar pemerintahan tetap berjalan. Tak hanya itu, pelantikan Bagir juga dapat dikatakan upaya Gus Dur untuk berkompromi dengan DPR demi menyelamatkan pemerintahannya setelah mendapat ancaman *impeachment*. Gus Dur sangat mengharapkan Ketua MA dapat "satu kubu" dengannya, karena ia membutuhkan fatwa MA untuk membubarkan Golkar.

---

535 "*Ketua MA Diwarnai Selera Partisan*", Majalah Gatra, 4 Desember 2000.
536 *"Korban Politik Karet", Majalah Gatra, 26 Februari 2001.*
537 "*Bagir Manan Siap Bersihkan Lantai Pengadilan*", Majalah Gatra, 5 Mei 2001.

Namun, yang diharapkan Gus Dur malah tak terjadi. MA justru malah memberikan fatwa bahwa dekrit yang dikeluarkan Gus Dur inkonstitusional.

Beberapa jam kemudian MA merespon surat yang Akbar sudah kirim. Pada pagi hari pukul 07.00 sudah keluar fatwa hukum MA. Dengan adanya surat MA, Akbar sebagai ketua DPR meminta SI dan merespons dekritnya Gus Dur. Akbar langsung menyerahkan surat itu kepada seluruh anggota MPR memang sudah siap-siap lakukan SI. Dengan pernyataan MA, bertentangan dengan kontitusi, maka MPR sepakat untuk mencabut mandat Gus Dur.[538] Sedangkan, Fuad Bawazier meyakini bahwa sebenarnya, fatwa MA hanya pelengkap saja. Dengan atau tanpa ada Fatwa MA, Gus Dur pasti jatuh karena membubarkan parlemen tanpa ada kekuatan konstitusi.[539]

Fuad menyatakan bahwa Poros Tengah ingin berkomunikasi dan berkompromi dengan Gus Dur. Hanya saja, Gus Dur lebih memercayai lingkaran sekelilingnya yang amatir dan bodoh.[540] Hal serupa diungkapkan Akbar Tandjung, ia meyakini bahwa tindakan-tindakan Gus Dur dipengaruhi pikiran-pikiran Marsillam dan mungkin dekrit yang mengarah pembubaran Golkar juga dipengaruhi Marsillam. Meskipun, Akbar mengakui tak dapat membuktikannya.[541]

Gus Dur pun menolak hadir di SI MPR. Megawati bertindak sebaliknya, ia datang ke SI MPR. Hal ini membuktikan bahwa Megawati ingin dan bersedia menggantikan Gus Dur. Jika pada saat itu Megawati tidak bersedia hadir, maka Gus Dur pun tak akan digantikan oleh Megawati.

Sebenarnya, Poros Tengah pada awalnya tak ada rencana untuk melengserkan Gus Dur, sebab Poros Tengah yang sebelumnya mendorong Gus Dur untuk menjadi presiden.

---

538 Wawancara dengan Akbar Tandjung di Jakarta, 24 Januari 2019.
539 Wawancara dengan Fuad Bawazier di Jakarta, 25 Januari 2019.
540 Wawancara dengan Fuad Bawazier di Jakarta, 25 Januari 2019.
541 Wawancara dengan Akbar Tandjung di Jakarta, 24 Januari 2019.

Namun, saat Gus Dur meninggalkan Poros Tengah dan tak mau menerima saran kami itu hanya menunggu waktu. Saat sudah sangat goyah, Gus Dur mencoba melakukan pendekatan, tapi hanya tersisa PKB sendiri dan sudah terlambat. Memorandum I dan II itu hanya satu proses saja.[542]

Namun, Gus Dur jatuh bukan karena Memorandum, melainkan karena mengeluarkan dekrit pembubaran parlemen. Kalau Gus Dur tak mengeluarkan dekrit, maka tak akan ada SI. Dekrit itu mestinya mendapat dukungan dari DPR/MPR dan juga mendapat dukungan dari TNI-Polri. Ini kan tidak dapat dukungan sama sekali, bahkan TNI dan Polri pun jengkel dengan tindakan Gus Dur.[543]

Akbar Tandjung sempat tak bersedia ditemui oleh siapapun menjelang dekrit. Musababnya adalah Gus Dur berkali-kali menyatakan keinginannya untuk membubarkan Golkar. Hal itu yang membuat Akbar terlihat stres dan ingin menyendiri. Akan tetapi, begitu mengetahui yang dibubarkan bukan hanya Golkar, melainkan seluruh parlemen, hal itu yang membuat Akbar semakin bersemangat untuk melawan Gus Dur.[544]

Alasan Utama fraksi-fraksi untuk memakzulkan Gus Dur antara lain dari PDIP melalui Agus Condro Prayitno. "Tantangan presiden kepada MPR yang merupakan lembaga tertinggi pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk adu kekuatan adalah tindakan yang sangat tidak konstitusional dan merusak serta melanggar tatanan bernegara dan berbangsa bahkan dapat dikualifikasi sebagai tindakan makar terhadap pemerintahan negara kebangsaan Indonesia."[545]

Sedangkan, Noviantika mengaku sempat berkomunikasi dengan Yenny Wahid agar Gus Dur jangan membubarkan parlemen. Akan tetapi, kenyataannya, Gus Dur tidak bisa atau tidak menerima saran PDIP kelompok lama.

---

542 Wawancara dengan Fuad Bawazier di Jakarta, 25 Januari 2019.
543 Wawancara dengan Fuad Bawazier di Jakarta, 25 Januari 2019.
544 Wawancara dengan Priyo Budi Santoso di Jakarta, 30 Januari 2019.
545 Hamdan Zoelva, *Op.cit.*, hlm. 161.

Di saat yang bersamaan, Taufiq sudah memiliki jalan yang berbeda dengan kelompok lama. Akhirnya, kelompok 87 hanya bisa mengikuti arus anak-anak kos saat SI.[546]

Sedangkan, Happy Bone dari Golkar mengatakan, "Tindakan presiden untuk mengeluarkan dekrit yang berupa maklumat tersebut nyata-nyata merupakan pengkhianatan dan menodai serta menginjak-injak konstitusi yang dijunjung tinggi oleh presiden. Penolakan presiden untuk memberikan pertanggungjawaban pada MPR adalah pelanggaran terhadap penjelasan umum UUD 1945 butir 3 serta pelanggaran terhadap pasal 9 UUD 1945 mengenai sumpah jabatan presiden."[547]

"Kami berupaya mencari jalan keluar dari krisis kepemimpinan di mana Presiden Gus Dur menjadi faktor utama penyebab pemerintahan tidak efektif. Jalan keluarnya, kami memasukkan poin secara substantif pemisahan tugas dan kewenangan kepala negara dan kepala pemerintahan lewat sebuah rekomendasi," kata Ade Komaruddin dari FPG. Gagasan tersebut didukung oleh Ketua DPR Akbar Tandjung bahwa karena adanya hambatan dalam diri presiden, MPR sebaiknya memberikan tugas khusus sehari-hari di bidang ekonomi dan koordinasi kabinet kepada Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.[548]

Sidang MPR semestinya tidak hanya menjadi forum balas dendam politik para elite politik yang bertikai, tetapi juga mesti dijadikan momentum untuk menata kembali kerangka aturan main yang bisa mengakomodasi penyelesaian konflik secara utuh.[549] Sidang untuk meminta pertanggungjawaban presiden melalui SI MPR bersifat politis. SI MPR dimaksudkan untuk memeriksa tuduhan yang tersimpan dalam bentuk memorandum DPR bahwa presiden telah melanggar haluan negara.

546 Wawancara dengan Noviantika Nasution di Jakarta, 1 Maret 2019.
547 Hamdan Zoelva, *Op.cit.*, hlm. 161.
548 Kholid Novianto, M Afan Alfian, dan Riyono Asnan, *Akbar Tandjung dan Partai Golkar Era Reformasi* (Bekasi: Sejati Press, 2004), hlm. 138.
549 Indra Surya Lubis (ed), *Op.cit.*, hlm. 12.

Cita-cita reformasi menuju demokrasi dan pemerintahan yang bersih hanya akan menjadi slogan dan retorika saja apabila penyelesaian konflik hanya didasarkan pada pandangan subjektif kekuasaan di satu pihak dan kekuatan massa di lain pihak.

Gus Dur yakin, apabila Gus Dur dilengserkan dalam SI MPR akan timbul reaksi massa yang luar biasa dan akan mengancam integrasi Indonesia. Sebaliknya, kubu lawan politik Gus Dur, terutama Megawati, juga yakin bahwa pelengseran Gus Dur akan disambut hangat dan meriah di tingkat bawah.[550] Oleh sebab itu, Syafii Maarif, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah dalam sebuah lobi yang dilakukan Taufiq Kiemas, mempertanyakan kesiapan Megawati dan jaminan PDIP bagaimana menghadapi kerusuhan.[551]

Namun, nyatanya kedua kondisi itu tak terjadi. Gus Dur sudah ditinggal oleh sekutu politiknya dan juga para pendukungnya. Di tingkat massa politik, presiden telah kehilangan dukungan mahasiswa. Gus Dur bahkan juga telah ditinggal pendukung fanatiknya yang tidak siap menghadapi militer.

***

Presiden Gus Dur mengeluarkan dekrit yang membubarkan DPR/MPR, mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dan membekukan Partai Golkar. Sebelum menerbitkan dekrit, terdapat diskursus mengenai penerbitan dekrit. Semestinya indikator dekrit semata-mata dikeluarkan karena negara dalam kondisi benar-benar genting adalah bila dekrit itu memenuhi dua syarat utama. Pertama, merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan negara dalam keadaan bahaya (*absolutely*

550 Hermawan Sulistiyo, *Op.cit.*, hlm. 55.
551 Derek Manangka, *Op.cit.*, hlm. 97.

necessary in the interest of the nation). Kedua, harus memenuhi teori keseimbangan (*evenwichtstheorie*) antara bahaya yang datang dengan tindakan dan isi dekrit yang dikeluarkan.

Hal yang paling memenuhi kedua indikator itu apabila negara sedang perang atau menghadapi bencana besar. Di luar kondisi itu, sifat kekuasaan cenderung mengontaminasi niat baik dekrit untuk penyelamatan negara, menjadi penyelamat penguasa belaka.[552]

Dekrit itu berdasarkan landasan teori hukum darurat negara (*staatsnoodrect*) yang bersifat subjektif dan tidak tertulis. Ditetapkan menurut pendapat subjektif presiden sebagai kepala negara, tanpa dasar ketentuan hukum perundangan.

Dekrit adalah produk hukum istimewa yang juga merupakan penyimpangan mendasar dari fungsi presiden yang melaksanakan hukum, menjadi fungsi pembuat hukum. Isi dekrit pun wajib bertentangan dengan konstitusi atau dimaksudkan sebagai tindakan ekstrakonstitusional. Kalau tidak, format dekrit jadi tidak perlu dan presiden cukup mengeluarkan perppu.

Menurut Baharuddin Lopa, dekrit bisa dikeluarkan oleh presiden apabila DPR terus-menerus akan menjatuhkan presiden. Alasannya, dalam sistem presidensial, presiden tidak bisa dijatuhkan oleh DPR. DPR bisa menjatuhkan presiden atau perdana Menteri dalam sistem parlementer. Perimbangannya di sistem parlementer, kepala negara juga bisa membubarkan DPR dengan alasan tidak representatif.

Bagi Lopa, apabila DPR ingin terus menjatuhkan presiden, maka DPR menggunakan sistem parlementer. Jika DPR menggunakan sistem parlementer, maka presiden melayaninya dengan sistem parlementer juga, presiden bisa membubarkan DPR dengan dekrit.[553] Proses demokrasi yang sudah dibangun

552 Irwan Suhanda (ed), *Op.cit.*, hlm. 263.
553 Mahfud MD, *Op.cit.*, hlm. 107.

bisa menjadi mundur kembali jika dekrit benar-benar dikeluarkan, sebab tidak mungkin dekrit keluar tanpa keributan dan tanpa melibatkan TNI dan Polri. TNI dan Polri bisa terseret masuk kembali ke dalam politik.[554]

Umam tak tahu dari mana dan sejak kapan munculnya pembubaran parlemen. Ia hanya mengetahui ada dua hal yang dapat dibubarkan. Pembubaran Golkar atau pembubaran parlemen, bukan membubarkan keduanya. Kalau keduanya yang dibubarkan, maka akan semakin banyak musuh.[555]

Pro dan kontra mengenai dekrit pun hadir dari pendukung-pendukung juga. Fordem salah satunya, menurut Todung Mulya Lubis, ia dan mayoritas Fordem tidak setuju dengan rencana Gus Dur mengeluarkan dekrit. Ini merupakan blunder politik terbesar yang dilakukan Gus Dur.[556] Pasalnya, kondisi politik dan keamanan tak mendukung Gus Dur untuk mengeluarkan dekrit. Dekrit membangkitkan perlawanan kolektif di parlemen. Kekuatan-kekuatan di luar PKB akhirnya berkumpul. Gus Dur dapat dikatakan juga agak naif dalam membaca pertarungan politik. Sebab, ia menganggap reputasinya di kalangan bawah dapat mengkapilitalisasi dukungan publik secara politik untuk menghadapi DPR.

Todung mengatakan bahwa secara pribadi, ia tidak setuju secara politik jika Gus Dur melakukan konfrontasi dengan DPR.[557] Belakangan, semakin lama, semakin banyak pembisik Gus Dur yang tidak dikenal teman-teman Fordem. Bahkan, ada kecurigaan pembisik-pembisik itu disisipkan oleh kelompok tertentu untuk melakukan disinformasi kepada Gus Dur.[558]

Umam mengaku, sudah mendapatkan informasi tentang dekrit dan isinya satu hari sebelum dekrit diumumkan.[559]

---

554 *Ibid.*, hlm. 105.
555 Wawancara dengan Khatibul Umam Wiranu di Jakarta, 10 Maret 2019.
556 Wawancara Todung Mulya Lubis di Jakarta, 17 Mei 2019.
557 Wawancara Todung Mulya Lubis di Jakarta, 17 Mei 2019.
558 Wawancara Todung Mulya Lubis di Jakarta, 17 Mei 2019.
559 Wawancara dengan Khatibul Umam Wiranu di Jakarta, 10 Maret 2019.

Pertimbangan mengeluarkan dekrit pasti sudah diperhitungkan. Gus Dur sudah mengakui bahwa dirinya sudah kalah dan jalan kompromi sudah tidak ada. Dekrit merupakan perlawanan terakhir Gus Dur.

Sebenarnya Pangdam Jaya Djaja Suparman menawarkan diri kepada Gus Dur untuk mengakhiri kebuntuan politik yang terjadi. Akan tetapi, Gus Dur menolak karena ia tak ingin ada acara-cara militeristik untuk mempertahankan jabatan.[560] Sehari setelah dilengserkan oleh parlemen, hal yang dilakukan Gus Dur adalah meminta Ketua RT Gambir untuk membuatkannya surat bahwa Gus tidak lagi tinggal di wilayahnya.

Di tengah banyaknya ketidaktahuan tentang siapa yang meyakinkan Gus Dur membuat dekrit. Seorang ulama kharismatik NU, KH Muhammad Ki Badar mengaku bahwa para ulama Nahdlatul Ulama (NU) meminta kepada Presiden Gus Dur (Gus Dur) untuk mengeluarkan dekrit. "Benar, para ulama NU se-Indonesia telah meminta Presiden Gus Dur untuk mengeluarkan dekrit malam ini (Minggu, 22/7)," katanya menjawab pertanyaan di Jakarta, Minggu.

Permintaan para ulama NU se-Indonesia itu merupakan hasil pertemuan para kiai NU dalam Forum Silaturahmi Ulama dan Pengasuh Pondok Pesantren se-Indonesia di Pesantren As-Sidiqiyah di Jl. PAP II Kelurahan Kebon Besar, Batu Ceper, Tangerang. Silaturrahmi tersebut, menurut dia, menghasilkan enam keputusan yang disebut "Taushiyyah". Salah satu keputusan tersebut adalah mendukung dekrit presiden dan meminta Presiden membekukan DPR/MPR.[561]

Pernyataan KH Muhammad Ki Badar yang meng-atasnamakan para ulama NU sulit untuk dibuktikan. Sebab, pada saat itu, NU tak ingin terseret arus politik praktis. Begitu juga sikap Gus Dur yang tak mau melibatkan NU dalam konflik politik yang terjadi antara dirinya dan parlemen.

560 Wawancara dengan Khatibul Umam Wiranu di Jakarta, 10 Maret 2019.

561 "*Ulama NU Minta Presiden Gus Dur Keluarkan Dekrit*", Majalah Gatra, 22 Juli 2001.

Mahfud menyatakan bahwa pertemuan dan pernyataan tersebut memang terjadi, hanya saja mereka bukan pertama yang mendorong dekrit. "Itu terjadi saat malam dekrit, mereka bukan faktor utama pendorong dekrit, hanya memberikan restu kepada Gus Dur untuk mengeluarkan dekrit," kata Mahfud.[562]

Tanda-tanda kejatuhan Gus Dur sudah terlihat sejak ia, pada Januari 2001, berencana memberlakukan Dekrit Presiden untuk membubarkan MPR dan DPR, serta kegagalan demi kegagalan Wahid untuk mengganti pucuk pimpinan TNI dan Polri. Klimaksnya terjadi pada 26 Juni 2001, ketika baik pimpinan TNI maupun Polri secara tegas menolak melaksanakan Dekrit Presiden yang sudah ditandatangani Wahid.

Beberapa hari setelah tak menjabat sebagai presiden, Gus Dur meminta masyarakat untuk menahan diri. Demokrasi tanpa kekerasan harus ditumbuhkan dengan kedewasan dan hati nurani. "Hendaknya anda bersabar, bisa menahan kekerasan, karena perjuangan untuk menegakkan demokrasi membutuhkan keadilan dari kita semua. Demokrasi tanpa keadilan hanyalah sebuah lelucon saja," tambahnya.

Perjuangan menegakkan demokrasi, menurut dia, memang tidak mudah. Perjuangan itu harus dilakukan dengan kerja keras–bila perlu dengan tetesan keringat, darah, dan air mata. "Apalagi di hadapan orang-orang yang kelihatannya terpelajar, banyak ilmunya, banyak pengetahuannya, tapi hati nuraninya tidak ada."[563]

562 Wawancara dengan Mahfud MD di Jakarta, 19 Juni 2019.
563 "*Gus Dur: Saya Tetap Berjuang Menegakkan Demokrasi*", Kompas, 27 Juli 2001.

BAB 7

KESIMPULAN

Perjalanan pemerintahan transisi dari rezim otoriter ke rezim demokratis memang tak pernah mudah. Peralihan dari masyarakat konservatif yang mengutamakan stabilitas menuju masyarakat terbuka merupakan sebuah langkah berat. Terlebih, untuk kasus di Indonesia, transisi tersebut berlangsung secara gradual dan masih melibatkan unsur-unsur kekuatan rezim sebelumnya. Tak hanya "melibatkan", ternyata unsur rezim lama masih mendominasi suprastruktur dan infrastruktur politik yang ada.

Terpilihnya Gus Dur menjadi presiden—yang juga didukung oleh kekuatan lama yakni Golongan Karya (Golkar)—merupakan sebuah siasat yang dilakukan oleh Golkar. Sebagai pihak yang tersandera karena adanya reformasi, Golkar butuh memperbaiki citra bahwa mereka tak sama dengan Golkar di rezim Soeharto. Golkar pascareformasi merupakan Golkar yang demokratis. Hal itu terbukti dengan mendukung Gus Dur. Ia sosok demokratis dan pluralis yang sering mengkritik Soeharto, namun tak jarang juga dapat melakukan komunikasi dengan Soeharto.

Tantangan terbesar pemerintahan Gus Dur adalah bagaimana proses demokrasi yang dimotori oleh mahasiswa dapat diikuti pula dengan terbangunnya sebuah sistem politik

demokratis. Kendati pemilihan presiden dan wakil presiden berlangsung cukup demokratis, tidak secara otomatis konsolidasi demokrasi berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Setidaknya hal ini dapat diperhatikan dari jalannya hak interpelasi, hak angket, Memorandum I, Memorandum II, hingga pemecatan Gus Dur yang dilakukan oleh parlemen. Demokrasi mengalami pendangkalan yang luar biasa. Serangkaian sidang parlemen yang disebutkan tadi hanya sebagai ajang pertarungan untuk melakukan delegitimasi terhadap pemerintah.

Gus Dur pun sadar bahwa menjadi presiden di masa transisi akan banyak membawa tantangan dan juga mungkin akan timbul kekacauan dari unsur-unsur rezim Orde Baru yang merasa kejayaannya terampas selama reformasi. Tak hanya itu, banyak harapan tertumpu pada pemerintahan Gus Dur, terutama tentang dapat terwujud atau paling tidak dijalankannya tuntutan-tuntutan reformasi.

Oleh sebab itu, Gus Dur dengan segala keterbatasannya mencoba menjalankan amanat reformasi. Pemerintahan yang dibangunnya pun pada awalnya bersifat kompromis. Tujuannya untuk meredam gejolak atau pembalasan dendam lebih besar kepada dirinya. Ia masih mengakomodasi kepentingan atau kekuatan lama, namun itu tak bertahan lama. Saat Gus Dur mulai melakukan *reshuffle* dan juga melakukan serangkaian kebijakan yang dianggap merugikan *status quo*—seperti pengusutan keluarga Soeharto beserta kroni-kroninya, membubarkan Golkar, membubarkan Departemen Penerangan, dan meminta maaf kepada korban pembunuhan massal 1965—saat itu pula Gus Dur mendapat tekanan.

Tekanan yang diterima Gus Dur tak hanya di parlemen, tetapi juga ekstraparlementer—tekanan massa. Parlemen tak hanya melakukan pengadilan politik, tetapi juga pengadilan hukum. Parlemen menjadi lembaga adidaya, sebab mereka juga melakukan tugas yudikatif. Bandul kekuasaan yang selama

pemerintahan Soekarno dan Soeharto berpusat pada presiden kemudian berganti ke parlemen, meskipun sistem pemerintahan tetap presidensial. Hal tersebut terlihat pada kasus *Buloggate* dan *Bruneigate*. Kendati yudikatif memutuskan Gus Dur tak bersalah, tapi parlemen terus memprosesnya untuk melakukan *impeachment* atau pemakzulan.

Sedangkan dari perspektif parlemen, mereka menganggap bahwa semestinya tugas parlemen bukan hanya menjadi pemberi persetujuan pada eksekutif. Mereka ingin memainkan peran yang semestinya memang dijalankan di negara-negara demokrasi, yakni sebagai pengawas eksekutif dan juga perimbangan politik.

Saat Gus Dur tak bisa memanfaatkan TNI-Polri, di ranah parlemen pun ia tak punya juru lobi atau kekuatan yang dapat menandingi partai-partai politik yang ada. Praktis, hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ada di parlemen. Hal itu semakin diperparah karena PKB pun mengalami konflik internal. Kalaupun ada tim lobi, mereka tak terkoordinasi dengan baik. Selain itu, Gus Dur pun tak mau melakukan kompromi politik dengan menambah jumlah menteri Golkar atau berbagi peran dengan Megawati yang menjadi kepala pemerintahan, sedangkan Gus Dur menjadi kepala negara.

Komunikasi politik Gus Dur juga dapat dikatakan sangat buruk. Komunikasi yang dilakukan Gus Dur pun terkesan mengancam, baik kepada legislatif maupun angkatan bersenjata. Bukan Gus Dur tak memperhitungkan dampak dari ucapan atau kebijakannya, ia hanya meyakini bahwa sistem pemerintahan Indonesia masih presidensial bukan parlementer. Landasan tersebut yang menjadikannya berani menentukan sikap.

Di ranah luar perlemen atau massa, penggalangan massa yang dilakukan oleh kekuatan eks Orde Baru sangat terstruktur, sistematis, dan masif.

Melalui senior-senior Himpunan Mahasiswa Islam (HMI),

yang biasa disebut dengan HMI *connection*, mereka menggalang sebuah kekuatan. Padahal sebenarnya isu yang digalang pun tak populis bahkan cenderung elitis, tetapi bisa menyatukan kekuatan lainnya. Organisasi sayap partai—terutama partai Islam—pun mendukung gerakan tersebut. Mereka dapat menciptakan seolah-olah keresahan bersama. Lantas, mereka membentuk simpul kekuatan yang juga dapat berkomunikasi dan berjejaring dengan elite politisi, polisi, dan TNI.

Baik parlemen maupun massa memanfaatkan manajemen pemerintahan Gus Dur yang bersifat eratik, tak dapat diprediksi, dan tidak berpola. Sebagian penyebabnya adalah karakter personal Gus Dur, sebagian lagi konteks kepemimpinan pemerintahan yang tak mampu dikendalikannya—terutama militer.

Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan Soeharto merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika Soeharto turun, ternyata dwifungsi ABRI belum hilang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Soeharto belum jatuh, meskipun sudah adanya reformasi. Di satu sisi, ada era keterbukaan yang tak disenangi ABRI. Era keterbukaan ini membuat peranan militer tak tahan uji. Apabila terus ditempa, maka akan membuat militer tidak akan terus bertahan dalam kekuasaan.

Serangan frontal yang dilakukan Gus Dur terhadap dwifungsi ABRI, yakni dengan terus melakukan era keterbukaan di masyarakat, merupakan sesuatu yang perlu dilakukan. Sebab, ada hal yang harus dikerjakan, yaitu keterbukaan harus dijaga terus. Kemudian di lain pihak harus dapat mendirikan pemerintahan yang efektif dan dapat memerintah semua elemen, termasuk militer.

Gus Dur ingin menjalankan supremasi sipil sepenuhnya. Ia ingin mengubah wajah dan karakter militer—yang selama pemerintahan Soeharto mendapatkan previlise di masyarakat.

Dampak dari previlise tersebut adalah sikapnya yang arogan di masyarakat. Gus Dur sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata ingin membentuk tentara profesional dengan mengembalikannya kembali ke barak sesuai dengan tuntutan reformasi. Akan tetapi, sebagian besar tentara menolak langkah Gus Dur. Celakanya, saat kebuntuan politik sipil terjadi, Gus Dur terkesan ingin menjadikan TNI dan Polri sebagai alat kekuasaan. Sebuah langkah yang tak berbeda jauh seperti yang dilakukan Soeharto. Simpul-simpul eks Orde Baru—mahasiswa dan TNI-Polri—menjadi sebuah kekuatan bersama yang menjadikan Gus Dur sebagai musuh politik.

Alhasil, Gus Dur tak lagi punya kuasa. Semua kekuatan-kekuatan politik berhasil mengunci geraknya. Sadar bahwa dia pasti akan kalah, Gus Dur mengeluarkan dekrit—yang salah satu poin krusialnya adalah pembubaran parlemen. Kalau saja Gus Dur hanya membubarkan Golkar—sebagai representasi kekuatan lama—mungkin Gus Dur akan masih mendapatkan dukungan. Namun, membubarkan seluruh parlemen yang notabene juga pemilih dirinya menjadikan proses pemakzulan tak lagi bisa dielakkan.

Pada periode Gus Dur, politik kekuasaan tidak dapat menjadikan atau mewujudkan demokratisasi total di masyarakat. Politik kekuasaan, terutama parlemen, masih berkutat pada balas dendam politik. Bagaimana tidak, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menjadi partai pemenang pemiluhan umum (pemilu) tak bisa menjadikan Megawati sebagai presiden. Sementara itu, Amien Rais merangkul Golkar sebagai kekuatan yang semestinya disisihkan dalam reformasi mendukung Gus Dur. Militer yang semestinya kembali ke barak pun tak rela melepaskan kekuatannya dari bidang politik ketika muncul tuntutan reformasi. Mereka bahkan membentuk organisasi paramiliter untuk menekan Gus Dur.

Korban demokratisasi memanfaatkan demokrasi untuk kembali berkuasa. Pada fase ini, bisa disebut bahwa keterbukaan bukan sebuah demokrasi, melainkan hanya sebuah fase awal menuju terciptanya demokrasi. Sayangnya, fase yang sudah dibentuk dan dilaksanakan saat reformasi ini malah terputus—kalau kita tidak mau mengatakan terkooptasi—oleh kekuatan lama yang anti-demokrasi. Oleh sebab itu, kendati sudah hampir 20 tahun pemakzulan Gus Dur, elite-elite politik masih dipimpin oleh kekuatan-kekuatan eks Orde Baru, baik sipil maupun militer. Bahkan, ekses dari praktik kotor politik—yang dilakukan oleh militer dengan membentuk organisasi paramiliter berbasis keagamaan—menjadikan organisasi tersebut ancaman bagi kehidupan demokrasi yang ada.

Setelah Gus Dur berkuasa, politik kekuasaan hanya sekadar bagi-bagi "kue". Politik tak lagi menyentuh substansi—yaitu sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dengan cara-cara demokratis. Tak ada lagi keberanian untuk mendobrak "kelaziman" yang sebenarnya "keliru" dalam praktik demokrasi. Dan Gus Dur merupakan aktor sekaligus korban dari praktik politik yang sedemikian keliru tersebut.

EPILOG

KEADILAN SEJARAH UNTUK GUS DUR

Sederet pertanyaan ini berisiko dituding memakai "tesis" orang yang malas berpikir: benarkah Presiden KH Abdurrahman Wahid secara sistematis sengaja dilengserkan oleh para seteru politiknya pada 2001 lalu? Dengan kata lain, benarkah mereka berkonspirasi menjatuhkan Presiden Wahid? Apakah dia benar-benar melanggar haluan negara? Sahkah upaya penggulingannya melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat ataukah sebaliknya--sebagaimana dituduhkan Gus Dur—justru tindakan mereka inkonstitusional.

Peristiwa sangat menegangkan menjelang kejatuhan Gus Dur dari kursi Presiden RI pada 23 Juli 2001 memang kerap dibahas sebagai bagian penting dari sejarah politik Indonesia. Kekuasaan Gus Dur dihentikan oleh MPR melalui Sidang Istimewa dalam situasi gejolak politik yang panas, genting dan mencekam. Ribuan pendukung Gus Dur berunjuk rasa besar-besaran di depan Monas dan Istana Merdeka. Rumah Wakil Presiden Megawati yang dipastikan bakal menggantikan posisi Presiden Wahid, dijaga ketat aparat. Polisi dan tentara siaga penuh.

Sejauh ini memang belum ada keadilan sejarah buat Gus Dur yang secara paksa dilengserkan dengan alasan yang tidak bisa dibenarkan. Belum ada yang membahas sangkaan

penggulingan ini, apalagi mengkajinya secara serius dan ilmiah. Perbincangan sebatas bisik-bisik di sela-sela peringatan haul Gus Dur di Ciganjur. Peristiwa kontroversial ini mungkin pernah disinggung sekilas dalam seminar demokrasi—yang hampir tak bisa dipisahkan dengan peran penting Gus Dur, bersama Marsilam Simanjuntak dan Rahman Toleng dkk mendirikan Forum Demokrasi.

Ruang untuk pelurusan sejarah harus dibuka lebar. Sudah betul pernyataan Yenny Wahid, putri Abdurrahman Wahid, yang mempersilakan siapa pun yang memahami fakta proses penjatuhan Gus Dur untuk mengungkapkannya. Pelurusan sejarah ini teramat penting agar menjadi pembelajaran bagi semua orang. Tentunya lebih penting ketimbang membukukan cerita sampiran setumpuk lelucon segar ala Gus Dur.

Bagi Gusdurian—buat para pendukung Gus Dur dan juga saya, pelurusan sejarah ini sejalan dengan hak publik untuk tahu: bahwa Presiden Wahid sama sekali tidak terbukti melakukan tindak kriminal sebagaimana dituduhkan kepadanya. Tersebab Gus Dur tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka seharusnya dia tidak bisa divonis "sungguh-sungguh melanggar haluan negara"—salah satu syarat penting alasan untuk memakzulkan presiden.

Akan halnya kasus Bulog –disebut dengan diksi tendensius berbau skandal, Buloggate, sama sekali tidak ada kaitannya dengan Gus Dur. Perkara ini muncul akibat ulah seorang tukang pijit dan paranormal bernama Soewondo, yang memanfaatkan kedekatannya dengan Gus Dur. Ia dilobi Wakil Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) saat itu, Sapuan, agar memperjuangkannya menjadi Kepala Bulog. Sapuan lalu menggunakan dana Yayasan Dana Bina Sejahtera Karyawan (Yanatera) sebanyak Rp 35 milyar, yang kemudian dia serahkan kepada Soewondo.

Sukses? Tidak juga. Kenyataannya yang terpilih sebagai Kepala Bulog bukan Sapuan, tapi Rizal Ramli. "Jadi banyak sekali *character assassination* (pembunuhan karakter) terhadap Gus Dur. Buktinya keluarganya hidup sederhana setelah beliau (Gus Dur) tidak jadi presiden," ungkap Rizal Ramli.

Soewondo dihukum penjara, begitu pula Sapuan. Saya terkaget-kaget ketika mendapat kabar bahwa Sapuan tak penuh menjalani hukumannya—ia banyak mendapat diskon remisi. Sedangkan Soewondo menjalani hukumannya sampai tuntas. Gus Dur? Ia dinyatakan tak terbukti ikut terlibat dalam perbuatan pidana korupsi atau pun penyalahgunaan wewenang.

Rencana menerbitkan risalah di balik kejatuhan Gus Dur patut disokong. Luhut Panjaitan, kini Menteri Koordinator Kemaritiman di bawah Presiden Joko Widodo, menegaskan: pemakzulan terhadap Gus Dur bukan karena perkara Brunei dan Bulog seperti yang dituduhkan selama ini. "Gus Dur dilengserkan karena dihimpit persoalan politik dan tidak ada konstitusi yang dilanggar," ujarnya.

Rizal Ramli yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian kala itu, segendang seirama dengan Mahfud dan Luhut. Rizal mengatakan bahwa Presiden Wahid dilengserkan secara tidak adil. Tidak ada bukti pelanggaran hukum dan tindakan inkonstitusional yang dilakukan oleh Presiden RI keempat itu. Lengsernya Gus Dur merupakan konspirasi elit politik yang merasa terganggu dengan cara berfikir dan langkah perubahan yang dilakukan oleh cucu pendiri NU, KH Hasyim Asy'ari itu. Ia lalu menyerukan perlunya negara merehabilitasi nama baik Gus Dur.

Awal kegaduhan dimulai dengan konflik yang kian meruncing antara presiden dengan politikus dan legislator di Senayan. Coba kita cermati pernyatan Akbar Tanjung, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan merangkap Ketua Umum Golkar

waktu itu. Menurut Akbar, kegaduhan bermula tatkala Gus Dur memecat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri Negara Investasi dan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara, Laksamana Sukardi.

Sejak itulah, Presiden Wahid harus berhadapan secara diametral dengan kedua kekuatan politik terkuat di DPR. Pemecatan kedua tokoh ini menimbulkan protes Golkar dan PDI-Perjuangan. Koalisi Poros Tengah, yang sukses mendorong kemenangan Gus Dur dalam pemilihan presiden, mulai bersikap kritis. Inilah awal terjadinya konflik dan bahkan polarisasi dengan politisi di DPR, yang menurut Akbar, "bermuara pada Gus Dur berhenti sebagai presiden."

Kemelut meruncing tatkala Presiden Wahid menerbitkan Dekrit Presiden. Dibacakan Yahya Cholil Staquf, salah seorang juru bicaranya, berisi pembubaran MPR/DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat Pemilu dalam waktu satu tahun dan membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR.

Masalahnya, dekrit tersebut tidak memperoleh dukungan dari para politisi di Senayan. TNI dan Polri juga tak berpihak padanya. Singkat kata, dekrit itu tak didukung realitas politik, sehingga pada 23 Juli, MPR secara resmi memakzulkan dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri. Presiden Wahid menjadi Presiden RI dalam rentang yang sangat pendek. Mulai 23 Oktober 1999 dan dijatuhkan pada 23 Juli 2001.

Secara yuridis penjatuhan Gus Dur tidak sah. Hal ini disampaikan Mahfud MD, ahli hukum tata negara. Mahfud, yang kemudian menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, punya catatan khusus tentang janggalnya proses pemakzulan. Selain soal tahapan memorandum kurang pas, ada dua fraksi yang tak hadir. Sidang Istimewa juga dipercepat dari semula akan dilangsungkan 1 Agustus 2001, menjadi 23 Juli tahun yang sama.

Peletup tambahan ini makin mempersulit posisi Presiden Wahid. Ia memecat Jenderal Bimantoro sebagai Kapolri dan menggantikannya dengan Jenderal Chairuddin Ismail, tanpa persetujuan DPR. Sejak saat itu polisi terbelah sikapnya. TNI bahkan menurunkan 40 ribuan tentara di Jakarta. Pasukan disiagakan dengan mengarahkan moncong tank-tank menghadap Istana Merdeka sebagai bentuk pertunjukan kekuasaan.

Beredar kisah ada tawaran bertransaksi dengan lawan-lawan politiknya beberapa hari sebelum Presiden Wahid lengser. Gus Dur ditawari berkompromi. Setiap perombakan kabinet kudu diserahkan kepada partai politik. Gus Dur menolak – seraya menggebrak meja—dan mengatakan lebih baik jatuh ketimbang melakukan politik transaksional semacam itu. Beberapa kalangan yang dulu turut menaikkannya, berubah haluan. Mereka berkongsi dan berperan penting dalam penjatuhan Gus Dur dengan Kabinet Persatuan Nasionalnya.

Sikap konfrontatif Gus Dur ini menimbulkan kemarahan di kalangan mereka. Dalam sebuah wawancara dengan Tempo (26/12/2003), Gus Dur membenarkan hal ini. Ia mengatakan, "Kalau pergantian saya sih, itu ya menunjukkan betapa rendahnya nilai para politisi kita, tokoh-tokoh partai-partai kita itu. Mereka kerja sama dengan kekuatan-kekuatan anti-demokrasi. Itulah yang tidak saya duga sama sekali."

Penulis menyimpulkan terdapat empat kekuatan yang saling bekerja sama untuk menurunkan Gus Dur dari jabatan presiden. Pertama, kelompok yang kecewa karena kalah dalam pemilihan presiden. Kedua, sisa-sisa Orde Baru yang masih berkuasa. Ketiga, Poros Tengah yang tadinya menjadi sekutu Gus Dur menjadi presiden versus Megawati. Keempat, TNI yang tak senang dengan supremasi sipil, dan pemisahan dengan Polri yang diputuskan di masa Presiden Wahid.

Keempat kelompok itu saling bekerja sama untuk mendongkel kepemimpinan Gus Dur. Niat baik Presiden Wahid ingin membersihkan pemerintahan dari unsur KKN, malah dituduh menggelapkan uang Bulog dan uang hibah dari Sultan Brunei Darussalam. Hingga akhir kepemimpinan Gus Dur, tuduhan itu tidak bisa dibuktikan. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Ia dijatuhkan dan sekali lagi kita mencatat penggulingan presiden.

Dokumen yang ditemukan penulis sangat menarik guna pelurusan sejarah dimaksud. Tercatat bahwa beberapa pihak melakukan pertemuan rahasia di kediaman Arifin Panigoro, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta pada 27 Juni 2000. Pertemuan itu membahas kemungkinan menjatuhkan Gus Dur yang akan digantikan Megawati. Pertemuan ini dilatarbelakangi atas pencopotan Jusuf Kalla dan Laksamana Sukardi yang menciptakan satu kesatuan kekuatan politik melawan Gus Dur. Selain itu, dibahas juga peran Amien Rais untuk melakukan kampanye anti-Gus Dur yang ditujukan untuk memancing historia umat Islam.

Skenario itu berjalan dengan sedikit hambatan. Hingga akhirnya, menjelang Memorandum I oleh DPR, Fuad Bawazier melaporkan rencana aksi yang sudah dilakukan untuk menjatuhkan Gus Dur. Di antaranya, menggerakkan mahasiswa dengan satu komando isu: menuntut Gus Dur mundur. Tercatat juga laporan kerja media massa yang telah melakukan provokasi pemberitaan berkaitan dengan tuntutan mundur terhadap Gus Dur.

Dokumen rahasia yang menjadi bahan utama buku ini, yang diperoleh Virdika Rizky Utama, sangat membantu untuk memantik diskursus seputar jalannya pemerintah setelah Orde Baru. Dokumen ini bisa mengisi celah kekosongan sejarah tentang kejatuhan Gus Dur.

Kendati menampilkan temuan rahasia yang sangat menarik, tapi buku ini tetap harus diperkuat dengan penelitian lanjutan. Penelitian yang mendalam dan akurat ihwal rahasia di balik penggulingan terhadap Presiden Wahid. Bagaimana pun peristiwa itu adalah tragedi bagi bangsa yang ketika itu sedang diselimuti semangat reformasi memasuki masa transisi menuju demokrasi. Kita seharusnya jeli membaca tragedi memilukan ini. Selanjutnya bersama-sama memberi koreksi dan tak membiarkannya terulang kembali.***

Wahyu Muryadi.
Jurnalis Senior, Kepala Biro Protokol Istana Kepresidenan pada 1999-2001.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

1999. TNI Abad XXI, Redefinisi, Reposisi, Reaktualisasi Peran TNI dalam Kehidupan Bangsa. Jakarta: Markas Besar.

Aditjondro, George Junus. 2001. Orang-Orang Jakarta Jakarta di Balik Tragedi. Maluku.

Ali, Mahrus dan M.F. Nurhuda Y. 2008. Pergulatan Membela yang Benar: Biografi Matori Abdul Djalil. Jakarta: Kompas.

Ardiantoro, Juri (ed). 1999. Transisi Demokrasi: Evaluasi Krisis Penyelenggaran Pemilu 1999. Jakarta: Komite Independen Pemantau Pemilu.

Barton, Greg. 2002. Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid. Yogyakarta: LkiS.

Boestam, Ambia B., dkk (ed). 2000. Kahmi, Reformasi, dan Civil Society. Jakarta: Majelis Nasional KAHMI.

Budiyarso, Edy. 2009. Melawan Skenario Makar. Jakarta: Pensil 324.

Djaelani, M. Anwar. 2000. Gus Dur dan Kritik, Kontroversi Itu untuk Apa?. Surabaya: Yayasan Kampusina.

Fatah, Eep Saefulloh. 2010. Konflik, Manipulasi, dan Kebangkrutan Orde Baru. Jakarta: Burung Merak Press.

Gaffar, Affan. 1999. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gie, Kwik Kian. 1999. Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Transisi Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Gie, Soe Hok. 1983. Catatan Seorang Demonstran. Jakarta: LP3ES.

Guhfron, Rodjil. 2001. Skandal Politik SI MPR RI 2001. Jakarta: Factual Analysis Forum.

Gunawan, Bondan. 2018. Hari-Hari Terakhir Bersama Gus Dur.

Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Hadi, Syamsul dkk. 2007. Disintegrasi pasca Orde Baru. Jakarta: Yayasan Obor.
Haris, Syamsuddin. 1999. Reformasi Setengah Hati. Jakarta: Erlangga.
----------¬--------------. 2007. Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Grafiti.
Hefner, Robert W. 2001. Civil Islam. Jakarta: Institus Studi Arus Informasi.
Hermawan, Agus dkk. 2000. Akrobat Politik: Investigasi Jurnalistik Membongkar Skenario dan Intrik Politik. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Hidayat, L. Misbah. 2007. Reformasi Administrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan di Tiga Presiden. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Hikam, Muhammad A.S. 1999. Politik Kewarganegaraan. Jakarta: Erlangga.
Huntington, Samuel. 1997. Gelombang Demokratisasi Ketiga. Jakarta: Grafiti.
Irawan, F. X. Bambang. 2000. Supremasi Sipil? Agenda Politik Militer Gus Dur. Yogyakarta: Elstreba.
Iskandar, Muhaimin. 2004. Gus Dur yang Saya Kenal. Yogyakarta: LKiS.
Klienken, Gerry van. 2007. Perang Kota Kecil. Jakarta: Yayasan Obor.
KPP HAM TIM-TIM. 2003. Laporan Investigasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur, Maluku, Tanjung Priok, dan Papua. Jakarta: Komnas Perempuan.
Lane, Max. 2014. Unfinisihed Nation. Yogyakarta: Djaman Baroe.
Lesmana, Tjipta. 2008. Dari Soekarno Hingga SBY, Intrik dan Lobi Para Penguasa. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Lubis, Indra Surya (ed). 2001. Bahaya Tirani DPR Konflik DPR vs Presiden. Jakarta: Lembaga Studi Politik Merdeka.

Malik, A. dan M. F. Nurhuda Y. 2000. Mengawal Transisi, Refleksi atas Pemilu 1999. Jakarta: PB PMII dan UNDP.

Manangka, Derek. 2009. Jurus dan Manuver Politik Taufik Kiemas. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Manning, Chris dan Peter van Diermen (ed). 2000. Indonesia di Tengah Transisi. Yogyakarta: LkiS.

MD, Mahfud. 2010. Setahun Bersama Gus Dur. Jakarta: Murai Kencana.

Muhaimin,Yahya A. 1982. Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Munjani, Saiful, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi. 2019. Kaum Demokrat Kritis. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Ng., Al Zastrouw. 1999. Gus Dur, Siapa sih Sampeyan?. Jakarta: Erlangga.

Novianto, Kholid, M Afan Alfian, dan Riyono Asnan. 2004. Akbar Tandjung dan Partai Golkar Era Reformasi. Bekasi: Sejati Press.

Poulgrain, Greg. 2018. Bayang-Bayang Intervensi. Yogyakarta: Galang Press.

Pramuko, Yudi. 2002. Yuzril Ihza Mahendra: Sang Bintang Cemerlang. Jakarta: Putera Berdikari Bangsa.

Rachbini, Didik J. 2001. Ekonomi di Era Transisi Demokrasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rafick, Ishak. 2007. Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia. Jakarta: Ufuk.

Reeve, David. 2013. Golkar Sejarah yang Hilang Arah Pemikiran dan Dinamika. Jakarta: Komunitas Bambu.

Ricklefs, M.C. 2007. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi.

Robison, Richard. 2012. Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia. Depok: Komunitas Bambu.

Schwarz, Adam. 1994. A Nation in Awaiting. Australia: Allen & Unwin Pty Ltd.

Sobary, Mohammad dkk (ed). 2000. Gus Dur di Istana Rakyat. Jakarta: LKBN Antara.

Suhanda, Irwan (ed). 2010. Perjalanan Politik Gus Dur. Jakarta: Kompas.

Sulistiyo, Hermawan. 2011. Darah, Nasi, dan Kursi. Jakarta: Pensil 324.

Suparman, Djaja. 2013. Jejak Kudeta 1997—2005. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Swantoro, F. S. dan Jusuf Suroso. 2019. PDI dalam Pusaran Politik Orde Baru. Jakarta: PARA Syndicate.

Tandjung, Akbar. 2003. Moratorium Politik Menuju Rekonsiliasi Nasional. Jakarta: Golkar Press.

----------------------. 2007. The Golkar Way. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Tim Gabungan Pencari Fakta. 1999. Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998. Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan.

Utama, Virdika Rizky. 2018. Demokrasi dan Toleransi dalam Represi Orde Baru. Yogyakarta: Kanisius

Winters, Jeffrey A. 1999. Power in Motion: Modal Berpindah, Modal Berkuasa. Jakarta: Sinar Harapan.

Zoelva, Hamdan. 2011. Pemakzulan Presiden di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Rahardjo, M. Dawam et al. 2000. Independensi BI dalam Kemelut Politik. Jakarta: Pustaka Cidesindo.

ARTIKEL, KORAN, DAN MAJALAH

1. Duta Masyarakat, 11 Juni, 2001. PDIP Sudah Dikuasai Kelompok Kost-Kostan.
2. Forum Keadilan, No. 47, 5 Maret, 2000. Lima Menggoyang Kuasa.
3. Garda, No. 60/Th II, 27 April—3 Mei 2000. Di Atas Kertas Gus Dur Jatuh.
4. Kompas, 11 Februari, 2001. Respons Presiden atas Memorandum DPR.
5. Kompas, 12 Juni, 2001. Sudah Terlambat, "*Reshuffle*" Kabinet dan Kompromi.
6. Kompas, 15 Mei, 2001. Megawati Soekarnoputri: Sidang Istimewa Tak Bisa Dihentikan.
7. Kompas, 16 Juli, 2001. Gagal, Upaya Pertemukan Empat Tokoh Ciganjur.
8. Kompas, 16 Oktober, 2000. Pansus DPR Tidak Punya Wewenang Panggil Presiden.
9. Kompas, 2 Juni, 2001. Kabinet Dikocok Kembali.
10. Kompas, 20 Desember, 2000. Gerakan Mahasiswa Kini Bersama Rakyat Tuntaskan Reformasi Total.
11. Kompas, 20 Juli, 1999. PDIP Bahas Caleg yang akan ke Senayan.
12. Kompas, 21 Juni, 2001. Rantap "Kompromi" Tak Ada Kaitannya dengan Gebrakan Lopa.
13. Kompas, 22 Juli, 1999. Gus Dur Bertemu Habibie: Saling Mencalonkan Merupakan Hal Sehat.
14. Kompas, 22 Juli, 2001. Kepleset Pelantikan Chaeruddin.
15. Kompas, 23 Juli, 2001. Presiden Berlakukan Dekrit.
16. Kompas, 24 Juni, 2001. Hindari Empat Hal di SI MPR.
17. Kompas, 26 April, 2001. Presiden Siap Terima Memorandum II.
18. Kompas, 27 Juli, 2001. Abdurrahman Wahid: Saya Tetap Berjuang Menegakkan Demokrasi.
19. Kompas, 28 Mei, 2001. Tim Tujuh Tak Persoalkan SI MPR.
20. Kompas, 29 Maret, 2001. Jawaban Presiden atas Memorandum DPR.

21. Kompas, 30 Mei, 2001. Presiden Menjawab Memorandum Kedua secara Tertulis.
22. Kompas, 31 Mei, 2001. Sidang Istimewa MPR Minta Pertanggungjawaban Presiden.
23. Kompas, 5 Februari, 2001. Turunkan Suhu Politik.
24. Kompas, 7 Juni, 2001. Menhan Mahfud akan Melobi Partai Politik.
25. Kompas, 8 Juni, 2001. Soal Pertanggungjawaban Presiden: Rantap Penerimaannya Tidak Disiapkan.
26. Kompas, Minggu 4 Februari, 2001. Menjawab Memorandum DPR Pemerintah Akan Bentuk Tim Hukum dan Politik.
27. Majalah Gatra, 10 Juli, 2000. Gus Dur Hanya Percaya 10%.
28. Majalah Gatra, 10 Juli, 2001. Wakasad: Penolakan Dekrit Bukan Bentuk Pembangkangan.
29. Majalah Gatra, 11 November 2000. Pergulatan dan Perkubuan di MPR Saat Gus Dur Terpilih.
30. Majalah Gatra, 13 Desember 1999. Nakhoda Pilihan Gus Dur.
31. Majalah Gatra, 15 Juni, 1998. Golkar Jadi Partai.
32. Majalah Gatra, 17 Juli, 2001. Polri Gelar Apel “Mantap Brata” Amankan SI MPR.
33. Majalah Gatra, 18 September, 2000. Sapi Keramat di Tangan Gus Dur.
34. Majalah Gatra, 19 April, 2001. 40 Anggota DPR Diburu Pasukan Berani Mati.
35. Majalah Gatra, 19 Februari, 2000. Memburu Juru Bisik Gus Dur.
36. Majalah Gatra, 20 Juli, 2001. Gus Dur: Saya Tidak pernah Mengatakan Akan Mengeluarkan Dekrit.
37. Majalah Gatra, 22 Juli, 2001. Ulama NU Minta Presiden Gus Dur Keluarkan Dekrit.
38. Majalah Gatra, 23 April, 2001. Teror Menjelang 30 April.
39. Majalah Gatra, 23 Juli, 2001. Polda Metro Jaya Tolak Dekrit, tetap Amankan SI MPR.

40. Majalah Gatra, 24 April, 2001. Kedatangan Pasukan Berani Mati Tak Pengaruhi Keputusan DPR.
41. Majalah Gatra, 24 Juli, 2000. Siap Buka-Bukaan.
42. Majalah Gatra, 25 Desember, 2000. Konflik dan Bahaya Ingatan Kolektif.
43. Majalah Gatra, 25 Oktober, 1999. Skenario dari Patra.
44. Majalah Gatra, 25 September, 2000. Bom Ciganjur untuk BEJ.
45. Majalah Gatra, 26 Februari, 2001. Korban Politik Karet.
46. Majalah Gatra, 27 Maret, 2010. Gus Dur Menggitik Istana.
47. Majalah Gatra, 3 Juli, 2000. Gus Dur Mengincar Kakap.
48. Majalah Gatra, 3 Juli, 2000. Rezim Zalim Pasti Jatuh.
49. Majalah Gatra, 3 Juli, 2000. Tuduhan Mesin Ulang Cendana.
50. Majalah Gatra, 4 April, 2001. Gus Dur Tak Setuju Pasukan Berani Mati, tapi Tak Melarang.
51. Majalah Gatra, 4 April, 2001. Siap Mati Syahid Membela Gus Dur.
52. Majalah Gatra, 4 Desember, 2000. Ketua MA Diwarnai Selera Partisan.
53. Majalah Gatra, 5 Juni, 2001. Apel Siaga Polri-TNI Untuk Evaluasi Tugas dan Antisipasi SI.
54. Majalah Gatra, 5 Juni, 2001. Puluhan SSK Ikuti Apel Siaga Polri di Jakarta.
55. Majalah Gatra, 5 Mei, 2001. Bagir Manan Siap Bersihkan Lantai Pengadilan.
56. Majalah Gatra. 13 Desember 1999. Nakhoda Pilihan Gus Dur.
57. Majalah Gatra. 16 November 2000. Putusan Kiki Membelah Beringin.
58. Majalah Gatra. 27 Maret 2010. Gus Dur Menggitik Istana.
59. Majalah Gatra. 6 Desember 2000. Syahril Sabirin Aktif Lagi.
60. Media Indonesia 29 Januari, 2001. Gus Dur Jatuh Jika Ditinggalkan Mega.
61. Media Indonesia, 1 November, 2000. PDIP Pertahankan Gus Dur.

62. Media Indonesia, 10 Januari, 2001. Taufik Kiemas Bantah Beri Jaminan kepada Gus Dur.
63. Media Indonesia, 11 Desember, 2000. Kegiatan Pansus Buloggate Harus Dihentikan.
64. Media Indonesia, 12 Januari, 2001. Fordem Soroti Kelemahan Gus Dur.
65. Media Indonesia, 16 November 2000. Mega Bersedia tapi Tidak Mau Merebut.
66. Media Indonesia, 18 Januari, 2001. Ribuan Demonstran Serbu DPR.
67. Media Indonesia, 2 November, 2000. Massa Gus Dur – Amien Beraksi.
68. Media Indonesia, 21 Juli, 2000. Laks dan Kalla Desak Gus Dur Minta Maaf.
69. Media Indonesia, 21 November, 2000. Sikap Pembangkangan Tommy dan Skandal *Borobudurgate*.
70. Media Indonesia, 23 Juli, 2000. Maaf Diterima, Klarifikasi Jalan Terus.
71. Media Indonesia, 24 Januari, 2001. Presiden dan MPR Harus Diganti.
72. Media Indonesia, 25 Juli, 2000. 252 Anggota DPR Tidak Puas.
73. Media Indonesia, 27 Januari, 2001. Gus Dur Akui Didukung Mega.
74. Media Indonesia, 27 Juli, 2000. Akbar Terima Dokumen KKN Laks dan Kalla.
75. Media Indonesia, 28 Januari, 2001. Hari-hari Penentuan dari Senayan.
76. Media Indonesia, 29 Oktober, 2000. Gus Dur Mundur, Megawati Naik.
77. Media Indonesia, 31 Januari, 2001. Akbar Tolak Pembubaran Golkar.
78. Media Indonesia, 31 Januari, 2001. DPR Garap Tiga Opsi.

79. Media Indonesia, 31 Januari, 2001. Tidak Ada Alasan DPR Dibubarkan.
80. Media Indonesia, 4 Desember, 2000. Keabsahan Pansus Bulog dan Brunei.
81. Media Indonesia, 5 Desember, 2000. Pansus Buloggate sudah Terdaftar.
82. Media Indonesia, 5 November, 2000. Gus Dur Mundur adalah Tuntutan Akal Sehat.
83. Media Indonesia, 6 November, 2000. Akbar Tolak Jadi Pengganti Presiden, KAHMI Siap Turunkan Gus Dur.
84. Media Indonesia, Minggu, 28 Mei, 2000. Interpelasi, Uji Coba Menggoyang Gus Dur.
85. Panji Masyarakat, 3—4 November, 1999. Harapan Kepada Gus Dur dan Mbak Mega.
86. Republika, 13 November, 2000. Bila Gus Dur Mundur, Duet Mega-Akbar Tepat Menggantikannya.
87. Republika, 13 November, 2000. Setelah Curah Pendapat.
88. Republika, 14 Oktober, 2000. Itu Hak DPR.
89. Republika, 16 November, 2000. Kwik Cs Imbau Fraksi DPR Ajukan Memo SI.
90. Republika, 17 November, 2000. Sejumlah Fraksi Siap Bicarakan Memo Kwik.
91. Republika, 18 November, 2000. FPBB: Bentuk Pansus *Borobudurgate*.
92. Republika, 18 Oktober, 2000. Kronologi *Buloggate*.
93. Republika, 19 Juni, 2001. Lintas Fraksi Capai Titik Temu.
94. Republika, 25 November, 2000. Jaksa Agung Bantah Ada Deal Antara Presiden dengan Tommy.
95. Republika, 25 Oktober, 2000. Husein Migdad, Menanti Keberanian DPR dan MPR.
96. Republika, 26 Oktober, 2000. Amien Rais Minta Maaf.
97. Republika, 27 Oktober, 2000. Gus Dur: Kalau Saya tidak Mau Mundur, Mau Apa?.

98. Suara Pembaruan, 23 Juni, 2001. Presiden: Masih Ada Opsi Percepatan Pemilu.
99. Tempo, 7 Mei 2000. Jusuf Kalla: Gus Dur Tukang Fitnah.
100. Tempo, 7 November, 1999. Kabinet Superkompromi.
101. Tempo, 7 November, 1999. Profesionalisme ala Gus Dur.
102. Time, 24 Mei, 1999. Soeharto Inc.
103. Tolleng, Rahman. 13 Februari 2000. Saya Harus Mempelajari Dulu Tawaran Itu. Forum Keadilan.

JURNAL

1. Jurnal Universitas Indonesia berjudul Kemajukan, Hipotesis Kebudayaan Dominan, dan Kesukubangsaan, 1999.
2. Jurnal Universitas Tanjung Pura berjudul Konflik Etnis di Ambon dan Sambas: Suatu Tinjauan Sosiologis, 1999.

SUMBER LISAN

1. Wawancara dengan Rahman Tolleng (Aktivis Forum Demokrasi), 17 November 2015 di Jakarta.
2. Wawancara dengan Amien Rais (Ketua MPR 1999—2004), 9 Januari 2019 di Jakarta.
3. Wawancara dengan Marsillam Simanjuntak (Mantan Jaksa Agung Era Gus Dur), 15 Januari 2016 di Jakarta.
4. Wawancara dengan Akbar Tandjung (Ketua DPR 1999—2004), 24 Januari 2019 di Jakarta.
5. Wawancara dengan Fuad Bawazier (Anggota DPR/MPR Fraksi Reformasi 1999—2004), 25 Januari 2019 di Jakarta.
6. Wawancara dengan Priyo Budi Santoso (Anggota DPR/MPR Fraksi Partai Golkar 1999—2004), 30 Januari 2019 di Jakarta.
7. Wawancara dengan M. Fakhruddin (Ketua Umum PB HMI 1999—2001), 2 Februari 2019 di Aceh.
8. Wawancara dengan X, 20 Februari 2019 di Jakarta.
9. Wawancara dengan Wimar Witoelar (Mantan Juru Bicara Presiden Gus Dur), 26 Februari 2019 di Jakarta.

10. Wawancara dengan Noviantika Nasution (Bendahara PDI Perjuangan 1999—2005), 1 Maret 2019 di Jakarta.
11. Wawancara dengan Khatibul Umam Wiranu (Anggota DPR/MPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa), 10 Maret 2019 di Jakarta.
12. Wawancara dengan Budi Murdono (Aktivis Forum Demokrasi), 24 Maret 2019 di Jakarta.
13. Wawancara dengan Fadjroel Rahman (Aktivis Forum Demokrasi), 27 Maret 2019 di Jakarta.
14. Wawancara dengan Y, 16 Mei 2019 di Jakarta.
15. Wawancara dengan Todung Mulya Lubis(Aktivis Forum Demokrasi), 17 Mei 2019 di Jakarta.
16. Wawancara dengan Mahfud MD (Mantan Menteri Pertahanan di Era Gus Dur), 19 Juni 2019 di Jakarta.
17. Wawancara dengan Yahya Staquf (Mantan Juru Bicara Presiden Gus Dur), 29 Juni 2019 di Jakarta.

INTERNET

1. Muhammad Husnil, "Golkar Sepeninggal Daripada Soeharto". Historia.id. 3 Juni 2019. Diakses dari https://historia.id/politik/articles/golkar-sepeninggal-daripada-soeharto-DbNWQ.
2. Hukumonline.com. 15 Juni 2019. Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol943/font-size1-colorff0000bperjalanan-ruu-pkbbfontbrfenomena-ruu-paling-berdarah-dalam-sejarah-indonesia.
3. Lama.eslam.or.id. 15 Juni 2019. Diakses dari http://lama.elsam.or.id/downloads/813335_Ringkasan_Eksekutif_TSS_Semanggi_Komnasham.pdf.
4. Mahfud MD: Golkar Memang Menggunakan Dana Nonbujeter. liputan6.com. 19 Mei 2019. Diakses dari https://www.liputan6.com/news/read/22448/mahfud-md-golkar-memang-menggunakan-dana-nonbujeter.

5. Fadel Muhammad: Golkar Tak Pernah Menerima Dana Bulog. liputan6.com. 19 Mei 2019. Diakses dari https://www.liputan6.com/news/read/8197/fadel-muhammad-golkar-tak-pernah-menerima-dana-bulog.
6. Hukumonline.com. 24 April 2018. Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol640/kapolri-diberhentikan-karena-dorongan-publik/.
7. Liputan6.com. 15 Juni 2019. Diakses dari https://www.liputan6.com/news/read/6765/menangkap-elize-menuding-tommy.
8. Tempo.co. 15 Juni 2019. Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/1916/abdul-jabar-tahu-lokasi-lokasi-bom-natal-2000.
9. Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2534/pasca-memorandum-ii-sulit-bagi-presiden-menghindar-dari-si. 20 Mei 2019.
10. Andreasharsono.net. 4 Juni 2019. Diakses dari http://www.andreasharsono.net/2001/09/kecepatan-ketepatan-perdebatan.html?m=1.
11. Liputan6.com. 4 Mei 2019. Diakses dari https://www.liputan6.com/news/read/16710/sekjen-mpr-undangan-si-sudah-disebar.
12. Republika.co.id. 9 Juni 2019. Diakses dari https://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/14/09/05/nbewk729-moncong-senjata-arah-istana.
13. Andreasharsono.net. 4 Juni 2019. Diakses dari http://www.andreasharsono.net/2001/09/kecepatan-ketepatan-perdebatan.html?m=1.
14. https://lipsus.kontan.co.id/v2/perbankan/read/325/skandal-bank-bali-kongkalikong-berbau-politik diakses pada 11 Juli 2019.

LAMPIRAN FOTO

ISTANA MERDEKA,
JAKARTA, INDONESIA – 26 JULI, 2001

Photo by Ahmad 'deNy' Salman

LAMPIRAN FOTO

ISTANA MERDEKA,
JAKARTA, INDONESIA – 26 JULI, 2001

Photo by Ahmad 'deNy' Salman

LAMPIRAN FOTO

ISTANA MERDEKA,
JAKARTA, INDONESIA – 26 JULI, 2001

Photo by Ahmad 'deNy' Salman

LAMPIRAN FOTO

ISTANA MERDEKA,
JAKARTA, INDONESIA – 26 JULI, 2001

Photo by Ahmad 'deNy' Salman

- **Dokumen Fuad Bawazier dan Dokumen Perencanaan Priyo Budi Santoso**
- **Surat Akbar Tandjung ke MA dan Balasannya**

.) 3150351 Date:16/01/01Time :22:41 Page 1 of

Kepada Yang Terhormat

CONFIDENTIAL

Bang Akbar Tandjung

Di Jakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Langsung saja, dengan ini saya laporkan kepada Bang Akbar tentang percepatan situasi yang berkembang di luar gedung Parlemen berkaitan dengan pelaksanaan Sekenario Semut Merah (SEMER) dengan *skenario pertama*. Tugas yang diberikan kepada saya berkaitan dengan penggalangan opini dan dukungan masyarakat luas; mahasiswa, media, Ormas, pengusaha, cendekiawan, preman dan kelompok kanan, serta masyarakat lainnya di seluruh Indonesia dalam rangka penjatuhan kredibilitas Presiden Wahid melalui kasus Buloggate dan Brunaigate telah berjalan sesuai rencana.

Bahkan lebih dari itu, kekuatan dan efek dari operasi tahap pertama ini ---*menurut pandangan saya*--- sudah harus ditingkatkan kepada pelaksanaan operasi *skenario kedua*, yakni: *Memaksa Abdurahman Wahid Mundur dan Mendorong Megawati Sukarnoputri menjadi Presiden*, yang akan bisa kita kendalikan dan pada akhirnya akan kita singkirkan juga.

Berikut laporan garis besar dan beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan *skenario pertama*, yakni:

1. BEM PTN dan PTS seluruh Indonesia yang selama ini telah kita koordinir di Cilosari dan Diponegoro (PB HMI), serta kelompok kanan, Ormas Islam yang tersentral di tiga titik lainnya, yakni: Masjid Sunda Kelapa, Istiqlal dan al-Azhar mulai bergerak secara massif, bergelombang dan bersamaan hampir di seluruh Indonesia dengan satu komando issu menuntut Abdurahman Wahid mundur. Khusus untuk pengepungan Senayan dalam rangka mem-*pressure* DPR agar menerima hasil kerja Pansus yang menyatakan Abdurahman Wahid

telah menyalahgunakan kekuasaannya (*Abuse of Power*) secara langsung dipelopori oleh para ILUNI pro kita, para rektor serta Ketua Umum BEM UI dan UMJ. Mereka semua ini bergerak dibawah komando langsung Ketua Umum PB HMI Fakhruddin cs.

.1) 3150351 Date 16/01/01 Time 12? 41 Page 2 of 4

2. Pada saat sidang paripurna digelar, adik-adik mahasiswa ini akan bergabung langsung dengan seluruh massa aksi dari rekan-rekan Pemuda Partai Keadilan yang langsung dibawah komando Saudara Hidayat Nur Wahid, Gerakan Pemuda Ka'bah yang dimobilisir oleh saudara Ali Marwan Hanan, massa PBB dibawah komando saudara Hamdan Zoelva, massa PAN dibawah komando saudara Patrialis Akbar, dan massa rakyat dan preman yang diorganisir oleh saudara Yapto dan DPP Pemuda Pancasila. Pada saat itulah komando akan saya pegang secara langsung, sedangkan operator di lapangan akan dipimpin oleh ketua umum KAMMI, AMPI, GPK, BM PAN, PB HMI, HAMMAS dan IMM.

3. Gerakan ini *Insya Allah* akan memperoleh dukungan penuh dari Zoelvan Lindan dan Julius Usman yang telah mampu mempengaruhi beberapa kantong massa PDIP untuk bergabung melakukan demonstrasi menyikat Abdurahman Wahid di Sidang Parlemen.

4. Kita juga telah melakukan aksi borong dollar di pasar valuta asing dan bursa efek ---*untuk menjatuhkan nilai tukar rupiah*--- di dalam dan luar negeri (terutama di London, Hongkong, dan Singapura) secara langsung dibawah kendali Bendahara Umum DPP Golkar. Aksi borong dollar ini juga didukung oleh Bambang Tri Atmojo dan liem Swie Liong, Arifin Panigoro.

5. Seluruh kerja Media Massa (cetak dan elektronik) yang bertugas mem-*blow up* secara kolosal dan provokatif semua pemberitaan berkaitan dengan tuntutan mundur terhadap Abdurahman Wahid sudah

di-*arrange* langsung oleh saudara Parni Hadi dan Surya Paloh sedangkan operator teknis di lapangan saya telah menyiapkan banyak kaki terutam diparlemen.

6. Penggiringan opini publik oleh para tokoh dan cendekiawan atas kegagalan pemerintahan Abdurahman Wahid lewat tulisan di media massa yang dimobilisir langsung oleh Azumardi Azrha, Dr Syahrir dan rekan-rekan KAHMI telah mampu meyakinkan publik bahwa Abdurahman Wahid memang benar-benar gagal mengemban amanat reformasi.

7. Tugas saudara Dien Syamsuddin untuk mengendalikan MUI lewat kasus Ajinomoto telah berhasil memaksa para ulama dan tokoh agama mencabut dukungannya kepada presiden Wahid.

Date:16/01/01Time :22:43

Dengan posisi Wakil Presiden, Mas Amien bisa bermain lincah untuk melakukan penggembosan dari dalam lewat isyu ketidakbecusan Megawati dalam mengatasi krisis ekonomi dan penyelesaian disintegrasi bangsa.

Untuk itu, mulai sejak sekarang harus kita pegang dan bantu secara kongkrit saudara-saudara kita dari luar jawa yang menginginkan kemerdekaan. Sedangkan untuk persoalan krisis ekonomi, sabotase akan terus dijalankan melalui jalur kawan-kawan lama kita di era Pak Harto yang sakit hati melihat ini semua. Tetapi semuanya ini tergantung anggota tim yang lain, apakah usulan saya ini diterima atau tidak.

Sebagai bahan pertimbangan operasi di lapangan, saya meminta khabar dari Bang Akbar Dan kawan-kawan tentang perkembangan di dalam Gedung senayan lewat jalur yang sudah tersedia saja,yaitu seluruh perkembangan situasi di dalam gedung kirim saja melalui saudara Anas Urbaningrum sebagai penghubung kita.Saya optimis bahwa skenario ini akan berjalan mulus.

Dengan begitu, misi untuk menyelamatkan seluruh asset politik dan ekonomi serta investasi kita serta pengeluarkan dana operasi sebesar 4 T,yang sudh saya sediakan tidak menjadi sia-sia dan dapat mengembalikan kejayaan kita yang telah dirampas sejak reformasi.

Akhirnya, semua ini tergantung perjuangan Bang Akbar bersama rekan-rekan yang berada di dalam Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Demikian, atas dukungan dan keseriusan rekan-rekan di Gedung Senayan saya sampaikan terima kasih

Billahi at-taufiq wal hidayah
Jakarta, 29 Januari 2001

Hormat saya,

Fuad Bawazier

3 Juli 2000

Yth. Bang Akbar
Di Kuningan

CONFIDENTIAL

Assalamualaikum Wr Wb,

Bang Akbar yang saya hormati,

Pada tanggal 27 Juni 2000 sekitar pukul 21.00, saya telah berhasil mendorong pertemuan terbatas di kediaman Arifin Panigoro di jalan Brawijaya. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Pak Fuad Bawazier, Pak Ginanjar Kartasasmita, Arifin Panigoro, Kapolri Jendral Rusdihardjo, Kapolda Jaya Mayjend Nurfaizi, dan Ass Intel Kapolri Mayjend Pol Guntur serta Ketua Umum HMI Fakhrudin. Sebenarnya saya juga mengundang Mas Wiranto, Pak Djaja Suparman, Mas Adi Sasono dan Mas Dawam Rahardjo dari ICMI. Tetapi keempat-empatnya berhalangan hadir. Sementara Eggi Sudjana yang saya hubungi, menolak menghadiri pertemuan tersebut. Saya sendiri tidak hadir dalam pertemuan itu atas usul Arifin. Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang kemungkinan menjatuhkan Gus Dur pada Sidang Umum MPR Bulan Agustus melalui mobilisasi massa di Jakarta. Juga kemungkinan menggantikannya dengan Mbak Mega seperti yang kita pernah bicarakan sebulan yang lalu bersama pak Ginanjar. Di bawah ini akan saya paparkan kesimpulan-kesimpulan yang di dapat dari pertemuan tersebut berdasarkan catatan yang dibuat oleh saudara Arifin Panigoro.

Jika terjadi perkembangan sampai Rapim Bulan depan akan selalu saya laporkan, minimal melalui kontak telepon.

Wassalam

Bayu Budi Santoso

CONFIDENTIAL

TENTANG MELEMAHNYA POSISI GUS DUR (Untuk pembahasan ini dipimpin Ginanjar kartasasmita)

Kampanye kita untuk menjatuhkan Gus Dur cukup berhasil . Secara umum telah terjadi penajaman polarisasi antara yang anti Gus Dur dan yang pro Gus Dur terutama di DPR. Isu tentang hak Interpelasi yang dimotori oleh Arifin Panigoro mampu membuat garis demarkasi antara pendukung dan yang anti Gus Dur. Isu Interpelasi ini juga sekaligus menghancurkan aliansi politik Poros tengah, Golkar dan Gus Dur melawan PDI menjadi Poros tengah, Golkar, PDI melawan Gus Dur. Melalui solidaritas terhadap pencopotan Yusuf kalla dan laksamana Sukardi, telah menciptakan satu persatuan yang menjadi alternatif kekuatan politik riil antara Golkar dan PDI (sementara poros tengah hanya akan digunakan untuk memancing historia ummat Islam terutama kampanye anti Gus Dur yang dilakukan oleh Amien Rais di media massa dan oleh Fuad Bawazier melalui jaringan HMI dan mahasiswa yang berjubah Islam) . Aliansi ini akan diuji lagi nanti pada penggalangan kekuatan untuk menggunakan hak angket terhadap Gus Dur karena skandal Bulog dan kasus bantuan dari Sultan Brunei. Direncanakan dalam tahap selanjutnya hak Interpelasi atau hak angket ini ditambah dengan isu pemeriksaan kesehatan Gus Dur yang akan menjadi jembatan untuk terselenggaranya Sidang Istimewa sekaligus menjatuhkan Gus Dur.

Sesuai dengan rencana kita, dalam skandal Bulog, Gus Dur semakin terpojok, terlebih lagi dengan didorong keberanian Rudiharjo melalui Hartaka dan Alex Bambang Riatmodjo untuk memeriksa kroni-kroni Gus Dur dengan ekspose yang sangat luar biasa di media massa. (Khusus pemeriksaan terhadap Gus Dur, sebenarnya hanya untuk konsumsi politik publik, Gus Dur sebenarnya tidak

diperiksa. Ini adalah bagian dari taktik kita melalui saudara Rusdihardjo untuk menurunkan pamor Gus Dur dengan berpura-pura menolong Gus Dur melalui pemeriksaan terhadapnya). Memang hasil pemeriksaan terhadap kroni Gus Dur pada skandal bulog sengaja diambangkan di Publik terutama keterkaitannya dengan keterlibatan Gus Dur. Pada saat yang tepat, hasil pemeriksaan terhadap kroni Gus Dur direncanakan akan diumumkan ke publik. Tinggal menunggu tekanan dari masyarakat terutama dari jaringan HMI yang menjelang sidang umum nanti akan berkali-kali demonstrasi ke Polri untuk membuka pemeriksaan terhadap kroni Gus Dur. Polri, dalam hal ini diwakili saudara Rusdihardjo akan mengumumkan hasil pemeriksaan tersebut. Diharapkan pengumuman itu akan semakin memojokkan Gus Dur. Atau setidaknya akan menghentikan kebijakan Gus Dur yang mempreteli basis ekonomi Golkar dan PDI pada BUMN-BUMN dan lembaga-lembaga penting seperti LKBN Antara ataupun Gubernur BI.

II

TENTANG RENCANA JANGKA PENDEK MENAIKKAN MEGAWATI (Untuk pembahasan ini dipimpin Arifin Panigoro dan Fuad Bawazier)

Jika aliansi PDI, Golkar, dan Poros tengah ini tetap solid (setelah nanti teruji dalam penandatanganan hak angket), maka jalan untuk menjatuhkan Gus Dur akan lebih terbuka. Karena itu untuk lebih memudahkan mendapat dukungan dari kalangan rakyat luas, maka kita perlu mendapatkan figur yang tepat untuk menggantikan Gus Dur. Keberhasilan kita menurunkan pamor Gus Dur, ditambah dengan semakin memburuknya perekonomian, akan menjadi sia-sia jika salah dalam menentukan Figur. Paling tidak ada empat alternatif yaitu Amien Rais, Megawati, Nurcholis Madjid atau Akbar Tanjung. Usulan mencalonkan kembali Habibie ditolak. Yang sangat problematik adalah Akbar Tanjung. Walaupun ia sedikit banyak mampu mengubah penampilan Golkar, tetapi rasanya sulit bagi Akbar Tanjung untuk diterima di kalangan PDI atau PKB, baik di DPR/MPR apalagi di kalangan luas. Sebab, masa lalu Golkar belum hilang dari memori anggota dewan dan rakyat luas (masih ada kebencian terhadap masa lalu).

Pilihan kita menjadi tiga, Amien, Mega atau Nurcholis. Posisi Amien juga mengandung resiko. Sebab Amien masih masih belum dapat diterima di kalangan PDI, sebab sebagian besar PDI masih merasa sakit hati dengan tingkah laku Amien melalui poros tengah ketika membangun kekuatan untuk memotong Mega di Sidang Umum lalu. Belum lagi ketakutan kaum minoritas kristen/katolik terhadap cita-cita negara Islam yang di bangun Amien. Lebih baik Amien memainkan peran, mendiskreditkan Gus Dur saja, Moral politik Amien sebagai tokoh reformasi diharapkan berhasil memainkan fungsi ini.

Sekarang tinggal Megawati atau Nurcholis. Secara Intelektual dan moral Nurcholis tidak perlu diragukan. Namun secara politik Nurcholis belum teruji. Dalam berbagai pertemuan, seminar, diskusi dan lokakarya, Nurcholis selalu didorong untuk bermain politik. Tetapi, nampaknya Nurcholis selalu menjaga jarak dengan dunia politik. Dia lebih memilih menjadi intelektual dan guru bangsa, berada di atas semua golongan. Tidak terlihat ambisi menggapai kekuasaan, bagi dia kekuasaan adalah urusan partai politik. Inilah kelemahan Nurcholis.

Jadi, pilihan terakhir ada pada Megawati. Secara konstitusional (isu konstitusional ini tidak dapat ditolak, bahkan oleh Gus Dur sendiri) jika Gus Dur jatuh maka Mega berhak, dan kemungkinan besar didukung oleh PDI dan Golkar, juga oleh Poros tengah demi kepentingan taktis menjatuhkan Gus Dur. Yang menjadi problem di kalangan poros tengah hanyalah tentang isu Mega anti Islam dan kepemimpinan perempuan. Sampai kemungkinan terburuk poros tengah tidak mendukung Mega pun, jika aliansi PDI Golkar solid, maka jalan menurunkan Gus Dur dan menampilkan alternatif Megawati menjadi tidak sulit. Jadi, Megalah yang menjadi alternatif paling utama untuk mengganjal Gus Dur.

III

TENTANG KEMUNGKINAN SERANGAN BALIK MOBILISASI MASSA PENDUKUNG GUS DUR (Pembahasan ini dipimpin Arifin Panigoro dan Mayjend. Guntur)

Karena posisinya yang terjepit di DPR/MPR, maka kemungkinan besar Gus Dur akan menggunakan dukungan ekstra parlementer. Berdasarkan perkembangan politik dan data di kepolisian, tercatat beberapa kekuatan yang diidentifikasikan sebagai kekuatan yang mendukung Gus Dur. Yang berbasis massa dan yang hanya mengandalkan kampanye di media massa.

Adapun yang berbasis massa adalah :

Pertama, massa NU dan PKB serta Pesantren luar Jakarta (terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah)

Kedua, massa PMII dan GP Ansor (Banser)

Ketiga, dukungan dari PRD (mereka mendukung Gus Dur dengan isu demiliterisasi dan pengikisan kekuatan lama). Bahkan, sudah ada pertemuan antara tokoh PKB dengan tokoh-tokoh PRD

Keempat, Gerakan mahasiswa seperti sebagian di Forkot, Famred, LMND dll. (sedangkan sebagian aktifis Forkot masih membatron kepada Arifin Panigoro)

Kelima, Etnis minoritas China dan elemen kristen/katolik yang dijamin pluralismenya oleh Gus Dur

Sedangkan yang tidak berbasis massa adalah:

Pertama, LSM-LSM seperti YLBHI, PBHI, ELSAM, Aliansi Jurnalis Independen serta kelompok perempuan.

Kedua, Intelektual-intelektual kampus seperti Arbi Sanit, Sri Mulyani dll.

Ketiga, Aktifis-aktifis yang akan aktif dalam Acara Rembuk Nasional di Bali akhir bulan ini.

Mereka ini sudah merencanakan akan melakukan kampanye dan aksi-aksi dukungan terhadap Gus Dur sampai dengan Sidang Umum nanti. Gus Dur sudah mengumpulkan beberapa pengusaha untuk mendukung mobilisasi tersebut.

...ngkan kekuatan massa yang dapat digunakan untuk meredam dukungan terhadap Gus Dur ;

Pertama, massa Poros tengah seperti FPI, laskar Jihad , massa KAMMI dll

Kedua, massa jaringan HMI dan KAHMI

Ketiga, dan diharapkan massa PDI jika mulai diangkat isu Mega menjadi Presiden menggantikan Gus Dur.

Untuk massa PDI ini sudah mulai dikonsolidasikan untuk menyambut isu Mega menjadi Presiden. Sedangkan massa poros tengah sudah dikonsolidasikan dengan kekuatan massa minimal seperti rapat akbar di Monas dalam acara solidaritas buat tragedi Ambon. Menurut kabar, Gus Dur lebih takut dengan aksi sejuta ummat di Monas ketimbang dengan laskar jihad.

IV

RENCANA DAN PENUGASAN

Berdasarkan situasi di atas, maka perlu ada penugasan-penugasan. Berikut pembagian tugasnya:

a. Di DPR (ditugaskan Arifin panigoro, Fuad Bawazier dan Ginanjar juga kita harapkan dibantu AM. Fatwa). Adapun tugasnya adalah:

Pertama, Memaksa Gus Dur untuk hadir menjawab hak interpelasi

Kedua; mengkampanyekan dan Memperjuangkan penandatanganan hak angket menyangkut skandal Bulog dan bantuan Sultan Brunei ... ...

Ketiga, mengkampanyekan isu memburuknya kesehatan Gus Dur. Sebenarnya jika isu ini dikelola dengan baik bukan tidak mungkin akan menjadi senjata ampuh yang dapat diterima masyarakat.

Keempat, mengkampanyekan isu perbandingan antara pemerintahan Gus Dur dan pemerintahan Habibie. Dari mulai kestabilan politik, kurs, dan kabinetnya.

Kelima, memperjuangkan terlaksananya Sidang Istimewa MPR mengganti Gus Dur Dengan Mega. (Arifin Panigoro diharapkan mampu mendorong mega untuk bersedia menggantikan Gus Dur)

b. di media massa (ditugaskan Fuad Bawazier dibantu Saudara Parni Hadi dan Agung Laksono). Tugasnya:

Pertama, memampu kampanye anti Gus Dur di lewat media Kompas dan Suara Pembaharuan yang sudah diidentifikasikan mendukung Gus Dur. Yang paling diutamakan adalah media televisi. Karena Faktor televisi ini sangat penting seperti ditunjukkan di saat krisis kekuasaan Soeharto.

c. Mobilisasi massa (ditugaskan Fuad Bawazier, Arifin Panigoro dan Fakhrudin)

- *Fuad Bawazier untuk memobilisasi massa poros tengah(FPI, Laskar Jihad, dan sejumlah organisasi dalam garis keras serta KAMMI)*
- *Arifin Panigoro untuk memobilisasi sebagian massa Forkot, dan memobilisasi massa PDI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Lampung*
- *Fakhrudin ditugaskan untuk memobilisasi jaringan HMI, membawa seluruh massa anggota HMI terutama di Jawa dan Sumatera ke Jakarta. Juga kepada Fuad Bawazier untuk mendatang pertemuan KAHMI bulan mendatang untuk mengkampanyekan pergantian Gus Dur secara konstitusional*
- *Kita juga meminta Mas Adi Sasono untuk mengorganisir ikatan-ikatan alumni perguruan tinggi yang juga efektif untuk mendiskreditkan Gus Dur.*

d. Mencegah persatuan Gus Dur dan Mega (ditugaskan kepada Fuad Bawazier)

Tugas Fuad bawazier dalam hal ini adalah menggagalkan setiap upaya bertemunya Gus Dur dan Mega dalam satu forum seperti Forum Ciganjur. Diupayakan kalaupun ada pertemuan-pertemuan dihadiri minus Mega atau minus Gus Dur. Hal ini penting agar di tingkat DPR/MPR serta di kalangan massa luas tidak terjadi persatuan antara dua kekuatan ini. Jika sempat terjadi maka akan menghancurkan skenario yang kita buat. Kita menginginkan Mega berani menentukan sikap. Tetapi, melihat track recordnya, Mega seringkali ewuh Pakewuh dan selalu tersubordinasi jika satu forum dengan Gus Dur –Mega kalah kualitas dan sering minder–.

e. Kampanye internasional

Tugas ini akan dipimpin oleh. Ginanjar. Kita berharap dengan pengalaman Ginanjar akan mampu memotong basis dukungan internasional baik politik dan ekonomi yang sudah terlebih dahulu dimiliki inisiatif politiknya oleh Gus Dur. Isu kesehatan Gus Dur, pencabutan TAP tentang Komunisme (terutama ke Amerika), skandal Bulog dan ketidakmampuan Gus Dur mengatasi konflik Maluku, Poso dan

sejumlah kerusuhan di teritorial kecil lainnya dapat dijadikan salah satu isu utama yang akan dikampanyekan di dunia internasional

f.. Melobi TNI

Pertemuan ini belum dapat mengambil kesimpulan tegas tentang posisi TNI (masih harus konfirmasi ke Pak Wiranto atau Pak Djaja). Tetapi, melihat kecenderungannya, TNI masih berkutat mengatasi friksi untuk tidak mengarah pada faksionalisasi dan memperbaiki citranya yang hampir hancur. Jadi, kemungkinan TNI akan mengambil alih kekuasaan dengan cara paksa sangatlah kecil. Tetapi juga tidak dapat disimpulkan bahwa TNI akan melakukan dukungan penuh terhadap Gus Dur. Dan Gus Dur sendiri masih belum mendapatkan tentara yang loyal selain Agus Wirahadikusumah. Agus Wirahadikusumah berhasil melakukan penyelamatan setelah kawan-kawannya yang lain dimutasi akibat dokumen Bulak Rantai. Keberhasilan kita membuat dokumen Bulak Rantai adalah menggagalkan konsolidasi Gus Dur terhadap TNI lewat Agus Wirahadikusumah. Secara umum, walau belum mendapat konfirmasi dari pak Wiranto dan Pak Djaja, Posisi TNI adalah menunggu hasil pertarungan politik yang konstitusional. Tidak sedang mengambil posisi inisiator. Jika rencana kita berhasil melalui jalan "Konstitusional yang wajar" maka TNI diharapkan memberikan dukungan.

g. Pengamanan di lapangan

Kepada Kapolri Rusdihardjo, dan Kapolda Nurfaizi ditugaskan untuk :

Pertama, menghentikan atau minimal menghambat proses pemeriksaan dan penangkapan sebagai komoditi politik berupa serangan balik Gus Dur terhadap lawan-lawannya seperti penangkapan pada Syahril Sabirin yang akan melibatkan banyak orang. Saudara Fuad Bawazier segera ditugaskan mendekati media-media massa untuk mengalihkan isu penangkapan akibat rentetan kasus Syahril Sabirin dengan mengalihkan isu bahwa Gus Dur akan melakukan penangkapan terhadap lawan-lawan politiknya. Kita harapkan Gus Dur akan terjebak

Kedua, membuka dan memproses dengan cepat setiap upaya KKN yang dibangun oleh pendukung-pendukung Gus Dur atau oleh Gus Dur sendiri seperti pada kasus Bulog.

Ketiga, menghambat mobilisasi massa pendukung Gus Dur dari luar Jakarta, dan jika mungkin dilakukan penangkapan.

Keempat, menangkap atau minimal [illegible] aksi-aksi pendukung Gus D[illegible] menjauhi Gedung DPR/MPR

Kelima, melonggarkan mobilisasi massa anti Gus Dur dari luar Jakarta, dan tidak menghambat massa tersebut mendekati gedung DPR MPR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270

Jakarta, 23 Juli 2001

Nomor	:	KS.02/3709.A/DPR RI/2001
Sifat	:	Rahasia
Derajat	:	Sangat Segera
Lampiran	:	–
Perihal	:	Permintaan Fatwa Mahkamah Agung

KEPADA YTH.

SDR. KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

J A K A R T A

Berkenaan dengan dikeluarkannya **Dekrit Presiden R.I.** pada tanggal 23 Juli 2001 pukul 01.10 WIB yang menetapkan:

1. Pembekuan MPR dan DPR RI;
2. Pembentukan Badan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum dalam waktu 1 tahun;

3. Pembekuan Partai Golongan Karya sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung;

Selaku Pimpinan DPR RI dengan ini saya menyatakan menolak Dekrit Presiden R.I. tersebut dengan alasan antara lain karena bertentangan dengan jiwa dan semangat konstitusi khususnya Penjelasan Umum UUD 1945. Oleh karena itu diharapkan agar Mahkamah Agung R.I. segera **MENGELUARKAN FATWA** berkaitan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden R.I. tersebut di atas.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

AKBAR TANDJUNG

Tembusan:

1. Yth. Pimpinan MPR RI
2. Yth. Ketua Fraksi-fraksi DPR RI

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 Juli 2001.

Nomor : KMA/419/VII/2001.
Lampiran : –
Perihal : Permintaan Fatwa Mahkamah Agung

Kepada Yth.

SDR. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Di

J A K A R T A

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 23 Juli 2001 Nomor: KS.02/3709.A/DPR RI/2001 perihal pada pokok surat tersebut di atas, maka dengan ini Mahkamah Agung R.I. memberikan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan dikeluarkannya Dekrit sebagaimana dinyatakan dalam Maklumat Presiden R.I. pada tanggal 23 Juli 2001 pukul 01.10 WIB sebagai berikut:

I. Hal Pembekuan MPR-RI dan DPR-RI:

a. Bahwa berdasarkan Penjelasan UUD 1945 angka VII dibawah sub judul Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat, disebutkan bahwa "Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan Sistem Parlementer)."

b. Bahwa Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat karena kedudukannya adalah juga anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan Pasal 2 UUD 1945 beserta Penjelasan Umum Sub Judul VII dan berdasarkan Bab II Bagian Pertama Pasal 2 UU-RI No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c. Bahwa Presiden yang diangkat oleh Majelis, tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UUD 1945 Sub Judul III tentang Kekuasaan Negara yang Tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

d. Bahwa oleh karenanya ditinjau dari segi ketentuan hukum, Presiden tidak dapat membekukan DPR RI, apalagi membekukan MPR RI.

II. Hal Pembentukan Badan guna menyelenggarakan Pemilihan Umum dalam waktu satu tahun:

Bahwa mengenai pembentukan Badan guna menyelenggarakan Pemilihan Umum dalam waktu satu tahun di atas adalah kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat R.I. No. III/

MPR/1988 tentang Pemilihan Umum dan Penanggung Jawab Pemilihan Umum adalah Presiden, berdasarkan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

III. Hal pembekuan Partai Golongan Karya sambil menunggu putusan Mahkamah Agung RI :

a. Bahwa kewenangan membekukan Partai Politik ada pada Mahkamah Agung R.I berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

b. Bahwa tindakan membekukan Partai Golongan Karya oleh Presiden, merupakan tindakan mencampuri kewenangan Badan Peradilan, sebab tentang masalah dibekukan atau tidak dibekukannya Partai Golongan Karya justru pada saat ini sedang dalam proses peradilan di Mahkamah Agung.

c. Bahwa selain daripada itu, dalam tindakan Presiden membekukan Partai Golongan Karya tidak dijelaskan secara cermat tentang pertimbangan yang menjadi alasan Partai tersebut harus dibekukan, bertentangan dengan asas hukum yang berlaku dalam Hukum Administrasi Negara bahwa keputusan administratif harus didasarkan pada motivasi dan pertimbangan hukum yang jelas.

d. Bahwa pada dasarnya pemakaian istilah "Maklumat" dalam Pidato Presiden tanggal 23 Juli 2001 pukul 01.10 WIB tersebut tidaklah tepat sebab dalam tata urutan perundang-undangan menurut hukum ketatanegaraan kita tidak dikenal suatu produk hukum yang disebut Maklumat (vide Ketetapan MPR Nomor: III/MPR/2000).

e. Bahwa oleh karenanya tindakan pembekuan Partai Golongan Karya oleh Presiden adalah bertentangan

dengan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, sehingga dengan demikian pembekuan tersebut tidak berkekuatan hukum.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Mahkamah Agung R.I berpendapat, bahwa dikeluarkannya Dekrit Presiden sebagaimana dinyatakan dalam Maklumat Presiden R.I tersebut diatas bertentangan dengan hukum.

Demikianlah pertimbangan hukum Mahkamah Agung R.I dan harap dijadikan maklum.

KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.

BAGIR MANAN.
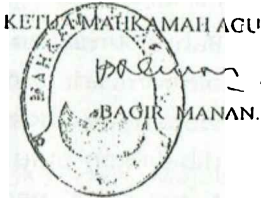
Tembusan:

1. Yth. Pimpinan MPR RI.
2. Arsip.

Tentang Penulis
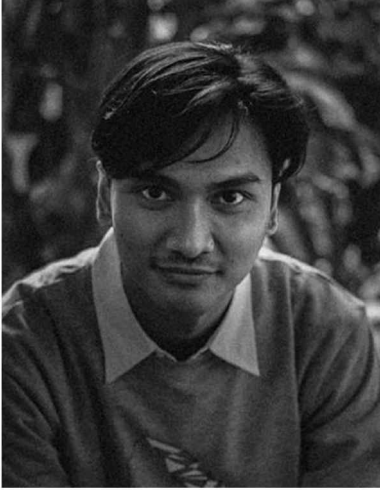
VIRDIKA RIZKY UTAMA biasa dipanggil Virdi. Lahir di Jakarta, 10 September. Menamatkan S1 di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Jurusan Pendidikan Sejarah pada 2016.

Selama berkuliah, Virdi aktif di LPM Didaktika dari staf redaksi sampai pemimpin umum. Tak hanya itu, Virdi juga aktif di Solidaritas Pemuda Rawamangun (Spora) dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI).

Setelah lulus, Virdi bekerja sebagai jurnalis dan peneliti. Virdi pernah menjadi jurnalis di Majalah Sawit Indonesia, Majalah Berita Mingguan Gatra, dan Narasi.tv. Sejak 2016, Virdi juga bekerja sebagai *Fellow Researcher* di PARA Syndicate.

Virdi pernah menerbitkan buku tentang Forum Demokrasi yang dipimpin oleh Gus Dur berjudul Demokrasi dan Toleransi dalam Represi Orde Baru (2018). Pada 2019 bersama Galeri Buku Jakarta, menerjemahkan dan menerbitkan buku Memikirkan Kata-Kata.

Virdi dapat dihubungi melalui sosial media **@virdikaa** dan surat elektronik **virdirainhard@gmail.com**

"Buku ini mengungkap data-data yang mengarah pada sebab dan rencana penjatuhan Gus Dur oleh kekuatan oligarki politik. Gus Dur, karena wataknya yang realistis dan bebas dari kemelekatan (attachment free) duniawi, tidak pernah bersikeras membuka kisah di balik pelengserannya. Baginya, ini adalah realita kekalahan kontestasi politik belaka. Namun, pengungkapan data-data sejarah perlu terus diupayakan. Bukan untuk membalaskan dendam, melainkan sebagai pelajaran agar kita tak selalu diwarisi awan gelap masa lalu dan agar catatan sejarah dapat diluruskan".

Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid (Putri pertama K.H Abdurrahman Wahid dan Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian).

"Virdi berhasil menjelaskan ikhtiar Gus Dur melakukan pembenahan sistem politik pada masa transisi dari sistem otoriter menuju demokrasi. Dengan modal dukungan politik yang terbatas dan strategi tanpa kompromi, Gus Dur menghadapi upaya anasir kekuatan Orde Baru yang ingin kembali merebut kekuasaan melalui persekongkolan besar. Hasilnya, Gus Dur secara politik memang dikalahkan, sehingga sistem politik Indonesia masih dikuasai oleh "orang lama" sampai saat ini. Akan tetapi, pencapaiannya dalam mendemokratisasi masyarakat Indonesia sulit disamakan oleh para penerusnya".

Muhammad A.S. Hikam (Mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi, Kabinet Persatuan Nasional)

"Periode pemerintahan Gus Dur adalah periode jeda, semacam disrupsi dalam panggung politik nasional. Ia mendobrak tabu, menjebol kebiasaan lama: mulai dari menghapuskan diskriminasi rasial sampai dengan upaya mengadili para pentolan Orde Baru. Sejarah mencatat dalam waktu hampir dua tahun, Gus Dur banyak memberi arti untuk Indonesia. Banyak lawan politiknya yang tak suka. Barangkali sepak terjangnya mengganggu kenyamanan mereka. Virdi mengungkapkan persekongkolan itu dengan sangat baik. Ia berhasil memadukan antara metodologi sejarah dan kemahirannya untuk menelusuri fakta-fakta yang berserakan dalam tugas reportasenya sebagai jurnalis. Sebuah sumbangan bagi penulisan sejarah kontemporer di Indonesia".

Bonnie Triyana (Sejarawan dan Pemimpin Redaksi Historia.id)

"Sejarah, biasanya hanya menampilkan narasi tunggal yaitu sang pemenang. Namun melalui dokumen rahasia yang ditemukan di kantor partai, Virdi mengunggah fakta sejarah lain di seputar kejatuhan Gus Dur. Dinamika eksternal dan internal yang melingkupi peristiwa tersebut, dia gambarkan dengan jernih—gaya khas seorang jurnalis. Fakta sejarah ini sebuah kontroversi. Sangat menarik dan layak dicermati".

Sukardi Rinakit (Staf Khusus Presiden Joko Widodo dan Chairman of PARA Syndicate)

"Membaca buku "Menjerat Gus Dur" karya Virdika Rizky Utama, seakan mengingatkan kita bahwa pertarungan politik yang membuat seorang presiden jatuh adalah sebuah peristiwa luar biasa dari sebuah bangsa. Sebagai jurnalis, Virdi membuktikan diri bahwa tugas jurnalis tidak hanya menulis rangkaian peristiwa, tetapi juga menjadi saksi mata sejarah".

Edy Budiyarso (Jurnalis Senior, Penulis Buku Melawan Skenario Makar: Tragedi 8 Perwira Menengah Polri di Balik Kejatuhan Gus Dur)

PT. NUMEDIA DIGITAL INDONESIA
Gedung PBNU Lantai 5,
Jalan Kramat Raya No. 164.
Kenari, Senen, Jakarta Pusat.
Indonesia, 10340.